



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Provinsi Jambi diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang baik;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi;

c. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

17. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RPJMD Provinsi Jambi ini:
 - a. RPJMD menjadi arah penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi;
 - b. keterpaduan penyelenggaraan pembangunan dalam lima tahun periode penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi; dan
 - c. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan RPJMD Provinsi Jambi ini yakni terwujudnya pembangunan Provinsi Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 4

- (1) RPJMD Provinsi Jambi berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 ini dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi.
- (3) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini menjadi dokumen rujukan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda;
- c. evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 7

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Pembangunan Nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2021

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH NOMOR : (12-249/2021)

2 Salinan sesuai dengan alisnya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
2021-2026

NARASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-5
1.4 Maksud Dan Tujuan	1-8
1.4.1 Maksud	1-8
1.4.2 Tujuan	1-9
1.5 Sistematika Penulisan	1-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1 Kondisi Geografi	2-1
2.1.2 Aspek Demografi	2-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-28
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-28
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	2-37
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	2-41
2.3 Aspek Pelayanan Umum	2-43
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	2-43
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	2-104
2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2-118
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	2-120
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-120
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	2-123
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	2-129
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia	2-130
2.2. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan	2-131
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu	3-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	3-1

3.1.2	Neraca Daerah.....	3-14
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-27
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	3-27
3.2.2	Analisis Pembiayaan	3-28
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	4-1
4.1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal.....	4-1
4.1.2	Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian 4-2	
4.1.3	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4-5
4.1.4	Degradasi Lingkungan Hidup.....	4-7
4.2	Isu Strategis	4-10
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	5-1
5.1	Visi.....	5-1
5.2	Misi	5-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	5-3
5.3.1	Tujuan Pembangunan Daerah	5-3
5.3.2	Sasaran Pembangunan Daerah.....	5-5
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	6-1
6.1	Strategi Pembangunan	6-1
6.2	Arah Kebijakan.....	6-11
6.2.1	Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi	6-12
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	7-1
7.1	Kerangka Pendanaan.....	7-1
7.1.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	7-1
7.1.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	7-6
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
BAB IX	PENUTUP	9-1
9.1	Kaidah Pelaksanaan	9-2
9.2	Pedoman Transisi	9-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi	2-1
Tabel 2-2	Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari	2-6
Tabel 2-3	Luas Daerah Pengaliran Beberapa Sungai di Provinsi Jambi.....	2-7
Tabel 2-4	Luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim	2-11
Tabel 2-5	Pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi, tahun 2011-2018.....	2-15
Tabel 2-6	Ketersediaan lahan pertanian pangan pada tahun 2020 dan alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033.	2-17
Tabel 2-7	Kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak (tidak rawan bencana) bagi penduduk Provinsi Jambi per kabupaten/kota pada tahun 2020.....	2-19
Tabel 2-8	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi.....	2-21
Tabel 2-9	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.....	2-23
Tabel 2-10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020.....	2-25
Tabel 2-11	Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota	2-25
Tabel 2-12	Distribusi Penduduk Menurut Agama tahun 2020	2-27
Tabel 2-13	Perkembangan Seni Budaya.....	2-41
Tabel 2-14	Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2020	2-42
Tabel 2-15	Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-44
Tabel 2-16	Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-45
Tabel 2-17	Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SLB di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-46
Tabel 2-18	Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Jambi	2-47
Tabel 2-19	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-48
Tabel 2-20	Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-50
Tabel 2-21	Prevalensi balita <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi	2-51
Tabel 2-22	Prevalensi Wasting (kurus) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi.....	2-52
Tabel 2-23	Eliminasi Malaria (kab/kota) di Provinsi Jambi	2-53
Tabel 2-24	Kondisi eksisting sebaran puskesmas terakreditasi di Provinsi Jambi.....	2-54

Tabel 2-25	Kondisi Eksisting sebaran puskesmas dengan dokter dan tanpa dokter di Provinsi Jambi.....	2-55
Tabel 2-26	Kondisi Eksisting Rumah sakit Pemerintah dan Swasta yang telah terakreditasi di Provinsi Jambi.....	2-57
Tabel 2-27	Rasio tempat tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk di Provinsi Jambi.....	2-57
Tabel 2-28	Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-60
Tabel 2-29	Kondisi Eksisting Ketersediaan 9 Jenis Tenaga Di Puskesmas di Provinsi Jambi.....	2-60
Tabel 2-30	Persentase Kepesertaan JKN – KIS Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020	2-61
Tabel 2-31	Persentase Merokok Penduduk Usia 10 – 18 Tahun di Provinsi Jambi.....	2-62
Tabel 2-32	Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi	2-63
Tabel 2-33	Kondisi Eksisting PMKS di Provinsi Jambi.....	2-64
Tabel 2-34	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi	2-66
Tabel 2-35	Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Jambi.....	2-71
Tabel 2-36	<i>Progress</i> Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.....	2-74
Tabel 2-37	<i>Progress</i> Penetapan RDTR Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.....	2-75
Tabel 2-38	Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha di Provinsi Jambi	2-79
Tabel 2-39	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	2-80
Tabel 2-40	Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-86
Tabel 2-41	Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2020	2-86
Tabel 2-42	Data lokasi Sampling Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.....	2-89
Tabel 2-43	Data Timbulan Limbah B3 medis tahun 2019 dan estimasi LB3 medis tahun 2020 di Provinsi Jambi.....	2-91
Tabel 2-44	Perkembangan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2016-2020....	2-101
Tabel 2-45	OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2020	2-101
Tabel 2-46	Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-103
Tabel 2-47	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2019.....	2-103
Tabel 2-48	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-103
Tabel 2-49	Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi	2-104
Tabel 2-50	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019.....	2-107
Tabel 2-51	Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019.....	2-107
Tabel 2-52	Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2019	2-108
Tabel 2-53	Potensi Geothermal Provinsi Jambi	2-112
Tabel 2-54	Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi.....	2-113

Tabel 2-55	Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci.....	2-114
Tabel 2-56	Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi periode 2016 – 2019/2020.....	2-132
Tabel 2-57	Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi periode 2016 – 2019/2020 berdasarkan kelompok pilar TPB.	133
Tabel 2-58	Indikator TPB yang tidak mencapai target TPB Provinsi Jambi periode 2016 – 2019/2020 berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan bidang.....	135
Tabel 3-1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-3
Tabel 3-2	Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-8
Tabel 3-3	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Rp).....	3-9
Tabel 3-4	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-12
Tabel 3-5	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-13
Tabel 3-6	Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020.....	3-17
Tabel 3-7	Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2016 - 31 Desember 2020.....	3-20
Tabel 3-8	Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-22
Tabel 3-9	Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-24
Tabel 3-10	Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-26
Tabel 3-11	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi.....	3-27
Tabel 3-12	Defisit Riil Anggaran	3-29
Tabel 3-13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	3-30
Tabel 3-14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	3-31
Tabel 5-1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi.....	5-9
Tabel 5-2	Target Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN.....	5-12
Tabel 5-3	Target Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026.....	5-12
Tabel 6-1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.....	6-1
Tabel 6-2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2016-2020.....	6-12
Tabel 6-3	Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	6-14
Tabel 6-4	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	6-14

Tabel 6-5	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	6-15
Tabel 6-6	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	6-16
Tabel 6-7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	6-18
Tabel 6-8	Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa.....	6-24
Tabel 6-9	Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin	6-25
Tabel 6-10	Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/ UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial.....	6-25
Tabel 6-11	Target Pemberian Honorarium	6-26
Tabel 6-12	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	6-27
Tabel 6-13	Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	6-27
Tabel 6-14	Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	6-28
Tabel 6-15	Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026.....	6-28
Tabel 6-16	Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	6-29
Tabel 6-17	Arah Kebijakan PembangunanProvinsi Jambi Tahun 2022 – 2026.....	6-30
Tabel 6-18	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	6-40
Tabel 7-1	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2026 Provinsi Jambi	7-3
Tabel 7-2	Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat.....	7-8
Tabel 7-3	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	7-9
Tabel 7-4	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026	7-10
Tabel 7-5	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026 Provinsi Jambi	7-11
Tabel 7-6	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi	7-12
Tabel 8-1	Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi	8-2
Tabel 8-2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi.....	8-2
Tabel 8-3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi.....	8-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-8
Gambar 2-1	Peta Administrasi Provinsi Jambi	2-2
Gambar 2-2	Peta administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam DAS Batanghari (Sumber: Arbain <i>et al.</i> 2015).	2-7
Gambar 2-3	Peta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer daerah Provinsi Jambi (Sudadi 2003)	2-10
Gambar 2-4	Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim	2-11
Gambar 2-5	Proporsi luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim	2-12
Gambar 2-6	Peta proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di Indonesia 2020-2049	2-13
Gambar 2-7	Peta proyeksi perubahan hari kering di Indonesia 2020-2049	2-13
Gambar 2-8	Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049.....	2-14
Gambar 2-9	Neraca air wilayah Provinsi Jambi tahun 2020	2-18
Gambar 2-10	Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi (<i>RTRWP Jambi Tahun 2013-2033</i>).....	2-20
Gambar 2-11	Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi	2-22
Gambar 2-12	Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.....	2-24
Gambar 2-13	Piramida penduduk tahun 1990, 2000,2012 dan 2021, Jambi Dalam Angka, data diolah).....	2-26
Gambar 2-14	Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 (dalam milyar rupiah).....	2-29
Gambar 2-15	Laju Perkembangan Sektor Primer PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019	2-29
Gambar 2-16	Laju Perkembangan Sektor Sekunder PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019	2-30
Gambar 2-17	Laju Perkembangan Sektor Tersier PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019	2-31
Gambar 2-18	Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020	2-31
Gambar 2-19	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jambi Tahun 2016 -2020 (dalam juta rupiah).....	2-32
Gambar 2-20	Koefisien Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016-2019.....	2-33
Gambar 2-21	Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-34
Gambar 2-22	Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020	2-35
Gambar 2-23	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-37

Gambar 2-24	IPM Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2020 dan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM.....	2-38
Gambar 2-25	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-39
Gambar 2-26	Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-40
Gambar 2-27	Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi.....	2-49
Gambar 2-28	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap satuan penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-54
Gambar 2-29	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-56
Gambar 2-30	Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2016-2020	2-59
Gambar 2-31	Persentase Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Sosial per Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi	2-65
Gambar 2-32	Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi.....	2-67
Gambar 2-33	Unjuk rasa yang terjadi tahun 2015-2019	2-70
Gambar 2-34	Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-72
Gambar 2-35	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi Tahun 2015-2020	2-73
Gambar 2-36	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	2-73
Gambar 2-37	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi 2016-2019.....	2-78
Gambar 2-38	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-79
Gambar 2-39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-81
Gambar 2-40	Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-82
Gambar 2-41	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2016 – 2020.....	2-82
Gambar 2-42	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2016 – 2020	2-83
Gambar 2-43	DG dan IPG Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020	2-84
Gambar 2-44	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif di Provinsi Jambi 2016-2020	2-85
Gambar 2-45	Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020	2-87
Gambar 2-46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020	2-88
Gambar 2-47	Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2019	2-89
Gambar 2-48	Perkembangan capaian urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2015-2020.....	2-92
Gambar 2-49	Persentase Aparatur Desa yang telah diberikan Bimtek RPJMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015-2020	2-93

Gambar 2-50	Total Fertility Rate Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	2-94
Gambar 2-51	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) di Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2020	2-95
Gambar 2-52	Arus penumpang angkutan umum di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-96
Gambar 2-53	Jumlah Desa/Kelurahan yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jambi Tahun 2019-2020	2-97
Gambar 2-54	Persentase Koperasi aktif di Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021	2-98
Gambar 2-55	Perkembangan UMKM dan serapan tenaga kerja pada UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	2-99
Gambar 2-56	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp.Trilyun) Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-100
Gambar 2-57	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-100
Gambar 2-58	Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi.....	2-105
Gambar 2-59	Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton)	2-106
Gambar 2-60	Perkembangan angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun)	2-106
Gambar 2-61	Produktifitas Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai (Kw/Ha)di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-110
Gambar 2-62	Perkembangan produktivitas komoditi perkebunan Provinsi Jambi (kg/ha/tahun) Tahun 2015 -2019.....	2-111
Gambar 2-63	Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2016- 2020 (US\$)	2-115
Gambar 2-64	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2016- 2020 (US\$)	2-116
Gambar 2-65	Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi.....	2-117
Gambar 2-66	Pengeluaran Perkapita per tahun Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi (ribu rupiah) Tahun 2016-2020.....	2-121
Gambar 2-67	Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	2-122
Gambar 2-68	Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2016 – 2020	2-123
Gambar 2-69	Arus penumpang angkutan umum di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-124
Gambar 2-70	Penggunaan lahan Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033).....	2-125
Gambar 2-71	luas kawasan budidaya berdasarkan arahan pola ruang Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033)	2-126
Gambar 2-72	Jumlah Rumah Makan di Provinsi Jambi Tahun 2015- 2020	2-127
Gambar 2-73	Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	2-127
Gambar 2-74	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2020	2-128

Gambar 2-75	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional	2-129
Gambar 2-76	Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019.....	2-130
Gambar 2-77	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2016-2020	2-130
Gambar 2-78	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.....	134
Gambar 4-1	Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2016-2020	4-3
Gambar 4-2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2016-2020.....	4-3
Gambar 4-3	IPM Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 dengan metode baru (BPS, 2021)	4-5
Gambar 4-4	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2016-2020	4-6
Gambar 4-5	Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020	4-7
Gambar 4-6	Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2017	4-8
Gambar 4-7	Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi	4-9
Gambar 4-8	Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)	4-10
Gambar 6-1	Peta Pengembangan Wilayah Sumatera RPJMN 2020-2024....	6-12
Gambar 6-2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020.....	6-13
Gambar 6-3	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020.....	6-15
Gambar 6-4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020.....	6-16
Gambar 6-5	Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020	6-17
Gambar 6-6	IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020.....	6-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Juli 2021. Periodesasi RPJMD tersebut tetap mengikuti masa jabatan, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA. Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya serta implementasi pertumbuhan ekonomi hijau Jambi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Sedangkan dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

16. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2026, harus berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

- (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif;
- (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya;
- (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum;
- (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib;
- (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan tahap perencanaan lima tahun keempat.

2. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, harus berpedoman pula pada RTRW Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam

menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyeraskan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga berkaitan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga bisa disebut sebagai zona konservasi, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai zona produksi meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai zona distribusi meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain kesesuaian dengan pola ruang pada RTRW, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD juga berpedoman pada tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang pada RTRW.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

5. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

6. RTRWN dan RPJMD Provinsi Jambi

Sesuai dengan RTRWN, Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional tersebut adalah:

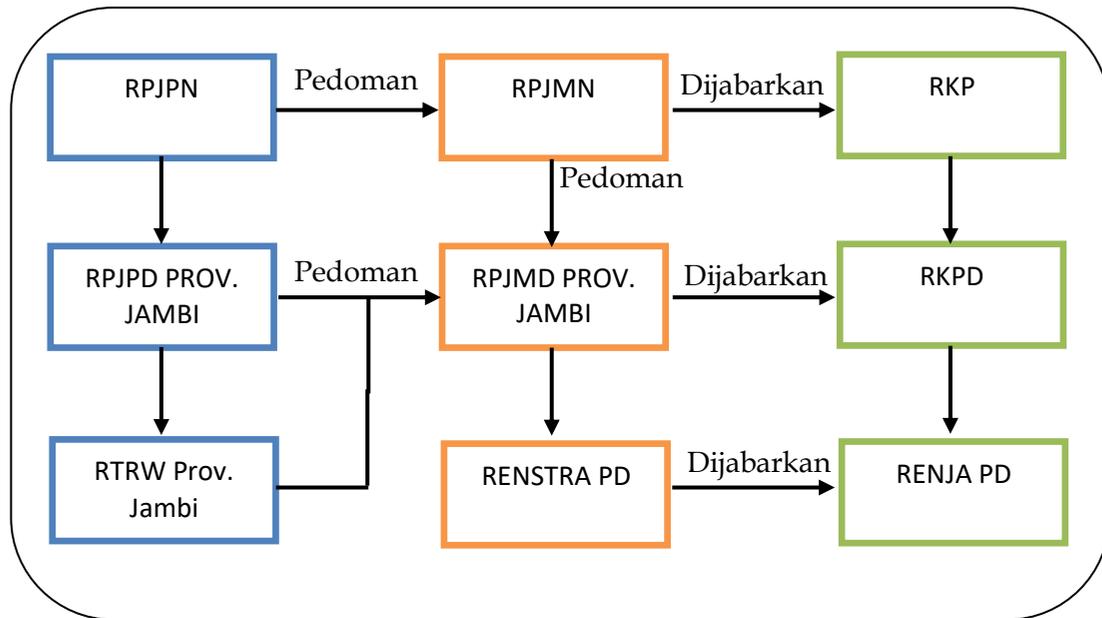
- Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan).
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi).
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau).
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

Dalam RPJMD Provinsi Jambi keempat kawasan strategis tersebut difungsikan sesuai dengan arahan ruangnya dalam RTRWN dengan penguatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

7. RPJMD dan RTRW Provinsi Berbatasan dengan RPJMD Provinsi Jambi

Arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tetap memperhatikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi dan kebijakan keruangan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergisitas pembangunan antar daerah berbatasan dan meminimalisir konflik pada wilayah perbatasan.

Hubungan antara RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 1-1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara

capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilakukan dengan tujuan:

1. Menyempurnakan arah kebijakan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ke dalam dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah dan terukur;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jambi, dan *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.

8. Sebagai acuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Maksud dan Tujuan
 - 1.5 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX PENUTUP
 - 9.1 Pedoman Transisi
 - 9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km² yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.508 km² atau 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.205 km² dan 5.948 km², sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kerinci	3.334,99	18	287
2	Merangin	7.508,23	24	215
3	Sarolangun	5.948,73	10	158
4	Bungo	4.673,16	17	153
5	Tebo	6.205,81	12	112
6	Batanghari	5.536,86	8	124
7	Muaro Jambi	5.321,67	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	Darat 4.990,95	13	134
		Laut 384,21		
9	Tanjung Jabung Timur	Darat 4.943,36	11	93
		Laut 4.061,73		
10	Kota Sungai Penuh	353,76	8	69
11	Kota Jambi	172,26	11	62
Luas Daratan		48.989,98		
Luas Lautan		4.445,94		
Total		53.435,92	143	1.562

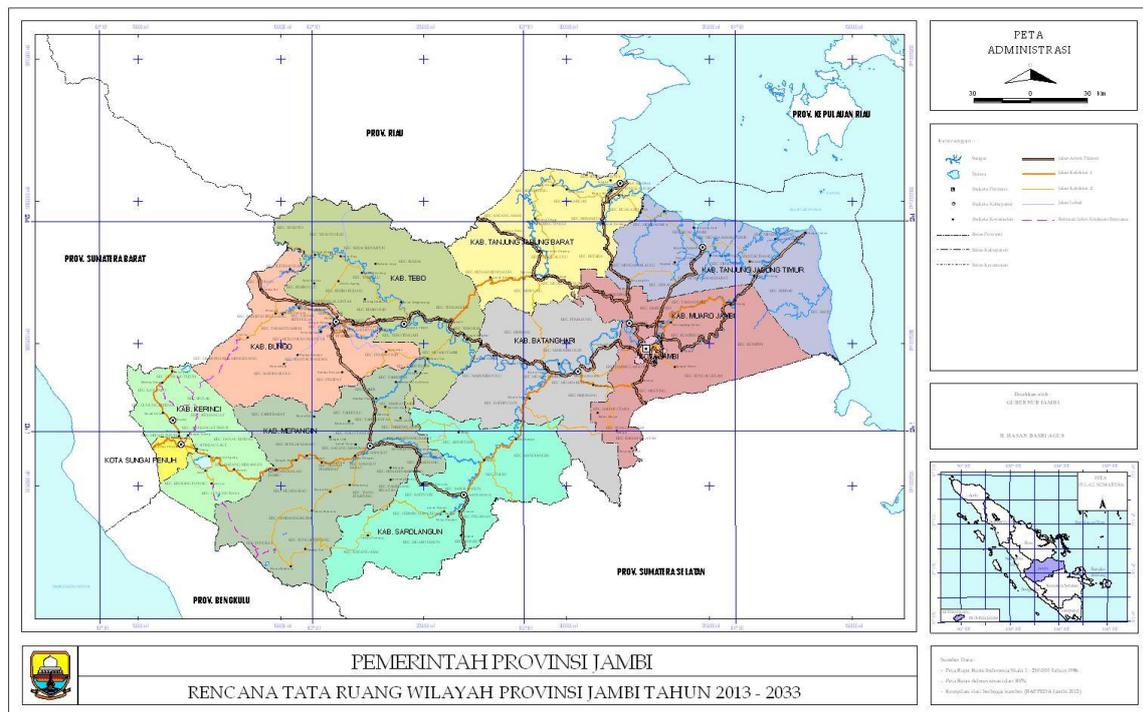
Sumber: Jambi Dalam Angka Jambi 2021, 2021

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 143 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa kelurahan adalah

sebanyak 1.562 desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis



Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ} 74'$ – $2^{\circ} 46,16'$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 12'$ – $104^{\circ} 44'$ Bujur Timur, yang berada pada bagian tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan

dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle*).

2.1.1.3 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Secara topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (BPS Provinsi Jambi 2020), yaitu:

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan masukan teknologi tertentu dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Provinsi Jambi dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang mempunyai kelerengan antara (20⁰-40⁰).

Kawasan ini terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang membujur dari barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

- Perbukitan bergelombang dengan ketinggian antara 50-500 meter dan kemiringan lereng 10° - 20° . Wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari.
- Dataran dengan ketinggian antara 0-50 meter, kelerengan antara 0° - 10° . Wilayah ini terletak di bagian timur Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan wilayah pantai.

2.1.1.4 Geologi

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.

- a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan alluvium, endapan rawa dan endapan undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang menandung sisa tumbuhan, berumur kuartar, resen.
- b. Batuan sedimen, berumur permo-karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda adalah sebagai berikut :
 - Formasi Mentulu (Permo-Karbon)
 - Formasi Mengkarang (Perem)
 - Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura)
 - Formasi Telangakar (Oligo Miosen)
 - Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen)
 - Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen)
 - Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen)
 - Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen)

Formasi ini terdiri dari batupasir, batu lempung, dengan sisipan batubara, batu lanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batu pasir tufan, batu pasir gampingan, batu gamping, konglomerat polemik dan breksi.

- c. Batuan malihan, terbagi atas formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong, Formasi Mentulu, dan formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta.
- d. Batuan gunung api, berumur Perem hingga Kwartir. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.
- e. Batuan terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horeblendita dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Provinsi Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar-pun banyak dijumpai. Struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo serta Batang Hari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu: Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari sesar besar Sumatera.

2.1.1.5 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

Pada musim hujan kecenderungan air sungai meluap, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai tujuh meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang

Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha.

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang mencakup enam sub DAS di dalamnya yaitu:

- a. Sub DAS Batanghari Hulu
- b. Sub DAS Batang Merangin Tembesi
- c. Sub DAS Batang Tabir
- d. Sub DAS Batang Bungo
- e. Sub DAS Batang Tebo
- f. Sub DAS Batanghari Hilir

Tabel dan Gambar di bawah ini menunjukkan luas areal dan lokasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurut DAS Batanghari.

Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Jambi	Batanghari	450,295	10.27
		Bungo	463,749	10.58
		Kerinci	260,024	5.93
		Merangin	658,230	15.02
		Muaro Jambi	277,845	6.34
		Sarolangun	558,475	12.74
		Tanjung Jabung Timur	286,656	6.54
		Tebo	616,617	14.07
		Kota Jambi	16,895	0.39
		Kota Sungai Penuh	14,939	0.34
		Luas DAS di Provinsi Jambi	3,603,725	82.23
2.	Sumatera Barat	Dharmasraya	304,274	6.94
		Solok	117,741	2.69
		Solok Selatan	356,973	8.15
		Luas DAS di Prov. Sumatera Barat	778,988	17.77
Luas DAS total			4,382,713	100.00

Sumber: Arbain et al. (2015)



Gambar 2-2 Peta administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam DAS Batanghari (Sumber: Arbain *et al.* 2015).

Di samping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu :

- a. DAS Betara Pengabuan mencakup tujuh Sub DAS didalamnya.
- b. DAS Mendahara mencakup sembilan Sub DAS didalamnya
- c. DAS Air Hitam Laut mencakup empat Sub DAS didalamnya.

Terdapat 15 danau yang terdaftar di Provinsi Jambi, yaitu Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Belibis, Danau Lingkat, Danau Duo, Danau Sipin, Danau Kenali, Danau Teluk, Danau Biaro, Danau Baru, Danau Sarang Burung, Danau Sepati Empat, Danau Kecil dan Danau Pauh. Selain itu, terdapat juga beberapa rawa pasang surut yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari. Ada juga rawa non pasang surut yang berada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 2-3 Luas Daerah Pengaliran Beberapa Sungai di Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai	Luas Daerah Pengaliran (Ha)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
Kerinci	Batang Merao	187,50	245,00	5,11
Merangin	Batang Merangin	3.645,00	2.300,00	26,07
Sarolangun	Batang Sarolangun	1.258,00	-	-
Batang Hari	Batanghari	35.984,38	8.484,00	202,00
Muaro Jambi	Batanghari	38.704,00	8.363,00	515,00
Tanjab Timur	Jangkat	-	-	-
Tanjab Barat	Batang Pengabuhan Merlung	4.300,00	57,11	2,50
Tebo	Batang Tebo	1.831,60	742,00	20,60
Bungo	Batang Bungo	410,60	177,20	6,54
Kota Jambi	Batang hari	42.142,00	12.059,00	-

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

Secara hidrogeologi, produktivitas air tanah daerah Povinsi Jambi yang didasarkan atas sifat fisik batuan penyusun (akuifernya) dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Sudadi 2003):

1. Produktivitas air tanah tinggi

Meliputi sepanjang Sungai Batanghari dan Sungai Tembesi. Litologi akuifaer terutama berupa pasir dan kerikil yang merupakan endapan alluvium sungai. Debit sumur berkisar 5 hingga 25 l/detik dan jika ditinjau dari sifat fisik batuan penyusun akuifernya yang merupakan batuan lepas maka aliran air tanah yang terjadi merupakan aliran air tanah melalui ruang antar butir. Muka air tanah bebas mempunyai kedalaman berkisar dari 0.5 – 2.5 m di bawah muka tanah setempat dengan buaian (perbedaan) muka air tanah kecil antara musim hujan dan kemarau. Muka air tanah dalam atau tertekan diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m dari muka tanah setempat.

Pasokan air dari daerah resapan umumnya kecil akan tetapi pasokan air terutama berasal dari Sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Sungai yang bertindak sebagai pemasok air tanah disebut juga sebagai sungai influen (influent stream). Ciri-ciri air tanah seperti ini umumnya potensi air tanahnya tinggi. Pengukuran harga keterusan air (*transmissivity*) yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan di berbagai tempat di

Indonesia yang mempunyai kondisi serupa menunjukkan bahwa harga keterusannya lebih dari 500 m/hari.

2. Produktivitas air tanah sedang

Produktivitas air tanah sedang di daerah Provinsi Jambi terdapat di 3 (tiga) tempat, yaitu:

a) Di bagian timur, meliputi daerah daratan pantai timur.

Walaupun produktivitas tanahnya sedang akan tetapi kendalanya adalah kualitas air tanahnya yang kurang baik, terutama untuk air tanah bebas. Kemungkinan air tanah dengan kualitas baik dapat diperoleh hanya berupa spot-spot, terutama pada lensa-lensa pasir lepas, dengan kedalaman muka air tanah bebas berkisar dari 3 – 10 m dibawah muka tanah setempat. Data air tanah tertekan diperoleh dari hasil pemboran di beberapa tempat menunjukkan 2 (dua) litologi akuifer utama, yaitu: a) Litologi akuifer dari Formasi Kasai yang dijumpai pada interval kedalaman 18 – 44 meter dan 76 – 95 meter dan berkualitas air kurang baik; dan b) Litologi akuifer dari Formasi Muaraenim yang dijumpai pada kedalaman antara 90 – 120 meter dan berkualitas air baik.

b) Di bagian tengah, di sekitar Bangko dan utara Muara Bungo

Debit sumur berkisar antara 1 – 5 l/detik dengan akuifer utama berupa batu pasir kurang padu, tufa dan tufa pasiran. Muka air tanah bebas diperkirakan kurang dari 20 m dari muka tanah setempat, sedangkan air tanah dalam diperkirakan dari 50 m dari muka tanah setempat. Data pemboran air tanah dalam di sekitar Bangko enunjukkan bahwa kedalaman sumur bor mencapai 100 meter dengan debit sekitar 8.5 l/detik.

c) Di bagian barat, di selatan Gunung Kerinci meliputi Sungai Penuh dan Padang Panjang (kaki Gunung Masurai)

Debit sumur diperkirakan sampai 5 l.detik dengan akuifer utama berupa tufa atau breksi volkanik dari endapan volkanik muda. Pada akuifer batuan lepas sistem airan air tanah dapat melalui ruang antar butir, sedangkan pada akuifer pada batuan padu aliran air tanah dapat melalui celahan dan rekahan. Muka air tanah bebas maupun muka air tanah dalam umumnya dalam. Untuk air tanah bebas, pada daerah tertentu dapat mencapai kurang dari 20 m di bawah muka tanah setempat.

3. Produktivitas air tanah rendah

Umumnya terdapat di bagian utara, baratdaya, dan barat wilayah Provinsi Jambi. Batuan penyusunnya adalah berupa batuan sedimen padu, batuan malihan dan batuan beku terobosan. Pada batuan malihan dan sedimen masih dapat diharapkan dijumpai air tanah walaupun secara terbatas, terutama pada zona pelapukan yang tebal atau daerah lembah. Sifat air tanah di daerah pelapukan dan lembah merupakan air tanah bebas yang dipengaruhi oleh musim, pada musim hujan air tanah dapat diperoleh sedangkan pada musim kemarau umumnya sulit diperoleh.



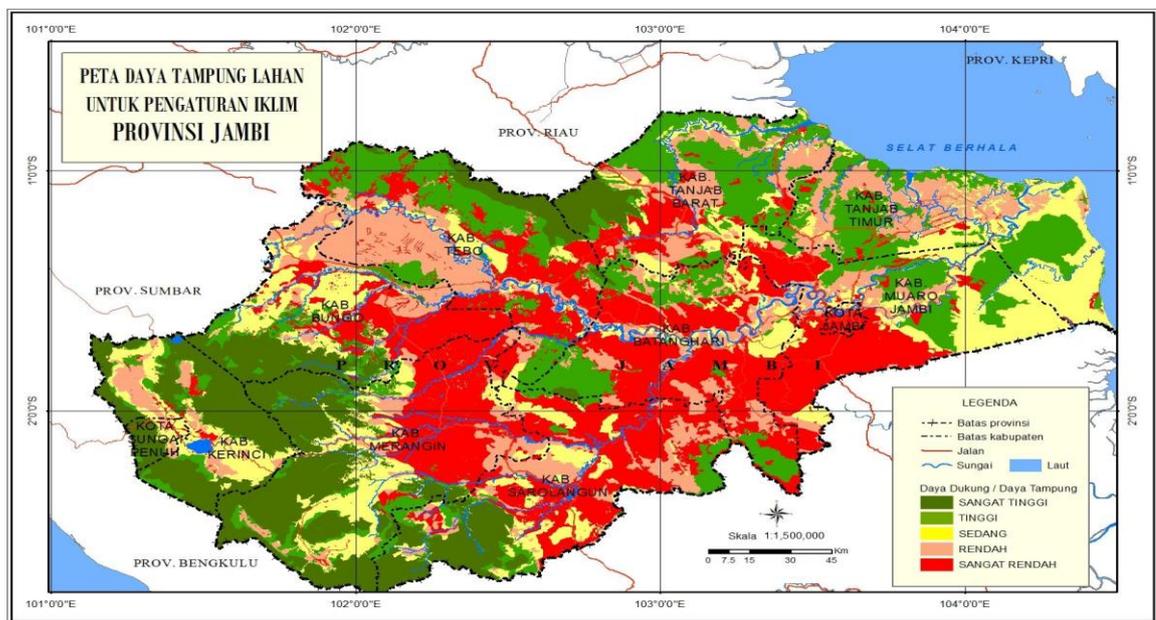
Gambar 2-3 Peta keterdapatn air tanah dan produktivitas akuifer daerah Provinsi Jambi (Sudadi 2003)

2.1.1.6 Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim yang tertinggi hanya dimiliki oleh 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjab Barat. Hal ini karena terkait

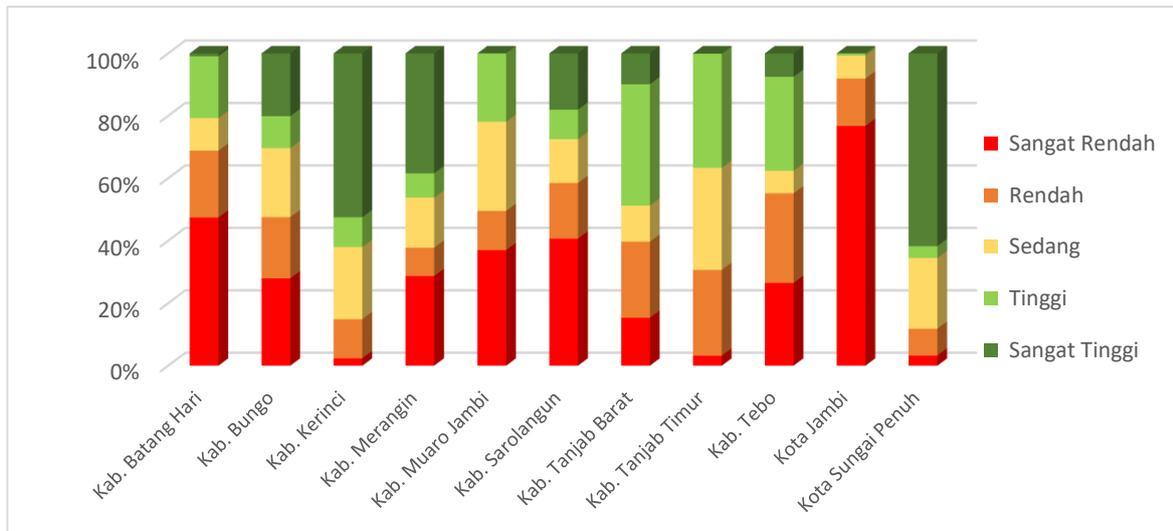
dengan keberadaan hutan-hutan konservasi pada wilayah tersebut, yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan Lindung Bukit Hulu Landai di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjanu Limun di Sarolangun serta Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Tebo dan Tanjab Barat. Sebaran wilayah berdasarkan jasa daya dukung dalam pengaturan pengaturan iklim dapat dilihat pada peta dan tabel di bawah. Sedangkan persentase luas masing masing kabupaten berdasarkan tingkat daya tampung lingkungan dalam pengaturan iklim adalah sebagaimana gambar di bawah ini yaitu pada sebagian kabupaten di dominasi oleh kemampuan sangat rendah yaitu di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sebaliknya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh didominasi kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi.



Gambar 2-4 Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim

Tabel 2-4 Luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim

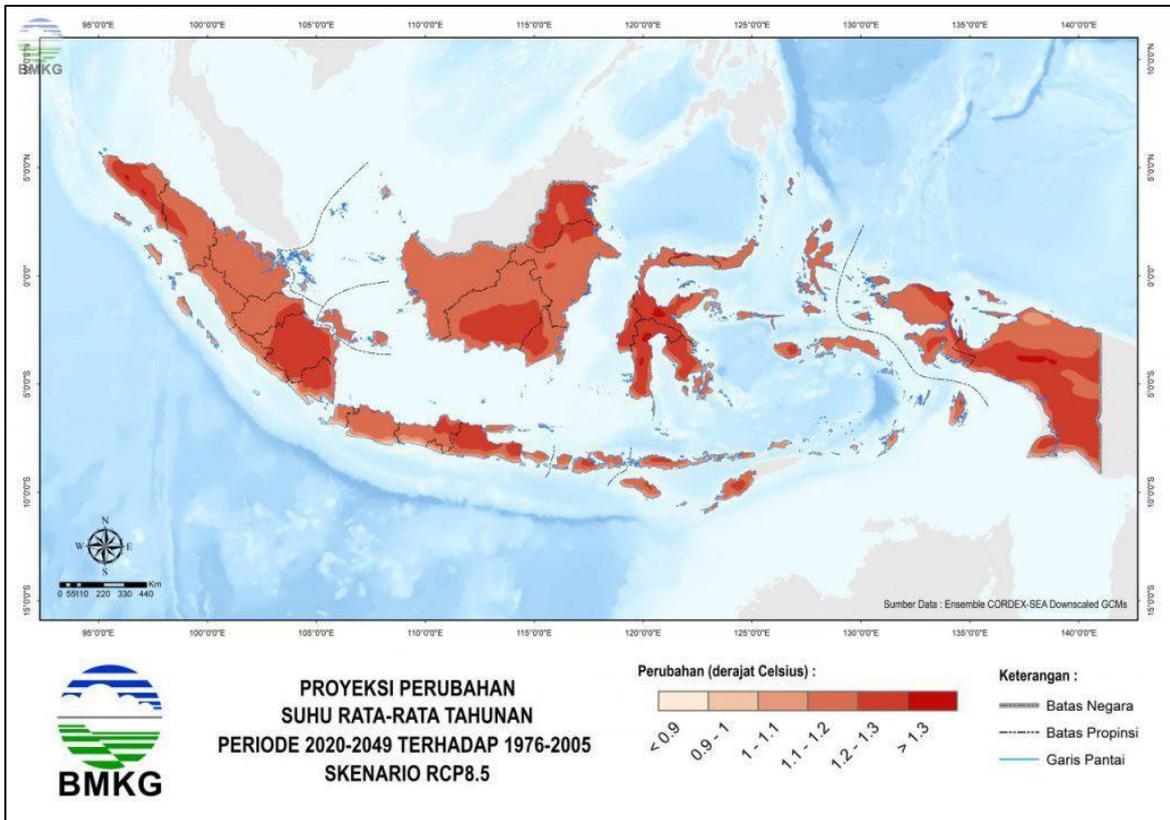
No	Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kab. Batang Hari	258.894	116.781	57.072	108.131	4.900
2	Kab. Bungo	130.754	91.487	103.281	48.005	93.789
3	Kab. Kerinci	7.891	41.692	77.151	31.840	174.925
4	Kab. Merangin	214.953	67.877	120.232	58.136	287.517
5	Kab. Muaro Jambi	199.747	67.750	154.338	118.043	-
6	Kab. Sarolangun	245.627	107.428	84.545	57.147	108.631
7	Kab. Tanjab Barat	76.655	121.563	57.852	194.222	49.272
8	Kab. Tanjab Timur	15.551	133.216	158.592	177.405	502
9	Kab. Tebo	164.435	177.939	44.868	186.887	46.428
10	Kota Jambi	13.473	2.666	1.291	122	-
11	Kota Sungai Penuh	1.180	3.127	8.225	1.377	22.428
	Jumlah	1.329.159	931.525	867.446	981.316	788.392



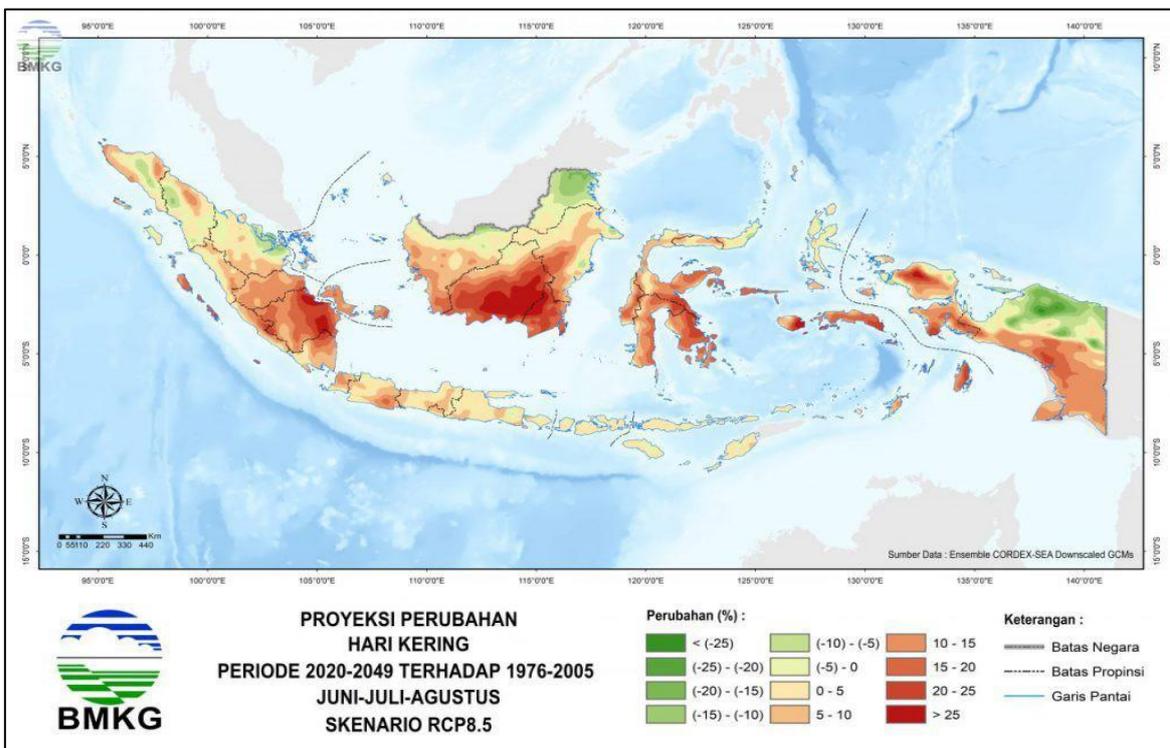
Gambar 2-5 Proporsi luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim

Gambar-gambar berikut menunjukkan hasil proyeksi perubahan iklim di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk periode tahun 2020 hingga 2049 berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976 hingga tahun 2005. Hasil proyeksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

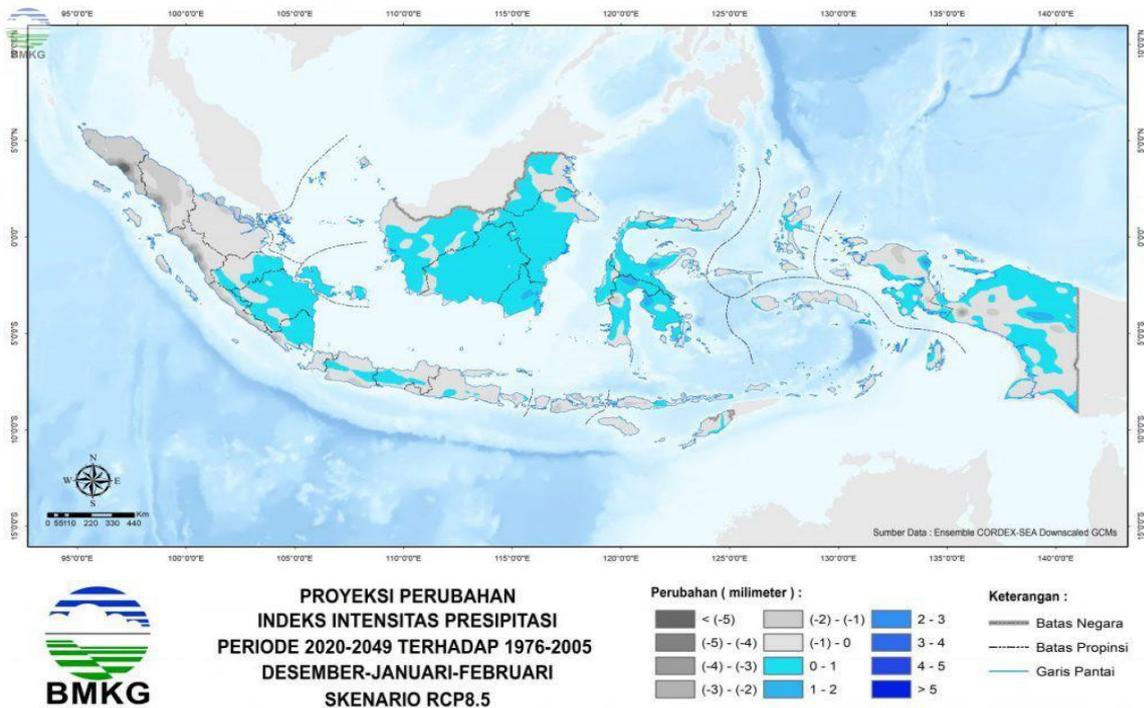
1. Sebagian besar wilayah Jambi akan mengalami peningkatan suhu rata-rata tahun sebesar 1°C hingga 1.1°C, dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sekitar 1.1°C hingga 1.2°C dibandingkan saat ini (lihat Gambar 2.6).
2. Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan mengalami penambahan hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20% dibandingkan saat ini (lihat Gambar 2.7).
3. Sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pantai Timur Sumatera) akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm, namun sebagian lainnya (wilayah tengah hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm (lihat Gambar 2.8).



Gambar 2-6 Peta proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di Indonesia 2020-2049



Gambar 2-7 Peta proyeksi perubahan hari kering di Indonesia 2020-2049



Gambar 2-8 | Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2011 dan 2018 nampak terdapat perubahan penggunaan sumberdaya lahan di wilayah Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada Tabel. Data dalam tabel tersebut menunjukkan terjadi pola penggunaan lahan sebagai berikut:

- Tutupan hutan terkonversi menjadi beberapa penggunaan lahan yang bersifat budidaya
- Penambahan luas lahan perkebunan juga berasal dari alih fungsi lahan budidaya lainnya (pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran).
- Pengelolaan pertanian dan perkebunan belum menerapkan praktek pertanian yang baik. Hal ini nampak dari meluasnya belukar dan lahan terbuka yang berasal dari lahan pertanian kering dan lahan perkebunan. Hal ini juga nampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan pada tahun 2015 seluas 90.363 hektar. Kebakaran hutan dan lahan ini terulang pada tahun 2019 dengan luasan yang lebih besar yaitu 101.418 hektar.

Tabel 2-5 Pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi, tahun 2011-2018

2011	Penutupan Lahan Tahun 2018 (ha)																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	576,797.67	25,392.94							17.34	21.24	15,400.38		22,385	12,870.88	5,263.35	92.75	06.47			67,00.00	
2	858.44.00	250,516.32		16,708					0,380	32,478.09	48,276.44	186.61	6,131	28,174.74	67,244.14	6,536.14				26,816	0,924
3			124,381.30	14,200.26					0,101		1,795.57	21,185.37	5,276	5,792	7,772.72	18,577.07					
4			784.04.00	30,238.98		70.93				1,827.57	736.95	3,272.42	6,049	1,449.41	3,397.73	7,542.91					
5					162.76	32,008										3,413				0,147	0,078
6				0,865	2,795	5,348.03			0,063			1,146	3,010	147.81	1,885	297.98					0,055
7							15,011.09		0,000	41.99	0,679	30.66		0,208		512.64	35,888				171.82
8								3,762						0,092							
9		03.14				6,336	0,251		42,256.94	0,853	0,001	0,121	0,801	0,983		2,225	167.75			76.85	2,653
10		68.13.00	315.55.00	4,765.39						163,898.58	3,448.19	3,639.92	7,405	3,158.75	17,598.49	7,008.95				0,545	108.87
11	00.41	1,065.37		0,380		0,675				3,099.41	97,796.17	22,934	7,515	38,378.64	1,052.25	9,966.31	17,774		0,190	530.68	6,562
12				277.67		107.77	0,255		0,366	3,256.88	1,472.40	194,870.28	7,107.30	3,718.91	4,438.19	45,304.57	491.89			0,356	7,956
13		0,767		0,055		3,692			6,598	414.91	2,507.26	927.65	67,088.65	3,474.57	1,841.21	257,305.35	582.64			1,320.52	5,693.69
14	00.56	4,163.87		1,175			498.96		40,690	3,171.89	551,001.75	12,881	6,599.14	1,020,959.30	8,522.76	203,982.69	400.90		0,167	6,772.98	29,362.08
15	00.00	230.53.00		10,924		0,208			0,382	34,707.48	22,405.92	1,364.99	26,190	20,616.11	81,382.79	15,708.78			0,149	14,417	0,135
16		34.48.00				3,354			0,003	2,952.87	2,750.87	2,053.00	11,741.34	9,077.32	2,241.73	408,760.42			4,930.72	11,478	5,777.95
17											1,415			0,797		2,002.66	13,951.73				1,443.46
18						0,226						72.61		42.98		28,694		8,797			
19													0,137							21,826.65	
20											0,177	0,223		1,632		0,997				5,555.97	281.85
21						56.70			0,101	88.33	358.97		4,363.19	11,240		7,522.81	182.75		8,284		44,100.32

- | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 Hutan Lahan Kering Primer | 5 Hutan Mangrove Primer | 9 Badan Air | 13 Pertanian Lahan Kering | 17 Sawah | 21 Pemukiman |
| 2 Hutan Lahan Kering Sekunder | 6 Hutan Mangrove Sekunder | 10 Hutan Tanaman | 14 Pertanian Lahan Kering Campur | 18 Tambak | |
| 3 Hutan Rawa Primer | 7 Rawa | 11 Belukar | 15 Tanah Terbuka | 19 Transmigrasi | |
| 4 Hutan Rawa Sekunder | 8 Savanna/ Padang rumput | 12 Belukar Rawa | 16 Perkebunan | 20 Pertambangan | |

2.1.1.7.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Bagian ini memaparkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi berdasarkan beberapa jasa ekosistem yang disediakan.

A. Ketersediaan Pangan

Berdasarkan data statistik tahun 2020, diketahui ketersediaan lahan pertanian pangan disajikan pada Tabel 2.9. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah:

- Konsumsi beras tahun 2020 sebesar 84,2 kg/kapita/tahun
- Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,38% per tahunnya
- Standar kebutuhan konsumsi layak (KKL) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2018.

Terdapat dua skenario terhadap ketersediaan lahan untuk penyediaan pangan, yaitu:

1. Jika dilakukan revitalisasi terhadap lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan serta dengan asumsi tidak ada peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan pengolahan pasca panen (pada tahun 2020 tercatat produktivitas lahan sawah hanya dapat menghasilkan 2,28 ton beras/ha/tahun) dan alih fungsi lahan pertanian pangan maka ketersediaan lahan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 88 tahun ke depan;
2. Jika tidak dilakukan revitalisasi lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan dan asumsi lainnya sama dengan skenario pertama maka ketersediaan lahan pangan hanya dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 18 tahun ke depan.

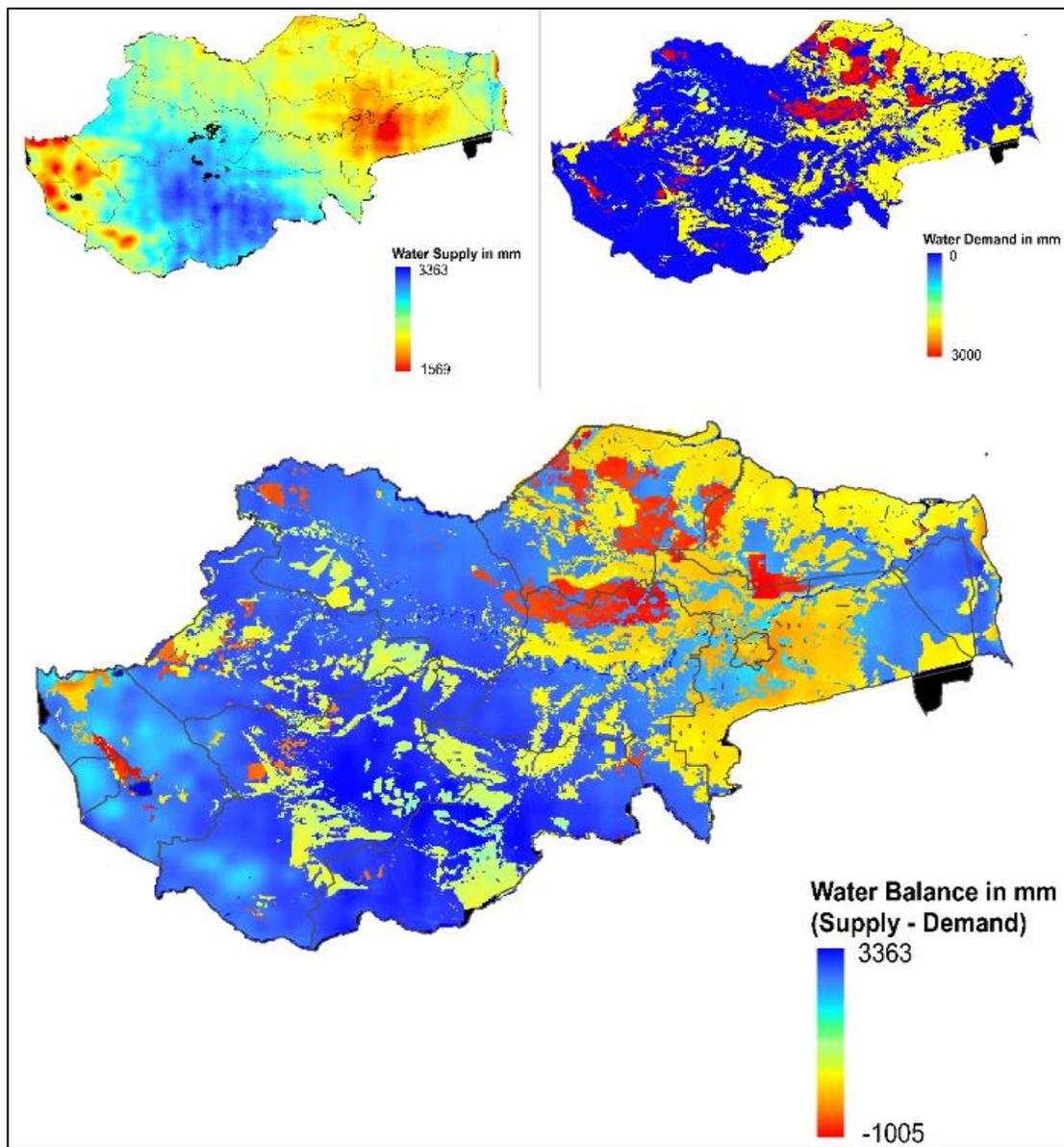
Tabel 2-6 Ketersediaan lahan pertanian pangan pada tahun 2020 dan alokasinya pada Revisi RTRW Provinsi Jambi 2013-2033.

Jenis lahan pertanian pangan	Luas (ha)
Lahan pertanian kering tidak/belum diusahakan	255.851
Lahan sawah	107.338
Lahan pertanian pangan non padi (hortikultura dan peternakan)	13.187*
Total ketersediaan lahan pertanian pangan	376.376
Alokasi lahan pertanian pangan dalam RTRW 2013-2033	443.955
Belum dimanfaatkan berdasarkan RTRW 2013-2033	67.578

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2020 dan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033

B. Ketersediaan Air

Hasil olahan terhadap data curah hujan dan geohidrologi diketahui bahwa hingga kini ketersediaan air untuk penduduk di wilayah bagian barat dan sebagian besar wilayah bagian tengah Provinsi Jambi masih melimpah. Wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhannya adalah terutama beberapa daerah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada daerah-daerah ini neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan).



Sumber: data diolah, 2021

Gambar 2-9 Neraca air wilayah Provinsi Jambi tahun 2020

C. Ketersediaan Lahan Tempat Tinggal/Berusaha Rendah Risiko Bencana

Dengan menggunakan indeks rawan bencana yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (rawan bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan dan lahan) serta standar luas ruang hidup layak yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR (11 m²/orang) dan Koefisien Dasar Hijau wilayah perkotaan dan perdesaan, maka dapat diketahui masih cukup ruang yang layak untuk penduduk di wilayah Provinsi Jambi tinggal dan berusaha, kecuali di wilayah perkotaan yaitu Kota Jambi dan terutama Kota Sungai Penuh yang mulai terbatas. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan penataan ruang untuk kawasan pemukiman atau desa tangguh bencana serta bangunan layak

ramah lingkungan di kawasan-kawasan pemukiman yang teridentifikasi berada di daerah rawan bencana untuk memitigasi dan mengantisipasi terjadinya kejadian bencana.

Tabel 2-7 Kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak (tidak rawan bencana) bagi penduduk Provinsi Jambi per kabupaten/kota pada tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Ruang Layak (Ha)*	Ruang Layak** (Ha)	Surplus/(Defisit) (Ha)
Kerinci	826	3.304	2.478
Merangin	1.169	4.674	3.506
Sarolangun	957	3.829	2.872
Bungo	1.595	6.378	4.784
Batang Hari	1.327	5.310	3.982
Tebo	1.486	5.944	4.458
Muaro Jambi	1.327	5.306	3.980
Tanjung Jabung Barat	1.397	5.588	4.191
Tanjung Jabung Timur	1.011	4.044	3.033
Kota Jambi	1.000	1.500	500
Kota Sungai Penuh	159	239	80
Total	6.380	22.622	16.242

Sumber: Data diolah (2021).

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk kawasan strategis provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan sekitarnya.

- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh.
- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur.
- Kawasan Strategis Bangko – Sarolangun

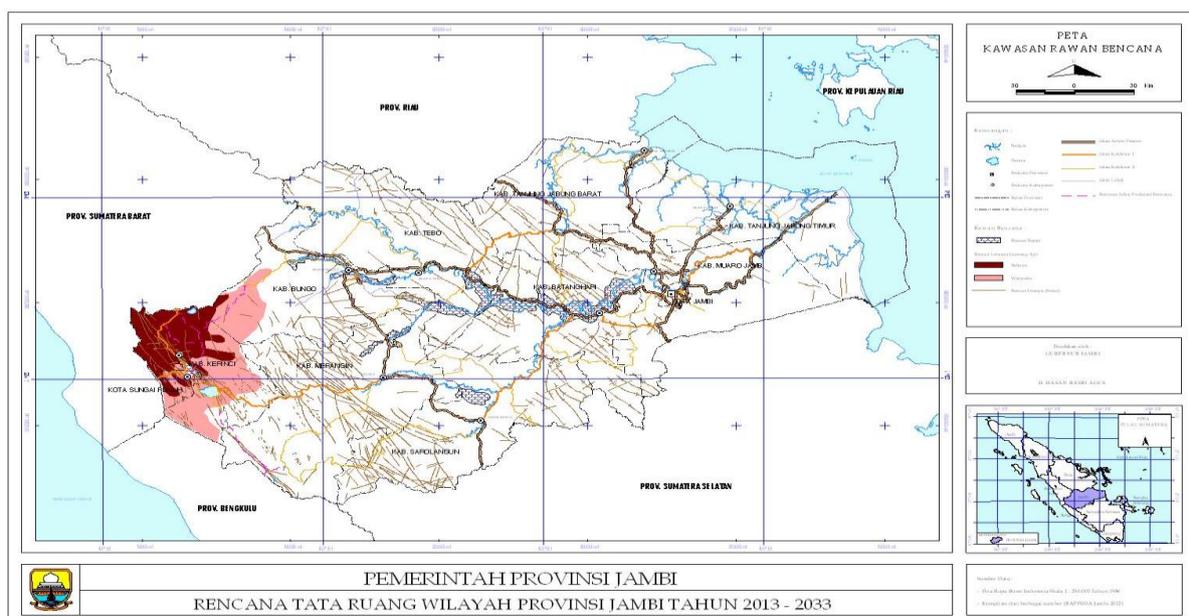
Sementara kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- Kawasan Wisata Sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2.10.



Gambar 2-10 Peta Rawan Bencana Provinsi Jambi (RTRWP Jambi Tahun 2013-2033)

A. Bencana Geologi

Bencana geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang berasal dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara. Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari enam kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

2. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari sembilan kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

B. Bencana Banjir

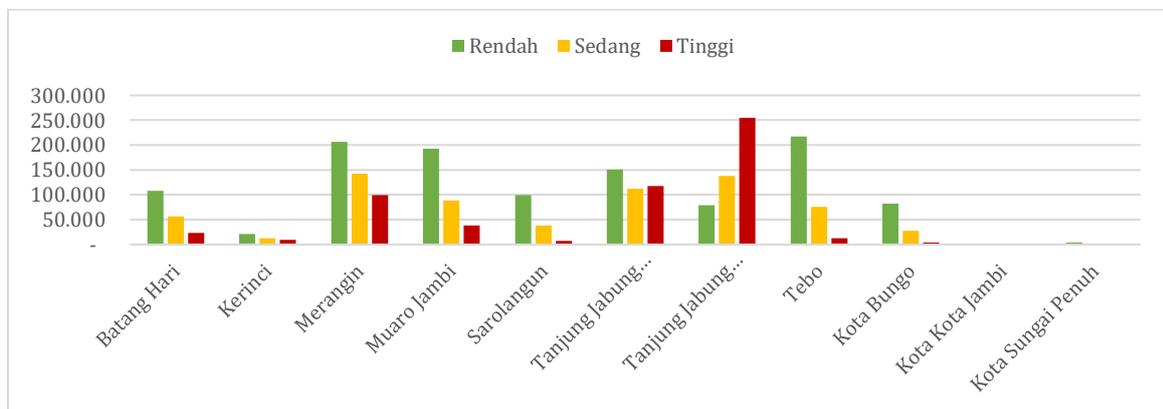
Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir diperoleh potensi luas dan kelas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-8 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Batang Hari	108.254	57.040	23.100	188.394	Tinggi
2	Kerinci	21.489	12.472	9.603	43.564	Tinggi
3	Merangin	206.376	142.623	99.615	448.614	Tinggi
4	Muaro Jambi	192.240	88.624	38.629	319.493	Tinggi
5	Sarolangun	99.693	38.149	6.913	144.755	Sedang
6	Tanjung Jabung Barat	150.552	112.454	118.029	381.035	Tinggi
7	Tanj. Jabung Timur	79.462	138.352	255.060	472.874	Tinggi
8	Tebo	217.016	76.251	13.045	306.312	Sedang
9	Bungo	81.806	28.134	3.611	113.551	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Jambi	39	19	-	58	Sedang
2	Kota Sungai Penuh	4.588	1.826	818	7.232	Tinggi
	Provinsi Jambi	1.161.515	695.944	568.423	2.425.882	Tinggi

Sumber : BPBD Prov. Jambi, 2020

Potensi bahaya banjir pada tabel di atas memperlihatkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Jambi yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jambi secara keseluruhan adalah 2.425.882,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.161.515,00 Ha, kelas sedang seluas 695.944,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 568.423,00 Ha.



Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2020

Gambar 2-11 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Tebo dengan luas 217.016,00 Ha. Pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Merangin dengan luas 142.623,00 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 255.060,00 Ha.

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

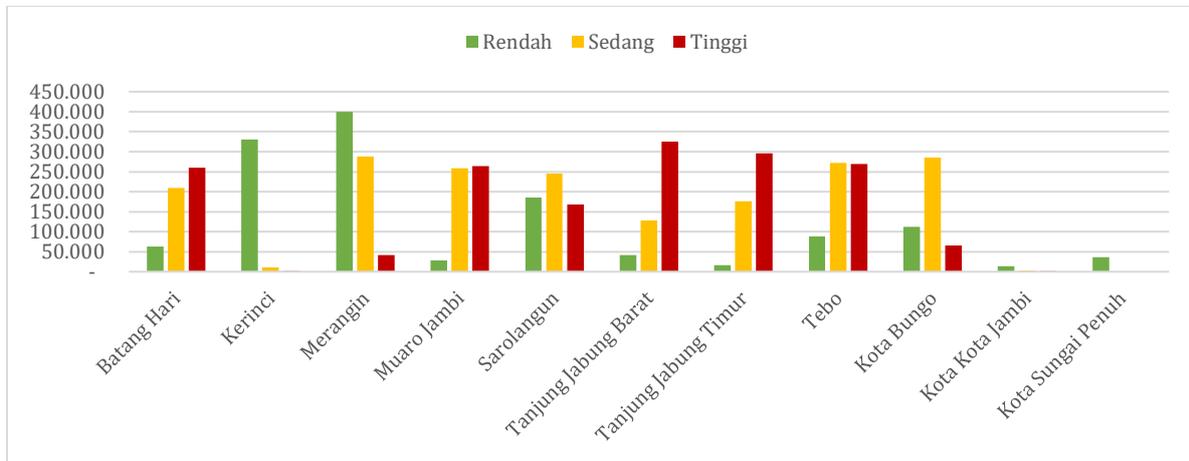
Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-9 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Batang Hari	63.456	209.625	260.103	533.184	Tinggi
2	Kerinci	330.854	10.743	2.197	343.794	Tinggi
3	Merangin	399.518	288.100	41.958	729.576	Tinggi
4	Muaro Jambi	28.670	258.686	264.193	551.549	Tinggi
5	Sarolangun	185.256	245.441	168.473	599.170	Tinggi
6	Tanjung Jabung Barat	41.247	127.735	325.886	494.868	Tinggi
7	Tanjung Jabung Timur	16.711	176.116	296.549	489.376	Tinggi
8	Tebo	88.565	271.693	269.181	629.439	Tinggi
9	Bungo	111.731	284.776	65.700	462.207	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Jambi	14.117	2.414	510	17.041	Tinggi
2	Kota Sungai Penuh	35.960	-	-	35.960	Rendah
	Provinsi Jambi	1.316.085	1.875.329	1.694.750	4.886.164	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2020

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jambi yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 4.886.164,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.316.085,00 Ha, kelas sedang 1.875.329,00 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.694.750,00 Ha.



Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2020

Gambar 2-12 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan masing-masing kabupaten/kota. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 399.518,00 Ha, yaitu Kabupaten Merangin, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Merangin dengan luas 288.100,00 Ha. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 325.886,00 Ha.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2021 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.548.200 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.951 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 247 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,38 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,26 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,61 persen.

Tabel 2-10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerinci	235.800	236.782	237.791	238.700	250.300
2	Merangin	372.200	377.905	383.480	388.900	354.100
3	Sarolangun	284.200	290.231	295.985	301.900	290.100
4	Batang Hari	263.900	266.971	269.966	272.900	301.700
5	Muaro Jambi	410.340	421.179	432.305	443.400	402.000
6	Tanjab Timur	215.320	216.777	218.413	220.000	229.800
7	Tanjab Barat	316.810	322.527	328.343	333.900	317.500
8	Tebo	337.020	343.003	348.760	354.500	337.700
9	Bungo	351.880	359.590	367.182	374.800	362.400
10	Kota Jambi	583.490	591.134	598.103	604.700	606.200
11	Sungai Penuh	87,97	88.918	89.944	90.900	96.600
Provinsi Jambi		3,402,052	3.515.017	3.570.272	3.624.600	3.548.200

Sumber: Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,34 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 47,66 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

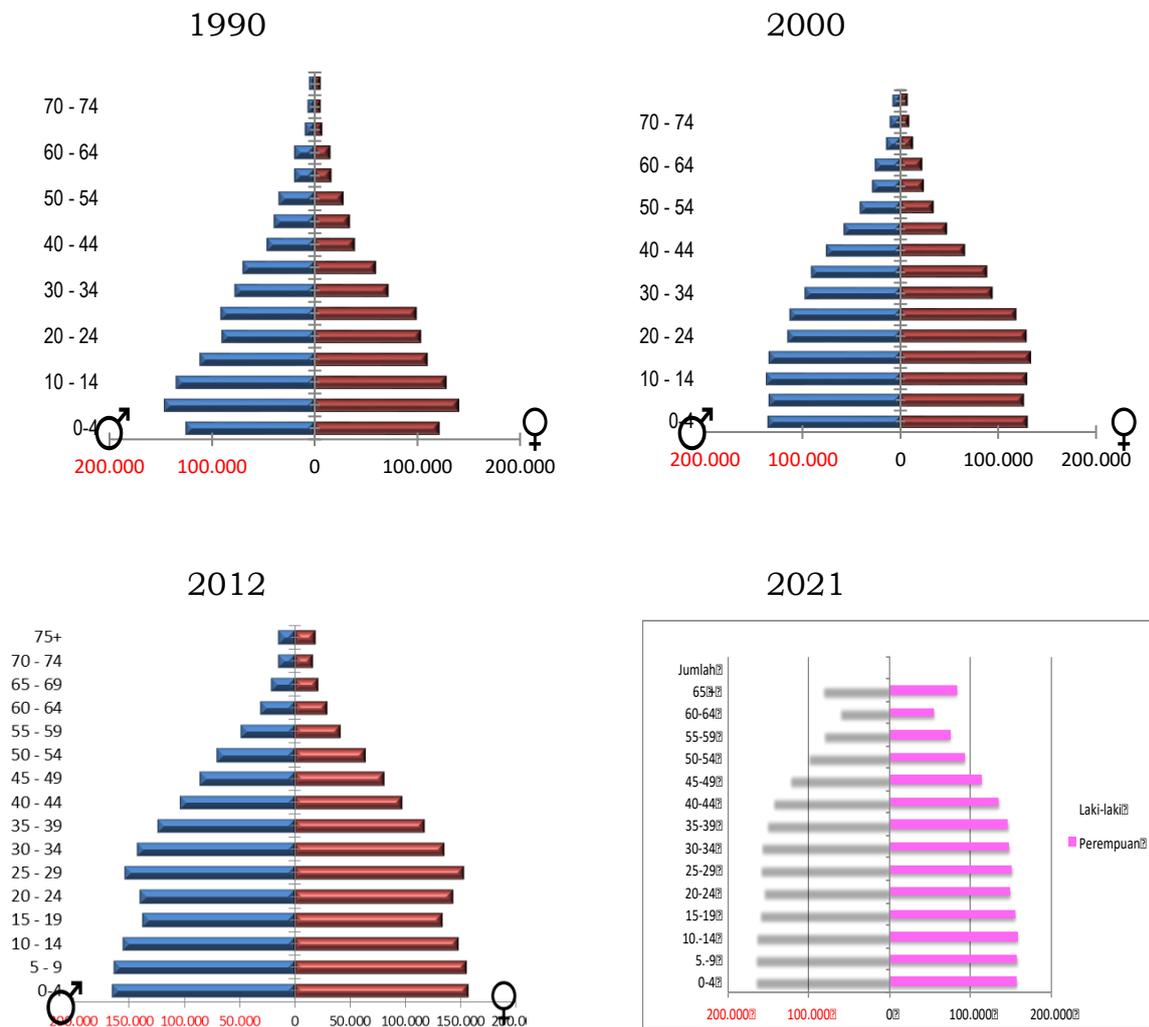
Tabel 2-11 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk(jiwa/km ²)
1	Kerinci	75
2	Merangin	46
3	Sarolangun	47
4	Batang Hari	52
5	Muaro Jambi	75
6	Tanjab Timur	42
7	Tanjab Barat	68
8	Tebo	52
9	Bungo	78
10	Kota Jambi	2.951
11	Sungai Penuh	247
Jumlah		66

Sumber: Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Bila dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah faktor migrasi, dimana penduduk laki-laki di kabupaten/ kota

tersebut banyak merantau keluar daerah untuk bekerja dan sebagian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 2-13 Piramida penduduk tahun 1990, 2000, 2012 dan 2021, Jambi Dalam Angka, data diolah)

Kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk selama empat dekade yakni tahun 1990, 2000, 2012 dan 2021 di atas. Pada tahun 1990 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun), sekolah menengah pertama/wajib belajar 9 tahun (13-15 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas (16 - 18 tahun) sampai usia masuk Perguruan Tinggi (15-19 tahun). Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada Piramida Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah balita cenderung tinggi, mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama cenderung tinggi. Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan

Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk meninggalkan Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk tuntutan terhadap infrastruktur dan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang baik.

Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2021, dimana dalam kurun waktu sembilan tahun, telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok penduduk usia sekolah yang hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan usia lanjut yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat. Peningkatan jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan, namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia.

Tabel 2-12 Distribusi Penduduk Menurut Agama tahun 2020

No	Kabupaten/ kota	Agama yang Dianut (%)					
		Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Kerinci	99,20	0,46	0,10	0,00	0,21	0,02
2	Merangin	96,93	2,64	0,28	0,00	0,14	0,01
3	Sarolangun	95,69	2,55	0,48	0,00	1,26	0,02
4	Batang Hari	98,01	1,35	0,36	0,00	0,27	0,01
5	Muaro Jambi	96,06	3,39	0,32	0,05	0,17	0,01
6	Tanjung Jabung Timur	97,74	1,38	0,60	0,02	0,25	0,02
7	Tanjung Jabung Barat	94,29	4,63	0,47	0,00	0,58	0,02
8	Tebo	97,73	1,78	0,34	0,00	0,14	0,01
9	Bungo	95,53	2,47	1,87	0,00	1,10	0,02
10	Kota Jambi	87,95	7,24	1,20	0,04	3,35	0,22
11	Kota Sungai Penuh	98,12	0,78	0,48	0,00	0,53	0,07

Sumber: Jambi Dalam Angka 2021.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk di seluruh kabupaten/kota beragama Islam dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah penduduk beragama Kristen Protestan dan Budha. Sedangkan untuk tiga agama lainnya menunjukkan variasi komposisi pada masing-masing kabupaten/ kota. Keragaman komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Provinsi Jambi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

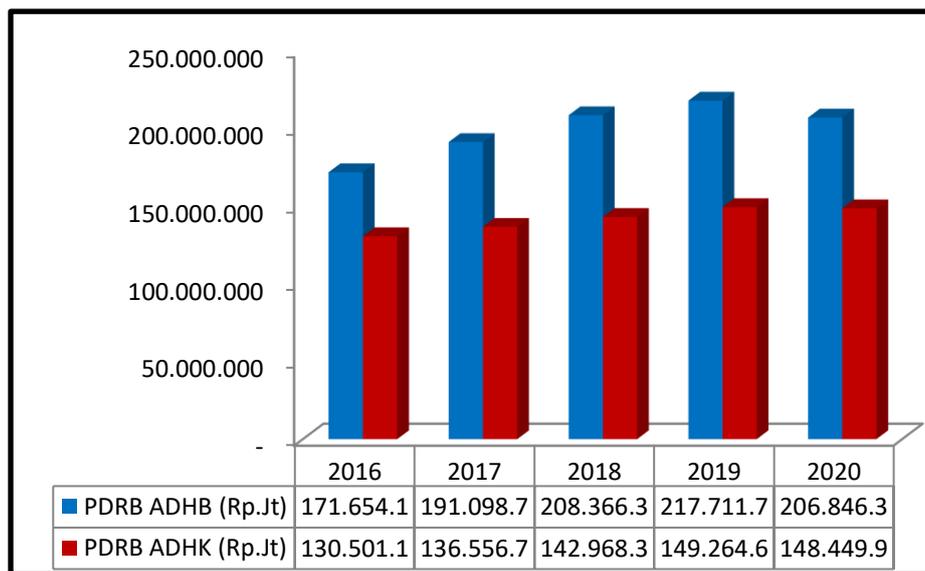
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2016-2018 mengalami peningkatan namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan, menurunnya harga minyak dunia dan juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung.

Selanjutnya, pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia juga berpengaruh terhadap Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 sehingga mengalami kontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.

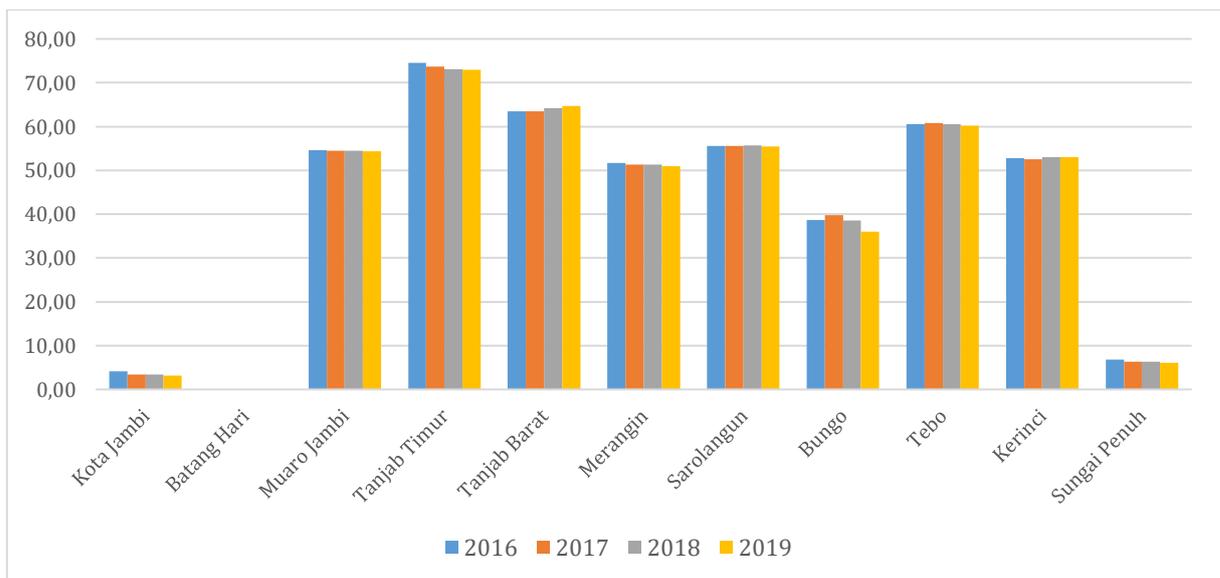
Laju pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode 2016–2020 adalah rata-rata sebesar 4,66 persen per tahun, sementara laju pertumbuhan PDRB ADHK rata-rata sebesar 3,22 persen per tahun. Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2020 ketika sektor lainnya mengalami kontraksi. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua hingga Tahun 2019 dan terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2020 tidak lagi menjadi pemberi kontribusi terbesar kedua namun

menjadi urutan ketiga setelah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ketiga hingga tahun 2019 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan trend yang terus mengalami peningkatan telah menempatkan sektor ini pada urutan kedua pemberi kontribusi terbesar pada tahun 2020.



Sumber: Data diolah. BPS, 2021

Gambar 2-14 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 (dalam milyar rupiah)

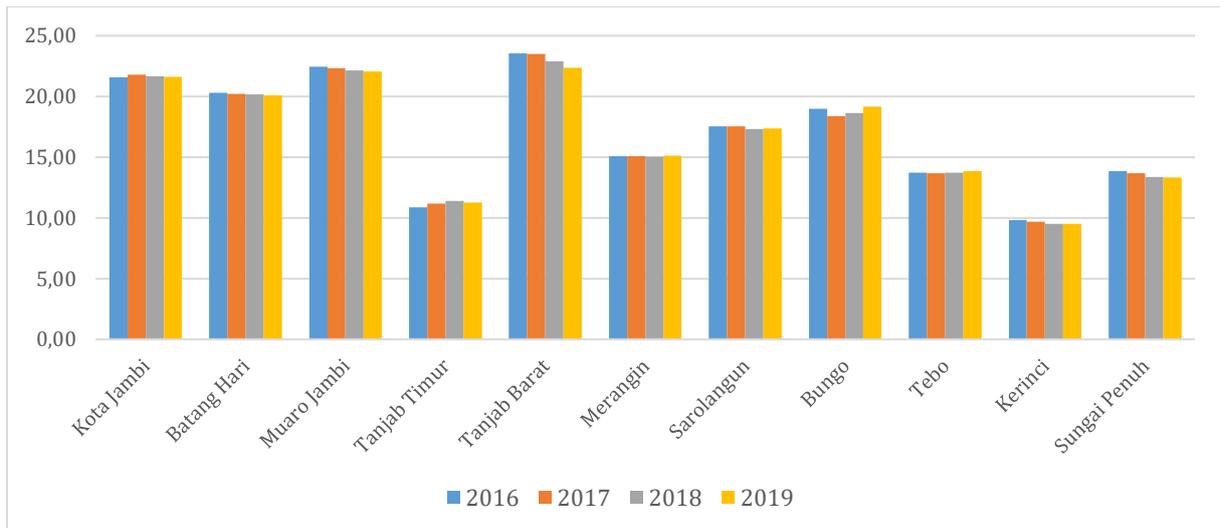


Sumber: Data diolah. BPS, 2020

Gambar 2-15 Laju Perkembangan Sektor Primer PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

Perkembangan sektor primer, sekunder dan teriser yang memberikan kontributor pertumbuhan ekonomi pada masing-masing

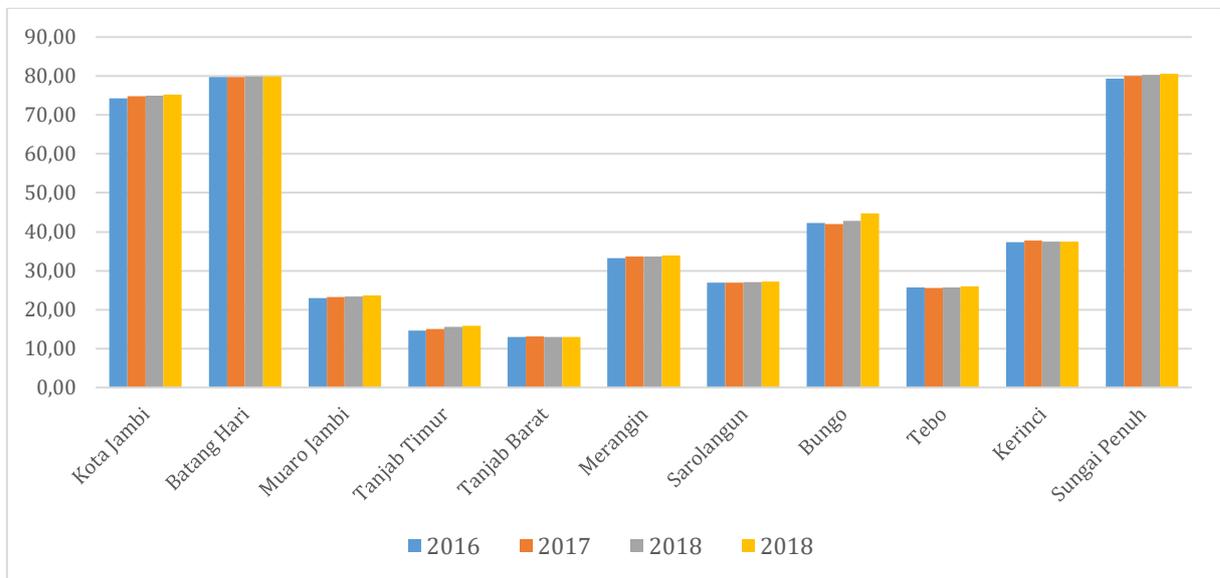
kabupaten/kota di Provinsi Jambi bervariasi. Sektor primer yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Ketiga kabupaten tersebut masih bergerak pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian.



Sumber: Data diolah. BPS, 2020

Gambar 2-16 Laju Perkembangan Sektor Sekunder PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

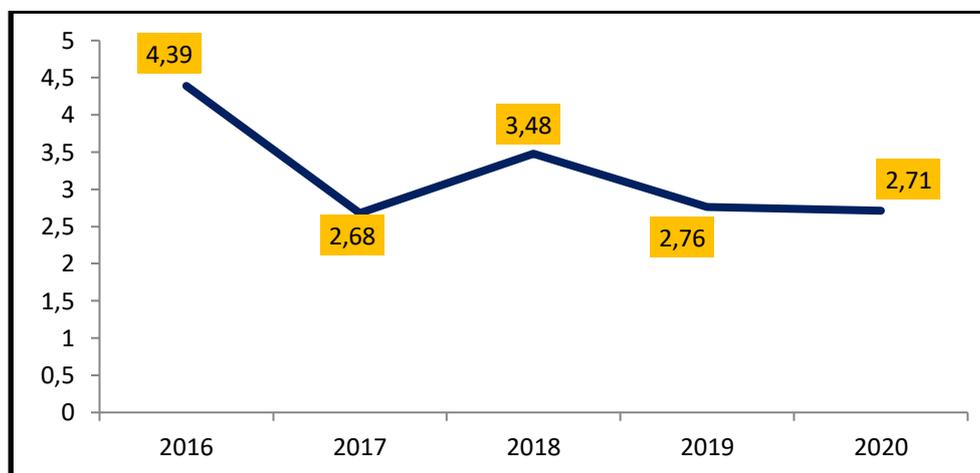
Untuk sektor sekunder, kabupaten sebagai kontributor tertinggi berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sektor sekunder yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor konstruksi. Sedangkan sektor tersier, kabupaten sebagai kontributor tertinggi berada pada Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari dan Kota Jambi. Sektor tersier bergerak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, sektor jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lainnya.



Sumber: Data diolah. BPS, 2020

Gambar 2-17 Laju Perkembangan Sektor Tersier PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

2.2.1.2 Inflasi

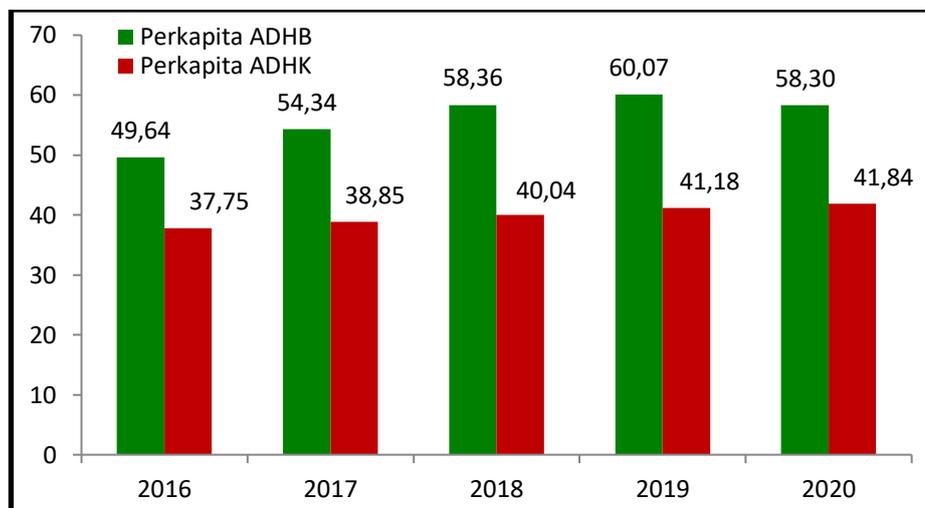


Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-18 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak keatas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

2.2.1.3 PDRB Perkapita



Sumber: BPS, 2021

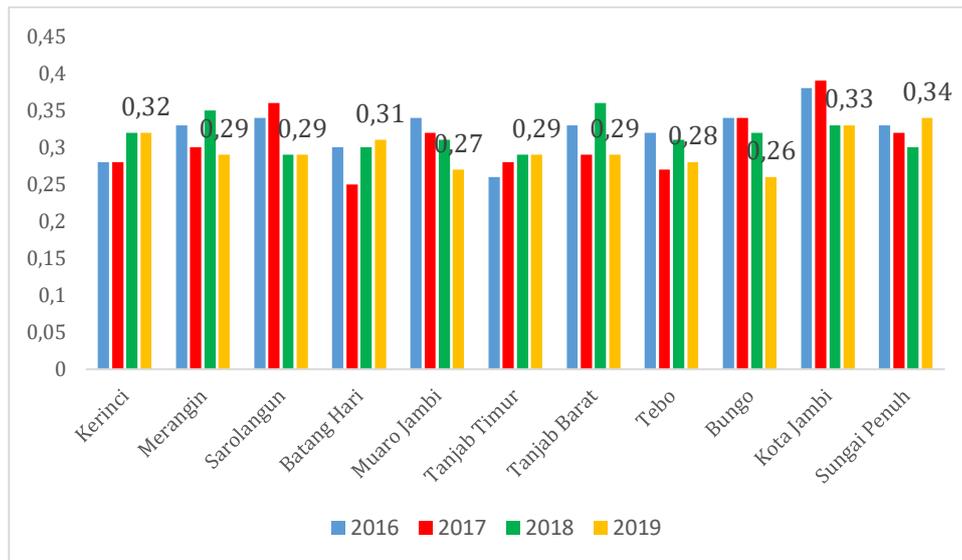
Gambar 2-19 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Jambi Tahun 2016 -2020 (dalam juta rupiah)

PDRB perkapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2016-2019 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,88 persen per tahun, namun pada tahun 2020 sedikit mengalami kontraksi akibat pandemi yang berdampak kepada hampir semua sektor. Sedangkan PDRB perkapita ADHB juga meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 6,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah-menengah (*lower-middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2.1.4 Indeks Gini

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Selama 4 tahun terakhir, Koefisien Gini Provinsi Jambi relatif rendah di bawah nasional. Berdasarkan daerah tinggal, Koefisien Gini Tahun 2020 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,346 dan 0,289. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan

indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit. Hanya beberapa Kabupaten/ kota yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan ketimpangan, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang.



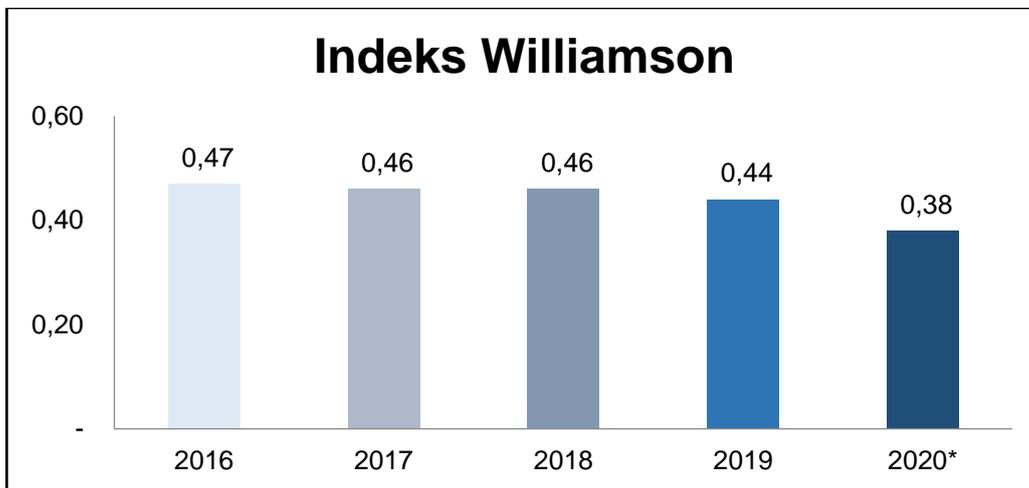
Sumber : BPS 2019. data diolah

Gambar 2-20 Koefisien Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

2.2.1.5 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan berimplikasi juga terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Besaran Indeks Williamson antara nol sampai satu dengan kriteria jika indeks $< 0,35$ dikategorikan rendah, $0,35 - 0,5$ dikategorikan sedang dan $> 0,5$ dikategorikan tinggi. Indeks Williamson Provinsi Jambi mulai dari tahun 2016-2020 memperlihatkan kecenderungan menurun, namun masih diketategorikan sedang. Pada tahun 2016, indeks Williamson Provinsi Jambi sebesar 0.47 mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 0,38.



Sumber : BPS 2021. data diolah

Gambar 2-21 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

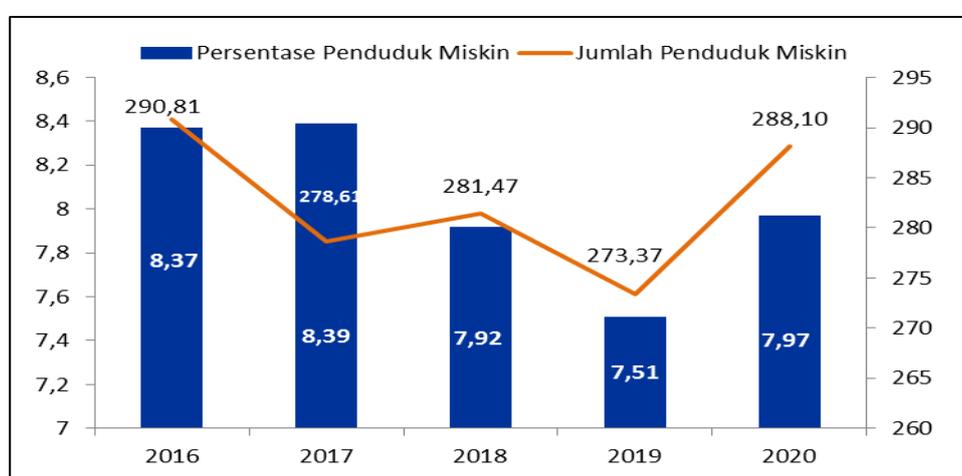
Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

2.2.1.6 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumberdaya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



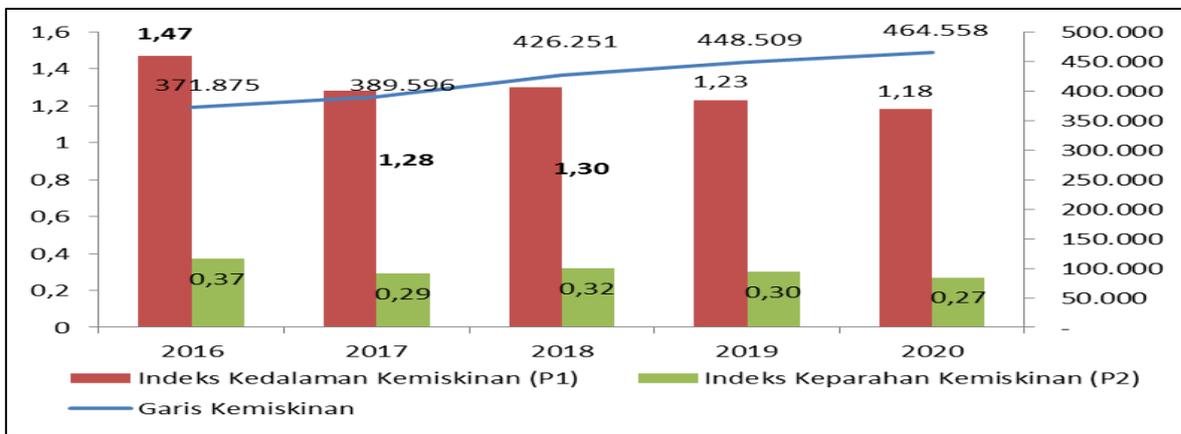
Sumber: BRS, BPS 2021

Gambar 2-22 Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi, terutama di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 dimana banyak aktivitas perekonomian yang mengalami stagnansi, sehingga juga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Bila membandingkan kondisi tahun 2016 dengan tahun 2021, terlihat bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami penurunan walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 5,56 persen, yaitu dari Rp371.875 per kapita perbulan pada 2016 menjadi Rp464.558 perkapita perbulan pada 2020. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 290,81 ribu orang, menurun menjadi 288,10 ribu orang pada tahun 2020.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode September 2016 - September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan, yaitu pada September 2016 nilai P1 sebesar 1,47 menurun menjadi 1,18 pada September tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di daerah perkotaan.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahannya Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), menurun dari 0,37 pada September 2016 menjadi 0,27 pada September 2020. Kenyataan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.



Sumber: BPS, data diolah, 2021

Gambar 2-23 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

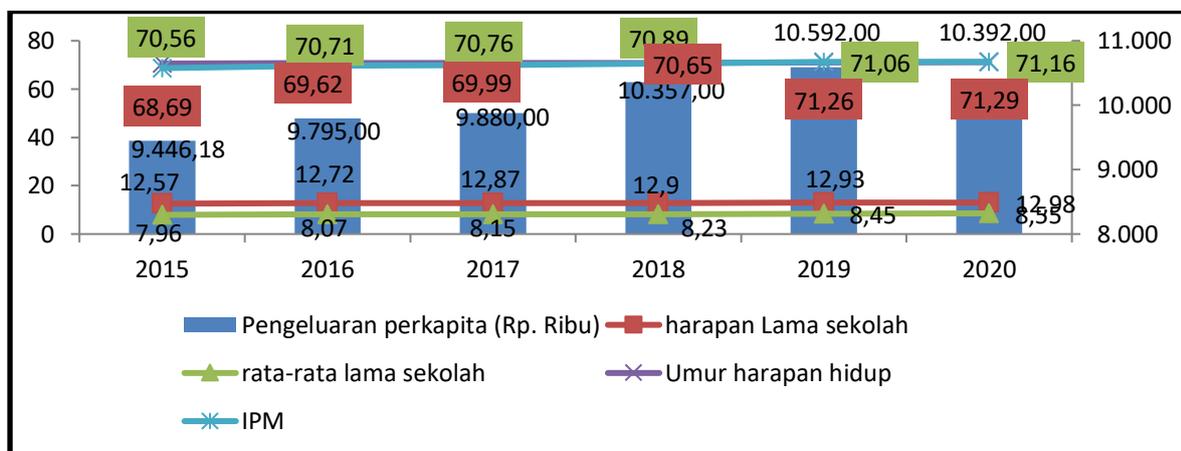
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian IPM Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan setiap tahun, bahkan mulai tahun 2018 sudah masuk dalam kategori tinggi. Seluruh komponen menunjukkan tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir seluruh komponen tetap menunjukkan perbaikan, kecuali komponen pengeluaran perkapita. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi, sebagai akibat kontraksi perekonomian secara global maupun nasional dan regional. Bila dilihat per kabupaten/ kota, IPM seluruh kabupaten/kota juga terus bergerak hampir menuju IPM tinggi, hanya dua kabupaten yang masih jauh untuk mencapai IPM kategori tinggi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tiga dari kabupaten/kota di Provinsi sudah masuk dalam kategori IPM tinggi yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, bahkan capaian IPM Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh lebih tinggi dibanding capaian nasional. Capaian yang masih timpang antar wilayah dalam Provinsi Jambi ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

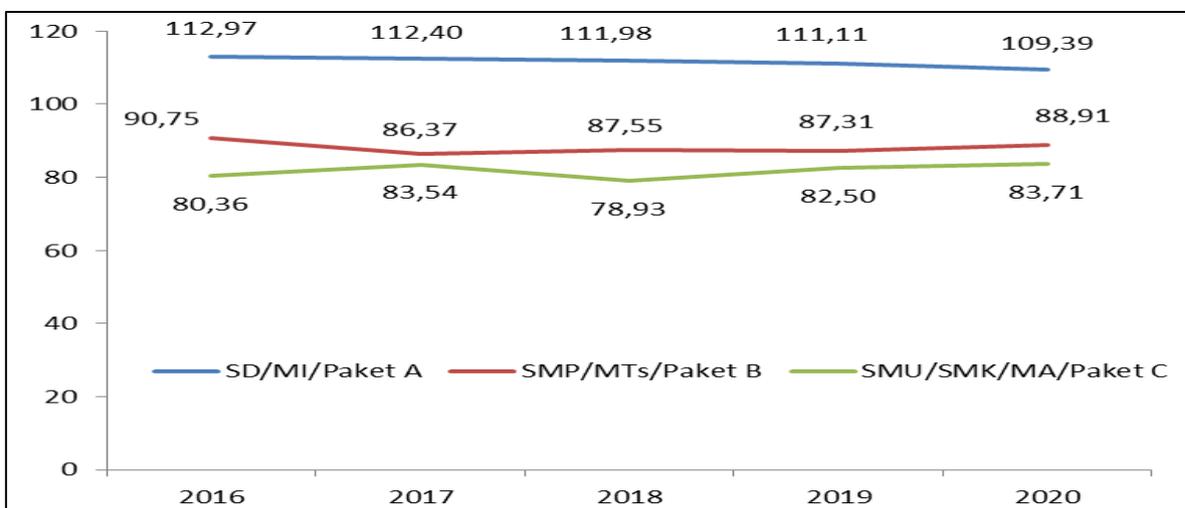


Gambar 2-24 IPM Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2020 dan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM

2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui **APK** (Angka Partisipasi Kasar) dan **APM** (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/ sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

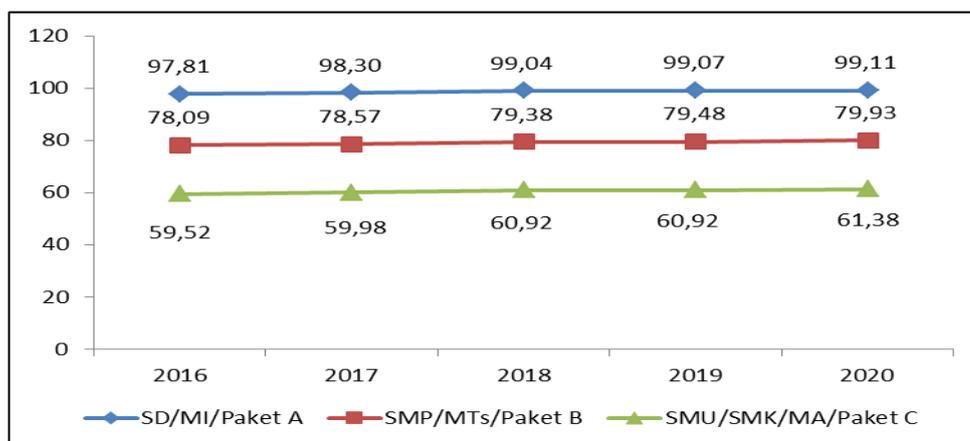


Sumber : BPS, Tahun 2021

Gambar 2-25 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, APK pada tingkat SD mencapai 109,39, atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 111,11. Hal ini berarti terdapat 109,39 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, APK SMP sederajat sebesar 90,75 persen menjadi 88,91 persen pada tahun 2020. Sementara, APK SMA Provinsi Jambi justru mengalami peningkatan pada periode tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016, APK SMA sebesar 80,36 persen, meningkat menjadi 83,71 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.



Sumber: Jambi Dalam Angka 2020, 2021

Gambar 2-26 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi peningkatan dari 97,81 persen pada tahun 2016 menjadi 99,11 persen pada tahun 2020. Demikian juga APM SMP yang meningkat dari 78,09 persen di tahun 2016 menjadi 79,93 persen di tahun 2020. Untuk APM SMA, pada tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, APM SMA sebesar 59,52 persen, meningkat menjadi 61,38 persen pada tahun 2020. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.

Meskipun angka partisipasi baik Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah mengalami peningkatan namun peningkatan ini juga belum cukup untuk meningkatkan kualitas **Sumber Daya Manusia Jambi**, karena masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2020 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.
2. Tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTA menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi
3. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.
4. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Seni Budaya

Tabel 2-13 Perkembangan Seni Budaya

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Warisan budaya tak benda yang ditetapkan	6	10	9	10	2
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	HKI karya seni	29	18	19	18	0

Sumber: Dinas Budpar, 2021

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi agar karya seni dan budaya Jambi mendapatkan pengakuan ataupun Hak Kekayaan Intelektual. Dalam rentang tahun 2016-2020 telah ditetapkan

37 warisan budaya tak benda dan 38 Hak kekayaan intelektual karya seni.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembangunan seni budaya menunjukkan peningkatan yang berarti, walaupun di sisi yang lain prasarana seperti gedung kesenian relatif stagnan. Guna memajukan seni budaya di Provinsi Jambi, maka kedepan program-program terkait internalisasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada generasi muda harus dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi.

2.2.3.2 Olah Raga

Tabel 2-14 Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Cabang Olahraga	2018		2019		2020	
		Pemda	Swasta	Pemda	Swasta	Pemda	Swasta
1.	Sepak Bola	16	68	15	225	19	230
2.	Tenis	24	31	24	31	17	21
3.	Bulu Tangkis	16	92	16	92	20	250
4.	Bola Voli	19	110	19	110	122	326
5.	Basket	2	47	27	47	11	44
6.	Tenis Meja	22	91	22	91	15	57
7.	Pencak Silat	11	18	11	18	10	16
8.	Menembak	0	0	0	0	0	1
9.	Angkat Besi	5	1	5	1	3	6
10.	Senam	1	0	1	0	1	0
11.	Kolam Renang	0	12	0	12	3	15
12.	Taekwondo	3	3	3	3	1	3
13.	Judo	3	2	3	2	1	2
14.	Kempo	1	4	1	4	1	3
15.	Gulat	2	4	2	4	2	2
16.	Panjat Tebing	7	2	7	2	13	1
17.	Golf	0	2	0	2	1	1
18.	GOR	1	4	1	4	15	16
19.	Dayung	3	6	3	6	8	3
20.	Tinju	0	3	0	3	1	5
21.	Sepak Takraw	2	29	2	29	3	31
22.	Karate	5	11	5	11	3	5
23.	Catur	5	4	5	4	2	3

Sumber: *Dispora*, 2021

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka olahraga merupakan salah satu faktor penunjang yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian budaya masyarakat Provinsi Jambi dalam berolahraga masih rendah. Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlit Provinsi Jambi yang belum menggembirakan.

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 44 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun oleh Pihak swasta.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Agenda besar pendidikan di Indonesia adalah bagaimana peningkatan mutu pendidikan bisa meningkat, sejajar dengan negara lain di Asia dan Dunia. Pendidikan yang bermutu hanya dapat dilahirkan oleh para pendidikan yang juga bermutu, yakni memiliki kualifikasi standar, profesional dan berdedikasi tinggi, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan SDM yang handal. Guru memiliki peran strategis dalam pembangunan pendidikan, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan, implementator kurikulum dan pelaku pendidikan yang secara langsung bersentuhan dengan siswa. Muatan-muatan ideal dalam

kurikulum menjadi tanggung jawab guru untuk merealisasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, untuk keberhasilan pendidikan diperlukan guru-guru yang berkualitas. Peningkatan kualifikasi guru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia, hal tersebut sebagai wujud realisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal S-1 dan memiliki sertifikat sebagai pengajar (Riyana, 2010).

Tabel 2-15 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru terhadap Murid SLTA/MA Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SLTA/MA					
Jumlah Satuan Pendidikan SMA/MA	414	414	436	450	449
Jumlah Guru	8.720	7.714	8.445	8.890	8.893
Jumlah Murid	95.657	95.853	102.714	105.507	106.033
Rasio Guru terhadap 10.000 murid	911,59	804,77	822,19	842,60	838,70
Rasio Guru terhadap murid	10,97	12,43	12,16	11,87	12,99
Rasio sekolah dengan murid	231,06	231,53	235,58	234,46	236,15
Rasio sekolah dengan guru	21,06	18,63	19,37	19,76	19,81

Sumber : BPS, 2021(data diolah).

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun dalam perspektif teknologi pendidikan kompetensi tersebut ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran (Miarso, 2008).

Rasio Guru terhadap murid adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu tahun agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada tabel di atas terlihat bahwa rasio guru terhadap 10.000 murid SLTA/MA tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016, ketersediaan guru per 10.000 murid sebanyak 911,59 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 10,97 orang murid SLTA/MA. Sementara di tahun 2020 ketersediaan guru per 10.000 murid adalah sebanyak 838,70 orang, atau satu orang guru tersedia untuk 12,99 murid.

Tabel 2-16 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SMK di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SMK					
Jumlah Satuan Pendidikan SMK	176	184	228	178	176
Jumlah Guru	3.906	3.930	4.102	4.319	4.446
Jumlah Murid	45.826	48.928	51.084	54.477	54.319
Rasio Guru terhadap 10.000 murid	852,35	803,22	802,99	792,81	769,98
Rasio Guru terhadap murid	11,73	12,45	12,45	12,61	12,22
Rasio sekolah dengan murid	260,38	265,91	224,05	306,05	308,63
Rasio sekolah dengan guru	22,19	21,36	17,99	24,26	25,26

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Pengembangan pendidikan kejuruan/vokasi menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Jambi. Pendidikan kejuruan ini akan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja terampil pada jenjang tenaga kerja menengah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah diberbagai sektor terutama agribisnis dan agroindustri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan desa inovati produktif yang menjadi salah satu progam unggulan provinsi Jambi. Untuk itu pembangunan pendidikan kejuruan akan menjadi prioritas baik dari segi pemenuhan kebutuhan infrastruktur, sarana dan

prasarana, guru maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan kejuruan yang berkualitas.

Rasio Guru terhadap 10.000 murid SMK pada tahun 2016-2020 berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ketersediaan guru sebanyak 852,35 orang untuk 10.000 orang murid SMK atau 1 orang guru tersedia untuk 11,73 orang murid. Sementara di tahun 2020, ketersediaan guru sebanyak 769,98 orang untuk 10.000 orang murid SMK, atau 1 orang guru tersedia untuk 12,22 orang murid.

Tabel 2-17 Jumlah Guru, Murid dan Rasio Guru terhadap Murid SLB di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
SLB					
Jumlah Satuan Pendidikan SLB	14	14	14	14	14
Jumlah Guru	298	298	298	298	298
Jumlah Murid	1503	1503	1503	1503	1503
Rasio Guru terhadap murid	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
Rasio sekolah dengan murid	107,36	107,36	107,36	107,36	107,36
Rasio sekolah dengan guru	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

* data tidak tersedia = sama dengan tahun sebelumnya

Untuk pendidikan khusus, jumlah murid bersifat tetap sesuai daya tampung sekolah, karena jumlah sekolah relatif stagnan, maka jumlah murid juga stagnan, sehingga rasio sekolah dengan murid stagnan, demikian pula dengan rasio guru dengan murid.

2.3.1.1.1.1 Capaian Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2-18 Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran		Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 – 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	185.200 orang	192.600 orang	116.262 orang	122.730 orang	62,78 %	63,72 %
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	36.417 orang	1.941 orang	1.967 orang	1.647 orang	5,4%	84,85 %

Belum terpenuhi 100 persen capaian SPM Bidang Pendidikan antara lain disebabkan oleh:

1. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh pernikahan usia dini (menikah pada saat di bangku sekolah).
2. Masih adanya anak usia sekolah sekolah yang harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga
3. Masih banyaknya orang tua yang menganggap bahwa mempunyai anak berkebutuhan khusus adalah sebuah aib sehingga tidak diberikan pendidikan serta mengucilkan mereka dari dunia luar
4. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga dibutuhkan biaya khusus untuk memperoleh pendidikan di luar tempat tinggal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu program pemberian beasiswa untuk memotivasi siswa untuk tetap bersekolah serta mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat melalui pembangunan sekolah baru pada wilayah geografis yang sulit dijangkau, serta sarana prasarana pendidikan yang optimal.

2.3.1.1.2 Kesehatan

2.3.1.1.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Karena survey tersebut dilakukan 5 tahun sekali, maka data terkait AKI untuk data tahunan disajikan berupa data jumlah kematian ibu yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

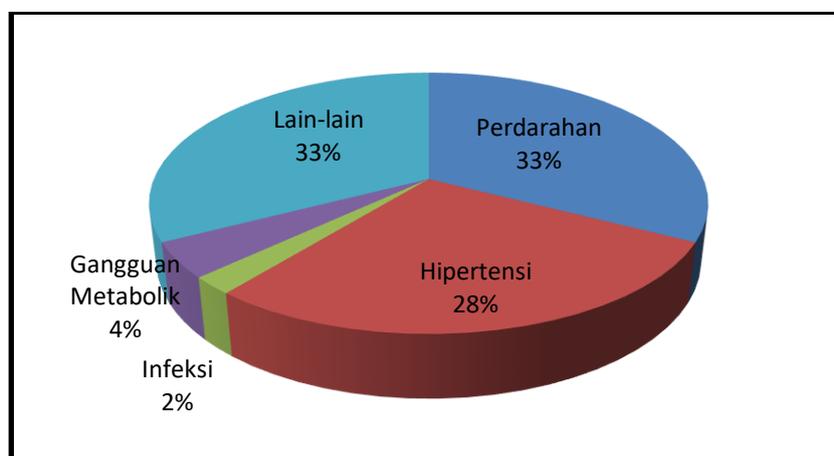
Tabel 2-19 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerinci	6	4	5	4	9
2	Merangin	6	5	5	9	5
3	Sarolangun	5	4	4	4	5
4	Batang Hari	2	8	3	7	7
5	Bungo	10	5	12	9	7
6	Tebo	9	4	3	10	11
7	Muaro Jambi	3	5	2	4	5
8	Tanjab Barat	5	7	4	5	3
9	Tanjab Timur	8	6	4	2	6
10	Kota Jambi	3	4	2	5	3
11	Kota Sei Penuh	2	2	2	0	1
	Provinsi	59	54	46	59	62

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2020. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2021, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebanyak 62 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Tebo dengan 11 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan 0 kasus.

Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-27 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi, jenis terbanyak adalah perdarahan dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi

kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga. Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Tabel 2-20 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kerinci	37	43	42	49	62
2.	Merangin	41	25	35	32	40
3.	Sarolangun	23	22	21	23	22
4.	Batanghari	29	19	25	29	27
5.	Muaro Jambi	27	14	12	21	13
6.	Tanjab Timur	12	9	11	13	20
7.	Tanjab Barat	35	34	35	33	45
8.	Tebo	30	26	38	52	52
9.	Bungo	17	15	32	26	43
10.	Kota Jambi	16	12	6	8	16
11.	Kota Sungai Penuh	7	20	6	4	8
	PROVINSI	274	239	263	290	353

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan. Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 berfluktuasi dan cenderung meningkat, pada tahun

2016 jumlah kematian bayi sebesar 274, kemudian menurun menjadi 239 di tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 353 ditahun 2020.

Penyebab meningkatnya AKI dan AKB dikarenakan belum semua nakes melaksanakan pelayanan ibu dan anak terstandar, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah,sebaran tenaga bidan yang tidak merata, dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak di beberapa Kabupaten tidak tinggal di kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran (RTK) belum maksimal.

2.3.1.1.2.2 *Stunting dan Wasting*

Tabel 2-21 Prevalensi balita *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	2013 (Riskesdas)	2018 (Riskesdas)	2020 (SSGBI)
1.	Kerinci	55,3	42,2	33,85
2.	Merangin	37,5	35	15,38
3.	Sarolangun	40,8	18,8	19,06
4.	Batanghari	39,5	32,8	27,32
5.	Muaro Jambi	50	20,7	13,51
6.	Tanjab Timur	48,5	40,9	20,05
7.	TanJab Barat	29,6	44	21,81
8.	Tebo	41,4	33	30,13
9.	Bungo	34,5	20,7	27,57
10.	Kota Jambi	24,6	26,2	18,62
11.	Kota Sungai Penuh	36,9	35,8	25,66
PROVINSI		37,2	30,1	21,03

Sumber: Riskesdas 2013, 2018 dan SSGBI 2020

Stunting (pendek) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Anak yang *stunting* biasanya juga mengalami *wasting* atau kurus, diukur dengan melihat kurva berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Anak dikatakan *wasting* jika berat badan anak berdasarkan tinggi badannya menunjukkan hasil di bawah -

2 SD. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Tabel di atas memperlihatkan perkembangan prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) di Provinsi Jambi, dimana Provinsi Jambi berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen (Riskesdas, 2013) pada tahun 2013 menjadi 21,03 persen (SSGBI, 2020) pada tahun 2020. Namun demikian terdapat beberapa kabupaten/kota yang harus menjadi perhatian untuk penurunan stunting ini karena prevalensinya masih di atas provinsi, yaitu Kabupate Kerinci, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo dan kota Sungai Penuh.

Tabel 2-22 Prevalensi Wasting (kurus) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Prevalensi Wasting	
		Riskesdas 2013	Riskesdas 2018
1	Kerinci	5.40	11.52
2	Merangin	11.60	12.29
3	Sarolangun	18.10	12.60
4	Batanghari	22.00	17.03
5	Muaro Jambi	10.20	19.51
6	TanjungJabung Timur	13.30	15.90
7	TanjungJabung Barat	11.40	13.01
8	Tebo	13.60	7.92
9	Bungo	19.20	5.85
10	Kota Jambi	11.90	10.33
11	Kota Sungai Penuh	10.40	3.96
	PROVINSI JAMBI	13.50	12.05
	INDONESIA	12.10	10.20

Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018

Sementara untuk balita kurus, data yang tersedia terakhir adalah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, dimana prevalensi wasting di Provinsi Jambi masih pada angka 12,05 persen atau di bawah nasional yang sudah mencapai 10,20 persen. Terdapat beberapa kabupaten yang prevalensi wastingnya cukup tinggi atau lebih rendah dari provinsi, yaitu Kabupate Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu kabupaten/kota dengan prevalensi *stunting* dan *wasting* yang masih lebih tinggi Provinsi Jambi harus didorong untuk melaksanakan program-program konvergensi penurunan *stunting* dan *wasting* ini.

2.3.1.1.2.3 Eliminasi Malaria (kab/kota)

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.

Tabel 2-23 Eliminasi Malaria (kab/kota) di Provinsi Jambi

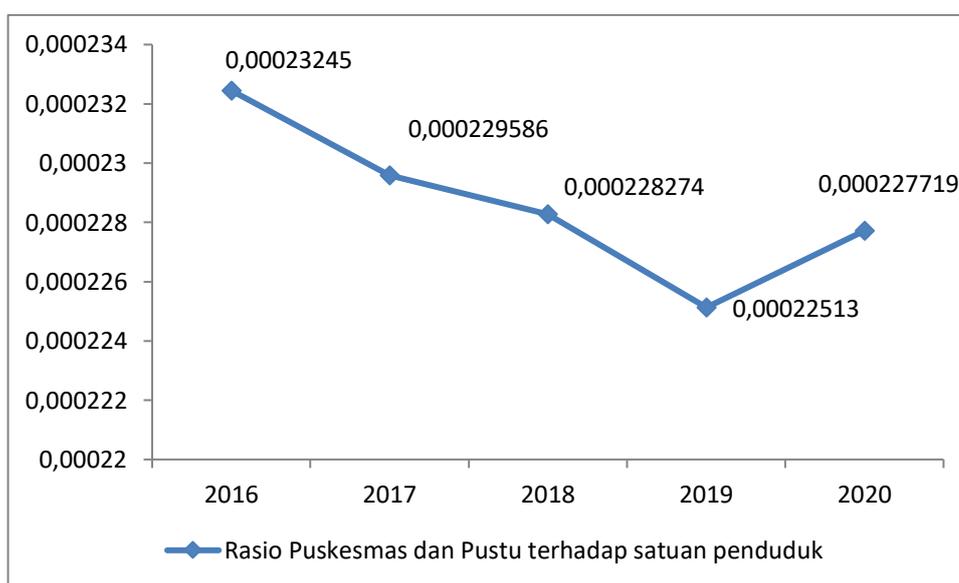
NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	KERINCI	v	v	v	v	v
2	MERANGIN	-	-	-	-	-
3	SAROLANGUN	-	-	-	-	-
4	BATANGHARI	-	-	-	-	-
5	MUARO JAMBI	-	-	v	v	v
6	TANJAB TIMUR	-	-	v	v	v
7	TANJAB BARAT	-	-	v	v	v
8	TEBO	-	-	-	-	-
9	BUNGO	-	-	v	v	v
10	KOTA JAMBI	v	v	v	v	v
11	SUNGAI PENUH	v	v	v	v	v
12	PROVINSI	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi telah berhasil melakukan eliminasi malaria pada 7 kabupaten/kota atau 63,63 persen dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam upaya pengobatan dan eliminasi malaria di Provinsi Jambi, diantaranya adalah masih kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas program serta masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas. Untuk itu kedepan perlu advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta perlunya komitmen dukungan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk tidak sering melakukan mutasi terhadap petugas yang telah dilatih minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan. Sedangkan upaya lain yang harus terus dilakukan adalah penguatan diagnosis dan tatalaksana pengobatan malaria, penguatan surveilans malaria, penguatan pengendalian faktor resiko serta sediaan darah mikroskop yang diuji silang.

2.3.1.1.2.4 Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Jambi tahun 2016-2020 sedikit mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah puskesmas tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah puskesmas. Dimasa yang akan datang diharapkan terjadi keseimbangan antara penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut ini.



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-28

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap satuan penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tabel 2-24 Kondisi eksisting sebaran puskesmas terakreditasi di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
1	Kerinci	21	18	3
2	Merangin	27	25	2
3	Sarolangun	16	15	1
4	Batanghari	18	17	1
5	Muaro Jambi	22	18	4
6	Tanjab Timur	17	13	4
7	Tanjab Barat	16	16	0
8	Tebo	20	17	3
9	Bungo	19	19	0
10	Kota Jambi	20	20	0
11	Kota Sungai Penuh	11	10	1
	PROVINSI JAMBI	207	188	19

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2021

Jika dilihat sebaran puskesmas terakreditasi per kabupaten/ kota di Provinsi Jambi, terlihat bahwa baru 3 Kabupaten/ kota yang telah mencapai 100 persen puskesmas terakreditasi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Capaian akreditasi puskesmas yang paling rendah adalah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan capaian 76,5 persen. Hal ini berarti 90,82 persen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah di kabupaten/kota yang memenuhi standar untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara untuk mendukung target RPJMN 0 persen puskesmas tanpa dokter, Provinsi Jambi masih memiliki 0,01 persen atau 3 puskesmas yang tanpa dokter, dimana keseluruhannya berada di Kota Sei. Penuh. Kedepan seluruh puskesmas- harus didorong agar terakreditasi dan memiliki dokter.

Tabel 2-25 Kondisi Eksisting sebaran puskesmas dengan dokter dan tanpa dokter di Provinsi Jambi

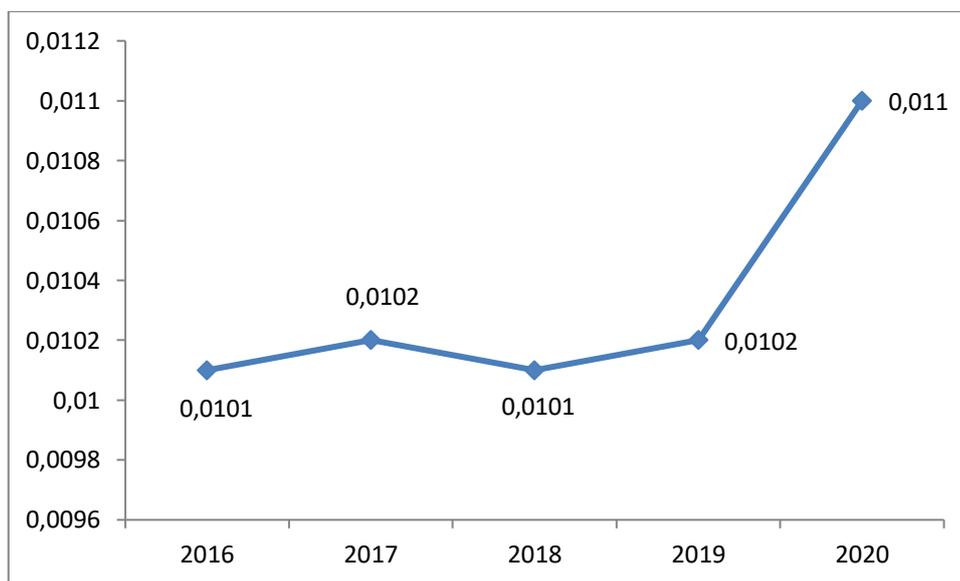
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	PUSKESMAS DENGAN DOKTER	PUSKESMAS TANPA DOKTER
1	Kerinci	21	21	0
2	Merangin	27	27	0
3	Sarolangun	16	16	0
4	Batanghari	18	18	0
5	Muaro Jambi	22	22	0
6	Tanjung Jabung Timur	17	17	0
7	Tanjung Jabung Barat	16	16	0
8	Tebo	20	20	0
9	Bungo	19	19	0
10	Kota Jambi	20	20	0
11	Kota Sungai Penuh	11	8	3
	PROVINSI	207	204	3

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2021

2.3.1.1.2.5 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perumahasaitan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang

memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Perkembangan jumlah rumah sakit dan rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2016-2020 cenderung stabil, namun di tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-29 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) tentu diperlukan standarisasi dalam pelayanan. Dari 33 rumah sakit di Provinsi Jambi, seluruhnya telah terakreditasi, dengan tingkatan sebagai berikut; 42,42 persen di antaranya telah terakreditasi tingkat paripurna; 15,15 persen terakreditasi tingkat utama; 12,12 persen terakreditasi tingkat madya; dan sisanya sebanyak 30,30 persen terakreditasi lulus perdana. Kedepan rumah sakit-rumah sakit ini harus didorong untuk meningkatkan akreditasinya sehingga pelayanan FKRTL merata di seluruh kabupaten/kota. Khususnya wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang seluruh rumah sakitnya baru terakreditasi tingkat lulus perdana.

Tabel 2-26 Kondisi Eksisting Rumah sakit Pemerintah dan Swasta yang telah terakreditasi di Provinsi Jambi

No	Kode RS	Nama Rumah Sakit	Kelas	Kb/ Kota	Status	Jumlah
RUMAH SAKIT PEMERINTAH						13
1	1501012	RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci	C	Kerinci	Tingkat Madya	
2	1502014	RSUD Kol. Abundjani Bangko	C	Merangin	Tingkat Utama	
3	1503036	RSUD Prof.DR.Khatib Quzwain Sarolangun	C	Sarolangun	Tingkat Utama	
4	1509013	RSUD H.Hanafie Ma.Bungo	B	Bungo	Tingkat Utama	
5	1508013	RSUD Sultan Taha Saifudin Tebo	C	Tebo	Tingkat Madya	
6	1504015	RSUD H.Abdul madjid Batoe batang hari	C	Batang Hari	Tingkat Paripurna	
7	1505016	RSUD Ahmad Ripin Ma.Jambi	C	Muaro Jambi	Lulus Perdana	
8	1505028	RSUD Sungai Gelam Ma.Jambi	D	Muaro Jambi	Lulus Perdana	
9	1505027	RSUD Sungai Bahar Ma.Jambi	D	Muaro Jambi	Lulus Perdana	
10	1507010	RSUD KH.Daud Arif Kuala Tungkal	C	Tanjung Jabung Barat	Tingkat Paripurna	
11	1506011	RSUD Nurdin Hamzah Ma.Sabak	C	Tanjung Jabung Timur	Tingkat Madya	
12	1571012	RSUD Raden Mattaaher	B	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
13	1571158	RSU Abdul Manap Kota Jambi	C	Kota Jambi	Tingkat Utama	
RUMAH SAKIT KHUSUS (PEMERINTAH)						1
14	1571136	RSJ Daerah Provinsi Jambi	B	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
RUMAH SAKIT SWASTA						19
15	1571159	RS Islam Arafah	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
16	1571023	RS Dr.Bratnata/DKT	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
17	1571067	RS Mayang Medical Center Kota Jambi	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
18	1571147	Siloam Hospital	B	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
19	1571161	RSIA Annisa	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
20	1504017	RS Royal Prima	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
21	1571163	RS Baiturrahim	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
22	1571034	RS Bhayangkara	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
23	1571168	RS Mitra Kota jambi	C	Kota Jambi	Lulus Perdana	
24	1571162	RS Kambang	C	Kota Jambi	Tingkat Paripurna	
25	1571045	RS Theresia	C	Kota Jambi	Tingkat Utama	
26	1509029	RS Moelia Kota jambi	C	Bungo	Lulus Perdana	
27	1509028	RSIA Permatahati Ma.Bungo	C	Bungo	Lulus Perdana	
28	1509031	RS jabal Rahmah Ma.Bungo	D	Bungo	Tingkat Paripurna	
29	1503039	RS Langit Golden Medika Sarolangun	C	Sarolangun	Tingkat Madya	
30	1502015	RSU Raudah	C	Merangin	Lulus Perdana	
31	1502019	RS Merangin Medikal Centre	D	Merangin	Lulus Perdana	
32	1504018	RS Mitra Medika Batang Hari	C	Batang Hari	Lulus Perdana	
33	1508002	RS Setia Budi Tebo	D	Tebo	Lulus Perdana	

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2021

Tabel 2-27 Rasio tempat tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk di Provinsi Jambi

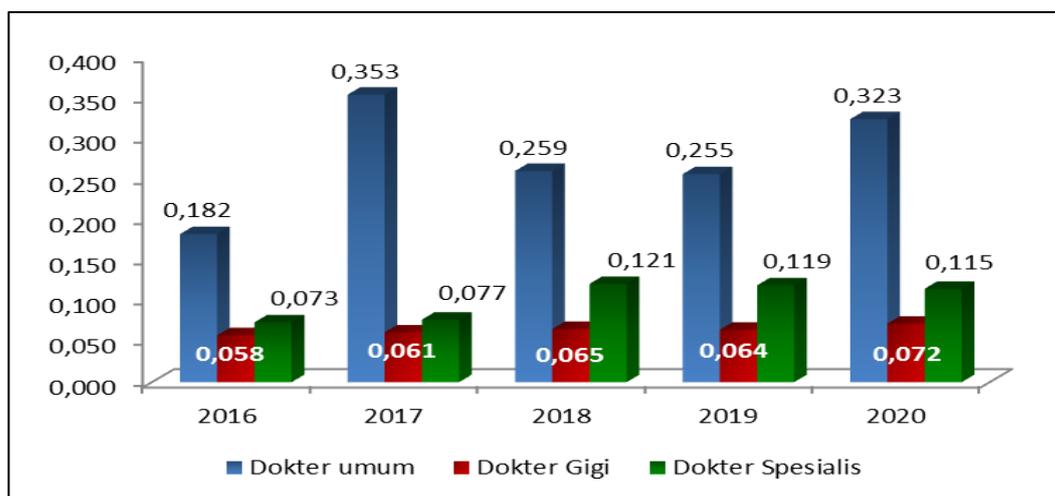
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Rasio Tempat Tidur
1	Kerinci	250.259	1	159	0,61
2	Merangin	354.052	4	325	0,92
3	Sarolangun	290.047	2	181	0,62
4	Batanghari	301.700	2	206	0,68
5	Muaro Jambi	402.017	3	194	0,48
6	Tanjung Jabung Timur	229.813	1	59	0,26
7	Tanjung Jabung Barat	317.498	2	171	0,54
8	Tebo	337.669	2	141	0,42
9	Bungo	362.363	5	387	1,07
10	Kota Jambi	606.200	17	2245	3,70
11	Kota Sungai Penuh	96.610	1	56	0,58
	PROVINSI	3.548.228	40	4.124	1,16

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2021

Jika dilihat pada tabel di atas, secara umum (provinsi) rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Provinsi Jambi masih memenuhi standar berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2021 tentang Perumahsakitan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan rumah Sakit, yaitu minimal 1:1000. Dimana rasio Provinsi Jambi adalah sebesar 1,16 atau per seribu penduduk tersedia 1,16 tempat tidur. Namun jika dilihat per kabupaten/kota terlihat bahwa hanya Kota Jambi dan kabupaten Bungo yang memenuhi standar minimal 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk, sedang sisanya belum memenuhi standar. Untuk itu perlu pengembangan sarana pendukung seperti tempat tidur ini guna mengantisipasi wabah seperti Covid-19 yang terjadi saat ini.

2.3.1.1.2.6 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Jumlah dan rasio dokter di Provinsi Jambi dapat dilihat pada data berikut ini.



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-30 Perkembangan Rasio Dokter di Provinsi Jambi tahun 2016-2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga

Kesehatan Tahun 2011 – 2025, telah ditetapkan sejumlah target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014, rasio dokter spesialis ditetapkan sebesar 10 dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio dokter umum sebesar 40 dokter umum per 100.000 penduduk, sementara pada tahun 2019 ketersediaan dokter spesialis mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 11 per 100.000 penduduk dan dokter gigi sebanyak 1,7 per 100.000 penduduk.

Jika dikonversikan, rasio dokter umum per 100.000 penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar 32,30 orang dokter umum, sementara untuk rasio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah sebesar 7,19 orang dokter gigi. Untuk rasio dokter spesialis sebesar 11,47 orang per 100.000 penduduk Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan standar ketersediaan tenaga medis terutama dokter, maka untuk dokter umum dari sisi jumlah sudah memenuhi target, demikian juga dengan dokter gigi. Namun untuk dokter spesialis masih terdapat kekurangan terutama untuk daerah-daerah terpencil. Untuk itu, ke depan perlu diprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan baik kuantitas maupun kualitas dokter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi.

2.3.1.1.2.7 Rasio Tenaga Kesehatan

Keberadaan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga Kesehatan meliputi tenaga medis, perawat dan bidan, tenaga farmasi, ahli gizi, teknisi medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Jambi berfluktuasi dengan rasio yang masih belum ideal. Hal ini berpengaruh terhadap sebaran tenaga kesehatan itu sendiri, terutama pada puskesmas-puskesmas yang merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dimana masih cukup banyak puskesmas yang belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan terutama pada wilayah-wilayah yang sulit akses transportasinya.

Tabel 2-28 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Medis	1.085	1.331	1.665	1.136	1.958
Rasio Tenaga Medis	0,314	0,379	0,466	0,031	0,055
Perawat dan Bidan	10.778	10.685	11.601	11.087	14.394
Rasio Perawat dan Bidan	3,116	3,040	3,249	3,059	4,057
Tenaga Farmasi	583	700	930	555	1.207
Rasio Tenaga Farmasi	0,169	0,199	0,260	0,153	0,340
Ahli Gizi	224	240	285	220	433
Rasio Ahli Gizi	0,065	0,068	0,080	0,061	0,122
Teknisi Medis	354	418	433	N/A	1.119
Rasio Teknisi Medis	0,102	0,119	0,121	N/A	0,315
Sanitasi	308	293	300	N/A	434
Rasio Tenaga Sanitasi	0,089	0,083	0,084	N/A	0,122
Kesmas	410	394	502	N/A	N/A
Rasio Tenaga Kesmas	0,119	0,112	0,141	N/A	N/A

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Tabel 2-29 Kondisi Eksisting Ketersediaan 9 Jenis Tenaga Di Puskesmas di Provinsi Jambi

NO	NAMA KAB/KOTA	PUSKESMAS	9 JENIS TENAGA								
			DOKTER UMUM	DOKTER GIGI	PERAWAT	BIDAN	TENAGA KEFARMAS	KESMAS	KESLING	GIZI	ATLM
1	KERINCI	21	20	9	21	21	21	20	20	21	16
2	MERANGIN	27	26	16	27	27	26	27	21	21	23
3	SAROLANGUN	16	16	10	16	16	15	14	15	13	13
4	BATANG HARI	18	17	14	17	17	15	17	14	16	14
5	MUARO JAMBI	22	22	13	22	22	20	16	18	17	20
6	TANJAB TIMUR	17	17	9	17	17	16	17	16	16	17
7	TANJAB BARAT	16	16	10	16	16	16	16	14	16	14
8	TEBO	20	20	15	20	20	19	19	14	15	14
9	BUNGO	19	19	18	19	19	18	16	17	15	15
10	KOTA JAMBI	20	20	20	20	20	20	18	20	20	20
11	KOTA SUNGAI PENUH	11	11	6	11	11	11	7	11	10	7
	JUMLAH	207	204	140	206	206	197	187	180	180	173

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2021

2.3.1.1.2.8 Jumlah Orang/Persen Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui PBI

Tujuan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Peserta PBI adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan gambaran kepesertaan di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-30 Persentase Kepesertaan JKN – KIS Provinsi Jambi
Tahun 2016 – 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN 2016 -2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	KERINCI	65,13	67,27	67,53	73,60	70,75
2	MERANGIN	37,22	42,10	46,75	53,25	60,27
3	SAROLANGUN	58,66	62,86	60,07	72,36	77,03
4	BATANGHARI	51,33	68,12	80,73	91,51	83,79
5	MUARO JAMBI	48,56	55,85	58,64	62,13	69,01
6	TANJAB TIMUR	44,22	76,74	55,69	67,53	67,23
7	TANJAB BARAT	44,53	33,54	56,64	64,56	70,85
8	TEBO	35,13	31,01	42,60	47,05	53,71
9	BUNGO	41,36	46,02	52,57	60,79	62,31
10	KOTA JAMBI	84,85	94,58	96,24	97,13	95,53
11	SUNGAI PENUH	54,62	67,55	73,01	111,75	97,65
12	PROVINSI	53,11	59,27	63,85	71,02	73,39

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2020 kepesertaan JKN – KIS Provinsi Jambi mencapai 73,39 persen, dengan persentase capaian tertinggi berada pada Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi dengan cakupan terendah berada pada Kabupaten Tebo, yang baru mencapai 53,71 persen. Oleh karena itu kedepan perlu upaya khusus untuk mendorong kabupaten/kabupaten lainnya untuk mencapai target cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage di Provinsi Jambi.

2.3.1.1.2.9 Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 tahun

Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2012 dan 2018, Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun di Provinsi Jambi menunjukkan penurunan baik pada kategori setiap hari maupun kadang-kadang. Hal ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh untuk menjaga kesehatan sejak dini. Namun demikian persentase angka ini masih cukup jika dibanding rata-rata nasional, sehingga diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan advokasi yang lebih masif lagi sehingga dapat mengimbangi terpaan iklan rokok yang sangat masif melalui berbagai media.

Tabel 2-31 Persentase Merokok Penduduk Usia 10 – 18 Tahun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN/ KOTA	2013		2018	
		Perokok saat ini		Perokok saat ini	
		Setiap hari	Kadang - kadang	Setiap hari	Kadang - kadang
1	2	3	4	5	6
1	KERINCI	27,00	1,80	23,15	4,49
2	MERANGIN	23,00	5,00	22,55	3,28
3	SAROLANGUN	21,10	5,50	8,95	4,43
4	BATANGHARI	25,00	3,90	25,38	3,10
5	MUARO JAMBI	17,60	7,80	21,44	2,83
6	TANJAB TIMUR	20,50	7,10	21,04	5,52
7	TANJAB BARAT	25,00	4,80	24,54	4,43
8	TEBO	28,70	4,40	23,61	2,02
9	BUNGO	25,20	3,30	27,16	4,54
10	KOTA JAMBI	19,50	4,10	17,91	3,79
11	SUNGAI PENUH	25,70	2,80	24,51	5,04
12	PROVINSI	22,90	4,70	21,48	3,77

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2021

2.3.1.1.2.10 Capaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi

Terdapat dua Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu: pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; serta pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Kedua SPM tersebut telah mencapai 100 persen pada tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2-32 Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran		Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.379.114	80.557	5.379.111	80.557	99,9999	100
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	183	18	183	18	100,00	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2021

2.3.1.1.3 Sosial

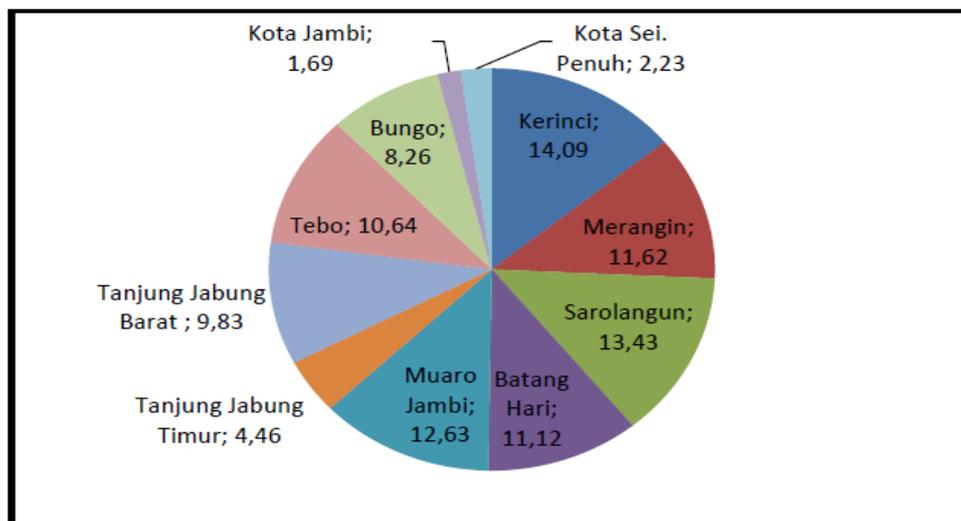
Keberhasilan pembangunan daerah selama ini tidak sepenuhnya dapat menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Konsep PMKS menunjukkan adanya kenyataan, bahwa keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menentukan kriteria masalah sosial, meliputi: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dari seluruh PMKS yang terdata di Provinsi Jambi, jumlah terbesar adalah pada kelompok fakir miskin diikuti oleh kelompok lansia terlantar dan penyandang disabilitas. Fakir miskin masih mendominasi dengan jumlah terbesar dan memiliki kecenderungan meningkat terutama seiring dengan peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2-33 Kondisi Eksisting PMKS di Provinsi Jambi

NO	JENIS PMKS	TOTAL PMKS		
		LK	PR	JML
1	Anak balita terlantar	26	19	45
2	Anak terlantar	11.247	10.191	21.438
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	90	40	130
4	Anak jalanan	68	32	100
5	Anak dengan Kedisabilatasan (Adk)	621	639	1.260
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah	60	35	95
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	51	46	97
8	Lanjut usia terlantar	10.251	9.868	20.119
9	Penyandang disabilitas	4.339	2.996	7.335
10	Tuna susila	327	352	679
11	Gelandangan	14	8	22
12	Pengemis	37	37	74
13	Pemulung	48	32	80
14	Kelompok minoritas	16	10	26
15	Eks warga binaan lembaga pemasyarakatan	471	10	481
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.316	524	1.840
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	389	238	627
18	Korban trafficking	2	0	2
19	Korban tindak kekerasan	8	9	17
20	Pekerja migran bermasalah sosial	2	71	73
21	Korban bencana alam	876	495	1.371
22	Korban bencana sosial	750	385	1.135
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	135	3.419	3.554
24	Fakir miskin	141.791	99.341	241.132
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	38	86	86
26	Komunitas adat terpencil	3.035	3.769	3.769
JUMLAH		176.008	132.652308608.660 52	60

Sumber: Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, 2021



Sumber: Jambi Dalam Angka 2020,2020

Gambar 2-31 Persentase Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Sosial per Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi

Bila dikaitkan dengan Program Penanganan PMKS secara umum ataupun program-program lain yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, program –program tersebut belum efektif atau belum dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat secara layak, sehingga dibutuhkan metode penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, meliputi: rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran.

2.3.1.1.3.1 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi

SPM Bidang sosial Provinsi Jambi terus diupayakan pemenuhannya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Provinsi. Hingga tahun 2020, tinggal satu jenis pelayanan yang belum terpenuhi, yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana yang tersedia serta keterbatasan sumberdaya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Kedepan keterbatasan tersebut perlu dicarikan solusinya sehingga Provinsi Jambi dapat memenuhi seluruh SPM bidang sosial yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

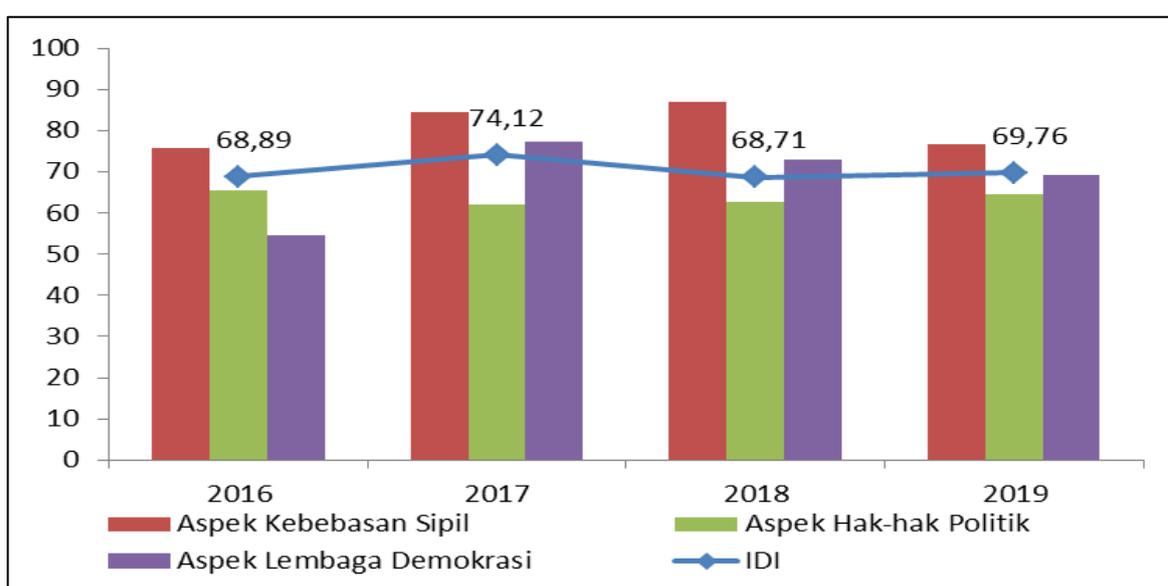
Tabel 2-34 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran		Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	120	50	120	50	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100	100	50	100	50%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	70	70	70	70	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti	100%	100%	0%	0%	0%	0%
5	Perlindungan dan jamnan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1761	1761	1761	1761	100%	100%

2.3.1.1.4 Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik. Beberapa potensi konflik dan konflik yang terjadi di Provinsi Jambi pada kurun waktu tersebut terkait dengan unjuk rasa, konflik lahan, konflik sumberdaya alam dan konflik politik, sosial dan budaya serta konflik SARA. Berdasarkan data, potensi konflik di Provinsi Jambi yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota menunjukkan tren penurunan, dimana pada tahun 2019 terdapat 62 potensi konflik, menurun jika dibandingkan potensi konflik pada tahun 2016 yang berjumlah 188 konflik. Hal ini berkat kinerja tim terpadu penanganan konflik di Provinsi Jambi yang terus melakukan pemantauan dan pemetaan konflik secara berkala.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2-32 Perkembangan Aspek IDI Provinsi Jambi

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh

sebab itu, data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pada Bulan Agustus 2020 merupakan kondisi tahun 2019. Berdasarkan data IDI di atas, terlihat bahwa capaian indeks ini berfluktuatif. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020 (kondisi tahun 2019) realisasi IDI Provinsi Jambi terealisasi sebesar 69,76 dalam skala indeks 0 sampai 100 atau meningkat 1,05 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Tingkat demokrasi di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori “sedang”.

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari ketiga aspek IDI, dua aspek mengalami penurunan dan hanya satu aspek yang mengalami peningkatan. Aspek yang mengalami peningkatan adalah aspek hak-hak politik dengan peningkatan sebesar 1,87 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan aspek lembaga demokrasi menurun sebesar 3,67 poin dan aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 10,14 poin.

Dari 28 indikator IDI, terdapat lima belas indikator yang memiliki skor dengan kategori baik atau skor di atas 80, meliputi :

- a. Indikator 1, ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- b. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
- c. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- d. Indikator 9, tindakan/ Pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya, dan
- e. Indikator 10, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
- f. Indikator 11, hak memilih atau dipilih terhambat
- g. Indikator 12, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
- h. Indikator 14, Partisipasi penduduk dalam pemilu (*voters turnout*)
- i. Indikator 17, Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
- j. Indikator 18, Netralitas penyelenggara Pemilu
- k. Indikator 19, kecurangan dalam penghitungan suara
- l. Indikator 20, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD
- m. Indikator 24, persentase perempuan pengurus partai politik
- n. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial

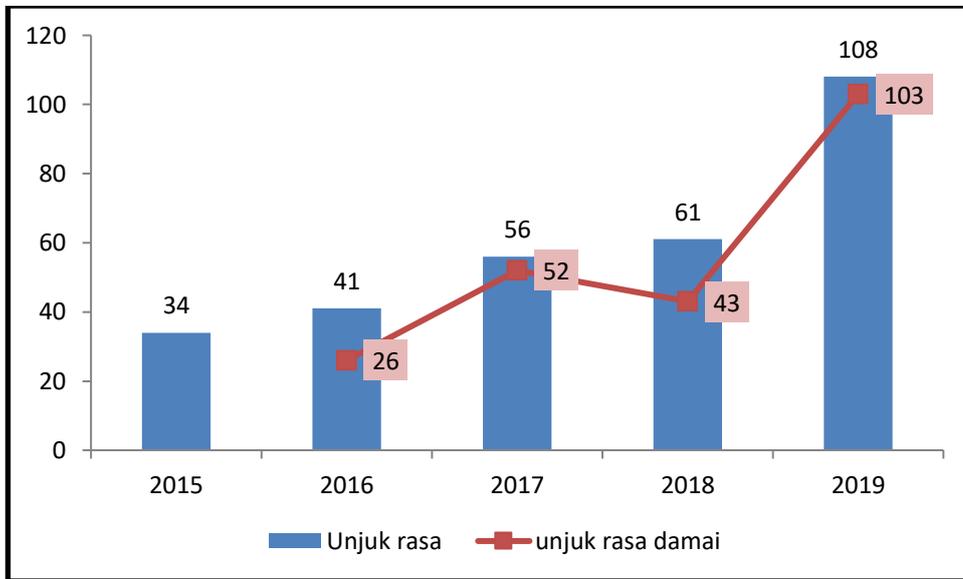
- a. Indikator 28, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Terdapat 4 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60-80) di tahun 2019. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 3, umlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- b. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- c. Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan
- d. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN

Meskipun demikian, masih terdapat 9 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2019, yang perlu perhatian khusus. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- a. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
- b. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
- c. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
- d. Indikator 7, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama
- e. Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi,
- f. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- g. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif
- h. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu
- i. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.



Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2020

Gambar 2-33 Unjuk rasa yang terjadi tahun 2015-2019

Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2019 terjadi 108 kali unjuk rasa dengan 5 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 4,67 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan

Beberapa wilayah di Provinsi Jambi termasuk wilayah rawan terhadap bencana, terutama bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Upaya pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan masyarakat di desa/kelurahan tersebut memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana, mampu mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 telah terbentuk 89 Desa Tangguh Bencana.

2.3.1.1.4.1 Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum

Jenis pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum untuk provinsi adalah pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi, dimana capaiannya menurun pada tahun 2020. Hal ini

disebabkan oleh kapasitas SDM dan sarana prasarana yang terbatas. Kedepan perlu diupayakan agar SPM bidang ini terpenuhi sebesar 100%.

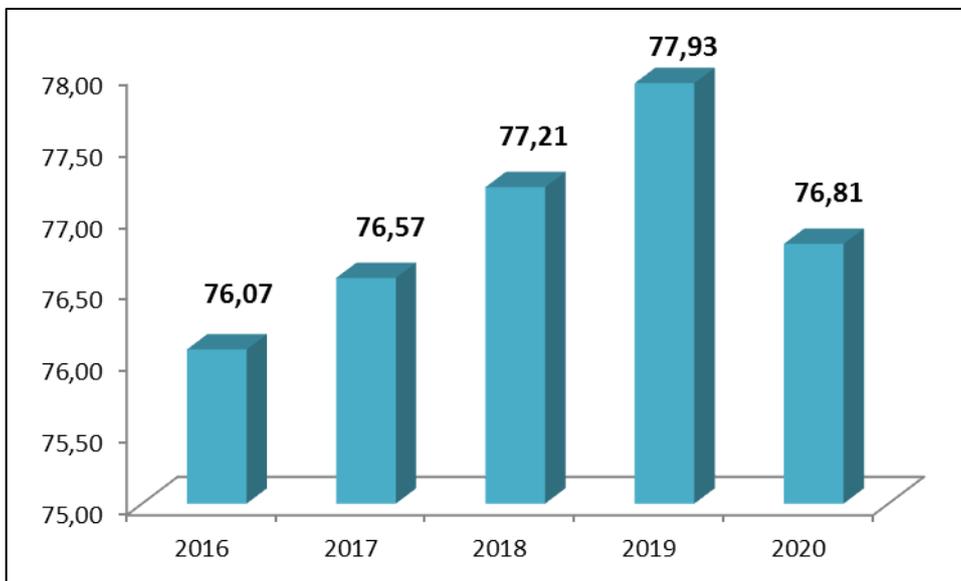
Tabel 2-35 Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran		Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	528	9	528	5	100%	55,55 %

2.3.1.1.5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Hasil yang dicapai terhadap upaya peningkatan kondisi jalan di Provinsi Jambi dengan kondisi Mantap sampai tahun 2016 adalah 75,40% atau terjadi peningkatan sebesar 6,99% dari tahun 2012 (kondisi Mantap 72,83%). Bila capaian ini dikonversikan dengan panjang jalan provinsi tahun 2016, maka capaian jalan mantap menjadi 73,94% karena beberapa ruas yang berubah status menjadi jalan nasional merupakan jalan yang kondisinya termasuk dalam kategori mantap.

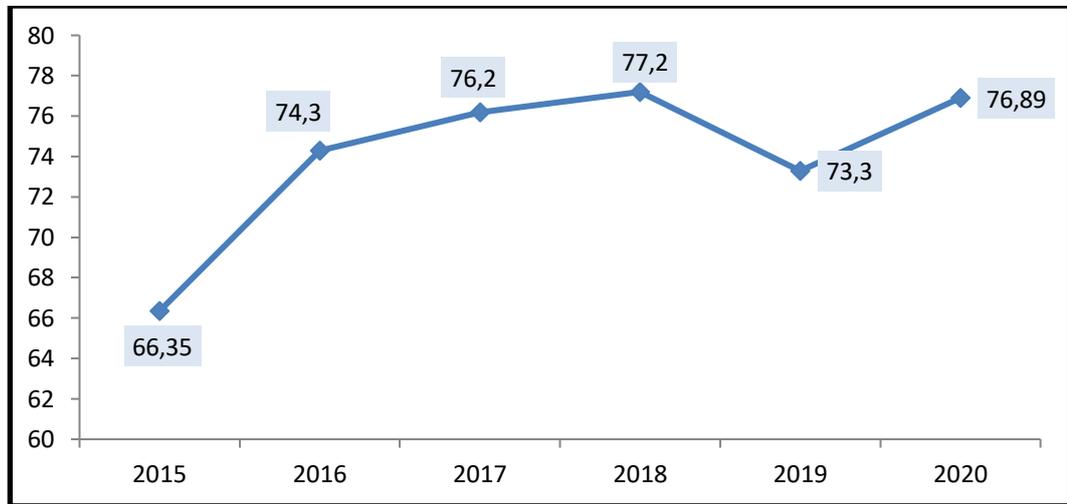


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021

Gambar 2-34 Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

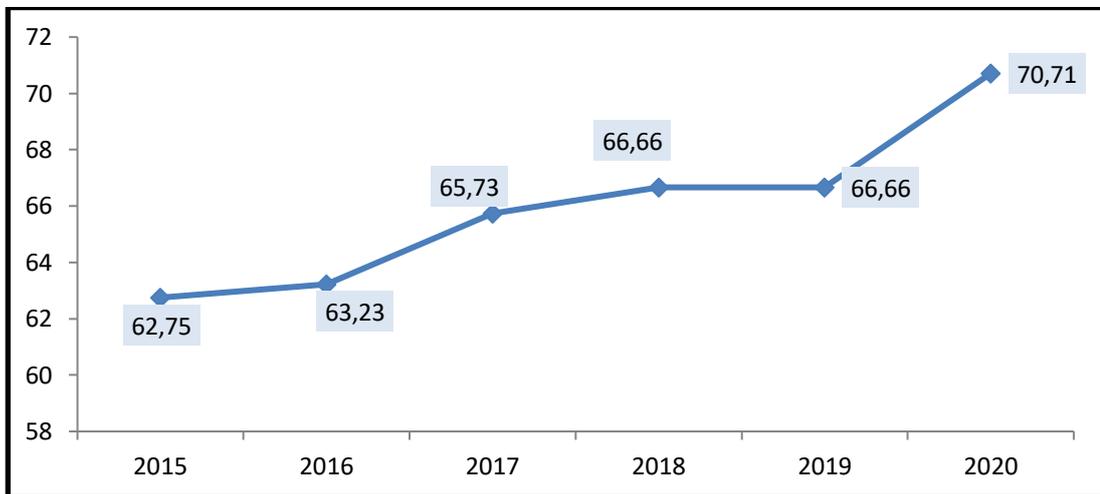
Panjang jalan Provinsi Jambi tahun 2020 adalah 1.032,88 km dan belum termasuk panjang jalan nasional dan kabupaten/kota. Panjang jalan ini tidak berubah dibandingkan dengan panjang jalan tahun 2019. Jalan Provinsi Jambi didominasi dengan kondisi jalan yang beraspal sepanjang 962,6 km, sedangkan jalan yang tidak beraspal hanya sepanjang 70,28 km. Kondisi jalan tidak beraspal 61,58 persen tanah dan sisanya berkerikil.

Sementara untuk luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2020 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Dari penanganan Daerah Irigasi tahun 2016-2020 melalui kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan rawa; pembangunan jaringan irigasi dengan fokus kegiatan pada penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan rantai saluran; serta pintu air. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dinilai efektif karena dapat meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-35 Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-36 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

Selanjutnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan yang merupakan target SDG'S Provinsi Jambi pada tahun 2015, terealisasi sebesar 62,75 persen. Capaian ini belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 68,87 persen karena beberapa faktor, diantaranya infrastruktur air minum berupa sambungan rumah yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal disisi lain *idle capacity* yang dimiliki masih sangat besar. Sampai dengan tahun 2020 realisasi capaian baru mencapai 70,71 persen, sehingga diperlukan upaya yang lebih fokus untuk mencapai target SDGs. Terkait dengan kewenangan, kedepan Pemerintah Provinsi Jambi harus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan infrastruktur ini.

RTRW Provinsi Jambi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi

Tahun 2013-2033, arah kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jambi adalah: KSP Kota Jambi – Bulian – Sengeti; KSP Perkotaan Muaro Bungo – Muaro Tebo; KSP Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi; KSP Perkotaan Kerinci – Sungai Penuh; KSP Bangko – Sarolangun; KSP Kawasan Candi Muaro Jambi; dan KSP Kawasan Panas Bumi Kerinci – Merangin. Saat ini RTRW tersebut sedang dalam tahap peninjauan kembali, untuk menyesuaikan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut *progress* revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Sampai dengan saat ini, hanya satu kabupaten yang telah menyelesaikan dan menetapkan revisi RTRW yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 tahun 2020.

Tabel 2-36 *Progress Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi*

NO	PROV./KAB./KOTA	RTRW		
		PERDA RTRW	Revisi Perda RTRW	PROGRESS DETAIL
Provinsi Jambi		No.10/2013	Sedang revisi	Perda Baru dan Integrasi Dengan RZWP3K
Kabupaten				
1	Kerinci	No.24/2012	Sedang revisi	Penyusunan Perda Baru
2	Merangin	No.4/2014	Sedang revisi	Penyusunan Perda Baru
3	Sarolangun	N0.2/2014	Sedang revisi	perbaikan Materi Teknis
4	Batanghari	No.16/2013	Sedang revisi	Persiapan Penyusunan Materi Teknis
5	Muaro Jambi	No.2/2014	Sedang revisi	Proses Persetujuan Substansi (Rekom BIG)
6	Tanjung Jabung Timur	No.11/2012	No.3/2020	PERDA
7	Tanjung Jabung Barat	No.12/2013	Sedang revisi	Proses Persetujuan Substansi (Rekom BIG)
8	Tebo	No.6/2013	Sedang revisi	Penyusunan Perda Baru
9	Bungo	No.9/2013	Sedang revisi	Persiapan Penyusunan Materi Teknis
Kota				
1	Kota Jambi	No.9/2013	Sedang revisi	Proses Persetujuan Substansi (Rekom BIG)
2	Kota Sungai Penuh	No.5/2012	Sedang revisi	perbaikan Materi Teknis

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2021

Tabel 2-37 Progress Penetapan RDTR Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

NO	PROV./KAB./KOTA	NAMA RDTR	TAHUN PENYUSUNAN	PROGRES DETAIL	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Kota					
1	Kota Jambi	RDTR Kota Jambi	2020	Persiapan persub namun menunggu Persub RTRW Kota Jambi	Rencana akan mengajukan Persub awal Tahun 2022
2	Kota Sungai Penuh	RDTR Kota Sungai Penuh	2020	Sudah Perda Tahun 2020	
Kabupaten					
1	Kerinci	Perkotaan Jujun		Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		Perkotaan Hiang		Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		Perkotaan Semurup		Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		Perkotaan Siulak Deras		Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
2	Merangin	RDTR Perkotaan Bangko	2019	Sedang proses pengajuan pra loket	Rencana akan mengajukan Persub awal Tahun 2022
3	Sarolangun	-	-	-	-
4	Batanghari	-	-	-	-
5	Muaro Jambi	RDTR Jaluko	2021	Sedang proses validasi KLHS	Rencana akan mengajukan persub tahun 2022
6	Tanjung Jabung Timur	RDTR Perkotaan Muara Sabak Barat	2018	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		RDTR Perkotaan Pandan Jaya Kecamatan Geragai	2018	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi

NO	PROV./KAB./KOTA	NAMA RDTR	TAHUN PENYUSUNAN	PROGRES DETAIL	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		RDTR Perkotaan Muara Sabak Timur	2019	-	-
		RDTR Perkotaan Rantau Indah Kecamatan Dendang	2018	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		RDTR Perkotaan Nipah Panjang	2020	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		RDTR Perkotaan Rantau Rasau	2019	-	-
		RDTR Perkotaan Berbak	2020	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
7	Tanjung Jabung Barat	RDTR Perkotaan Tebing Tinggi		Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		RDTR Perkotaan Teluk Nilau	2019	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
		RDTR Perkotaan Bram Itam Kiri	2019	Persiapan pembahasan dengan Provinsi Jambi	Rencana pembahasan Di Provinsi Jambi
8	Tebo	-	-	-	-
9	Bungo	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2021

Sementara *progress* penetapan RDTR Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sampai saat ini baru satu RDTR yang telah ditetapkan yaitu RDTR Kota Sungai Penuh, sedang lainnya masih berproses. Selain itu masih terdapat empat kabupaten yang belum memproses RDTR, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Keempat Kabupaten ini akan didorong untuk segera melakukan penyusunan dan penetapan Perda RDTR agar memiliki acuan spasial yang jelas dalam membangun daerahnya.

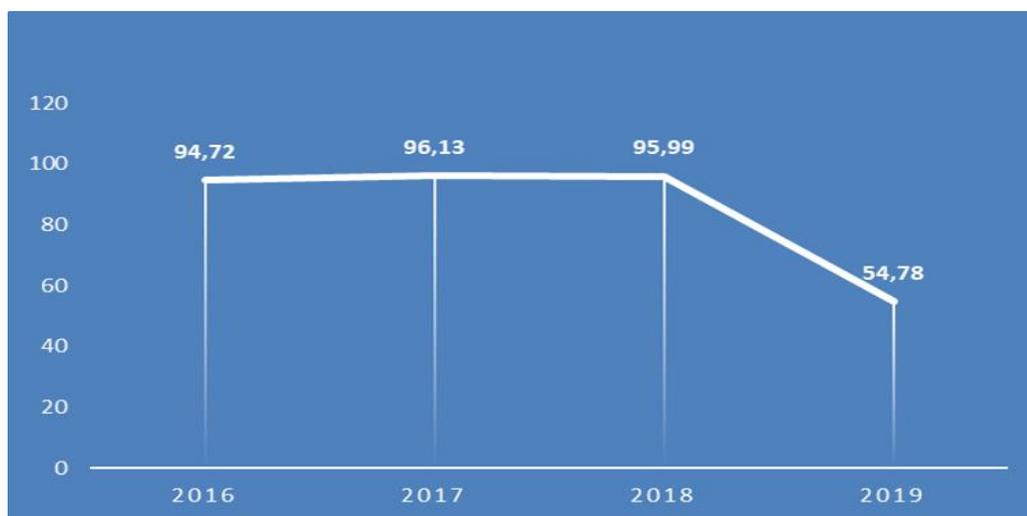
2.3.1.1.5.1 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat dua jenis layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Provinsi, yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Sampai saat ini Provinsi Jambi belum memiliki SPAM dan SPALD regional sehingga belum dapat melaksanakan standar layanan ini.

2.3.1.1.6 Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berfokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dalam meningkatkan standar hidup 40% terbawah, tantangan yang dihadapi adalah akses terhadap hunian layak.

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini menunjukkan persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Jambi.

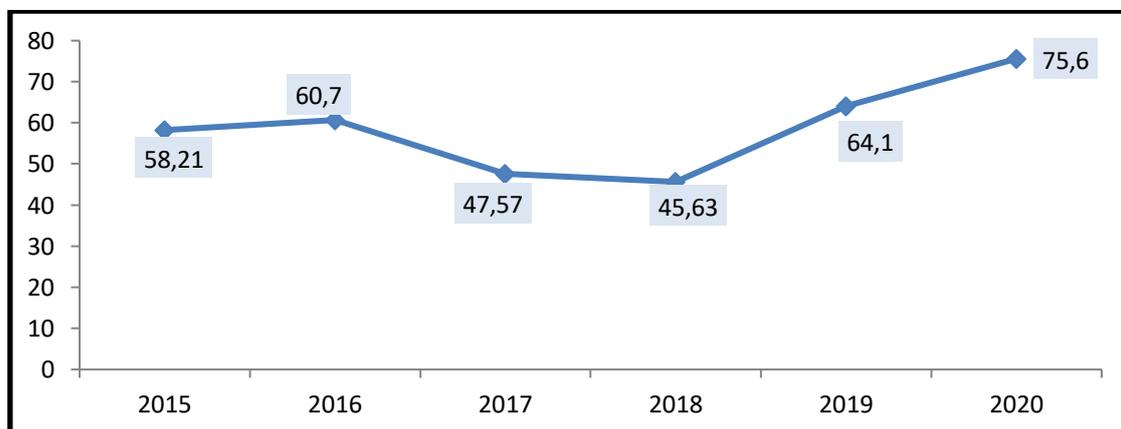


Sumber: BPS, 2020

Gambar 2-37 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi 2016-2019

Pada tahun 2016 rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses hunian layak sebesar 94,72 persen, ini merupakan hal yang baik, karna hampir keseluruhan rumah tangga memiliki akses hunian layak, tetapi pada tahun 2019 akses hunian layak bagi rumah tangga turun menjadi 54,78 persen. Data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS pada November tahun 2020 adalah kondisi 2019, sehingga tidak diketahui bagaimana akses hunian layak ini pada tahun 2020. banyak hal yang menyebabkan turunnya akses hunian layak ini antara lain kepadatan penduduk yang terus meningkat, penyediaan sumber air yang aman, dan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, untuk itu kedepan diharapkan Pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk, memperbanyak ketersediaan sumber air aman, dan meningkatkan prekonomian masyarakat.

Sanitasi layak merupakan satu hal penting yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Suatu rumah tangga dikatakan memiliki akses ke sanitasi layak jika fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Gambar di bawah menunjukkan bahwa sekitar 75,60 persen rumah tangga di Provinsi Jambi pada tahun 2020 memiliki akses ke sanitasi layak. Persentase rumah tangga di perkotaan dengan akses ke sanitasi layak lebih tinggi yaitu 83,49 persen dibandingkan dengan di perdesaan (57,28 persen) Rendahnya persentase tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak khususnya di perdesaan.



Sumber : Dinas PUPR Prov. Jambi, 2021

Gambar 2-38 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tabel 2-38 Kawasan Kumuh 10 – 15 Ha di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	Kota Jambi (2016)	Kawasan	Orang Kayo Hitam	10,06
			Pakuan Baru	13,93
			Murni	14,04
			Teluk Kenali	14,16
			Kenali Besar	13,64
			Jelmu	12,14
			Tengah	14,26
2	Tanjung Jabung Timur (2014)	Geragai	Pandan Jaya	10,93
3	Batanghari (2019)	Muara Bulian	Muara Bulian	11,07
		Muara Tembesi	Kampung Baru	10,51
4	Tebo (2019)	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	14,29
		Tebo Ulu	Pulau Temiang	13,5
5	Tanjung Jabung Barat (2017)	Bram Itam	Bram Itam Kiri	10,05
6	Sarolangun (2014)	Singkut	Sungai Benteng	11,12
		Pauh	Pauh	10,93
7	Kerinci (2014)	Siulak Mukai		12,19
8	M. Jambi (2021)	Kumpeh Ulu	Desa Pemunduran	10,34
TOTAL				207,16

Kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jambi berdasarkan SK kawasan kumuh Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan adalah seluas 1.355,64 Ha dengan kawasan terluas berada pada Kota Jambi yaitu seluas 689,1 Ha atau 50,8 persen dari total kawasan kumuh Provinsi Jambi. Sedangkan Kabupaten dengan kawasan kumuh terkecil adalah Kabupaten Bungo, yaitu seluas 17,47 Ha atau sebesar 1,3 persen dari total kawasan kumuh Provinsi Jambi. Namun total kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi dengan luasan 10-15 Ha adalah seluas 207,16 Ha.

2.3.1.1.6.1 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2-39 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran		Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10	2.268	10	0	100%	0%
2.	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	282	282	282	282	100%	100%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jenis layanan dasar yang belum tercapai adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya data perumahan yang akurat dan mutakhir serta ketergantungan daerah yang tinggi terhadap program rehabilitasi rumah dari pusat.

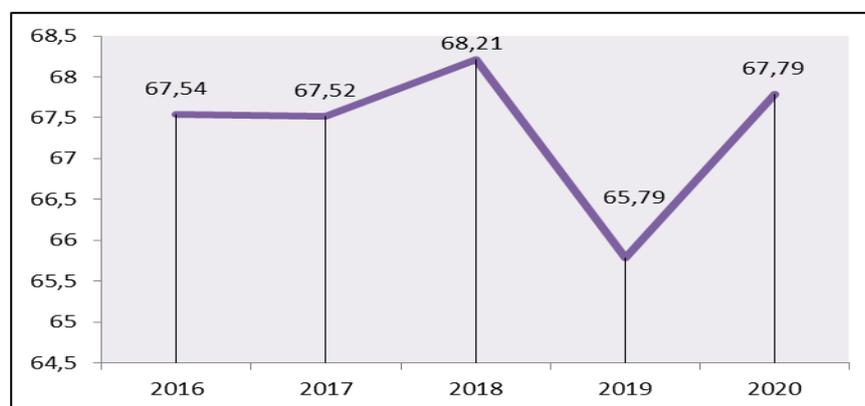
2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 78.000 orang dibanding Agustus 2019. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2020 adalah sebesar 67,79% atau memperlihatkan peningkatan sebesar 2,0 % dibanding Agustus 2019 yang menunjukkan data sebesar 65,79%. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya – upaya perluasan lapangan pekerjaan belum seimbang dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, sehingga harus dilakukan peningkatan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan penumbuhan

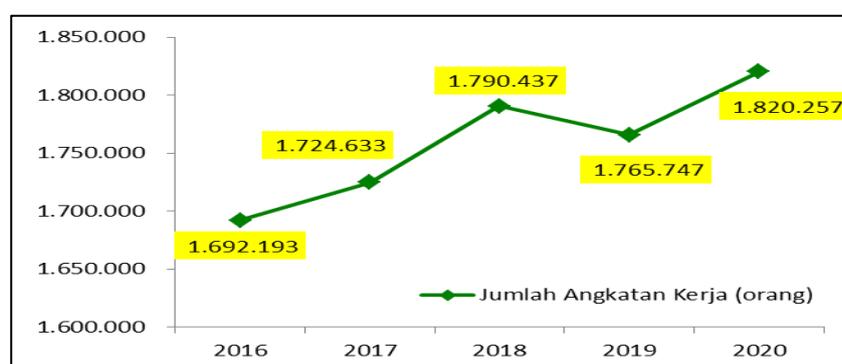
wirausaha baru untuk menampung angkatan kerja yang ada di masa yang akan datang.

Bila dilihat tren sektoral selama Agustus 2019 – Agustus 2020, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada sektor pertambangan dan penggalian (1,22 persen poin), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,52 persen poin), dan sektor transportasi dan pergudangan (0,27 persen poin), Perdagangan besar dan eceran (0,12 persen poin), Jasa keuangan dan asuransi (0,11 persen poin), Pengadaan listrik dan gas (0,06 persen poin), serta Jasa lainnya (0,01 persen poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan terutama adalah sektor industri pengolahan (0,53 persen poin), sektor Administrasi pemerintahan (0,54 persen poin), sektor Konstruksi (0,39 persen poin) sektor Jasa Pendidikan (0,36 persen poin); Penyediaan Akomodasi makan dan minum (0.24 persen poin); Jasa Perusahaan (0.16 persen poin); serta Jasa Kesehatan (0,07 persen poin).



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020



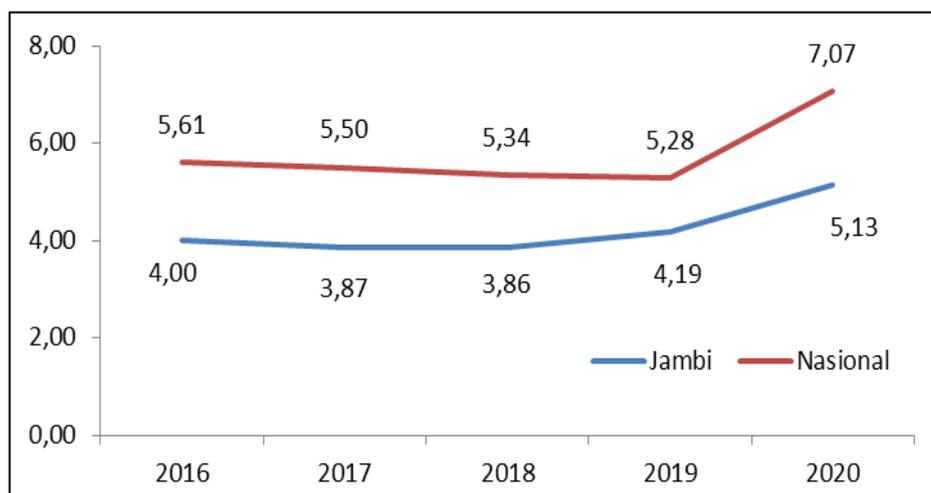
Sumber: Jambi Dalam Angka, BPS, 2021

Gambar 2-40 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tingkat pendidikan angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jambi adalah tamat SD kebawah, namun kondisi ini terus membaik sehingga

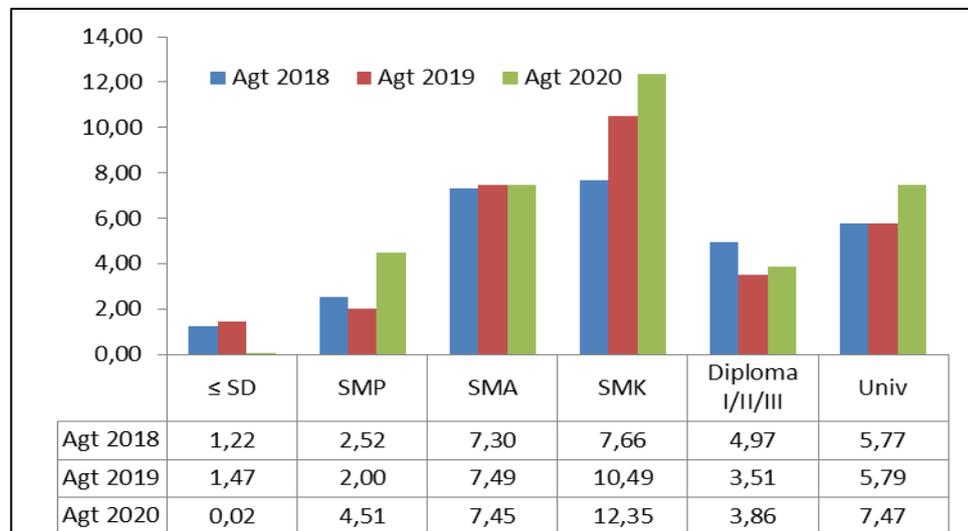
terjadi penurunan secara signifikan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah diiringi peningkatan jumlah angkatan kerja lulusan SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi. Perbaikan kondisi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan produktifitas angkatan kerja.

Untuk mendorong tingkat produktifitas, maka angkatan kerja akan diarahkan kepada pendidikan kejuruan, sehingga angkatan kerja yang tamat SLTA sederajat akan memiliki keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian diharapkan tenaga kerja tersebut akan mampu bersaing tidak hanya di Provinsi Jambi, akan tetapi dalam wilayah yang lebih besar termasuk dalam memenuhi permintaan pasar tenaga kerja



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-41 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-42 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2016 – 2020

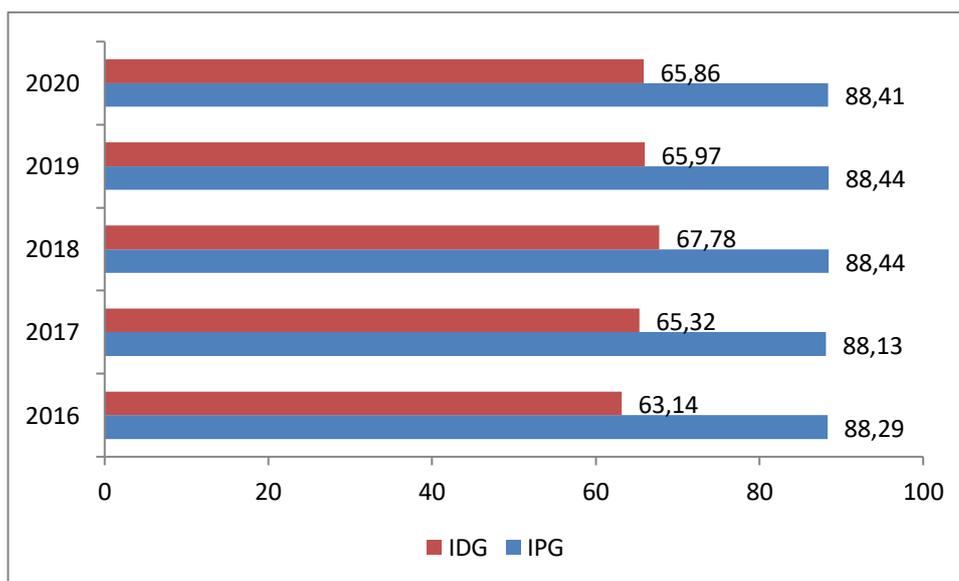
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dari tahun 2016-2018 cenderung menurun, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,19 persen,. Tingkat pengangguran tersebut didominasi oleh penganggur dengan pendidikan SMA/SMK, sementara yang paling sedikit adalah penganggur dengan pendidikan SD kebawah.

Selanjutnya, pada tahun 2020, TPT Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 5,13 pada Agustus 2020 terutama akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan IV tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,703 ribu, terdapat 252,8 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 9,35 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,07 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 6,03 persen. Berkurangnya jam kerja merupakan dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 217,74 ribu orang terdampak. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 18,79 ribu orang atau sekitar 20

persen terhadap total penganggur (94 ribu orang) di Provinsi Jambi. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

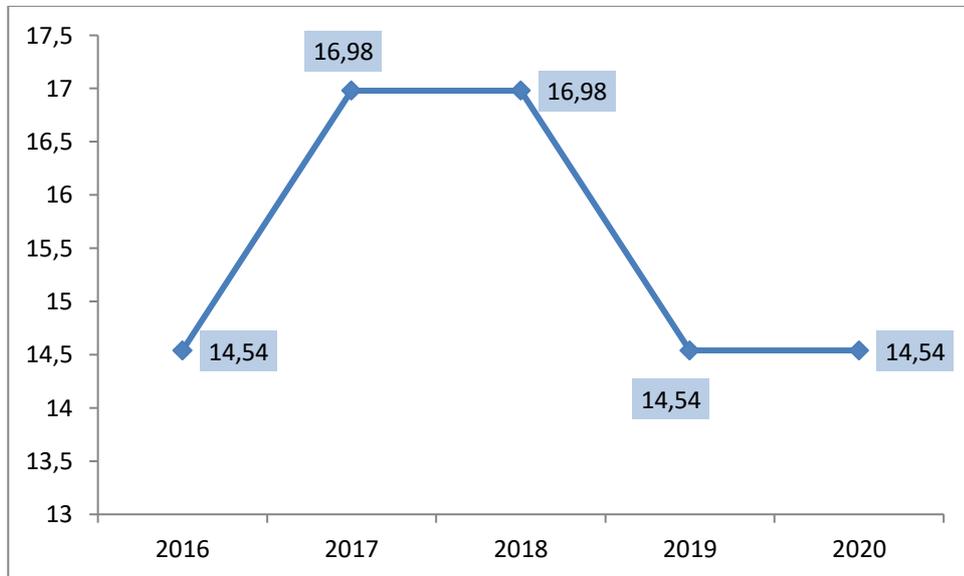
Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung menguntungkan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi yang masih tergolong rendah. Selain itu capaian yang berfluktuatif juga menunjukkan bahwa Provinsi Jambi belum memiliki pondasi yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pembangunan gender dan pemberdayaan gender.



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-43 DG dan IPG Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

Disamping itu, partisipasi perempuan dalam legislatif pada tahun 2016-2020 juga masih rendah, kuota 30 persen keterwakilan perempuan tidak tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 2-44 Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif di Provinsi Jambi 2016-2020

Sehubungan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2020, terdapat 115 kasus yang ditangani oleh Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jambi, yang terdiri dari 54 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di ranah rumah tangga dan sebanyak 61 kasus terjadi di ranah publik.

2.3.1.2.3 Pangan

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi tahun 2016-2019, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita telah melebihi angka kecukupan gizi untuk energi di tingkat ketersediaan ideal sebesar 2.400 Kkal/kap/Hari.

Tabel 2-40 Perkembangan Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan NBM Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)
1	2016	2.854
2	2017	3.425
3	2018	3.134
4	2019	3.047
5	2020*	3.047

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

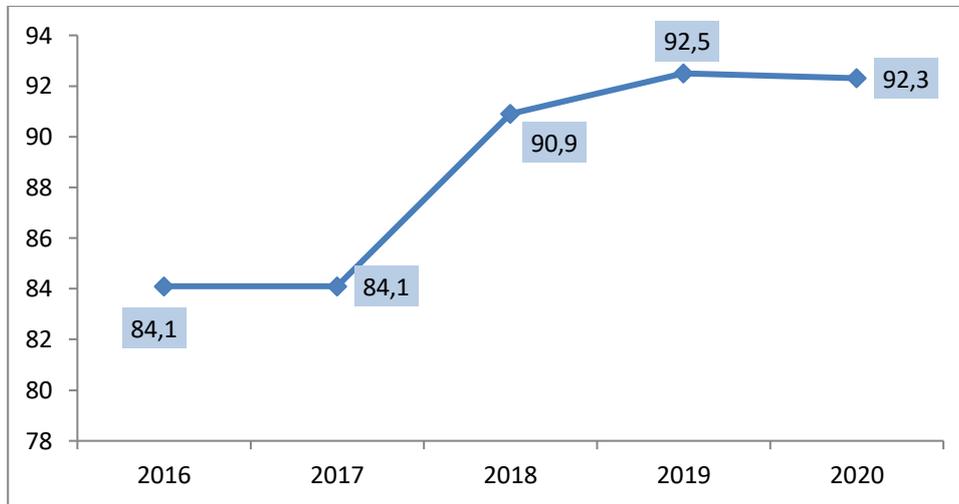
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi telah melebihi ketersediaan energi ideal, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Di tahun 2020, komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah, sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Tabel 2-41 Kondisi Ketersediaan Energi Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/kap/hari)
1	Padi-padian	1.520	1.200
2	Umbi-umbian	98	144
3	Pangan Hewani	183	288
4	Minyak dan Lemak	712	240
5	Buah Biji/Berminyak	208	72
6	Kacang-kacangan	56	120
7	Gula	141	120
8	Sayuran dan Buah	128	144
9	Lain-lain	-	72
	JUMLAH	3.047	2.400

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi dapat terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2016-2020 mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian) yaitu lebih dari 50 persen.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Gambar 2-45 Perkembangan Skor PPH Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020

2.3.1.2.4 Pertanian

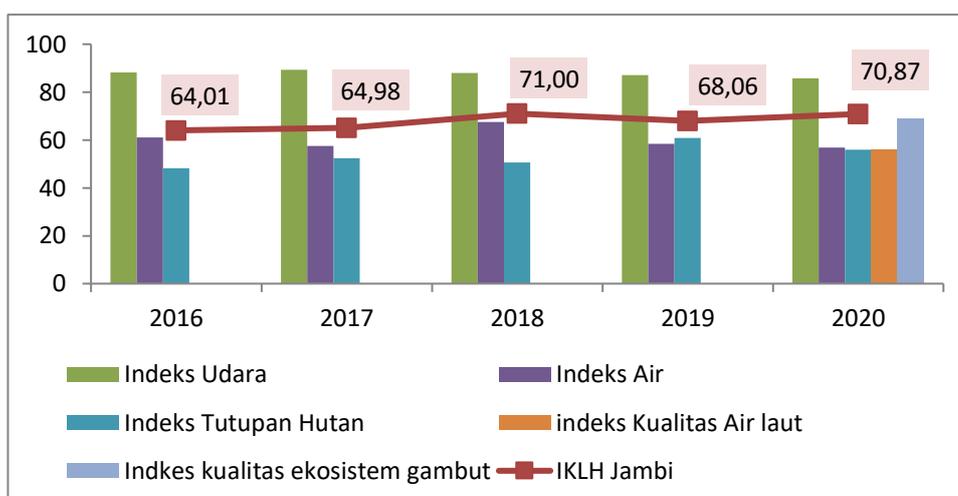
Urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penataan pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Provinsi Jambi. Untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi dalam hal ini tanah serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan. Selain itu, pelaksanaan urusan ini juga dilakukan dalam rangka pengakuan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kinerja urusan lingkungan hidup Provinsi Jambi dapat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, dan merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Penghitungan IKLH sejak tahun 2015 telah menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan pada penghitungan IKLH tahun-tahun sebelumnya. Penyempurnaan ini telah mempertimbangkan dinamika vegetasi setiap tahun, kondisi habitat, kondisi tutupan lahan di luar kawasan hutan, dan kondisi tutupan lahan

di sempadan sungai. Untuk tahun 2020, IKLH dihitung menggunakan 4 indikator yaitu indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

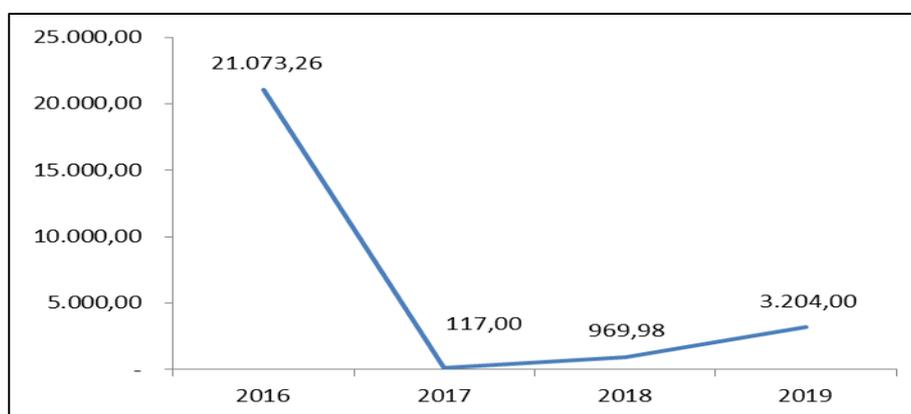


Sumber : Kemen.LHK, 2021

Gambar 2-46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rentang waktu 2016 – 2020 selalu menunjukkan angka yang berfluktuasi. Ketiga indeks yang diukur sedikit mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan karena kebakaran lahan dan hutan cukup besar sehingga mempengaruhi kualitas udara dan aktivitas ekonomi penduduk Provinsi Jambi. Pada saat terjadi kabut asap tersebut, pemantauan terhadap parameter PM10 dilakukan dengan menggunakan alat AQMS (*air quality monitoring system*) mobile dari P3E Sumatera. Data PM10 tersebut kemudian dikonversikan ke ISPU sebagai bentuk informasi kualitas udara sesuai dengan KepMenLH Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya-upaya perbaikan perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 cukup berat karena musim kemarau yang panjang.



Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2020
 Gambar 2-47 Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2019

Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 3.204 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 0,37 persen. Sementara itu untuk pemantauan kualitas air, secara berkala dilakukan sampling air sungai lintas kabupaten/kota Provinsi Jambi dengan lokasi sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel 2-42 Data lokasi Sampling Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

No	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu ke Hilir)
1	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci
2	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin
3	Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin
4	Batang Limun	Desa Pulau Pandan, Kab. Sarolangun
5	Batang Tembesi	Desa batu Kucing, Kab. Sarolangun
6	Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang, Kab. Sarolangun
7	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang, Kabupaten Bungo
8	Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo
9	Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo
10	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang, Kab. Tebo
11	Batang Tabir	Dusun Tuo Peninjauan, Kab. Batang Hari
12	Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi, Kab. Batang Hari

Sumber: Dinas LH Prov. Jambi, 2021

Menurut PP No 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Saat ini kegiatan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan belum diberi izin dilakukan di Provinsi Jambi, sehingga harus dibawa ke perusahaan jasa pengolahan yang berada di Pulau Jawa. Untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, KLHK telah memberi izin 5 perusahaan jasa pengelola LB3 di Provinsi Jambi (3 perusahaan transporter dan 2 perusahaan pengumpul), sedangkan kegiatan pengurangan dan penyimpanan (sementara) diwajibkan kepada sumber penghasil LB3 tersebut.

Penanganan limbah medis khususnya Covid-19 menjadi sorotan sejak terjadinya pandemi Covid-19. Arahan KLHK untuk penanganan limbah medis dan limbah Covid-19 menekankan agar limbah tersebut dikurangi dan dikelola semaksimal mungkin di sumber penghasil (PermenLHK Nomor 56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 dari Fasyankes). Berdasarkan data yang dikumpulkan DLH Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, timbulan limbah medis pada tahun 2019, serta estimasinya pada tahun 2020 (dengan mempertimbangkan peningkatan limbah medis covid-19) adalah sebagai berikut:

Tabel 2-43 Data Timbulan Limbah B3 medis tahun 2019 dan estimasi LB3 medis tahun 2020 di Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Tahun 2019			Tahun 2020		
		LB3 RS /Kg/Hari	LB3 Fasyankes /Kg/Hari	TOTAL LB3/Kg/Hari	LB3 RS /Kg/Hari	LB3 Fasyankes /Kg/Hari	TOTAL LB3/Kg/Hari
1	Kota Jambi	645,15	591,60	1.236,75	1.290,30	1.183,20	2.473,50
2	Tebo	42,00	177,50	219,50	84,00	355,00	439,00
3	Sarolangun	69,00	291,20	360,20	138,00	582,40	720,40
4	Batang Hari	33,20	554,40	587,60	66,40	1.108,80	1.175,20
5	Muaro Jambi	92,40	333,00	425,40	184,80	666,00	850,80
6	Tanjung Jabung Barat	35,00	695,50	730,50	70,00	1.391,00	1.461,00
7	Tanjung Jabung Timur	44,00	166,00	210,00	88,00	332,00	420,00
8	Merangin	126,00	335,00	461,00	252,00	670,00	922,00
9	Bungo	145,30	238,00	383,30	290,60	476,00	766,60
10	Kerinci	25,00	45,00	70,00	50,00	90,00	140,00
11	Sungai Penuh	12,00	22,00	34,00	24,00	44,00	68,00
	TOTAL SUMBER	1.269,05	3.449,20	4.718,25	2.538,10	6.898,40	9.436,50

Sumber: Dinas LH Provinsi Jambi, 2021

Selain limbah yang dihasilkan di RS dan Fasyankes, limbah Covid-19 yang dihasilkan di tempat-tempat pasien Covid-19 melakukan isolasi mandiri tidak terpantau dan tidak dikelola sebagaimana mestinya sesuai SE MENLHK No. 02/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah

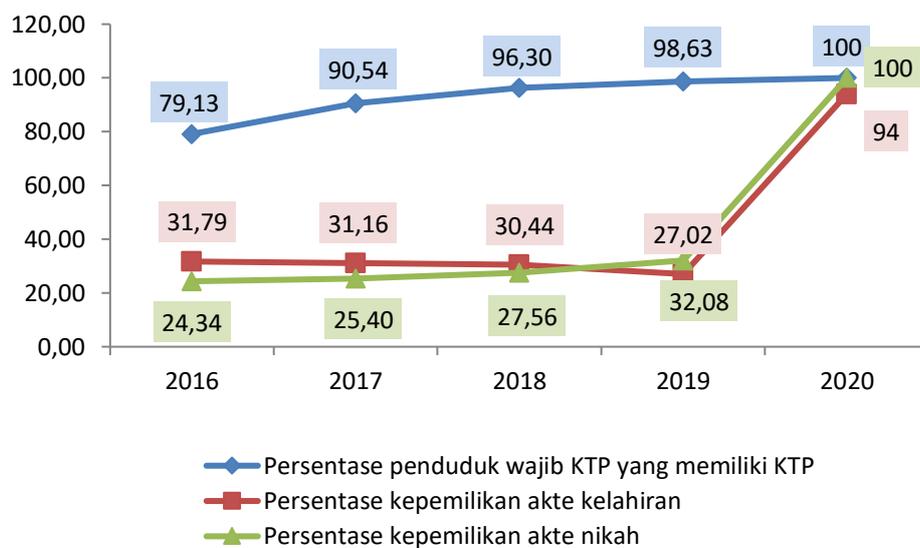
B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19, Surat MENLHK No. 167 tahun 2020 perihal Pengelolaan LB3 Medis pada Fasyankes Darurat Covid-19, dan Surat Dirjen PSLB3 No. 194 Tahun 2020 terkait Penanganan Limbah Infeksius Covid. Pendataan limbah medis di klinik dokter atau bidan juga belum terdata sehingga dapat dikatakan potensi limbah medis jauh di atas angka tertera pada tabel di atas.

Potensi timbunan sampah Provinsi Jambi mencapai 1.746 ton per hari sehingga Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam kebijakan strategi pengelolaan sampah daerah (Jakstrada) sebanyak 173,2 ton per hari. Timbunan sampah yang cukup besar tersebut akibat dari pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2020 sekitar 1,34 persen per tahun, sehingga berimplikasi pada peningkatan timbunan sampah di masing-masing daerah. Provinsi Jambi memiliki 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dimanfaatkan oleh 11 kabupaten dan kota, yaitu lima unit TPA *control landfill*, tiga unit TPA *sanitary landfill*, dan dua unit TPA *open dumping*. Timbunan sampah terbesar dihasilkan oleh Kota Jambi sekitar 418,91 ton per hari. Pada 11 kabupaten dan kota di Jambi telah dibentuk 51 unit bank sampah dan 14 tempat pengelolaan sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R). Pemanfaatan bank sampah dan TPS 3R tersebut dapat mendukung capaian target Jakstrada Provinsi Jambi, khususnya pengurangan sampah. Selain itu pemanfaatan bank sampah juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah sebagai tindak lanjut upaya pengurangan sampah di daerah.

2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase penduduk berumur 17 tahun keatas yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Provinsi Jambi pada tahun 2020 meningkat signifikan dibanding tahun 2016, dari 79,13 persen menjadi 100 persen di tahun 2020. Demikian pula pada kepemilikan akte kelahiran dibandingkan jumlah penduduk telah memperlihatkan cakupan yang baik, dimana sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 94 persen, dari sebelumnya pada tahun 2016 baru mencapai 31,79 persen. Kepemilikan akta nikah juga telah mencapai 100 persen pada tahun 2020. Capaian pada urusan administrasi kependudukan dan

catatan sipil ini harus dipertahankan terus mengingat data kependudukan sangat penting dalam berbagai urusan yang lain.

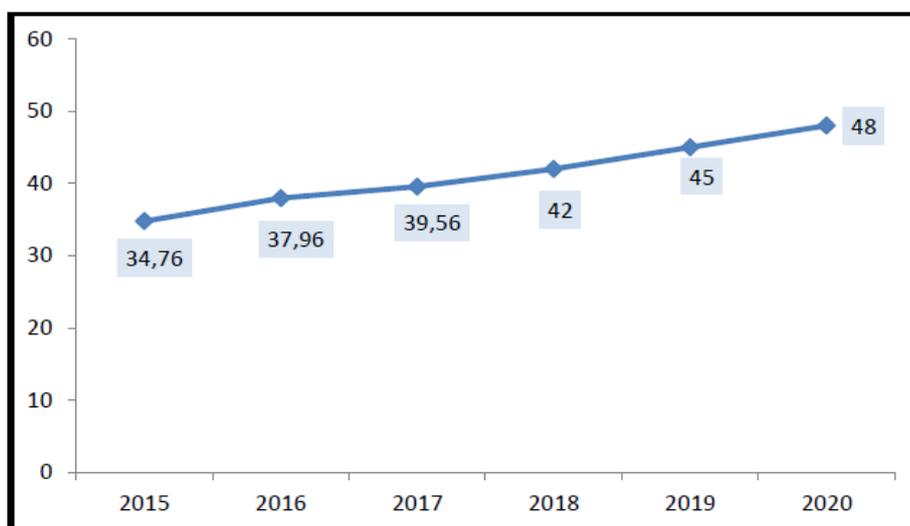


Sumber: Dinas Sosdukcapil Prov. Jambi, 2021
 Gambar 2-48 Perkembangan capaian urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan artinya memiliki atau mempunyai daya. Dengan demikian pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa/kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu masyarakat diharapkan mampu memetakan dan mengoptimalkan potensi diri dan lingkungannya, serta mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri.



Sumber: DP3AP2, 2021

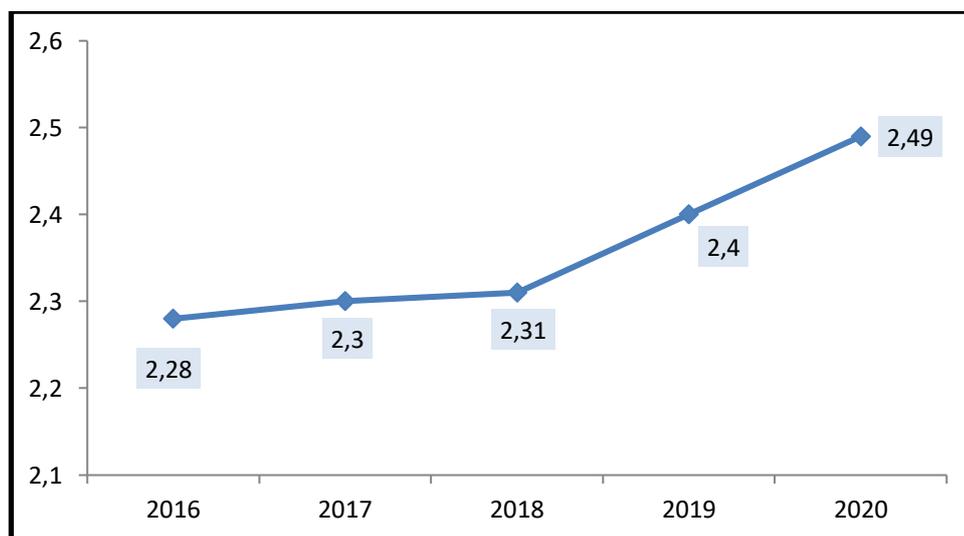
Gambar 2-49 Persentase Aparatur Desa yang telah diberikan Bimtek RPJMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015-2020

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat gambar di atas. Hingga tahun 2020, persentase aparatur desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya baru mencapai 48 persen, sehingga perlu upaya lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang karena hal ini berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, salah kawasan perdesaan di Provinsi Jambi ditetapkan menjadi lokus prioritas KPPN. Kawasan perdesaan tersebut adalah Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi yang terletak pada Desa Penyengat Olak, Desa Kademangan, Desa Senaung, Desa Setiris, Desa Mudung Darat dan Desa Danau Kedap. Desa-desanya tersebut berada pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Maro Sebo. Dalam rangka pengembangan kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agribisnis ini, maka telah dibentuk Bumdes Rezeki Usaha Bersama sebagai lembaga yang didorong untuk mewujudkannya.

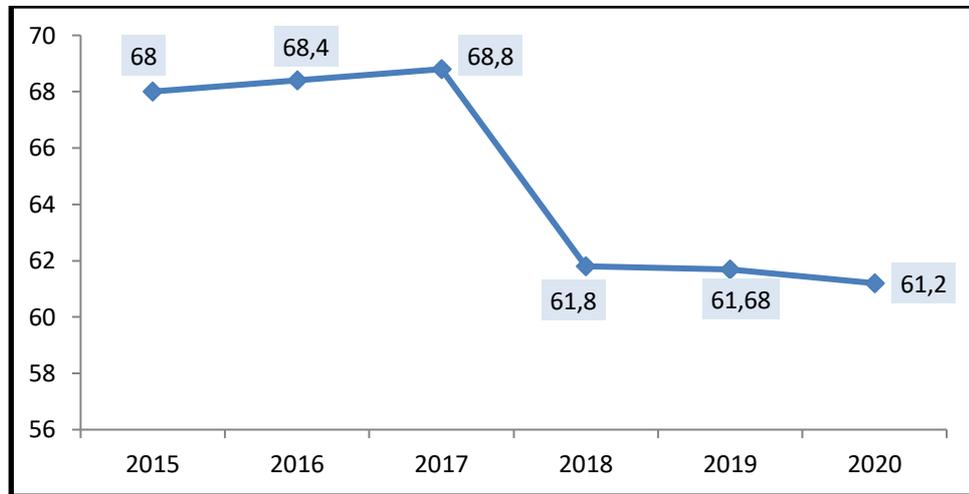
2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana. Sebagaimana ketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, dan berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.



Sumber: DP3AP2, 2021
Gambar 2-50 Total Fertility Rate Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka pemerintah menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan Kesehatan Reproduksi saat ini tidak hanya di tujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.



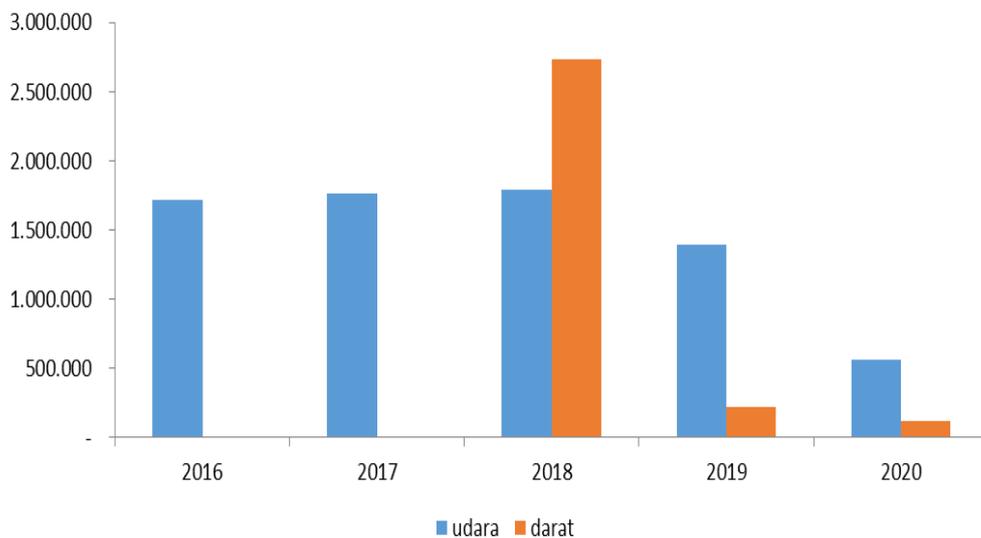
Sumber: DP3AP2 Prov. Jambi, 2021

Gambar 2-51 Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) di Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2020

Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi tahun 2016-2021 menunjukkan trend peningkatan hingga mencapai 2,49 pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa rata-rata perempuan usia subur di Provinsi Jambi memiliki anak lebih dari 2 orang. Salah satu pemicu peningkatan TFR ini adalah tren penurunan pemakaian kontrasepsi yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Kedua hal ini patut diwaspadai dan diupayakan pengendaliannya segera karena angka kelahiran yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masalah lainnya, seperti angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, kualitas sumberdaya manusia hingga daya saing.

2.3.1.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Provinsi Jambi terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2018, padahal bila dilihat dalam kurun waktu 2015-2018 tren yang terlihat adalah meningkat. Penurunan arus penumpang yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh bencana asap yang melanda Jambi sehingga transportasi penumpang khususnya udara dan laut mengurangi frekuensi penerbangan. Sementara penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi Covid-19.



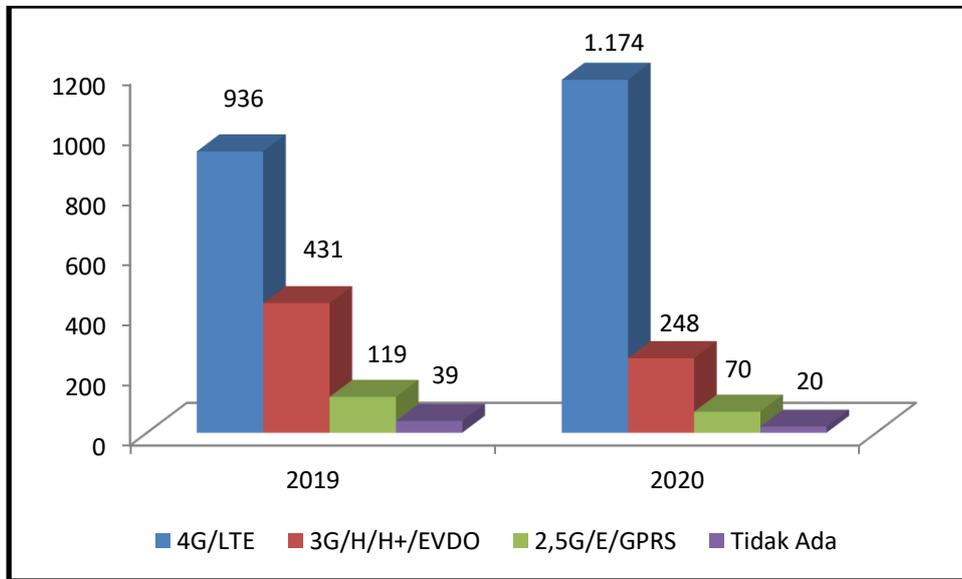
Sumber: dinas Perhubungan, 2021

Gambar 2-52 Arus penumpang angkutan umum di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Karena manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Terkait dengan pemanfaatan internet/intranet di seluruh perangkat daerah di Provinsi Jambi, saat ini seluruh perangkat daerah telah tersambung dan dapat terintegrasi dengan Portal Intranet/Internet dengan bandwidth sebesar 200 Mbps. Selanjutnya juga dilakukan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk mengadakan transponder dengan bandwidth 4 Mhz untuk mempromosikan program/kegiatan Provinsi sampai ke pelosok pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara trkoneksi dan terintegrasi melalui penayangan siaran TVRI Jambi dan dapat dipergunakan untuk siaran langsung setiap saat dari mana saja dengan hasil gambar dan suara yang baik.



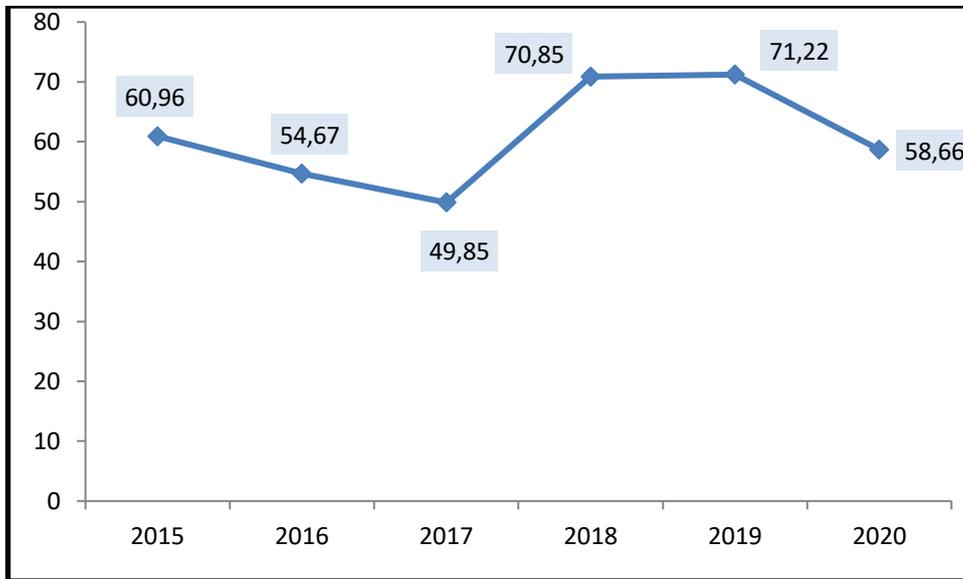
Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-53 Jumlah Desa/Kelurahan yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jambi Tahun 2019-2020

Pada grafik diatas dapat dilihat perkembangan desa/kelurahan di Provinsi Jambi yang telah menerima sinyal internet telepon seluler, dimana pada tahun 2020 hampir seluruhnya yang menerima sinyal 4G/LTE yaitu sebanyak 1.174 desa/kelurahan, meningkat sebanyak 25 persen dibanding tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah dapat diakses hingga ke desa-desa dan kelurahan.

2.3.1.2.11 Koperasi dan UKM

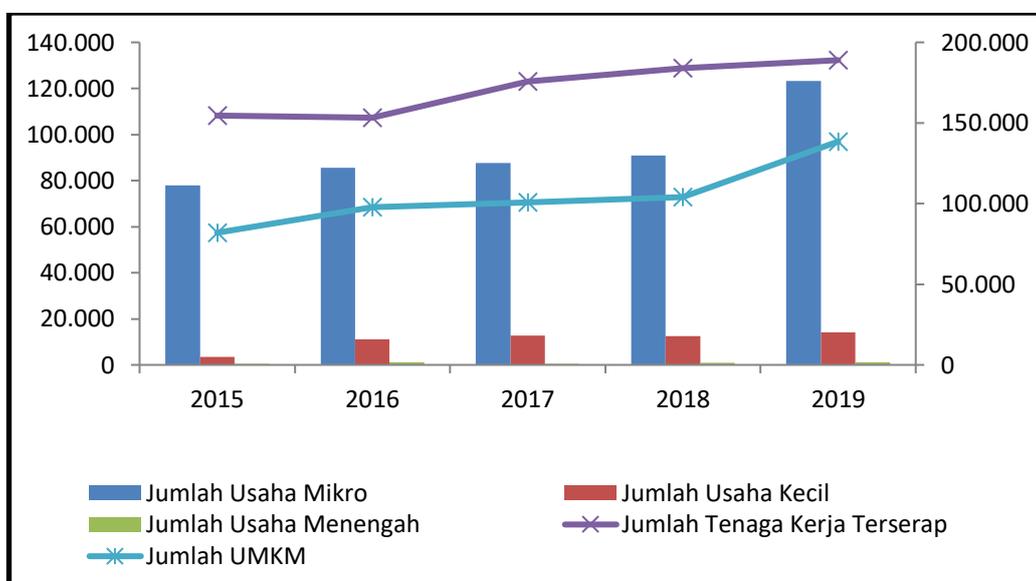
Ekonomi rakyat belum mendapat perhatian layak. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional, industri rumahan (perajin). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global.



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2021
 Gambar 2-54 Persentase Koperasi aktif di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Pada periode tahun 2016-2021, persentase koperasi aktif di Provinsi Jambi berfluktuatif, bahkan memperlihatkan tren penurunan, padahal di sisi yang lain terlihat peningkatan jumlah koperasi. Hal ini berarti upaya penumbuhan koperasi cukup baik namun belum diiringi dengan upaya pembinaan yang efektif. Untuk itu kedepan upaya – upaya pembinaan harus dilakukan dengan cara-cara baru atau inovasi baru agar lebih baik.

Sementara itu, perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan sebesar 68,95 persen dari tahun 2015 sampai tahun 2019, atau meningkat rata-rata 17,24 persen per tahun yaitu dari 81.959 unit pada tahun 2015 menjadi 138.470 unit di tahun 2019. Dibandingkan dengan jumlah usaha kecil dan menengah, usaha mikro memiliki jumlah yang terbanyak setiap tahunnya. Namun bila dilihat dari perkembangannya, maka terlihat bahwa perkembangan terbesar adalah pada usaha kecil, dimana usaha mikro meningkat rata-rata 14,48 persen pertahun, dibawah perkembangan usaha menengah yang meningkat rata-rata 30,88 persen per tahun, sedangkan usaha kecil meningkat rata-rata sebesar 77,50 persen per tahun.



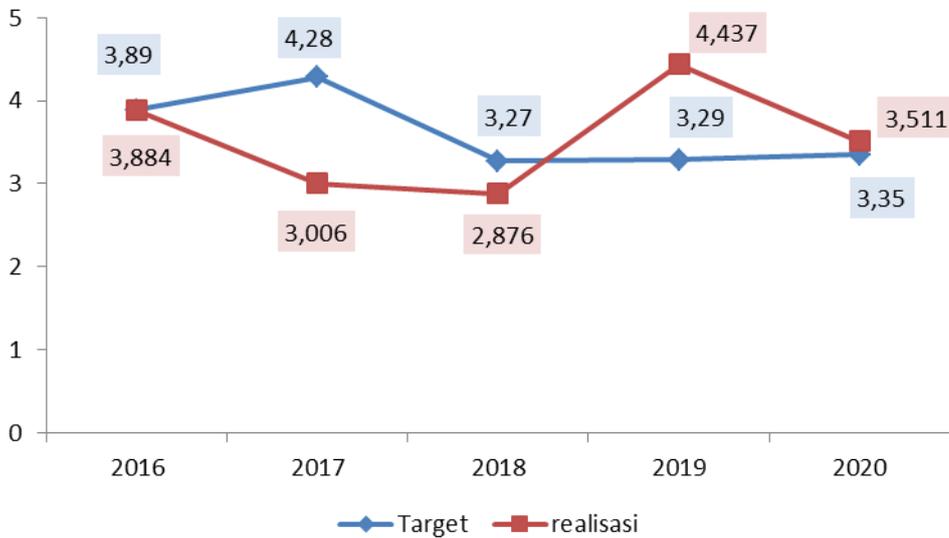
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2020

Gambar 2-55 Perkembangan UMKM dan serapan tenaga kerja pada UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Selain peningkatan jumlah UMKM, pada periode yang sama terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 153.283 orang pada tahun 2015, bertambah menjadi 188.947 orang pada tahun 2019. Berarti penyerapan tenaga kerja dari UMKM meningkat setiap tahun rata-rata sebesar 17,24 persen. Hal ini seiring dengan kebutuhan tenaga kerja akibat peningkatan jumlah UMKM tersebut.

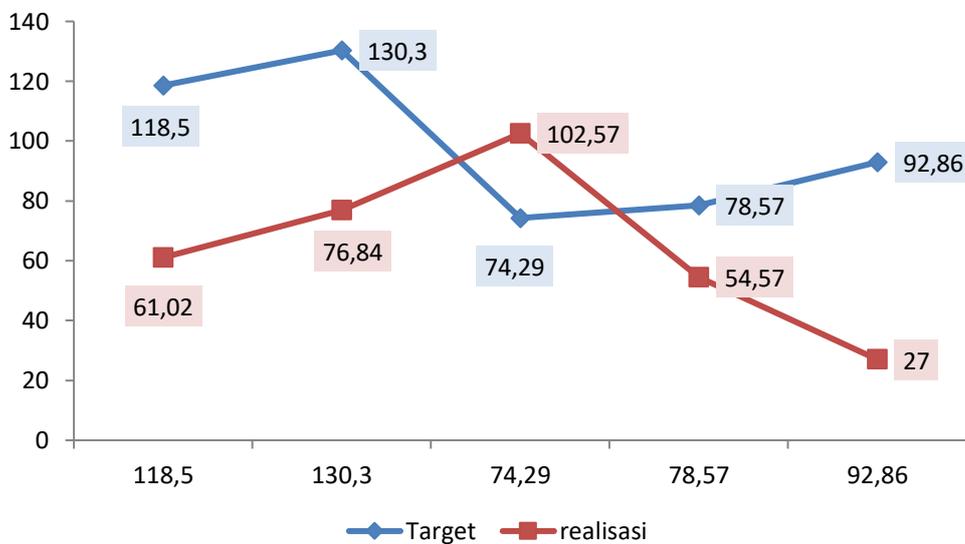
2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Pada periode tahun 2016-2021, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) DI Provinsi Jambi memperlihatkan tren penurunan dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,77 persen.. Peningkatan PMDN tercatat pada tahun 2017, dan turun signifikan di tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya memperlihatkan tren peningkatan, namun tidak terlalu signifikan dibandingkan penurunan yang telah terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA). Yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 0,88 persen.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-56 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp.Trilyun) Provinsi Jambi Tahun 2016-2020



Sumber: DPMPTSP, 2021

Gambar 2-57 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka olahraga merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Meskipun demikian budaya masyarakat Provinsi Jambi dalam berolahraga masih rendah. Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlet Provinsi Jambi juga belum mengembirakan.

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuh kembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 44 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari

segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap. Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel di atas.

Tabel 2-44 Perkembangan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Nama Program	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	44	44	44	44	44
Jumlah Gedung Olahraga	14	14	14	14	14
Jumlah cabor yang dibina di PPLPD	6	6	6	6	6
Jumlah atlet pelajar yang dibina di PPLPD	46	46	46	46	46

Sumber : Dispora, 2021

Tabel 2-45 OKP tingkat Provinsi Jambi tahun 2020

No	Bidang	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
1	Keagamaan	PW. Pemuda Muhammadiyah (PM)
		GP. Ansor
		DPD Angkatan Muda Indoneia (AMII)
		PW. Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU)
2	Kebangsaan	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)
		KNPI
3	Kemahasiswaan	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
		Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
		Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila(Satma-PP)
4	Kepartaian	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
		Pemuda Ka'bah
		BM PAN
5	Keluargaan	Forum Komunikasi Putra/putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)
6	kepanduan	Pramuka
		Hisbul Wathan

Sumber: Diskepora, 2021

Pemuda merupakan komponen masyarakat yang memiliki peran strategis di dalam pembangunan daerah. Prosentase jumlah yang besar dalam komposisi penduduk Provinsi Jambi di satu sisi merupakan kekuatan, namun di sisi lain juga dapat menjadi penghambat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu pembinaan kepemudaan agar lebih produktif merupakan kebijakan yang perlu ditempuh. Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) termasuk juga pramuka, sebagai wadah dalam berhimpun dan menempa kemampuan dan keterampilan pemuda untuk itu perlu ditumbuhkembangkan.

2.3.1.2.14 Kebudayaan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang meliputi aspek: kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; permuseuman; kebahasaan; kesusastraan; tradisi; kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kepastakaan; kenaskahan; dan perfilman.

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota selama ini telah dilaksanakan dan menetapkan agenda berkala kegiatan festival lomba dan pawai berbagai seni budaya Melayu Jambi. Terdapat 12 agenda kegiatan yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Terkait dengan warisan budaya, penetapan Candi Muaro Jambi sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini telah terdaftar di UNESCO untuk di ajukan sebagai sebagai salah satu Warisan Dunia. Selain itu ditetapkannya Geopark Merangin Jambi sebagai salah satu Jaringan Geopark Nasional oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang saat ini dalam proses pengajuan untuk menjadi Global Geopark Network (GGN) UNESCO. Sementara itu di Provinsi Jambi masih terdapat sejumlah cagar budaya yang belum dilakukan proses penetapan. Aspek budaya daerah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah tradisi yang masyarakat, lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dan dokumentasi sejarah daerah Provinsi Jambi, serta ragam bahasa daerah.

2.3.1.2.15 Perpustakaan

Pada tahun 2016-2020, jumlah anggota perpustakaan Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan ini disebabkan akibat pesatnya kemajuan internet sehingga mengurangi minat baca masyarakat ke perpustakaan. Di sisi lain perlu juga dievaluasi terkait dengan fasilitas, sarana prasarana dan sistem layanan perpustakaan, termasuk koleksi buku yang dibutuhkan pembaca. Kecenderungan penurunan jumlah anggota perpustakaan dipengaruhi oleh semakin mudah dan murah akses internet. Melihat tren minat baca yang mulai beralih ke digital, perpustakaan Provinsi Jambi sudah membuka layanan perpustakaan digital untuk menyesuaikan perkembangan kemajuan zaman.

Tabel 2-46 Jumlah Anggota Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah (orang)	Perkembangan (%)
1	2016	8.971	255,57
2	2017	3.271	-63,54
3	2018	3.405	4,1
4	2019	2.975	-12,63
5	2020*	2.975	0

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Di sisi lain, pada periode yang sama penurunan tidak terjadi pada jumlah pengunjung perpustakaan, meskipun berfluktuasi namun cenderung meningkat, yaitu dari 249.945 orang pengunjung di tahun 2016 menjadi 271.312 orang di tahun 2019. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang kurang memungkinkan bagi masyarakat berkunjung ke perpustakaan.

Tabel 2-47 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah (orang)	Perkembangan (%)
1	2016	249.945	-3,55
2	2017	260.100	4,06
3	2018	270.887	4,15
4	2019	271.312	0,16
5	2020	24.925	-90,81

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Tabel 2-48 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah (buku)	Perkembangan (%)
1	2016	177.854 eks	534,94
2	2017	186.833 eks	5,05
3	2018	13.896 eks	-92,56
4	2019	157.366 eks	1032,46
5	2020	211.709 eks	2,03

Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2021

Jumlah koleksi buku perpustakaan Provinsi Jambi berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada kurun tahun 2016-2019, yaitu dari 177.854 eksemplar pada tahun 2016 menjadi 157.366 eksemplar pada tahun 2019 yang disebabkan karena kondisi buku – buku yang mulai rusak.. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2020 Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah menambah koleksi hingga berjumlah 211.709 eks, atau meningkat 2,03 persen dibanding tahun 2019.

2.3.1.2.16 Kearsipan

Dibidang Kearsipan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, yaitu antara lain: terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional, tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metode pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan, terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat, terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan kearsipan.

Tabel 2-49 Capaian urusan kearsipan di Provinsi Jambi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pemberkasan arsip in-aktif	5.000 berkas pendataan/tata	1.500 berkas arsip in aktif		7.891 berkasmusnah
		700 berkas akuisisi	1.000 berkas usul musnah 3.501	nihil	15.765 arsip In-aktif
2	Penyusutan Arsip			6.901 berkas (7 OPD)	7.891 berkasmusnah
				34 album	34 Album
3	Akuisisi			285 CD	285 CD
				5 profil dewan	5 Profil dewan
4	Bertambahnya koleksi arsip statis dan mempermudah penemuan kembali arsip	550 photo	200 photo		157 Photo
		4.267 lembar peta	250 peta		10.898 peta
		1.262 arsip buku	60 arsip buku		325 arsipbuku
		150 naskah dinas	154 naskah dinas	nihil	2.970 naskah kuno
5	Telaksananya pameran kearsipan	3 kali	2 kali	1 kali	1 kali

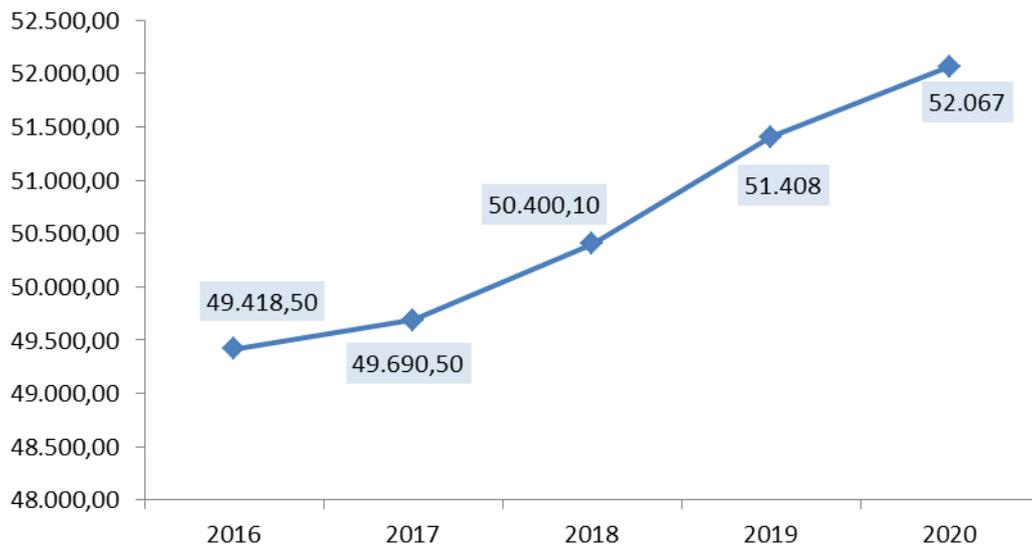
Sumber: DPAD Provinsi Jambi, 2020

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan tahun 2016–2020 menunjukkan tren peningkatan. Produksi perikanan budidaya tahun

2016 berada pada angka 49.418,5 ton dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 52.067 ton. Peningkatan ini merupakan hasil sinergi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi



Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2021

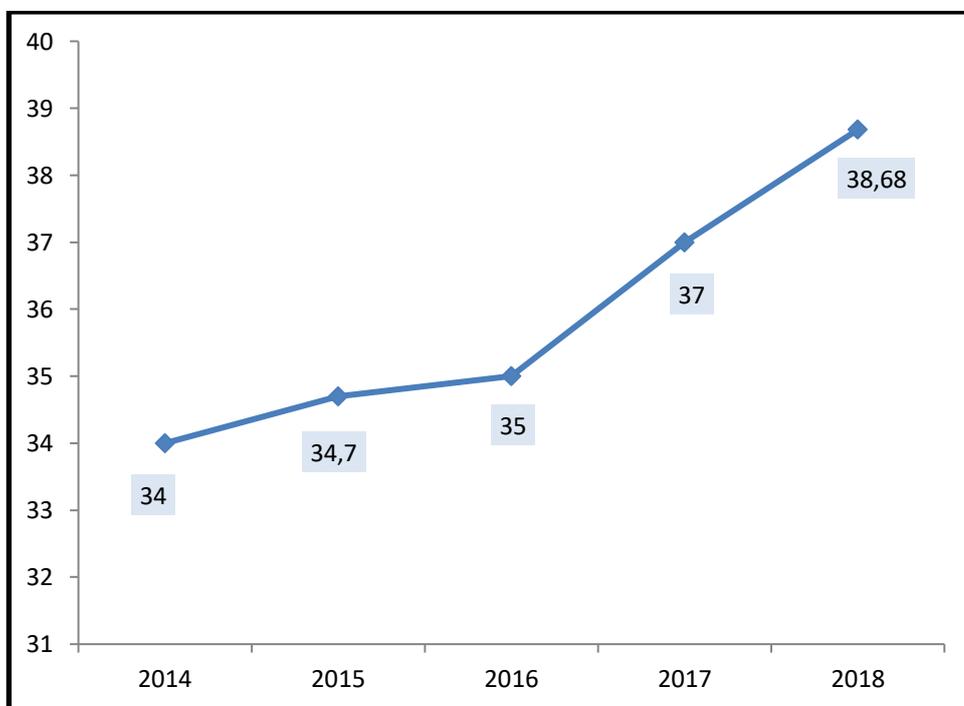
Gambar 2-58 Perkembangan produksi perikanan budidaya (ton) di Provinsi Jambi

Sementara untuk produksi perikanan tangkap, pada tahun 2016 adalah sebesar 53.485,6 ton, sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 51.370,70 ton. dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 53.833 ton. Penurunan angka produksi di tahun 2017 tersebut dikarenakan kemarau panjang dan bencana kabut asap yang terjadi di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang menyebabkan jarak pandang nelayan menjadi terbatas dan menghambat aktifitas penangkapan ikan baik di wilayah perairan laut maupun perairan umum.



Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-59 Perkembangan produksi perikanan tangkap di Provinsi Jambi (ton)



Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-60 Perkembangan angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi (kg/perkapita/tahun)

Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Provinsi Jambi pada periode tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Upaya meningkatkan angka konsumsi ikan ini dilakukan melalui Program Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan bermacam kegiatan diantaranya pameran produk perikanan, Kampanye GEMARIKAN, Lomba masak serba ikan, Demonstrasi pengolahan

(diversifikasi) produk yang berbahan dasar ikan, peningkatan mutu produk, pengembangan produk dan lain sebagainya.

2.3.2.2 Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan pariwisata dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Terkait dengan hal tersebut, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terlihat fluktuatif selama tahun 2015-2019.

Tabel 2-50 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019

No.	Wisatawan	2015 (Orang)	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)
a	b	c	d	e	f	g
1	Kerinci	4.310	6.477	1.386	5.325	3.859
2	Merangin	-	-	-	-	238
3	Sarolangun	108	157	108	135	64
4	Batang Hari	38	54	54	65	49
5	Muaro Jambi	230	378	545	713	424
6	Tanjabtim	54	42	16	19	5
7	Tanjabbar	22	36	54	53	25
8	Bungo	54	36	16	22	8
9	Tebo	40	24	27	13	1
10	Kota Jambi	5.888	4.834	3.160	4.523	5.328
11	Sungai Penuh	32	30	13	19	525
Total Provinsi Jambi		10.776	12.069	5.378	10.887	10.526
Pertumbuhan		6,49%	12,00%	-55,44%	102,44%	-3,32%

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi, 2020

Tabel 2-51 Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jambi Tahun 2015- 2019

No	Tujuan	2015 (Orang)	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)
a	b	c	d	e	f	g
1	Kerinci	329.175	328.965	266.554	359.667	387.584
2	Merangin	520.309	520.862	431.355	465.000	448.933
3	Sarolangun	33.077	32.897	21.568	34.389	43.130
4	Batang	19.821	35.638	17.254	37.106	40.799
5	Muaro	297.319	274.138	258.813	265.300	104.827
6	Tanjabtlim	9.911	16.448	8.627	9.012	9.525
7	Tanjabbar	37.165	54.828	45.782	58.571	14.760
8	Bungo	103.548	109.655	97.055	91.045	91.045
9	Tebo	247.766	219.310	258.813	125.750	106.049
10	Kota Jambi	693.745	1.011.569	653.900	867.500	886.971
11	Sungai	185.825	137.069	97.055	75.333	40.799
Total		2.477.660	2.741.379	2.156.777	2.388.673	2.094.549
Pertumbuhan		8,00%	10,64%	-21,33%	10,75%	-12,31%

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2020

Bila dilihat jumlah daya tarik wisata dari tahun 2015 hingga tahun 2019, terlihat kecenderungan meningkat secara total. Namun bila dilihat lebih rinci terlihat bahwa peningkatan terbesar adalah pada wisata buatan yang diikuti oleh wisata alam. Sedangkan wisata sejarah/budaya malah cenderung memperlihatkan penurunan jumlah dari tahun 2015 – 2019. Untuk itu kedepan perlu perhatian lebih pada daya tarik wisata ini.

Tabel 2-52 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wisata Alam	184	193	193	191	215
Wisata Buatan	112	119	130	142	205
Wisata Sejarah/Budaya	129	133	133	133	113
Total	425	445	456	466	533

Sumber: Disbudpar Provinsi Jambi,2020

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum berkembang di Provinsi Jambi, padahal potensi yang dapat dikembangkan cukup banyak. Beberapa hal yang menghambat adalah kurangnya promosi dan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pariwisata. Ke depan, kegiatan promosi melalui berbagai media serta peningkatan kuantitas dan kualitas ekonomi kreatif harus lebih baik agar pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah yang besar di Provinsi Jambi, sehingga pada akhirnya

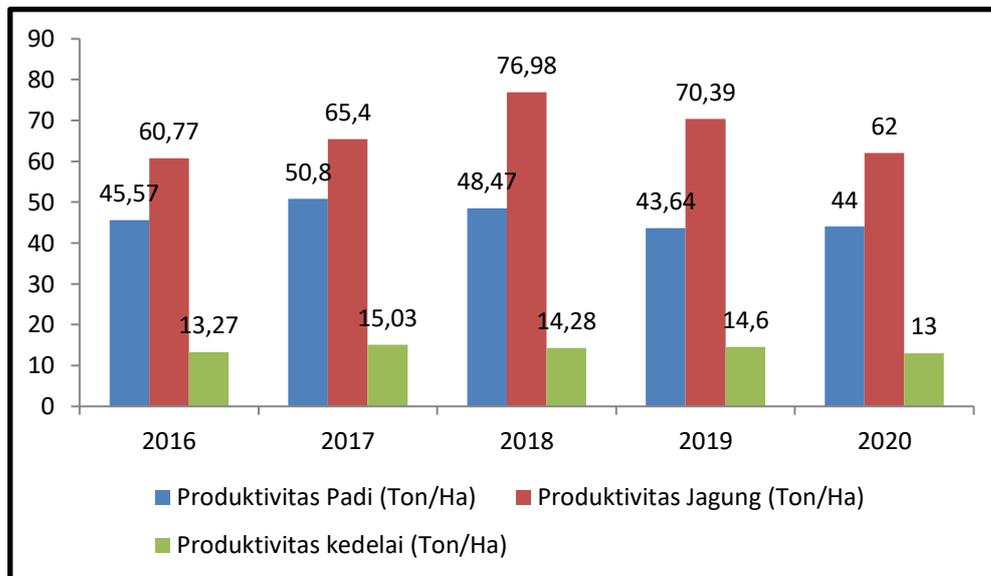
dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.2.1 Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan hanya karena pada masa krisis hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang positif, tapi tidak ada satu Negara majupun di dunia dimana pertaniannya tidak maju. Pertanian menjadi landasan perekonomian suatu Negara, menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu, murah, dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa, sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya, dan sebagai pemasok tenaga kerja bagi sektor manufaktur dan sektor jasa di perkotaan.

Pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa (Kuznet, 1964). *Pertama*, kontribusi produk, diartikan bahwa produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Kedua*, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian. *Ketiga*, kontribusi faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. *Keempat*, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat

ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

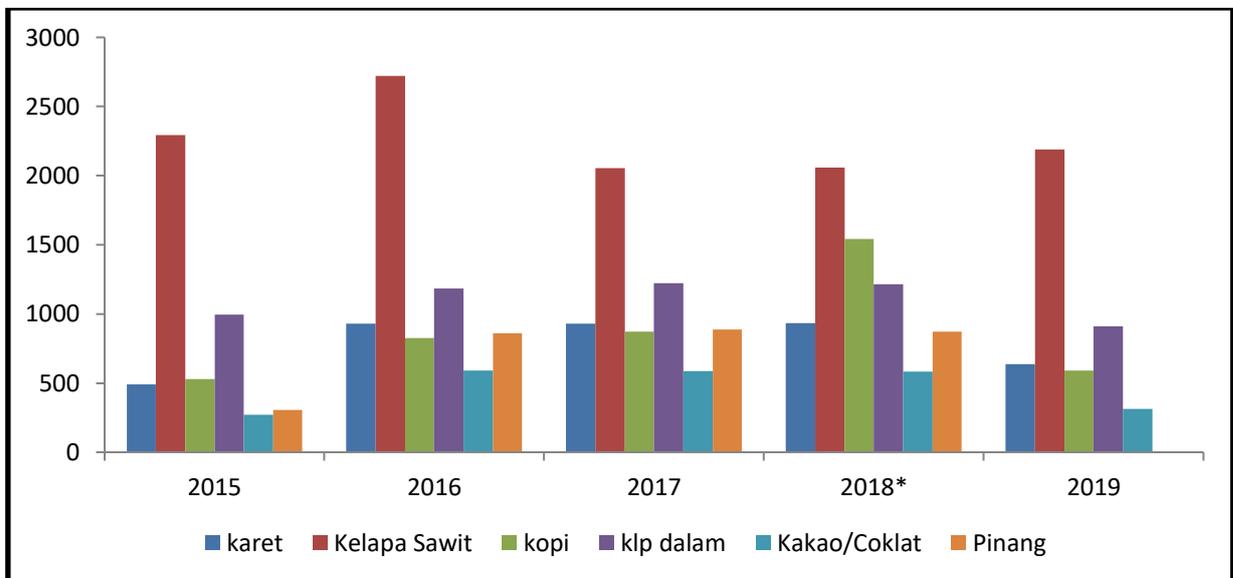


Sumber: Dinas TPHP, 2021

Gambar 2-61 Produktifitas Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai (Kw/Ha)di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Produktivitas tanaman padi di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan selama tahun 2016 – 2018, namun penurunan terjadi pada tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen. Peningkatan produktivitas tidak hanya pada tanaman padi, namun juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. Peningkatan ini harus terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani.

Sektor perkebunan juga belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2015 – 2019. Hal ini terlihat pada produktivitas komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2020

Gambar 2-62 Perkembangan produktivitas komoditi perkebunan Provinsi Jambi (kg/ha/tahun) Tahun 2015 -2019

2.3.2.3 Kehutanan

SK.863/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi ditetapkan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Jambi adalah seluas + 2.098.535 hektar yang dirinci menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

- Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas + 685.471 ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas + 179.588 ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 258.285 ha
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 963.792 ha
- Kawasan Hutan produksi Konversi (HPK) seluas + 11.399 ha

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan serta Tata Guna Hutan kesepakatan (TGHK) tahun 2018, luas hutan di Provinsi Jambi ditetapkan seluas 2.113.775,33 Ha, dengan perincian:

- Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas + 694 586,01 ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas + 181 794,96 ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 260 386,14 ha
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 966 704,47 ha
- Kawasan Hutan produksi Konversi (HPK) seluas + 10 303,75 ha

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi

area dengan luas ± 1.458.934 ha terdiri dari HL dengan luas ± 175.483 HP dengan luas ± 981.530 ha, HPT dengan luas ±301.922. Berdasarkan SK tersebut maka kawasan hutan provinsi Jambi dibagi dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Dari 17 KPH tersebut sampai dengan tahun 2015 baru terdapat 5 KPHP yang memiliki organisasi pengelola dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) yaitu KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun, KPH Unit I Kerinci, KPHP Lubuk Pekak Hulu Landai Kabupaten Merangin, KPHP Tebo Barat dan Tebo Timur di Kabupaten Tebo. Sedangkan satu KPHL yaitu KPHL Bram Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki pengelola hanya RPHJPnya perlu direvisi menyesuaikan dengan format baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.3.2.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (*geothermal*). Potensi sumber enenrgi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Data-data lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah.

Tabel 2-53 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Tabel 2-54 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci	13 KW
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
4	SAROLANGUN	17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
		18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsat	
5	BUNGO	21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
		22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Tabel 2-55 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

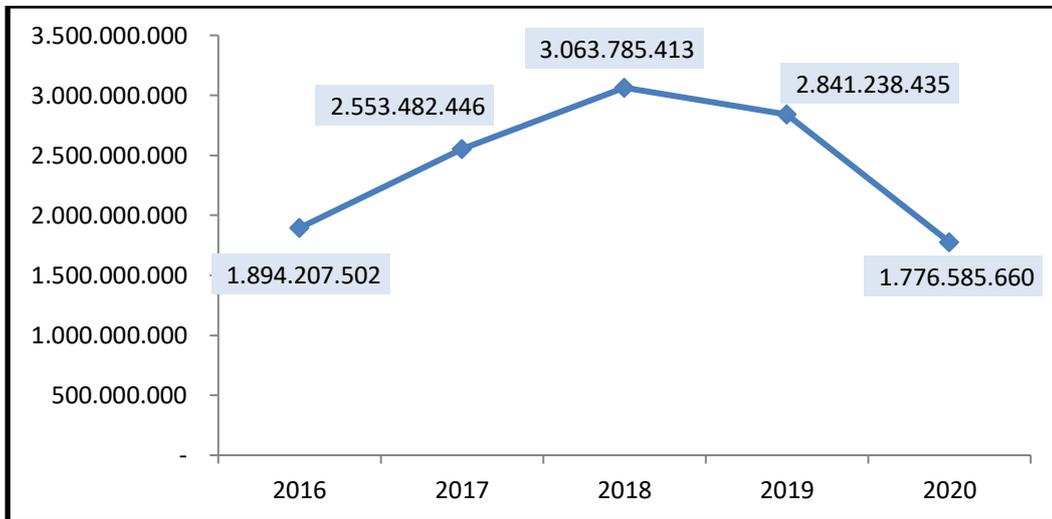
NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2020

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di atas. Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi.

2.3.2.4.1 Perdagangan

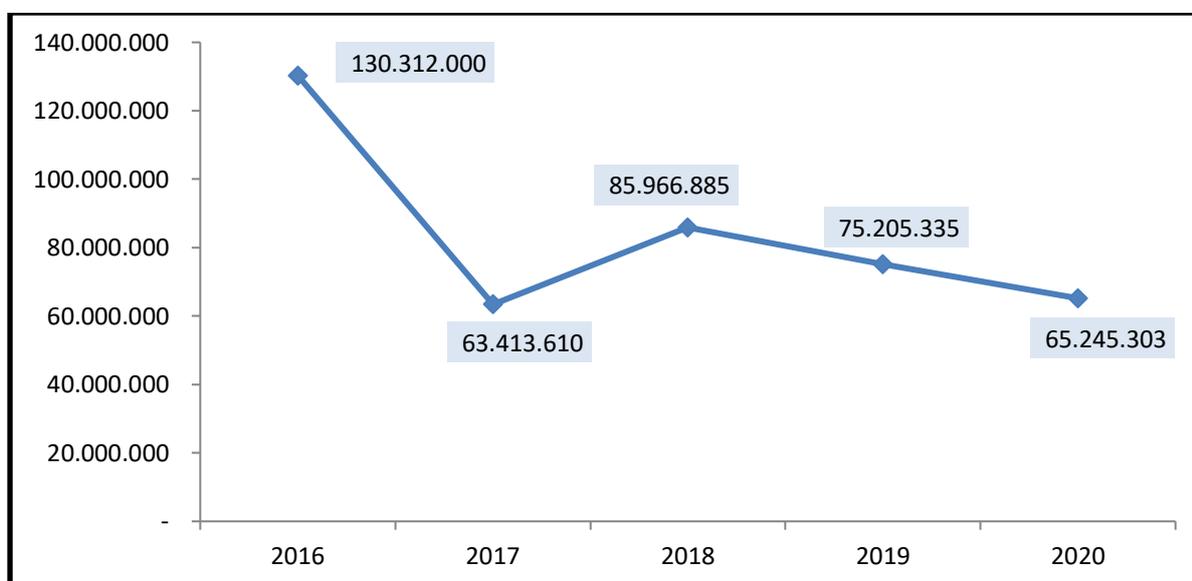
Perkembangan ekspor asal Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2016, nilai ekspor terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 seiring dengan penurunan harga komoditas. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dimana perekonomian seluruh dunia mengalami kelesuan, sehingga permintaan bahan baku yang merupakan komoditas ekspor Provinsi Jambi berkurang dan berimplikasi pada penurunan nilai ekspor pada tahun tersebut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-63 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (US\$)

Ekspor asal Provinsi Jambi terbagi atas komoditi Migas dan Non Migas. Pada 2016-2020 struktur nilai ekspor Provinsi Jambi masih didominasi oleh ekspor komoditi migas. Komoditas ekspor non migas Provinsi Jambi masih didominasi oleh komoditas Karet Olahan, Minyak Nabati (CPO dll) dan Kertas/Pulp serta pinang, sementara dari pertambangan didominasi komoditi migas. Adapun negara tujuan ekspor komoditas dari Provinsi Jambi selama kurun waktu tersebut mencapai 80 Negara, dengan negara tujuan utama ekspor Thailand, Jepang, China, Singapura, Malaysia, India dan Amerika Serikat. Kinerja yang ada tidak terlepas dari perkembangan permasalahan ekonomi yang terjadi di AS dan Kawasan Eropa serta menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kinerja ekspor dan impor Provinsi Jambi. Permasalahan yang dihadapi diantaranya masih banyaknya prasarana dasar yang belum terpenuhi, sehingga para investor masih belum banyak yang tertarik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan pemberian insentif kepada investor dan pelayanan perizinan yang berkualitas serta mengoptimalkan penggunaan sarana jalan dan pelabuhan yang ada.



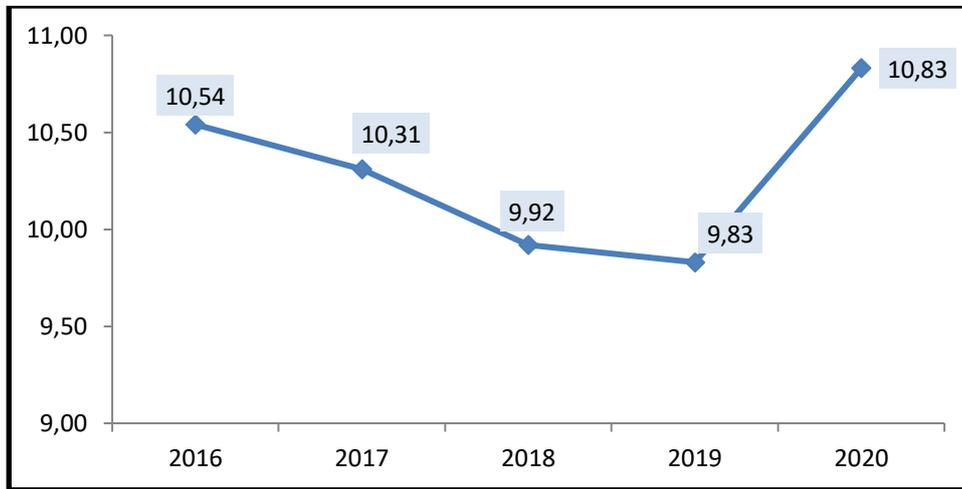
Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-64 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (US\$)

Sementara itu, perkembangan impor Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, baik nilai maupun volumenya. Nilai impor pada tahun 2016 mencapai US\$130,316 juta, angka tersebut turun hingga akhir tahun 2020 menjadi US\$65,245 juta.

2.3.2.5 Perindustrian

Pemerintah Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 berupaya untuk menggeser share sektor primer ke sektor sekunder, salah satunya melalui upaya-upaya meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Jambi. Upaya ini menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun belum sesuai yang diharapkan. Dalam kurun tahun 2016-2020 kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi terus memperlihatkan tren penurunan setiap tahunnya. Namun peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sektor industri pengolahan belum memperlihatkan kinerja yang baik dalam lima tahun ini. Oleh sebab itu, percepatan perwujudan kawasan Ujung Jabung harus terus dilakukan untuk mendorong sektor ini lebih berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Jambi.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2-65 Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi

2.3.2.5.1 Transmigrasi

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma sebagai berikut, yaitu; mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan; mendukung kebijakan energi alternatif (*bio fuel*); mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia; mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan; menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk (dalam arti sempit), melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *topdown* dari pusat, melainkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.

Dasar hukum pelaksanaan program transmigrasi ini di antaranya adalah Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Adapun manfaat transmigrasi bagi masyarakat, antara lain yaitu: Meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan peluang daerah dengan potensinya yang belum banyak dimanfaatkan orang; merangsang pembangunan daerah baru, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembauran antar suku bangsa, solusi masalah pengangguran dan kemiskinan. Terkait hal

tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi Jambi sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran di bidang ketramigrasian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, terdapat beberapa lokus kawasan transmigrasi prioritas di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu Kabupaten Bungo
2. Kawasan Transmigrasi Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kawasan Transmigrasi Bathin IX Kabupaten Sarolangun
4. Kawasan Transmigrasi Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Jambi termasuk dalam kategori berhasil karena daerah – daerah yang telah dijadikan lokasi transmigrasi umumnya menjadi wilayah yang maju dan cepat tumbuh. Contoh daerah transmigrasi yang tumbuh lebih baik daripada wilayah sekitarnya adalah Sungai Bahar di Kabupaten Muaro Jambi, Singkut di Kabupaten Sarolangun dan Rimbo Bujang di Kabupaten Tebo.

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1 Perencanaan

Definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan di Provinsi adalah teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Perencanaan yang disusun selain untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, juga mendukung perencanaan nasional, sehingga akan tercipta sinergisitas antara pusat dan daerah.

Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 dan telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir beberapa penyempurnaan terhadap RPJPD terkait dengan indikator, target indikator dan penyesuaian terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal perencanaan secara spasial, Provinsi Jambi juga telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Kedua dokumen perencanaan tersebut, yaitu RPJPD dan RTRWP merupakan dokumen yang diacu dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

2.3.3.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terlihat dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah memperoleh opini WTP sembilan kali dalam dekade terakhir. Kondisi ini hendaknya dapat terus dipertahankan di masa yang akan datang.

2.3.3.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan sistem *reward and punishment*. Disiplin PNS ditegakkan antara lain melalui penggunaan absensi berbasis aplikasi online (SiABON) bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kedisiplinan ini menjadi salah satu indikator dalam pemberian reward berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Formulasi penilaian kinerja ini akan terus dikembangkan ke arah yang lebih baik dan adil.

Pengembangan SDM juga tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat tersebut diharapkan menjadi daya ungkit dalam mewujudkan ASN yang berkompeten dan profesional, yang tentunya harus didukung dengan inovasi, kurikulum, metode serta sarana dan prasarana diklat yang baik.

2.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan dan dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintahan, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat daerah yang juga merupakan suatu pengaturan kelembagaan yang sistematis, dan berjangka panjang untuk mendorong, menyebarluaskan dan menerapkan inovasi teknologi dalam aspek pembangunan maka dibangun Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sistem inovasi dibutuhkan dalam rangka mengatasi permasalahan karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin ilmu, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat dan pengelolaan SDM kolaboratif serta rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat.

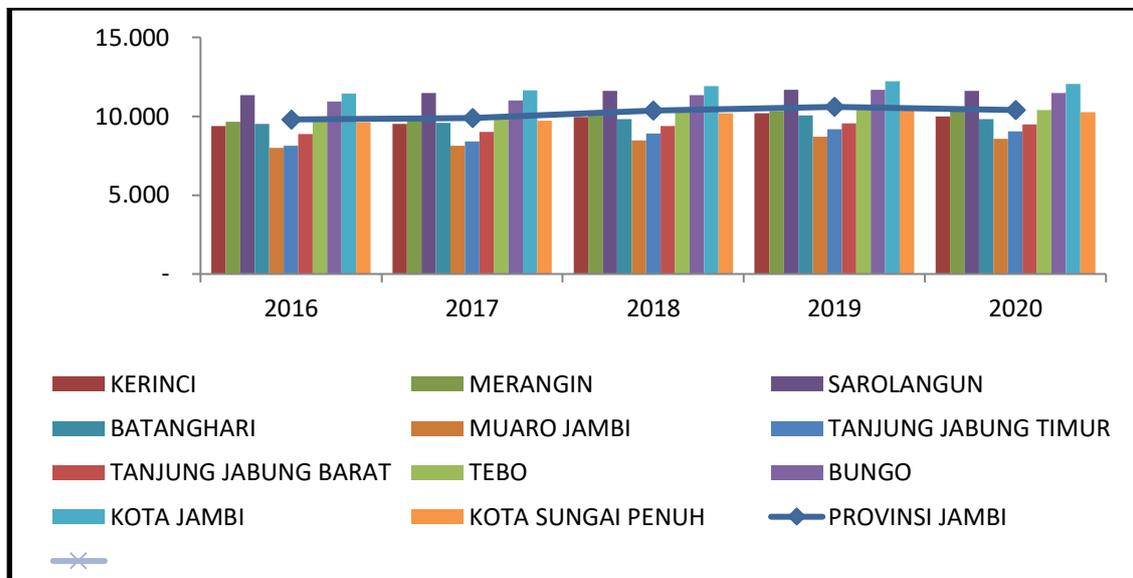
2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2016-2020 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pengeluaran nominal perkapita untuk makanan Provinsi Jambi meningkat dari Rp.9.795 ribu/tahun pada tahun 2016 menjadi Rp.10.392 ribu/tahun pada tahun 2020. Adapun Kabupaten/ Kota dengan pengeluaran perkapita lebih besar dari Provinsi Jambi adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi.



Sumber : BPS, 2021

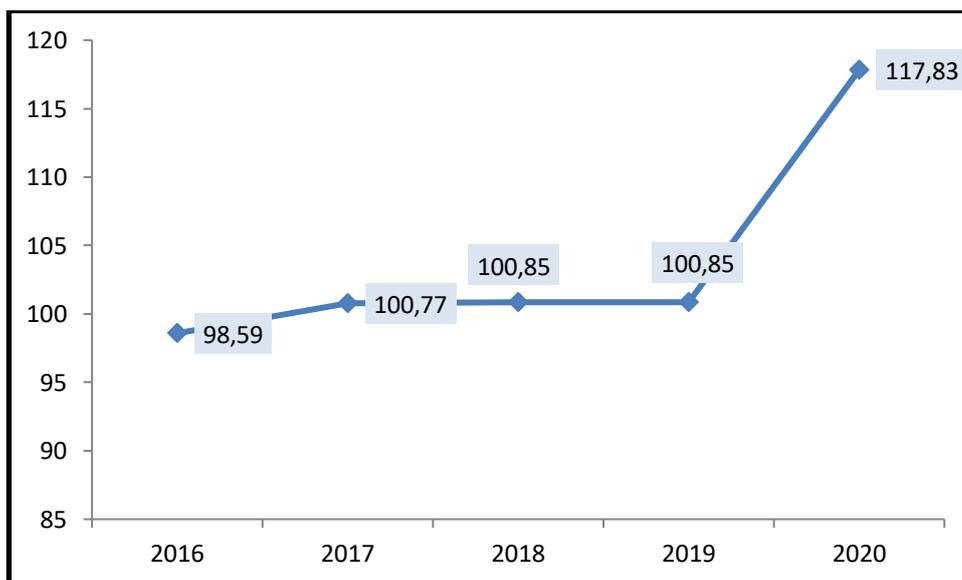
Gambar 2-66 Pengeluaran Perkapita per tahun Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi (ribu rupiah) Tahun 2016-2020

Bila dilihat komposisi pengeluaran maka terlihat pergeseran komposisi, dimana sampai dengan tahun 2017, pengeluaran terbesar adalah pada kelompok makanan, yaitu sebesar 51,13 persen. Mulai tahun 2018 terjadi pergeseran komposisi pengeluaran, dimana pengeluaran pada kelompok makanan turun menjadi 48,87 persen dan 50,49 persennya dikeluarkan untuk kelompok bukan makanan, dan pada tahun berikutnya penurunan terus terjadi pada pengeluaran pada kelompok makanan hingga menjadi 49,14 persen.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.



Sumber Dinas TPHP Prov. Jambi, 2021
 Gambar 2-67 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

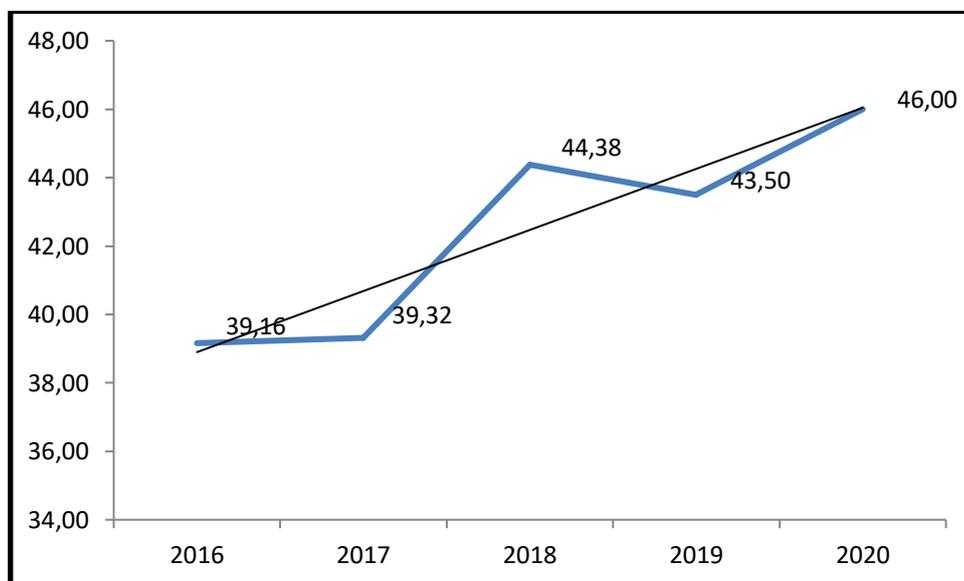
Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan

subsektor peternakan. Peningkatan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu ke depan kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1 Proporsi Jalan Kondisi baik

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2020 berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan meningkat, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Penurunan tersebut terjadi karena jalan dalam kondisi baik tersebut menurun kondisinya dan masuk dalam kategori jalan sedang. Namun demikian jalan tersebut masih dalam kondisi mantap.

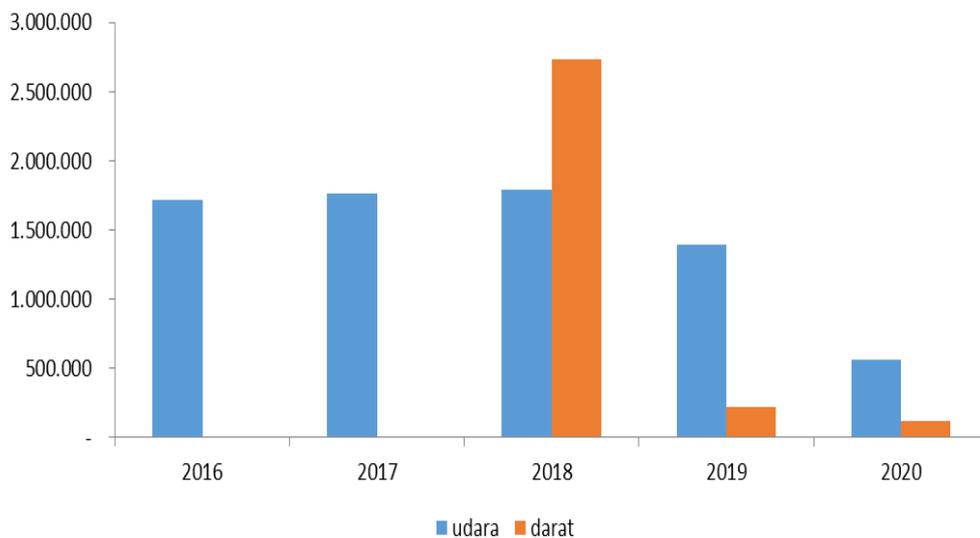


Sumber: Dinas PU Provinsi Jambi, 2021

Gambar 2-68 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2016 – 2020

2.4.2.2 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang yang terangkut angkutan umum di Provinsi Jambi mengalami penurunan sejak tahun 2019, setelah sebelumnya sejak tahun 2016 – 2018 mengalami kenaikan.



Sumber: dinas Perhubungan, 2021

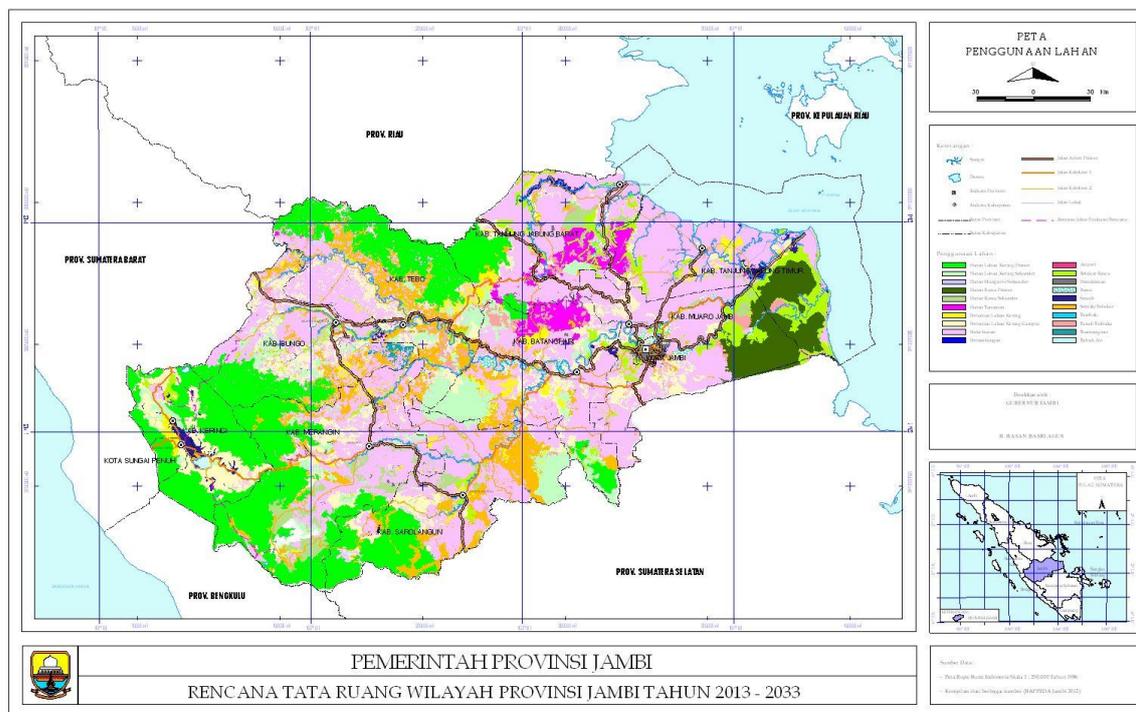
Gambar 2-69 Arus penumpang angkutan umum di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.4.2.3 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidayapertanian terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan sedangkan kawasan budidaya non-pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan industri.

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. Arah pola ruang untuk kegiatan budi daya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.

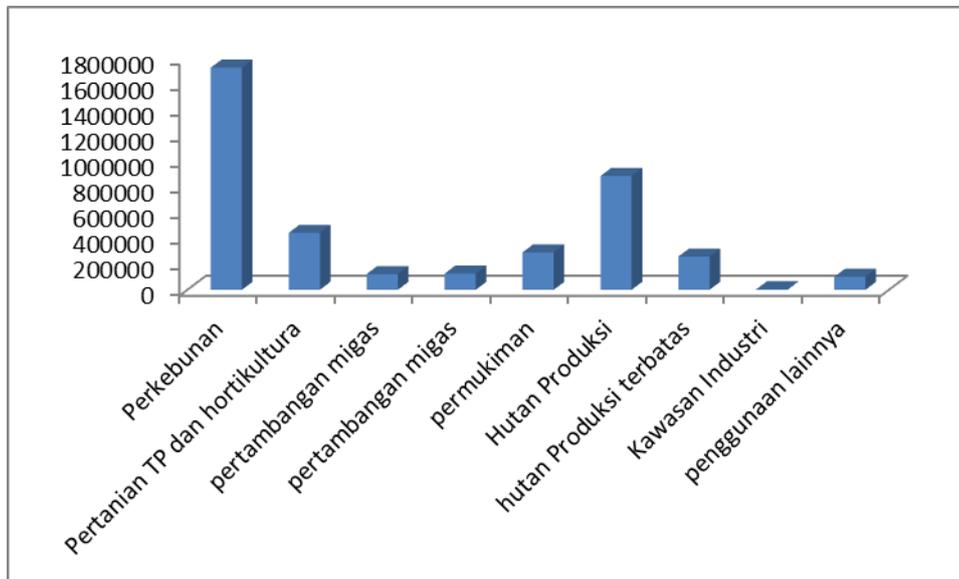


Gambar 2-70 Penggunaan lahan Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033)

Pengembangan Kawasan industri di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar diarahkan pengembangannya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Kawasan peruntukan industri kecil diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk daerah perkotaan industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan.

Luas rencana kawasan industri yang diperuntukkan untuk kawasan industri besar yaitu seluas 4.565,26 Ha. Arahkan pengembangan zona industri meliputi:

- a. Penataan ruang untuk kawasan industri besar dan zonasinya diarahkan di sekitar Kuala Tungkal, Ujung Jabung serta Muara Sabak.
- b. Penyediaan prasarana pendukung kawasan industri
- c. Pengembangan kawasan perindustrian di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukan dan sentra-sentra kecil

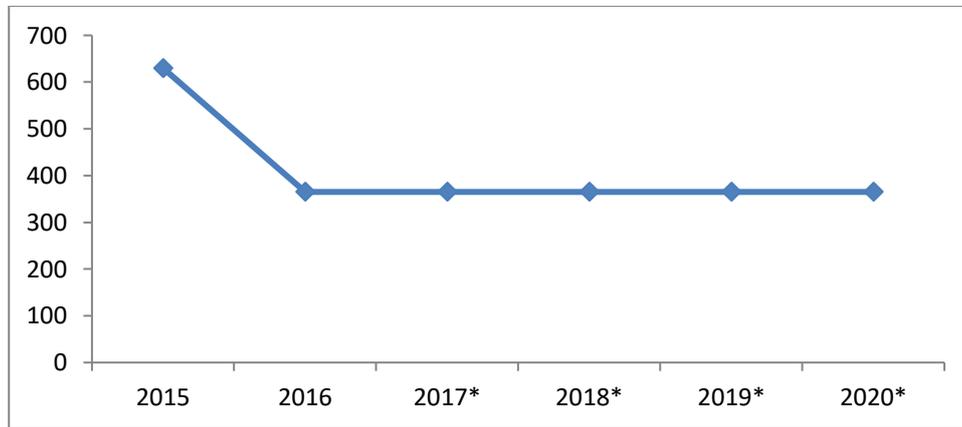


Gambar 2-71 luas kawasan budidaya berdasarkan arahan pola ruang Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033)

Sedangkan wilayah banjir di Provinsi Jambi tersebar hampir di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jambi terutama pada wilayah barat dan tengah antara lain Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Adapun luas wilayah banjir ± 146.709 Ha. Luas ini akan terus bertambah apabila tidak dilakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan terutama pada kawasan hulu Provinsi Jambi.

2.4.2.4 Jenis, kelas, dan jumlah restoran, penginapan/hotel

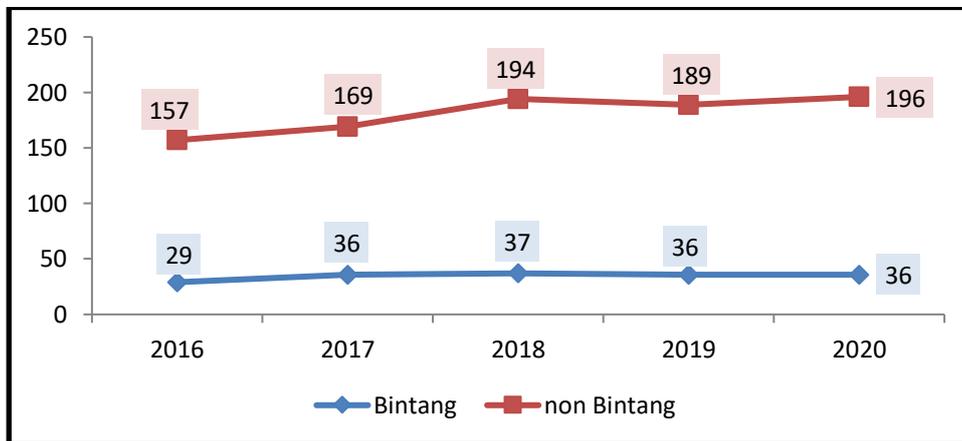
Perkembangan jumlah restoran atau rumah makan di Provinsi Jambi pada periode tahun 2015-2020 berdasarkan data yang tersedia cenderung menurun. Hal yang hampir sama terjadi pada sektor perhotelan. Meskipun jumlah hotel baik hotel kelas bintang maupun non bintang mengalami kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2018, namun jumlah tersebut kembali menurun pada tahun 2019. Penurunan restoran dan hotel ini disebabkan oleh belum pulihnya perekonomian Provinsi Jambi sejak tahun 2015 yang menyebabkan banyak sektor pembangunan di Provinsi Jambi mengalami penurunan aktivitas. Pada tahun 2020, walaupun sektor pariwisata mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19, jumlah hotel non bintang di Provinsi Jambi mengalami peningkatan.



Sumber: BPS, 2021

*data sama dengan tahun lalu (tidak tersedia update data)

Gambar 2-72 Jumlah Rumah Makan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



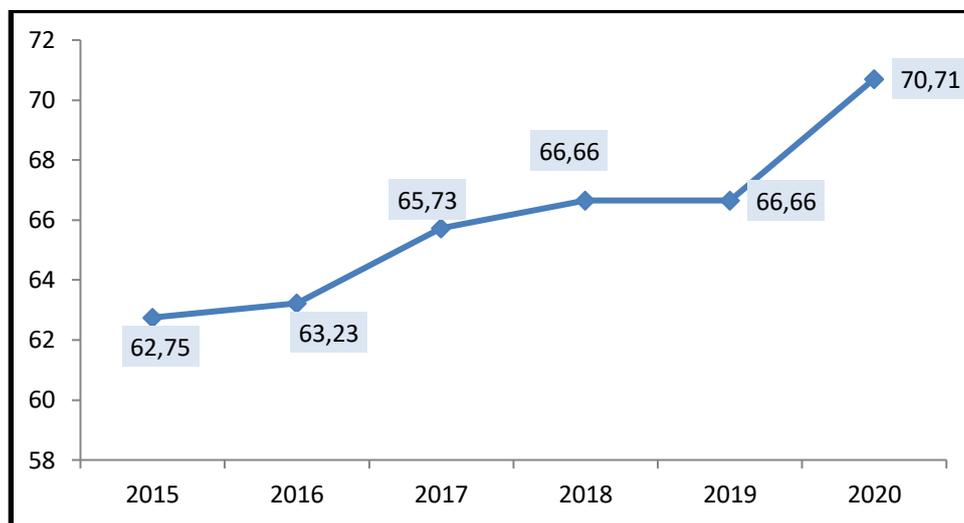
Sumber: Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Gambar 2-73 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

2.4.2.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2020 adalah 70,71 persen. Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa hambatan yang dihadapi terkait cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

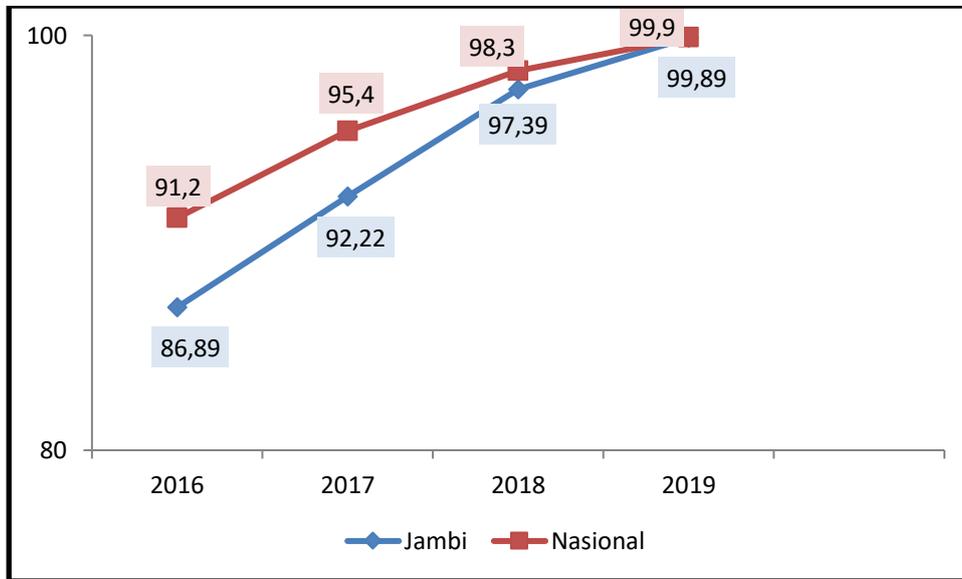


Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2021

Gambar 2-74 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2020

2.4.2.6 Rasio ketersediaan daya listrik,

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun, bahkan sejak tahun 2019 capaian Provinsi Jambi melampaui nasional. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas ESDM, 2021

Gambar 2-75 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Kriminalitas

Selama selang waktu tahun 2015-2019, jumlah kejahatan di Provinsi Jambi terlihat berfluktuatif, namun memperlihatkan tren penurunan. Hal yang sama terlihat pada jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan, walaupun penurunannya tidak signifikan. Salah satu pemicu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi, untuk itu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kejahatan di Provinsi Jambi, seiring dengan upaya perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.



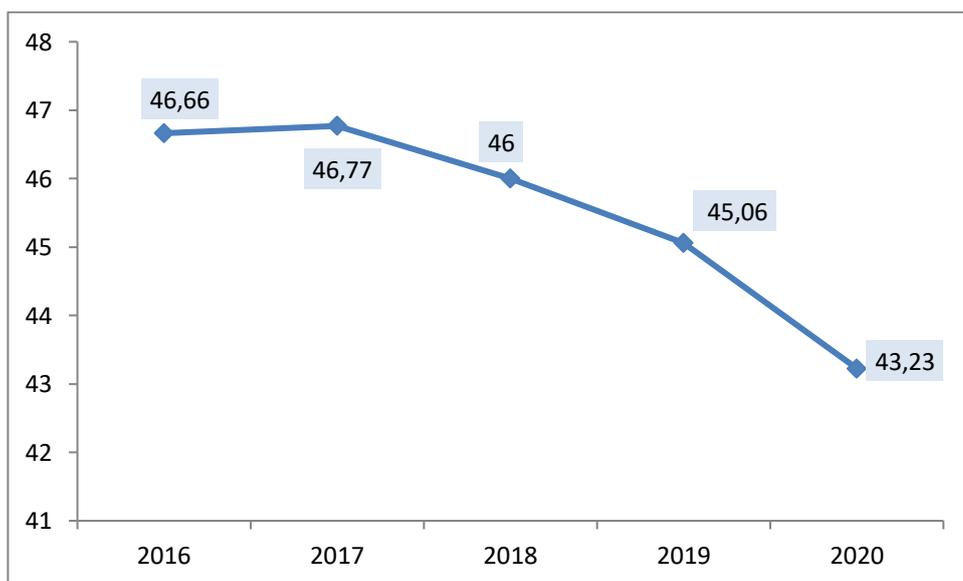
Sumber: Statistik Kriminal 2020, 2020

Gambar 2-76 Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif menanggung hidup (konsumsi) penduduk usia produktif di Provinsi Jambi dapat dilihat dari Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebagaimana tersaji pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2021 dan Data diolah

Gambar 2-77 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65+ tahun) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan

kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin berkurang.

2.2. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh uraian tentang kondisi umum daerah, kinerja pemerintah daerah serta potensi perekonomian dan daya saing daerah saat ini pada akhirnya membangun pencapaian target pembangunan berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jambi pada periode tahun 2016-2020. Adapun pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Data dalam Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian TPB Provinsi Jambi hingga tahun 2020. Dari 289 indikator pembangunan berkelanjutan yang kemudian dicerminkan oleh 219 target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional hanya 197 target pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan karakter yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Dari target PB nasional tersebut, 85 target (43,2%) dapat dicapai, 58 target (29,4%) belum dapat dicapai, dan belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang tersedia adalah sebanyak 55 target (27,4% dari total target PB).

Tabel 2-56 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi periode 2016 – 2019/2020

TPB (2020)		Indikator PB (Metadata SDGs 2020 v.2)	Target PB Nasional 2019	Capaian PB Nasional 2019/2020	Melebihi capaian nasional (2019/2020)	Belum > capaian nasional (2019/2020)	Belum dilaksa- nakan	Belum teriden- tifikasi
1	Tanpa kemiskinan	14	23	21	16	4	-	1
2	Tanpa kelaparan	16	9	9	4	4	-	1
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	31	36	32	16	13	-	3
4	Pendidikan berkualitas	14	18	17	8	7	-	2
5	Kesetaraan gender	12	16	13	6	3	-	4
7	Energi bersih dan terjangkau	7	6	6	3	3	-	-
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	17	16	8	6	-	2
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	21	15	8	-	3	-	5
10	Berkurangnya kesenjangan	17	16	13	6	2	-	5
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	25	14	9	4	3	-	2
6	Air bersih dan sanitasi layak	10	1	9	2	-	-	7
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	17	3	3	1	1	-	1
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	17	7	4	-	1	-	3
13	Penanganan perubahan iklim	9	1	5	1	-	-	4
14	Ekosistem lautan	10	7	6	1	4	-	1
15	Ekosistem daratan	14	3	4	-	1	-	3
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	36	27	22	9	3	-	10
	Total	289	219	197	85	58	-	54
			75.8%	90.0%	43.15%	29.44%	0.0%	27.41%

Sumber: berbagai sumber statistik.

Keterangan:

Tujuan 1 – 5 termasuk Pilar Sosial

Tujuan 7-20 dan Tujuan 17 termasuk Pilar Ekonomi

Tujuan 6, dan Tujuan 11-15 termasuk Pilar Lingkungan

Tujuan 16 adalah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sementara, tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator berdasarkan pengelompokan TPB sebagaimana oleh Bappenas tahun 2020. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa Pilar Sosial merupakan pilar yang paling banyak mencapai target (41,7% dari total target TPB) dan Pilar Hukum dan Tata Kelola yang paling sedikit mencapai target (41,7% dari total target TPB).

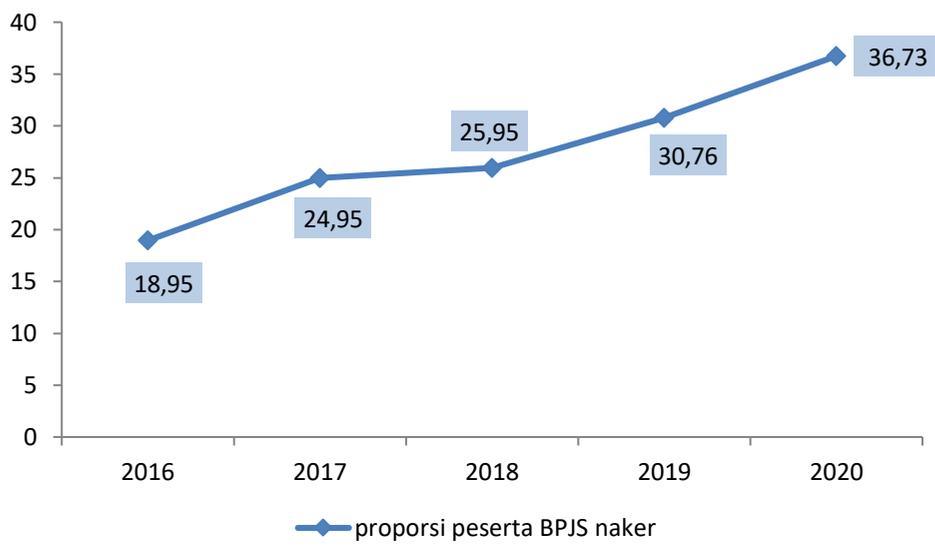
Tabel 2-57 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi periode 2016 – 2019/2020 berdasarkan kelompok pilar TPB.

Pilar	Sudah tercapai	Belum tercapai	Belum dilaksanakan	Tidak teridentifikasi
Sosial	54.3%	33.7%	0.0%	12.0%
Ekonomi	48.1%	32.7%	0.0%	13.0%
Lingkungan	48.8%	22.6%	0.0%	13.1%
Hukum & Tata Kelola	41.7%	13.6%	0.0%	21.7%

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator TPB yang belum mencapai target TPB sebagian besar (81,1%) merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Separuhnya terkait dengan urusan wajib terkait pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan 25,9% terkait dengan urusan wajib tetapi tidak terkait langsung pelayanan dasar pada bidang tenaga kerja, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penanaman modal, perhubungan, kominfo dan lingkungan hidup. Pada urusan pilihan, terdapat target TPB yang belum tercapai pada urusan ESDM, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan. Adapun pada urusan penunjang adalah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan. Hal-hal ini selayaknya menjadi permasalahan dan menjadi isu penting pembangunan pada periode tahun 2021-2026. Adapun target yang belum teridentifikasi menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang dalam penyediaannya untuk segera melengkapi sistem pendataannya, sehingga informasi mengenai kondisi pencapaian TPB dapat diperoleh dengan baik.

Khusus proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, walaupun proporsi kepesertaan terus meningkat, namun sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 36,73 persen. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebanyak 639.057 orang, dengan jumlah kepesertaan aktif sebanyak 288.375 orang dan sisanya adalah peserta non aktif. Pemerintah daerah akan terus mendorong

peningkatan proporsi kepesertaan ini agar para pekerja mendapatkan perlindungan sosial ekonomi pada saat bekerja maupun setelah pensiun.



Sumber: Kemenaker, 2021

Gambar 2-78 Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan

Tabel 2-58 Indikator TPB yang tidak mencapai target TPB Provinsi Jambi periode 2016 – 2019/2020 berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan bidang.

Kode	Target TPB	Urusan	Sub-Urusan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	1	Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	1	Pendidikan
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	1	Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	1	Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Sederajat.	1	Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur \geq 15 tahun.	1	Pendidikan
4.5.1*	3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan	1	Pendidikan
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	1	Pendidikan
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.	1	Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	1	Kesehatan
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1	Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	1	Kesehatan
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1	Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1	Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.	1	Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur \leq 18 tahun.	1	Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1	Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur \geq 15 tahun dalam satu tahun terakhir	1	Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR).	1	Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur \geq 15 tahun.	1	Kesehatan
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	1	Perkim

Kode	Target TPB	Urusan	Sub-Urusan
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	1	Perkim
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1	Perkim
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1	Perkim
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	1	Perkim
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan.	1	Sosial
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	1	Sosial
1.5.3*	Rencana dan Implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework of Disaster Risk Reduction 2015-2030	1	Tantib Linmas
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	1	Tantib Linmas
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	2	Tenaga kerja
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	2	Tenaga kerja
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	2	Tenaga kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2	Tenaga kerja
2.1.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2	Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2	Pangan
3.7.1.(b)	Angka penggunaan MKJP cara modern.	2	P2- KB
5.6.1.(a)	Unmet need KB yang tidak terpenuhi).	2	P2-KB
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa.	2	Penanaman modal
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	2	Perhubungan
17.8.1*	Persentase pengguna internet	2	Kominfo
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	2	P3A

Kode	Target TPB	Urusan	Sub-Urusan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	2	P3A
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	2	P3A
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	2	Lingkungan Hidup
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	2	Lingkungan Hidup
7.3.1*	Intensitas energi primer	3	ESDM
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	3	Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3	Perindustrian
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 WPPNRI secara berkelanjutan.	3	Kel.dan Perikanan
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	3	Kel.dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	3	Kel.dan Perikanan
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan.	3	Kehutanan
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	4	Perencanaan
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	4	Perencanaan
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	4	Keuangan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	4	Keuangan

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2021 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan, demikian pula selama dua tahun pelaksanaan RPJMD. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecuali tahun 2020 dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; **Pertama**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. **Kedua**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, telah dilakukan melalui berbagai metode pengelolaan. Ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi. Dampak reformasi ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Upaya

ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2006. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2016 – 2020.

Tabel 3-1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	3.394.795.872.564	4.311.792.610.112	4.412.464.565.281	4.575.192.849.736	4.400.624.372.119	5,33
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.233.514.664.110	1.580.304.867.342	1.656.569.597.282	1.651.089.944.335	1.535.183.487.238	4,47
1.1.1.	Pajak daerah	966.519.347.103	1.316.162.467.485	1.374.289.409.975	1.345.106.684.308	1.292.729.048.514	5,99
1.1.2.	Retribusi daerah	19.073.840.425	19.864.952.006	20.208.219.913	19.109.708.620	18.593.509.421	-0,51
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	26.979.273.416	29.054.470.467	30.511.006.522	31.064.882.847	27.923.864.762	0,69
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	220.942.203.166	215.222.977.385	231.560.960.872	255.808.668.561	195.937.064.541	-2,37
1.2.	Dana Perimbangan	1.547.888.628.151	2.723.260.588.950	2.745.221.967.999	2.896.753.806.401	2.849.121.391.956	12,98
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	395.791.297.693	390.520.754.714	406.804.973.987	396.542.022.347	444.609.573.625	2,35
1.2.2.	Dana alokasi umum	1.070.452.478.000	1.397.912.161.000	1.399.367.134.000	1.433.203.410.000	1.288.418.327.000	3,78
1.2.3.	Dana alokasi khusus	81.644.852.458	934.827.673.236	939.049.860.012	1.067.008.374.054	1.116.093.491.331	68,72
1.3	Trasnfer Pemerintah Pusat Lainnya	611.790.980.303	-	9.125.000.000	25.741.099.000	13.767.184.000	8,57
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.601.600.000	8.227.153.820	1.548.000.000	1.608.000.000	2.552.308.925	9,77
1.4.1	Hibah	1.601.600.000	1.658.460.000	1.548.000.000	1.608.000.000	2.552.308.925	9,77
1.4.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.4.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.4.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	0,00

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.4.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.4.6	Pendapatan luar biasa	-	6.568.693.820	-	-	-	0,00
2	Belanja	3.294.484.968.673	4.132.941.881.087	4.198.255.718.275	4.824.366.351.413	4.430.392.750.899	6,10
2.1	Belanja Operasi	1.947.816.538.589	2.561.387.667.311	2.733.539.585.386	3.079.700.724.871	2.902.115.287.977	8,30
2.1.1	Belanja Pegawai	623.561.725.029	1.127.581.142.739	1.303.794.986.014	1.382.612.319.837	1.391.317.474.093	17,41
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	646.197.608.660	847.470.203.952	941.766.705.945	1.024.032.706.552	743.288.221.805	2,84
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	500.000.000	500.000.000	550.000.000	1,92
2.1.4	Belanja Hibah	678.057.204.900	586.336.320.620	487.359.693.428	672.272.497.982	766.631.092.079	2,49
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	118.200.000	283.200.500	328.500.000	22,68
2.2	Belanja Modal	945.539.006.404	895.648.009.333	784.723.907.609	866.500.805.931	642.695.707.788	-7,43
2.3	Belanja Tidak Terduga	93.456.012	58.345.000	96.682.192	91.193.410	152.703.760.217	339,19
2.4	Belanja Bagi Hasil	399.535.722.421	517.348.197.874	579.768.148.688	710.641.702.401	631.105.361.717	9,57
2.5	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.245.247	158.499.661.569	100.127.394.400	167.431.924.800	101.772.633.200	132,43
2.5.1	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	-	156.720.000.000	98.066.500.000	165.466.500.000	99.800.420.000	-8,63
2.5.2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.500.245.247	1.779.661.569	2.060.894.400	1.965.424.800	1.972.213.200	5,62
3	Pembiayaan	177.910.337.967	278.221.241.857	457.071.970.882	669.496.931.347	420.323.429.670	18,76
3.1	Penerimaan Pembiayaan	177.910.337.967	278.221.241.857	457.071.970.882	669.496.931.347	420.323.429.670	18,76
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	0,00

Sumber: Bakeuda, 2021

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program **intensifikasi** dan **ekstensifikasi** terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2016-2020 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.
2. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten, dan menyediakan beberapa gerai samsat pada pusat perbelanjaan di Kota Jambi, serta pembayaran pajak melalui ATM.
3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengadakan pertemuan dengan *Dealer* Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha *Show Room*

kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru.

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
7. Melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak dan retribusi daerah baik selama tahun 2016-2019, kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan kemampuan penerimaan daerah akibat kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan transfer pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat

tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Bila dilihat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), dengan membandingkan Total PAD dengan Dana Perimbangan, maka terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah sempat meningkat pada periode tahun 2016-2018, namun terus menurun setelahnya hingga tahun 2020. Kondisi ini disebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik pajak daerah maupun retribusi. Selain itu, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, terlihat bahwa pada periode tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan adalah sebesar 5,33%, dengan komponen pendapatan dengan pertumbuhan rata-rata terbesar adalah dana perimbangan yaitu 12,98% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 12,74%, sementara PAD hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,47%.

Tabel 3-2 Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai RKKD (%)
2016	57,12
2017	58,03
2018	60,14
2019	56,50
2020	52,32

Sumber: *Bakeuda Provinsi Jambi 2021, data diolah*

Tabel 3-3 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 (Rp)

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		%	Ket								
1	PENDAPATAN	98,86	UT	101,84	OT	104,71	OT	100,19	OT	105,37	OT
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	93,33	UT	110,77	OT	111,14	OT	105,40	OT	112,80	OT
1.1.1.	Pajak daerah	87,58	UT	109,24	OT	107,82	OT	100,30	OT	111,65	OT
1.1.2.	Retribusi daerah	98,40	UT	98,27	UT	96,69	UT	80,23	UT	216,07	OT
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	73,02	UT	77,49	UT	101,31	OT	106,34	OT	89,46	UT
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	136,59	OT	131,08	OT	140,43	OT	148,42	OT	119,99	OT
1.2.	Dana Perimbangan	103,62	OT	97,18	UT	101,54	OT	97,44	UT	101,77	OT
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	139,44	OT	89,39	UT	127,06	OT	88,69	UT	122,06	OT
1.2.2.	Dana alokasi umum	100,00	E	100,00	E	100,00	E	100,00	E	99,73	UT
1.2.3.	Dana alokasi khusus	58,51	UT	96,61	UT	95,42	UT	97,67	UT	97,62	UT
1.3	Trasnfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	E	-	E	50,00	UT	100,00	E	100,00	E

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100,00	E	442,68	OT	96,36	UT	108,06	OT	127,11	OT
1.4.1	Hibah	100,00	E	89,24	UT	96,36	UT	108,06	OT	127,11	OT
1.4.2	Dana darurat	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E
1.4.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E
1.4.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E
1.4.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E
1.4.6	Pendapatan luar biasa	-	E	-	OT	-	E	-	E	-	E

Sumber: *Bakeuda, 2021*

Keterangan: E = Equal (realisasi sama dengan target/anggaran)

UT = Under Target (realisasi lebih kecil dari target/anggaran)

OT = Over Target (realisasi lebih besar dari target/anggaran)

Tabel di atas memperlihatkan kinerja realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020, dengan membandingkan antara anggaran pada perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Secara umum pendapatan daerah pada periode ini cukup efisien dan terus memperlihatkan perbaikan, yang ditandai dengan selalu terlampauinya target pendapatan kecuali tahun 2016. Tidak tercapainya target pada tahun 2016 tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya komponen Pendapatan Asli Daerah, sementara dana perimbangan mengalami pelampauan target meskipun pada subkomponen dana alokasi khusus tidak mencapai target dan komponen pendapatan lainnya terealisasi sama dengan target. Komponen PAD yang kinerjanya kurang baik dalam periode 2016-2021 adalah retribusi daerah, karena selalu terealisasi dibawah target kecuali tahun 2020. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dalam pemanfaatan aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan yang potensial.

Pada tabel berikut dapat dilihat potret proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 dari sisi pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2016 -2018 menunjukkan tren peningkatan, namun kembali mengalami penurunan hingga proporsi pada tahun 2020 lebih kecil dibanding tahun 2016, dimana pada tahun 2016 PAD berkontribusi sebesar 36,34% terhadap pendapatan, pada tahun 2020 menjadi 34,89%. Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan melalui dana perimbangan yang terus memberikan kontribusi besar, hingga terakhir pada tahun 2020 sebesar 64,74% dari sebelumnya sebesar 45,60% pada tahun 2016. Gambaran ini belum sejalan dengan semangat otonomi daerah, dimana sumber pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Tabel 3-4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	36,34	36,65	37,54	36,09	34,89
1.1.1.	Pajak daerah	28,47	30,52	31,15	29,40	29,38
1.1.2.	Retribusi daerah	0,56	0,46	0,46	0,42	0,42
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,79	0,67	0,69	0,68	0,63
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6,51	4,99	5,25	5,59	4,45
1.2.	Dana Perimbangan	45,60	63,16	62,22	63,31	64,74
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	11,66	9,06	9,22	8,67	10,10
1.2.2.	Dana alokasi umum	31,53	32,42	31,71	31,33	29,28
1.2.3.	Dana alokasi khusus	2,41	21,68	21,28	23,32	25,36
1.3	Trasfer Pemerintah Pusat Lainnya	18,02	-	0,21	0,56	0,31
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,05	0,19	0,04	0,04	0,06
1.4.1	Hibah	0,05	0,04	0,04	0,04	0,06
1.4.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.4.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.4.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-
1.4.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.4.6	Pendapatan luar biasa	-	0,15	-	-	-

Sumber: Bakeuda, 2021

Tabel 3-5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
2.1	Belanja Operasi	59,12	61,97	65,11	63,84	65,50
2.1.1	Belanja Pegawai	18,93	27,28	31,06	28,66	31,40
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,61	20,51	22,43	21,23	16,78
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	0,01	0,01	0,01
2.1.4	Belanja Hibah	20,58	14,19	11,61	13,93	17,30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00	0,01	0,01
2.2	Belanja Modal	28,70	21,67	18,69	17,96	14,51
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
2.4	Belanja Bagi Hasil	12,13	12,52	13,81	14,73	14,24
2.5	Belanja Bantuan Keuangan	0,05	3,84	2,38	3,47	2,30
2.5.1	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	-	3,79	2,34	3,43	2,25
2.5.2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04
3	Pembiayaan	5,40	6,73	10,89	13,88	9,49
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5,40	6,73	10,89	13,88	9,49
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Sumber: Bakeuda, 2021

Sementara untuk proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 dari sisi belanja daerah, tabel di atas memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi mendominasi belanja Pemerintah Provinsi Jambi dengan tren peningkatan proporsi setiap tahunnya. Hal sebaliknya terjadi pada belanja modal yang terus mengalami penurunan proporsi, sedangkan komponen belanja lainnya berfluktuasi. Komponen belanja operasi yang mengalami peningkatan proporsi setiap tahunnya adalah belanja pegawai yang merupakan belanja wajib dan mengikat berupa belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungut pajak daerah, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru. Komponen lainnya pada belanja operasi yang proporsinya meningkat cukup

signifikan pada tahun 2020 adalah belanja hibah, dimana beberapa program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang salah satunya adalah Jaring Pengaman Sosial ditempatkan pada jenis belanja ini, selain belanja hibah kepada penyelenggara Pemilukada dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selain bertambahnya proporsi belanja hibah, kenaikan proporsi belanja tidak terduga pada tahun 2020 sebagai antisipasi bila anggaran yang disediakan untuk penanganan dampak Covid-19 dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kurang, juga menjadi penyebab berkurangnya proporsi belanja modal pada tahun 2020 secara cukup signifikan.

3.1.2 Neraca Daerah

Pertumbuhan aset lancar dalam neraca keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 3,01 persen. Peningkatan aset lancar ini salah satu disebabkan oleh meningkatnya kas dari Rp319.968.964.278,- pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp432.451.382.483,- pada tahun 2020. Sementara piutang tumbuh rata-rata 1,81 persen per tahun dan piutang lain-lain rata-rata tumbuh -1,94 persen per tahun atau mengalami penurunan. Penurunan juga terjadi pada persediaan yang rata-rata mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,80 persen pertahun.

Investasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 5,59 persen, investasi ini didorong oleh peningkatan investasi permanen yang tumbuh rata-rata sebesar 5,77 persen dan investasi non permanen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,56 persen pertahun. Investasi ini ditempatkan di beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinilai mempunyai prospek yang baik. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 juga mengalami

peningkatan yaitu pada tahun 2016 senilai Rp4.351.091.973.074,- menjadi senilai Rp6.711.472.204.139,- pada tahun 2020, sehingga secara rata-rata aset tetap tumbuh sebesar 9,05 persen selama tahun 2016-2020. Kontribusi terbesar dari aset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp5.408.154.358.364,- pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp7.727.796.254.785,- persen pada tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah gedung dan bangunan yaitu dari Rp802.945.051.432,- pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.720.231.317.702,- pada tahun 2020. Kemudian peralatan dan mesin dari Rp849.221.633.178,- pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.667.913.033.379,- pada tahun 2020. Peningkatan kontribusi jalan, jaringan dan instalasi serta gedung dan bangunan ini disebabkan alokasi biaya infrastruktur kurun waktu 2016-2020 yang meningkat sehingga beberapa asset Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan.

Utang jangka pendek dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengalami penurunan dari Rp170.147.336.453,- pada tahun 2016 turun menjadi Rp144.615.379.908,- atau tumbuh negatif rata-rata sebesar 3,20 persen pertahun selama 2016-2020. Munculnya utang jangka pendek ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban jangka pendek yaitu dari Rp Rp213.411.027.840,- pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp389.279.172.270,- pada tahun 2020 atau meningkat rata-rata sebesar 12,77 persen. Perbedaan antara utang jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi masih mempunyai utang belanja dan utang pada pihak ketiga sehingga walaupun utang jangka pendek turun, namun kewajiban jangka pendek tetap meningkat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki utang jangka panjang sehingga kewajiban jangka panjang sampai tahun 2020 tidak ada. Dengan demikian dari perhitungan kewajiban jangka pendek tersebut sama jumlahnya

dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi yaitu tumbuh rata-rata sebesar 12,77 persen pertahun selama 2016-2020.

Tabel 3-6 Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020

KD. REK		2016	2017	2018	2019	2020	GR(%)
1	ASET	6.230.703.051.278	7.922.958.480.711	8.495.832.583.829	8.941.719.097.775	9.058.798.239.794	7,77
01.01	ASET LANCAR	660.157.534.896	788.400.519.957	995.246.618.336	992.014.627.206	765.755.995.537	3,01
01.01.01	Kas	319.968.964.278	500.862.927.894	717.180.441.963	468.227.411.054	432.451.382.483	6,21
01.01.02	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0,00
01.01.03	Piutang	51.312.870.406	27.334.097.428	33.979.981.852	251.859.944.723	56.138.206.655	1,81
01.01.04	Belanja dibayar dimuka	982.645.320	1.252.163.261	843.812.813	845.725.257	661.979.657	-7,60
01.01.05	Piutang Lain-lain	-	7.415.225.560	6.721.699.200	-	-	0,00
01.01.06	Persediaan	287.893.054.892	251.536.105.814	236.520.682.508	271.081.546.172	276.504.426.742	-0,80
	JUMLAH ASET LANCAR	660.157.534.896	788.400.519.957	995.246.618.336	992.014.627.206	765.755.995.537	3,01
	PERT.ASET LANCAR (%)	38,19	19,43	26,24	(0,32)	(22,81)	190,21
01.02	INVESTASI JANGKA PANJANG	314.986.990.087	344.594.455.583	386.387.041.199	427.714.586.558	413.360.381.437	5,59
01.02.01	Investasi Permanen Non	12.188.327.347	12.022.351.306	12.197.067.306	12358783135	12.533.929.154	0,56
01.02.02	Investasi Permanen	302.798.662.740	332.572.104.277	374.189.973.894	4,15356E+11	400.826.452.283	5,77
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	314.986.990.087	344.594.455.583	386.387.041.199	427.714.586.558	413.360.381.437	5,59
	PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%)	3,59	9,40	12,13	10,70	(6,29)	211,87
01.03	ASET TETAP	4.351.091.973.074	5.869.792.729.936	6.138.019.136.778	6.524.037.916.803	6.711.472.204.139	9,05

KD. REK		2016	2017	2018	2019	2020	GR(%)
01.03.01	Tanah	651.861.132.359	755.588.163.101	782.603.827.388	785.181.775.722	746.820.630.097	2,76
01.03.02	Peralatan dan Mesin	849.221.633.178	1.059.612.798.143	1.276.370.389.402	1.513.917.191.769	1.667.913.033.379	14,45
01.03.03	Gedung dan Bangunan	802.945.051.432	1.309.278.538.420	1.422.186.530.463	1.575.338.632.494	1.720.231.317.702	16,46
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.408.154.358.364	6.447.316.543.350	6.953.653.854.201	7.333.105.832.486	7.727.796.254.785	7,40
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	365.154.755.446	409.861.419.365	458.019.324.660	502.637.720.745	466.335.510.863	5,01
01.03.06	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.740.425.400	59.944.575.232	60.307.829.961	110.279.947.679	94.622.912.487	9,63
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	(3.785.985.383.105)	(4.171.809.307.675)	(4.815.122.619.298)	(5.296.423.184.093)	(5.712.247.455.174)	8,57
	JUMLAH ASET TETAP	4.351.091.973.074	5.869.792.729.936	6.138.019.136.778	6.524.037.916.803	6.711.472.204.139	9,05
	PERT.ASET TETAP (%)	17,54	34,90	4,57	6,29	2,87	-30,36
01.04	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00
01.04.01	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0,00
	PERT.DANA CADANGAN (%)	-	-	-	-	-	0,00
01.05	ASET LAINNYA	904.466.553.221	918.273.055.245	976.179.787.516	997.951.967.208	1.168.209.658.681	5,25
01.05.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0,00
01.05.02	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	44.966.500	165.725.500	156.062.000	156062000	120.562.000	21,80
01.05.03	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	189.742.089.055	189.742.089.055	189.742.089.055	1,89742E+11	397.742.089.055	15,95

KD. REK		2016	2017	2018	2019	2020	GR(%)
01.05.04	Aset Tidak Berwujud	9.295.795.680	11.167.077.439	9.532.845.680	10048341699	10.221.497.949	1,92
01.05.05	Aset Lain-lain	712.136.129.486	734.679.084.488	793.799.303.970	8,25337E+11	915.157.760.271	5,14
	Akumulasi Amortisasi	(5.578.594.294)	(6.448.141.374)	(6.861.088.450)	(7.179.144.083,80)	(7.515.137.483)	6,14
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	(1.173.833.206)	(11.032.779.863)	(10.189.424.739)	(20.152.583.464,52)	(147.517.113.112)	162,93
	JUMLAH ASET LAINNYA	904.466.553.221	918.273.055.245	976.179.787.516	997.951.967.208,15	1.168.209.658.681	5,25
	PERT.ASET LAINNYA (%)	(0,25)	1,53	6,31	2,23	17,06	333,43
	JUMLAH ASET	6.230.703.051.278	7.922.958.480.711	8.495.832.583.829	8.941.719.097.775	9.058.798.239.794	7,77
	PERT.ASET (%)	15,59	27,16	7,23	5,25	1,31	-39,07

Sumber : Bakeuda, 2021

Tabel 3-7 Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2016 - 31 Desember 2020

Kode rek.		2016	2017	2018	2019	2020	GR (%)
1		2	3	4	5	6	7
2	KEWAJIBAN	213.411.027.840	347.596.657.213	445.044.323.195	411.030.632.726	389.279.172.270	12,77
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	213.411.027.840	347.596.657.213	445.044.323.195	411.030.632.726	389.279.172.270	12,77
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	0,00
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	0,00
4.1.6	Utang Belanja	1.515.968.967	1.705.840.898	1.810.228.744	270.437.818.403	244.663.792.362	176,42
5.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	170.147.336.453	302.099.859.304	397.334.470.377	140.592.814.322	144.615.379.908	-3,20
6.1.8	Utang Kepada Pihak Ketiga	41.747.722.420	43.790.957.011	45.899.624.074			1,91
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	213.411.027.840	347.596.657.213	445.044.323.195	411.030.632.726	389.279.172.270	12,77
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)	56,00	62,88	28,03	(7,64)	(5,29)	-
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0,00
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)	-	-	-	-	-	0,00

Kode rek.	2016	2017	2018	2019	2020	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH KEWAJIBAN	213.411.027.840	347.596.657.213	445.044.323.195	411.030.632.726	389.279.172.270	12,77
PERT. KEWAJIBAN (%)	56,00	62,88	28,03	(7,64)	(5,29)	162,39

Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, 2021

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-8 Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio Likuiditas					
1. Rasio Lancar	3,09	2,27	2,24	2,41	1,97
2. Quick Ratio	1,74	1,54	1,70	1,75	1,26

Sumber: Hasil Pengolahan (2021)

Rasio Lancar (Current ratio), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Provinsi Jambi dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2020 selalu

lebih besar dari 1,5 namun menunjukkan tren penurunan hingga 1,97 pada tahun 2020 dari 3,09 pada tahun 2016. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun jika dilihat dari trend nilai rasio lancar tersebut cenderung terus menurun sudah mendekati angka 1,5, maka kedepan Pemerintah Provinsi Jambi, harus mulai hati-hati dalam mengelola asset lancarnya terutama terkait dengan kewajiban jangka pendek.

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka *quick ratio* yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya *quick ratio* yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2020 masih lebih besar dari 1. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Provinsi Jambi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun nilai dari *quick ratio* menunjukkan kecendrungan yang menurun, sehingga kedepan perlu pengelolaan asset lancar pemerintah daerah lebih hati-hati.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan

formula tersebut, maka rasio solvabilitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2020 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3-9 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio Solvabilitas					
1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04
2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04

Sumber: Hasil Pengolahan (2021).

Rasio kewajiban terhadap aset diperoleh dengan membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan aset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2016-2020 berada pada rentang 0,03 – 0,04. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap aset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 cukup kuat jika untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Sementara rasio kewajiban terhadap ekuitas didapat dengan membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2016-2020 berada pada rentang 0,04-0,06. Nilai rasio ini hampir sama dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah

Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas (lihat tabel sebelumnya). Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Rasio aktivitas untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-10 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio Aktivitas					
1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang	3,02	3,64	2,81	11,40	8,26
2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan	15,89	12,43	10,48	10,36	11,03

Sumber: Hasil Pengolahan (2021).

Rasio rata-rata umur piutang menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2016-2020 berada pada rentang 2,81 – 11,40. Tabel di atas menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 relatif berfluktuasi, namun cenderung naik.

Nilai Rasio rata-rata umur persediaan menunjukkan jumlah perputaran persediaan dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relatif rendah dan dapat mengganggu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relatif besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tersebut pada tahun 2016-2020 berada pada rentang 10,36-15,89, dengan tren menurun. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama

tahun 2016-2020 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020.

Tabel 3-11 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi

No	Uraian	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2016	623.561.725.029	3.294.484.968.673	18,93
2	2017	1.127.581.142.739	4.132.941.881.087	27,28
3	2018	1.303.794.986.014	4.198.255.718.275	31,06
4	2019	1.382.612.319.837	4.824.366.351.413	28,66
5	2020	1.391.317.474.093	4.430.392.750.899	31,40

Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, 2021

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dari proporsi belanja ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk belanja aparatur semakin besar dan mengurangi proporsi belanja program selama tahun 2016-2020. Kondisi ini kedepan harus dibenahi, agar proporsi belanja menjadi lebih fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Kondisi alokasi anggaran ini mengindikasikan bahwa, pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2016-2020 belum mampu mendorong alokasi anggaran pada belanja publik yaitu untuk menstimulasi ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang rusak.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2016–2018 terjadi surplus anggaran dan pada tahun 2019-2020 terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran pada tahun 2019-2020 tersebut dipenuhi dari Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3-12 Defisit Riil Anggaran

N O	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata- rata Pertu mbuh an
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.394.795.872.564	4.311.792.610.112	4.412.464.565.281	4.575.192.849.736	4.400.624.372.119	5,33
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	3.294.484.968.673	4.132.941.881.087	4.198.255.718.275	4.824.366.351.413	4.430.392.750.899	6,10
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
	Defisit riil	100.310.903.891	178.850.729.025	214.208.847.006	(249.173.501.676)	(29.768.378.779)	- 178,43

Sumber : Bakeuda Provins Jambi, 2021(diolah)

Tabel 3-13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	5,400	6,732	10,887	13,877	9,487
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : Bakeuda Provinsi Jambi, 2021

Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembiayaan APBD Provinsi Jambi selama tahun 2016-2020 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

Tabel 3-14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	278.221.241.857	100	457.071.970.882	100	669.496.931.347	100	420.323.429.670	100	285.774.677.553	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	(88.353.244.641)	-31,76	153.608.141.544	33,61	166.065.027.961	24,80	84.642.815.824	20,14	174.196.723.107	60,96
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	49.027.650.454	17,62	(81.981.672.554)	17,94	30.677.223.158	4,58	(62.825.879.424)	-14,95	(44.545.360.208)	-15,59
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	200.000.000	0,07	6.368.653.820	1,39	(58.412.000)	-0,01	120.000.000	0,03	544.308.925	0,19
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	317.346.836.045	114,06	379.076.848.072	82,94	472.813.092.228	70,62	398.386.493.271	94,78	155.579.005.729	54,44
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
7.	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Sumber: Bakeuda (diolah), 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Pembentuk Silpa terbesar berasal dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada tahun 2020 terjadi pergeseran proporsi pembentuk Silpa, dimana proporsi terbesar berasal dari pelampauan PAD. Kondisi ini perlu ditingkatkan, dimana Silpa diupayakan berasal dari pelampauan target pendapatan bukan berasal dari belanja yang tidak terealisasi ataupun penghematan belanja.

Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 5 tahun kedepan (tahun 2022-2026) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup :

pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Jambi pada tahun 2022-2026 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, atau pada Bank Jambi.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan bidang usaha BUMD.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Jambi untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jambi diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor

tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan emudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;

5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN.
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

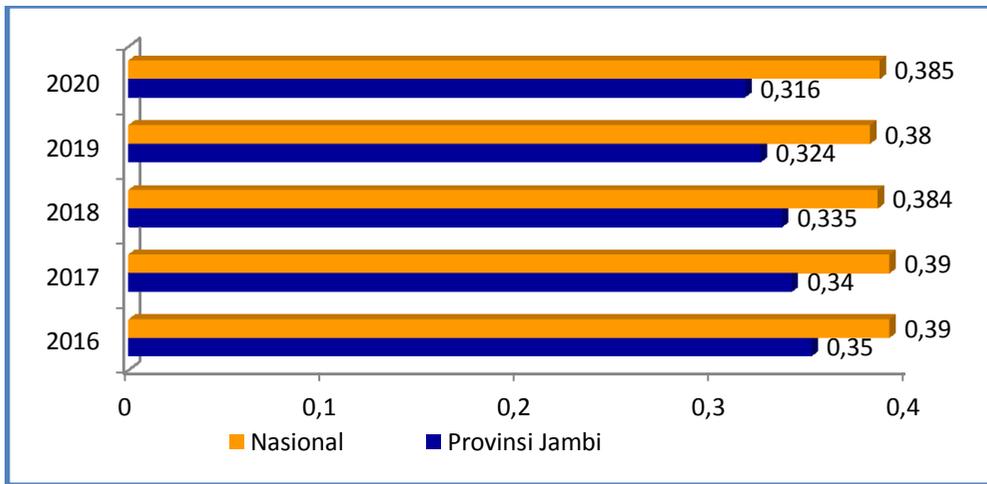
Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian berikut memaparkan beberapa indikasi permasalahan ini, yaitu:

1. Belum diterapkannya prinsip aturan hukum dengan baik. Pemerintah belum menjamin kepastian tegaknya hukum terhadap beberapa hal yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masih berlangsung aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian dan aktivitas penambangan ilegal.
2. Prinsip daya tanggap yang baik terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Daya tanggap yang dibutuhkan adalah terkait dengan:
 - a. Tata guna lahan (*land use planning*), yaitu struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharannya (UUPA No.5 tahun 1960). Pemerintah Provinsi Jambi perlu menanggapi dengan cepat masalah ini dikarenakan basis perekonomian wilayahnya terletak pada sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya lahan (pertanian, kehutanan dan pertambangan) serta masih

- tingginya konflik lahan. Dikhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan situasi yang kontra produktif bagi para pelaku usaha serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya.
- b. Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, yaitu separuh anggaran Pendapatan Daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan dasar. Penggalan sumber pendanaan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat mendanai pembangunan wilayah sesuai tujuan dan sasaran yang saat ini kontribusinya relatif rendah merupakan masalah dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Belum diterapkannya prinsip visi strategis dengan baik, nampak dari belum dilakukannya penataan lahan dengan cepat sebagaimana yang telah dijelaskan serta masih minimnya upaya membangun iklim investasi yang mendukung penguatan infrastruktur perekonomian, khususnya investasi sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode manakala Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025 ditetapkan.

4.1.2 Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

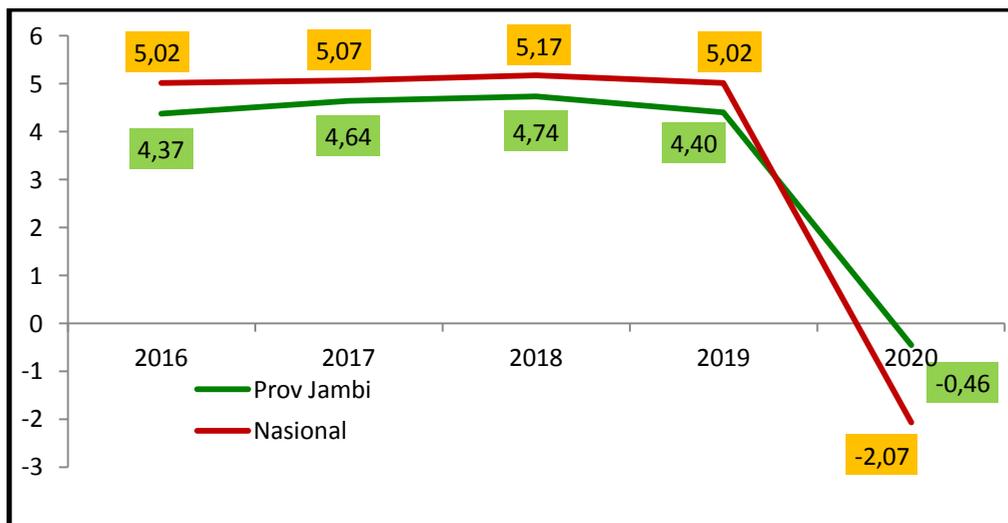
Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020, juga dialami oleh Provinsi lainnya di Sumatera. Kontraksi terdalam dialami oleh Provinsi Riau, yang mengalami pertumbuhan minus 3,80 persen, sedangkan kontraksi terkecil dialami oleh Provinsi Bengkulu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,02 persen. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berada pada urutan ke-empat, dibawah Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Aceh, sedangkan dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi lainnya di Sumatera, pertumbuhan Provinsi Jambi masih lebih baik.



Sumber : BPS 2021

Gambar 4-1 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di Provinsi Jambi ini juga masih lebih baik dari nasional, demikian pula indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) masih tetap memperlihatkan tren membaik. Namun demikian jika melihat tren lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi masih berada di bawah nasional, sehingga perlambatan ini juga perlu diintervensi dengan baik.



Sumber: Data diolah. BPS, 2021

Gambar 4-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk

jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

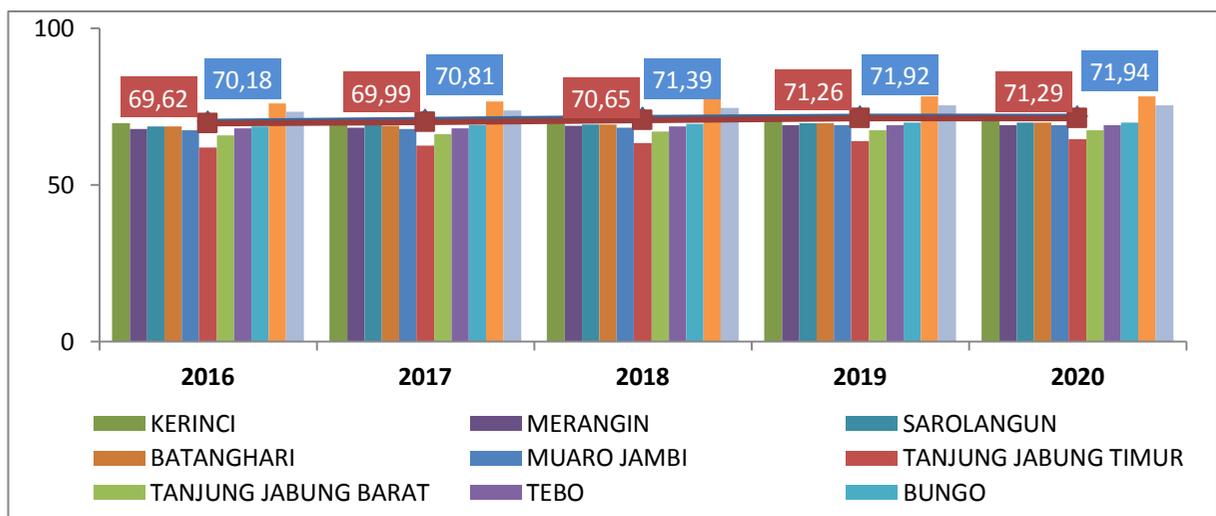
Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan

masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

4.1.3 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

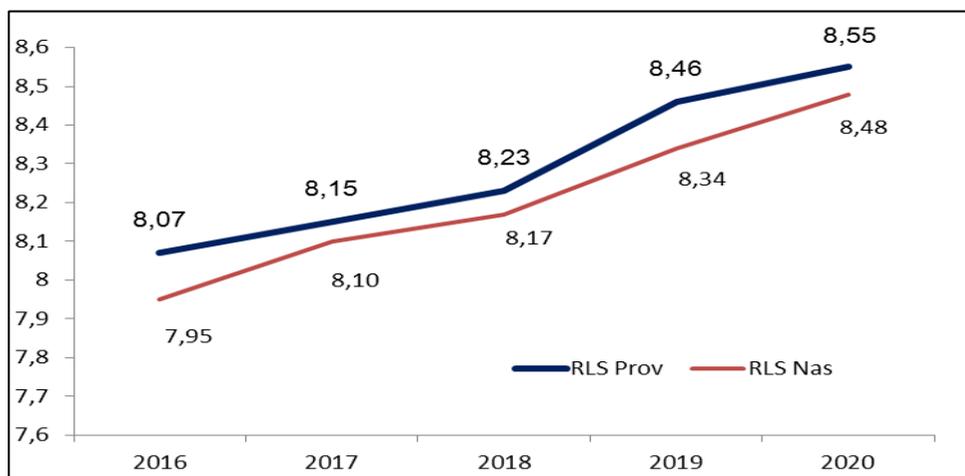


Gambar 4-3 IPM Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 dengan metode baru (BPS, 2021)

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2020 di Provinsi Jambi adalah 8,55 tahun, ini berarti rata-rata

penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau kelas 2 SMP. Walaupun pada dasarnya angka ini lebih baik dari nasional, namun capaian tersebut tergolong rendah dalam mendorong daya saing sumber daya manusia.

Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal. Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (*false unemployment*) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil.



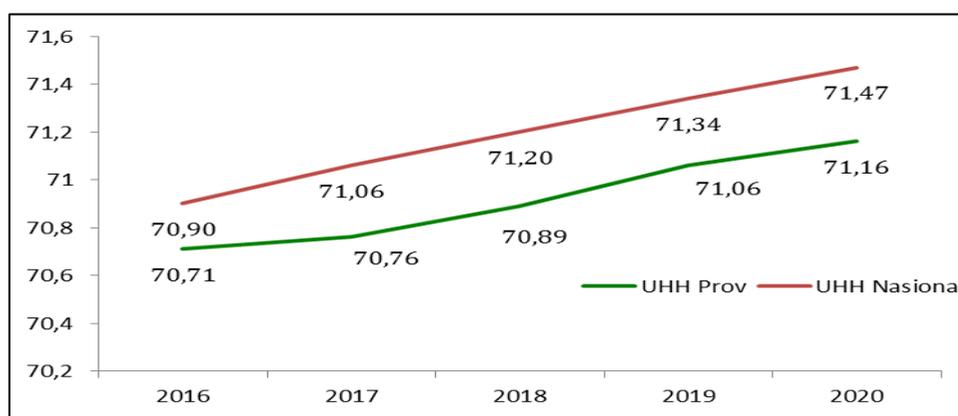
Sumber : BPS, 2021

Gambar 4-4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2016-2020

Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses

aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 70,71 tahun pada 2016 meningkat menjadi 71,16 tahun pada 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 71 – 72 tahun. Data tahun 2020 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,10 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 71,06 tahun menjadi 71,16 tahun atau meningkat 0,21%. Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Tahun 2021

Gambar 4-5 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2016-2020

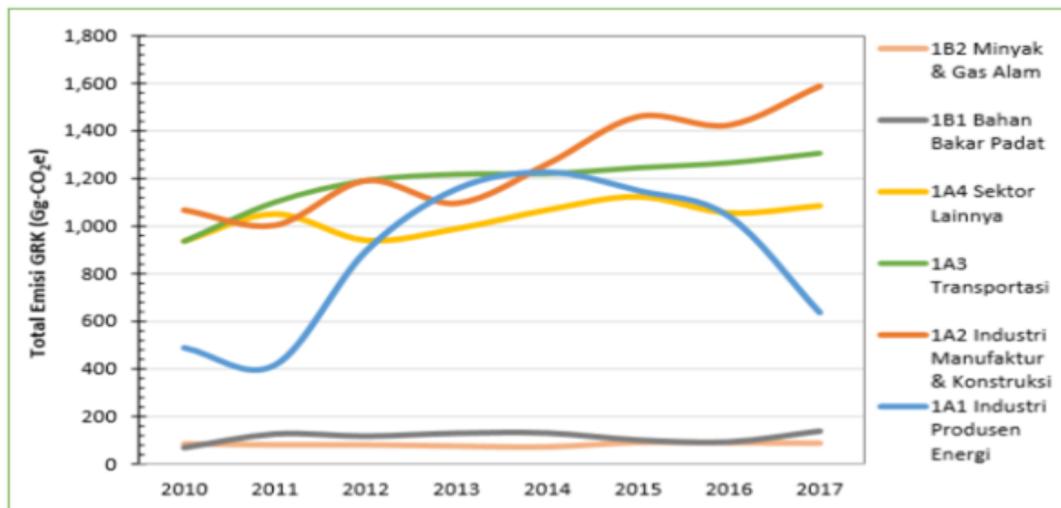
Hingga kini, Provinsi Jambi masih menghadapi masalah kesehatan bagi masyarakatnya. Masih belum tercapainya target angka kematian ibu, bayi dan balita yang disebabkan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan serta masih tingginya persentase merokok pada masyarakat umur lebih dari 15 tahun merupakan masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

4.1.4 Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan

indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.



Sumber: KLHS Energi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, UNDP, 2021

Gambar 4-6 Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2017



Sumber: Dinas LH Provinsi Jambi, 2021

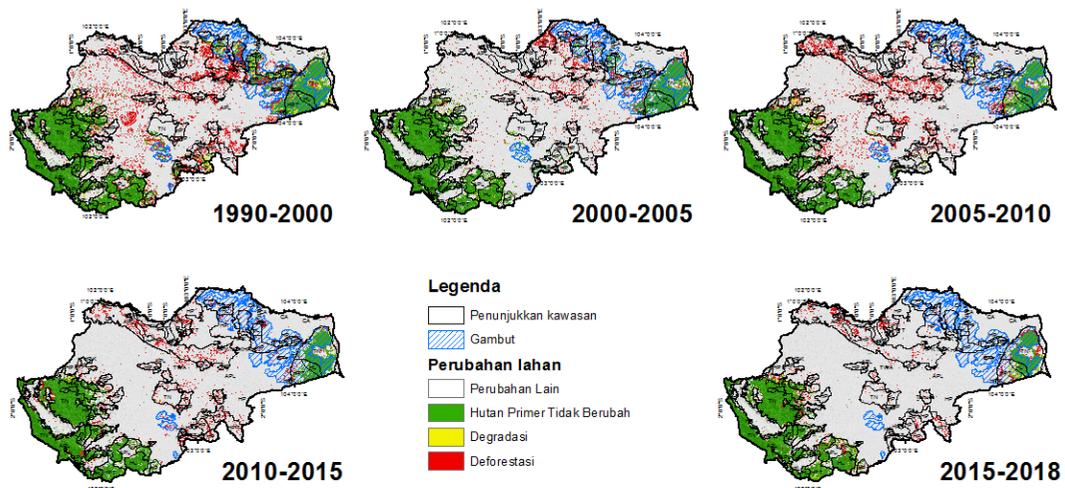
Gambar 4-7 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi

Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO₂e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO₂e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta

meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.



Gambar 4-8 Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, dimana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagai intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

4.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang

kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana,
- d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
- f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
- g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
- j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut:

- a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah

c. Penguatan sektor industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi). Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya: rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 juga harus memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, yaitu:

- a. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
- b. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
- c. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
- d. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut menjadi penopang agenda pembangunan nasional, yaitu:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta

kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan dan dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan; 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan 3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.

- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Berdasarkan ketujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional tersebut, Pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan untuk Pulau Sumatera, yaitu:

- Memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global melalui kerjasama internasional, seperti: Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), dan masyarakat ekonomi ASEAN
- Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
- Mempercepat transformasi ekonomi melalui:

- a. hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah;
- b. mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan Pelabuhan; dan.
- c. pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor, dengan hub internasional di Kuala Tanjung (Kabupaten Batubara, Sumatera Utara).

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan tersebut, Pemerintah merencanakan pelaksanaan 41 proyek strategis nasional. Beberapa diantaranya yang terkait dengan solusi permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, yang memiliki manfaat:
 - Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs).
 - Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun.
 - Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri (investasi dan bisnis).
2. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit, yang memiliki manfaat:
 - Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen;
 - Meningkatnya produktivitas sawit 10 persen per tahun;
 - Meningkatnya produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia;
 - Meningkatnya nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat.
3. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, yang memiliki manfaat meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan:
 - Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup
 - Menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen
4. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh, yang memiliki manfaat:

- Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi)
- Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan
- Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0.

5. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung

6. Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital, yang memiliki manfaat:

- Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK
- Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah desa/kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan
- Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman, terintegrasi, dan dapat diakses setiap saat, serta mampu untuk melakukan analisa Big Data dari berbagai sumber data yang tersedia.

7. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

8. Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)

Wilayah Provinsi Jambi dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan, yaitu bagian barat, tengah dan timur. Pembagian ini didasarkan pada karakter bentang alam. Bagian barat ditujukan untuk pembangunan berbasis sektor kehutanan dan konservasi sumber daya alam, bagian tengah merupakan sentra pembangunan berbasis sektor pertanian dan sektor lain yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lahan (pertambangan), sedangkan bagian timur ditujukan pada pembangunan sektor industri, perdagangan dan jasa serta interkoneksi antar wilayah di pesisir timur Sumatera.

Berdasarkan pembagian wilayah pembangunan tersebut, terdapat korelasi rencana pembangunannya dengan wilayah lain yang bersebelahan namun secara yurisdiksi merupakan wilayah provinsi lain, yaitu Provinsi Sumatera Barat (bagian barat dan tengah), Provinsi Riau

(bagian tengah dan timur), Provinsi Bengkulu (bagian barat) dan Provinsi Sumatera Selatan (bagian barat, tengah dan timur sebelah selatan Provinsi Jambi). Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditelaah rencana pembangunan pada wilayah-wilayah yang dimaksud karena akan saling terkait dengan rencana pembangunan di wilayah yang secara yurisdiksi merupakan wilayah Provinsi Jambi.

Hasil telaah menunjukkan bahwa ada kesamaan rencana pembangunan yang dilakukan di wilayah Provinsi Jambi yang berbasis pembagian wilayah pembangunan dengan rencana pembangunan pada wilayah-wilayah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud. Hal ini dikarenakan rencana pembangunan provinsi lain juga telah berdasarkan pada karakter dan potensi lokal. Dengan demikian, perlu dilakukan koordinasi antar pemerintah agar hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan di wilayah-wilayah yang berada didalam satu kesamaan wilayah pembangunan dapat saling menguatkan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada:

a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan

Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lahan-lahan pertanian pangan yang produktif dan berskala ekonomi, sehingga hasilnya akan mendukung peningkatan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tersebut dengan kualitas yang terjaga dan harga yang semakin terjangkau. Meningkatnya produksi pertanian pangan dapat menjadi salah satu sektor yang juga mendorong meningkatnya tingkat pendapatan kelompok masyarakat petani dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendongkrak perekonomian wilayah Provinsi Jambi.

Potensi pengembangan wilayah pertanian pangan sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Provinsi Jambi merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang merupakan DAS kedua terbesar di Indonesia dan pada saat ini merupakan sumber air yang belum banyak dimanfaatkan. Dibutuhkan penyediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dari aliran sungai ini berupa perluasan jaringan irigasi dan embung-embung penampungan air untuk kebutuhan lahan pertanian pangan teknis. Adanya infrastruktur ini akan merubah lahan pertanian kering yang belum dimanfaatkan menjadi lahan pertanian sawah irigasi teknis dengan luasan yang cukup signifikan untuk mendorong peningkatan aspek ketahanan pangan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Jambi yang juga dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan, mengingat lebih dari 70% pendapatan masyarakat miskin digunakan untuk konsumsi pangan dan lebih dari 20% digunakan untuk konsumsi beras atau bahan makanan pokok. Di sisi lain, adanya infrastruktur ini akan berfungsi juga didalam pengendalian potensi banjir yang di masa depan akan meningkat jika aktivitas manusia di daerah hulu yang menyebabkan tingginya sedimentasi dan pendangkalan aliran sungai di wilayah Provinsi Jambi tidak segera ditertibkan.

Perluasan lahan pertanian di lahan-lahan rawan kebakaran juga menjadi salah satu program yang dapat mendukung penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Adanya pemanfaatan lahan-lahan tersebut dan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat juga dapat berperan dalam mengurangi potensi bencana kebakaran lahan serta memburuknya kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi.

b. Penguatan kelembagaan koperasi petani dan nelayan

Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya adalah kelompok masyarakat yang sumber penghidupannya adalah pada sektor pertanian, khususnya pertanian perkebunan. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, berbagai upaya peningkatan produktivitas lahan dan akses kepada pembiayaan usaha termasuk investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dapat lebih diwujudkan. Disamping itu dengan menguatnya kelembagaan

koperasi ini akan menguatkan posisi tawar petani terhadap harga jual hasil produksi perkebunannya. Sisa hasil usaha yang dikelola oleh koperasi juga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan modal usaha maupun investasi pada sektor industri pengolahan yang dibutuhkan bersama dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan sistem ekonomi rakyat selaras dan karenanya harus dibarengi dengan kebijakan pembangunan yang fokus pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau. Ekonomi Hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi hijau mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mengakui nilai modal alam, meningkatkan ketahanan, membangun ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan, serta memperhitungkan penurunan emisi gas rumah kaca.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan koperasi yang bergerak pada sektor pertanian perkebunan difokuskan agar para anggotanya dapat berdaya untuk menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan adalah meningkatnya produktivitas lahan dan keuntungan pelaku usaha disamping mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup akibat perluasan lahan perkebunan yang dapat memicu terjadinya peningkatan gas emisi rumah kaca.

c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan)

Pembangunan infrastruktur statis ini tidak hanya dapat menekan biaya logistik, namun juga memiliki dampak lainnya berupa: menurunnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan pengangkutan yang digunakan pada saat ini serta dampak lanjutannya berupa konflik sosial antara masyarakat disepanjang jalan pengangkutan tersebut dengan para pengguna jalan. Keberadaan infrastruktur ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan menekan potensi terjadinya alih fungsi lahan di sekitar infrastruktur tersebut dibandingkan jenis infrastruktur pengangkutan lainnya (jalan tol atau jalan berbayar) mengingat konflik lahan masih merupakan permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi pada saat ini,

d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung

Pembangunan infrastruktur statis ini perlu dilakukan sebagai pelabuhan pengumpul sesuai arahan kebijakan pembangunan nasional. Di masa depan, diperlukan upaya peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung berikut fasilitasnya sebagai pendukung pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hub internasional untuk wilayah Pulau Sumatera. Letak geografis yang strategis menjadi pertimbangan terhadap upaya peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung ini, karena dapat mengurangi biaya logistik untuk kegiatan ekspor-impor bagi wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya, dan berdampak pada menurunnya harga barang-barang dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi

Pembangunan kawasan strategi ekonomi sangat diperlukan untuk mengakomodir pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian. Disamping selaras dengan RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 Pertumbuhan ekonomi hijau juga difokuskan pada pembangunan kawasan strategis ekonomi yang memfasilitasi pembangunan berbagai industri yang tidak hanya dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat namun juga meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi tekanan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

2. Pabrik pengolahan CPO (PKS) dengan kapasitas 5 ton/jam yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi pekebun rakyat. Pembangunan dilaksanakan pada daerah sentra perkebunan rakyat yang masih belum memiliki atau lokasinya jauh dari PKS yang sudah ada sehingga dapat mengurangi biaya logistik yang saat ini menjadi beban bagi masyarakat pelaku usaha. Saat ini dengan menggunakan data nasional, kapasitas penggunaan PKS sudah diatas 90%, dan karenanya dibutuhkan penambahan PKS untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan produk minyak sawit baik dalam maupun luar negeri.
3. Pabrik pengolahan limbah cair PKS yang dapat menghasilkan listrik biogas bagi operasional PKS maupun listrik bagi pemukiman sekitarnya sebagai bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Pabrik pengolahan aspal karet, sebagai upaya menyerap hasil produk perkebunan karet rakyat serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan instruktur nasional dan dapat mengurangi biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan.
5. Pembangkit listrik tenaga uap biomassa, yang bersumber bahan bakunya dari biomassa yang dihasilkan dari upaya peremajaan kebun karet, rehabilitasi lahan kritis, hasil pengelolaan hutan di areal program perhutanan sosial maupun hutan tanaman industri.

Pembangunan kawasan strategis ekonomi juga meningkatkan potensi Pendapatan Daerah melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan aktivitas perekonomian didalamnya.

f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital

Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang menggunakan layanan internet sebagai media dalam berkomunikasi, kolaborasi dan bekerjasama antar perusahaan atau individu. Program pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) beserta penguatan ekosistem ekonomi digital seperti pasar komoditas digital di sentra-sentra produksi perkebunan kopi, kayu manis dan rempah-rempah lainnya akan meningkatkan peluang pemasaran hasil produk pertaniannya hingga ke pasar global disertai dengan mengurangi biaya transaksi ekonomi yang terjadi pada saat ini melalui sistem tata niaga dan rantai pasok konvensional.

g. Penataan ruang dan tata guna tanah.

Penataan ruang wilayah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sudah merupakan kebutuhan mutlak, terutama Provinsi Jambi yang perekonomiannya masih tergantung pada lapangan usaha berbasis pada pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya yang terkandung didalamnya. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah perlu ditindaklanjuti dengan penataan penggunaan tanah yang baik, yang bertujuan untuk: i) mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah, sehingga tidak terjadi penggunaan lahan yang salah tempat; ii). mengatur persediaan lahan bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penatagunaan tanah yang salah urus; iii). mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, yaitu dengan mengendalikan kebutuhan masyarakat akan tanah; dan iv) menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Terwujudnya penataan ruang wilayah dan penataan penggunaan tanah yang baik merupakan wujud konkrit hasil dari reformasi birokrasi dan berjalannya proses pembangunan yang inklusif. Program ini juga akan mendukung peningkatan pelayanan pada bidang perumahan dan permukiman, yang difokuskan pada program peningkatan akses masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah-rendah, kepada air bersih dan sanitasi yang layak berbasis komunitas. Penyadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana disertai dengan pengalokasian kawasan permukiman di daerah layak huni – tidak rawan bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan relokasi masyarakat di daerah rawan bencana sesuai penataan ruang juga perlu menjadi prioritas.

h. kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik melalui pengelolaan satu data – satu peta

perencanaan tata guna lahan tampak belum cukup mengatur alokasi lahan produktif. Rencana induk perkebunan hanya dimiliki komoditas tertentu sementara masih banyak komoditas strategis lainnya. Perluasan perkebunan yang berlebihan perlu dikendalikan sehingga tidak merusak dan mengganggu lahan yang seharusnya dilindungi. Pengaturan yang minim pada lahan mengakibatkan konflik pada areal hutan lindung gambut. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka peluang pelanggaran terhadap penguasaan lahan. Persoalan pemetaan ini juga terjadi pada lahan pertanian yang belum dilengkapi dengan peta kesesuaian lahan pertanian. Budidaya padi merupakan sektor yang masih perlu untuk didorong mengingat produktivitasnya masih dibawah rata-rata nasional. Perluasan lahan

pertanian, meskipun sudah didorong oleh pemerintah daerah melalui penegasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), masih membutuhkan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini perlu didukung oleh pengelolaan data yang lebih baik mulai dari pengumpulan data, data cleaning, penyebarluasan data dan pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi-institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat

keriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

5.2 Misi

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sesuai” berasal dari suai yang artinya berpadanan

(dengan); berpatutan (dengan); selaras. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Secara jumlah terjadi pengurangan terhadap jumlah misi yang disampaikan pada saat kampanye, namun secara substansi ketiga misi yang ditetapkan selaras dengan misi saat kampanye. Berdasarkan hasil *cascading* yang dilakukan, dua diantara lima misi yang dilaksanakan pada saat kampanye lebih tepat sebagai sasaran pada misi memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

5.3 Tujuan dan Sasaran

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.**

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan

bertanggung jawab. Sementara pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi titik strategis dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi berkontraksi pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun sebelumnya perlu dipulihkan segera agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Komoditas unggulan Provinsi Jambi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang hampir seluruhnya berbasis lahan perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menerapkan praktek-praktek baik, serta perlu ditingkatkan nilai tambahnya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung guna meningkatkan produktivitas serta menarik investasi industri pengolahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan ditandai oleh penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Ekonomi hijau menjadi pilihan karena menjadi salah satu jalan tengah agar ekonomi Provinsi Jambi bertumbuh namun lingkungan tetap terjaga, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB hijau.

3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik dan sehat ini ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Agama dan kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam

pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana pembangunan kebudayaan yang dilakukan karena memuat 7 dimensi yang holistik yaitu (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

5.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah.

2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat menghendaki penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik. Untuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan organisasi dan aparatur yang kapabel sehingga dapat bekerja efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima akan ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan tersebut, sehingga indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terus meningkat, sedangkan birokrasi yang kapabel pada Pemerintah Provinsi Jambi ditandai dengan Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang semakin meningkat.

3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan

Komoditas unggulan Provinsi Jambi merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga perlu dikelola dengan baik agar berkelanjutan dengan produktivitas yang tinggi. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan, maka seluruh kewenangan perizinan, pengawasan dan pembinaan berpindah ke Pemerintah Pusat,

sehingga walaupun komoditas pertambangan seperti batubara merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi namun tidak menjadi bagian yang dimaksud dalam sasaran ini. Sehingga indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.

4. Meningkatkan industri pengolahan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Provinsi Jambi adalah melalui pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi industri pengolahan terhadap PDRB.

5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata

Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, seperti Geopark Nasional Merangin Jambi, Komplek percandian Muaro Jambi, Alam Kerinci, 4 (empat) Taman Nasional, Pantai Cemara di Pantai Timur yang merupakan tempat burung bermigrasi antar benua dan lain-lain, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang baik terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi terutama pasca pandemi Covid-19. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar

Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, rasio elektrifikasi, persentase luas sawah beririgasi, dan persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon (ekonomi hijau) di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan

diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

8. Menurunnya tingkat pengangguran

Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Provinsi Jambi, sehingga pada periode RPJMD ini akan dilakukan upaya-upaya penurunan angka pengangguran tersebut. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang terus menurun.

9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Jambi berkaitan dengan pangan, karena konsumsi pangan masih mendominasi pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan diangkat menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks ketahanan pangan.

10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

11. Meningkatnya akses pendidikan

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah.

12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat

perekat bangsa. Oleh karena itu meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya menjadi salah satu

sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD ini, yang ditandai dengan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama

Kerukunan intra dan antar agama melalui pengembangan sikap toleransi diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Situasi yang kondusif tentu akan membuat pembangunan berjalan lebih baik. Untuk itulah hal tersebut dijadikan salah satu sasaran dalam RPJMD ini, dengan indikator Indeks kebebasan dari diskriminasi.

14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu didorong untuk berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender.

Tabel 5-1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi

Visi: Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi			B	B	B	BB	BB	BB	BB
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	75	77	80	82	85	85
			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	28,1	30	32	34	36	38	38
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83,09	83,50	84,00	84,50	85,30	86,00	86,00	
Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau			NA	4,55	4,75	5,00	5,20	5,30	5,30
			Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	30,85	30,90	30,92	30,93	30,94	30,95	30,95
			Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	10,83	10,90	10,95	11,00	11,50	11,75	11,75
			Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,18	1,20	1,22	1,30	1,40	1,50	1,50

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas	53,5	53,9	54,0	54,1	54,2	54,4	54,4
				Akses terhadap air minum layak	78,06	79,08	83,92	85,00	87,00	90,00	90,00
				Rasio elektrifikasi	99,9	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
				Persentase luas sawah beririgasi	76,89	78,00	79,50	81,00	82,50	84,00	84,00
				Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	81,76	99,36	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	72,07	72,43	72,80	73,17	73,53	73,53
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)	31,683	3,283	3,348	3,412	3,476	3,541	34,641
			Tingkat kemiskinan		7,97	7,90	7,84	7,60	7,45	7,2	7,2
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka	5,13	5,00	4,61	4,56	4,39	4,20	4,20
			meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia			71,29	72,14	72,62	73,07	73,56	74,04	74,04
			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,16	71,28	71,40	71,52	71,64	71,76	71,76
			Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,55	8,79	8,90	9,02	9,14	9,26	9,26
			Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1,02	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00
			Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi	93,47	93,60	93,80	94,05	94,30	94,50	94,50
			Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	65,86	67,78	69,02	70,05	71,50	73,00	73,00

Sasaran-sasaran di atas diharapkan dapat memulihkan perekonomian Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh berkurangnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Tabel 5-2 Target Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMN untuk Provinsi Jambi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7	5,4	6,0	6,4	6,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,7	3,5	3,40	2,90	2,60

Sumber: RPJMN 2020-2024

RPJMN telah memberikan target pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana tergambar pada tabel 5-2 di atas. Target tersebut dibangun pada kondisi normal pada tahun 2019 dengan melihat tren pada tahun-tahun sebelumnya serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia tahun 2020 dan telah memasuki tahun kedua dengan kondisi yang tidak terlalu berbeda maka target tersebut tentu saja sudah tidak relevan. Terlebih dampak yang telah diakibatkan tentu memerlukan biaya penanganan yang tidak sedikit, sehingga beberapa rencana pembangunan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah menghitung kembali dan menetapkan target rasional dengan tetap melakukan langkah-langkah agar dapat merealisasikannya sebagaimana tergambar dalam tabel 5-3.

Tabel 5-3 Target Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022-2026

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	4,90	5,15	5,30	5,40
2	Tingkat Kemiskinan (Sept) (%)	7,90	7,84	7,60	7,45	7,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%)	5,00	4,61	4,56	4,39	4,2

Sumber: Analisis KEMD Bappeda Prov. Jambi, 2021

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024. Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6-1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Jambi
Tahun 2021 – 2026

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : memantapkan Tata kelola Pemerintah		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Percepatan proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah
		Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
		Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi
		Pengembangan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal
		Penataan batas wilayah provinsi
		penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah
	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dnegan pelayanan publik yang prima	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	
	Penyederhanaan birokrasi dan perizinan	
	Menerapkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0	

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2 : memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat
		Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin
		mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah
		Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk
		Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan
		Peningkatan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna
		revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan
		Meningkatnya industri pengolahan
	fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam	
	Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor berstandar internasional dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung	
	Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	
	bantuan modal kerja bagi UMKM/ industri rumah tangga	

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	<p>Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non fiskal</p> <p>Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran</p> <p>Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi</p> <p>Dukungan fasilitas e-bisnis untuk usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Pengembangan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal</p> <p>membangun digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan</p> <p>mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota</p> <p>Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi</p> <p>membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan</p>

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
	memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	<p>Fasilitasi dan peningkatankualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara</p> <p>Fasilitasi akses terhadap jaringan internet</p> <p>Peningkatan sarana prasarana air minum perdesaan danperkotaan</p> <p>Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi</p> <p>Fasilitasi dan pembangunan jembatan</p> <p>Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus</p> <p>Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol</p> <p>Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung</p> <p>Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional</p> <p>Fasilitasi percepatan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung</p> <p>Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang</p> <p>Fasilitasi percepatan pembangunan rel kereta api Provinsi Jambi</p> <p>fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati parbo</p>

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pengembangan dan peningkatan bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional
		Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi
		Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan
		Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum
		Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas dan kelestarian sungai
		restorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis (GEBERMEWAH)
		peningkatan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat
		Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan
		Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk
		pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat
		Peningkatan penggunaan energi bersih (clean energy) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
		pengembangan Ruang Terbuka Hijau Fasilitasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan
	menurunkan tingkat pengangguran	Peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil atau usaha rumah tangga Revitalisasi peran BLK peningkatan <i>life skill</i> santri/santriwati Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya
	meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Pembangunan kawasan lumbung pangan(<i>food estate</i>) pengembangan kawasan kampung pangan terpadu Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi ternak Fasilitasi peningkatan peran PPL yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu. Peningkatan produksi potensi kelautan di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan berpotensi untuk pangan di Provinsi Jambi serta mendorong Kabupaten menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Misi 3: Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid-19
		Mendorong optimalisasi peran institusi kesehatan
		Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular
		Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah
		Subsidi BPJS bagi keluarga miskin
		Dukungan kegiatan posyandu
		Pengembangan RSUD Rd. Mattaheh dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
		pembangunan stadion olahraga (Jambi Sport Center)
		mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga tertentu menjadi industri olahraga
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100%
	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin
		Pemberian beasiswa
		Dukungan fasilitas e-learning untuk keluarga miskin
		Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal
		Revitalisasi SMK
		Penambahan RKB SMA/SMK
		beasiswa bagi atlet berprestasi
		Peningkatan peran swasta dalam pembangunan bidang olahraga
		Pengembangan pusat pendidikan dan latihan pelajar olahraga unggulan
		peningkatan rata-rata lama sekolah
		Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
	Peningkatan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah	
	Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat	
	Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	pembangunan Islamic Center
		Pembangunan sarana prasarana agama termasuk sarana pendidikan keagamaan

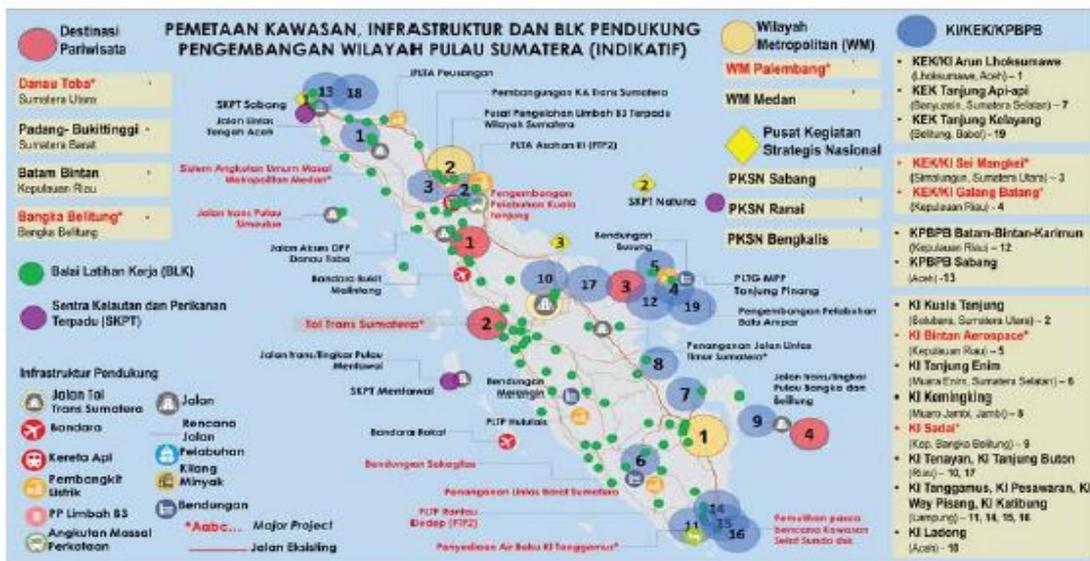
VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT"

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>peningkatan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama</p> <p>Peningkatan Indeks aspek kebebasan sipil</p> <p>Penguatan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan dalam negeri</p> <p>Peningkatan peran da'i dalam pembangunan</p> <p>fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan keagamaan (ponpes dan tahfiz)</p>
	<p>Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan</p>	<p>Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi</p> <p>Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>Peningkatan Usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi</p> <p>Pembangunan pusat pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi</p> <p>peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</p>

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional seperti yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetap juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada tahun 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Transformasi ekonomi wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor.



Sumber : RPJMN, 2020

Gambar 6-1 Peta Pengembangan Wilayah Sumatera RPJMN 2020-2024

6.2.1 Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya dengan mempertimbangkan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh masing-masing kabupaten/kota, perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

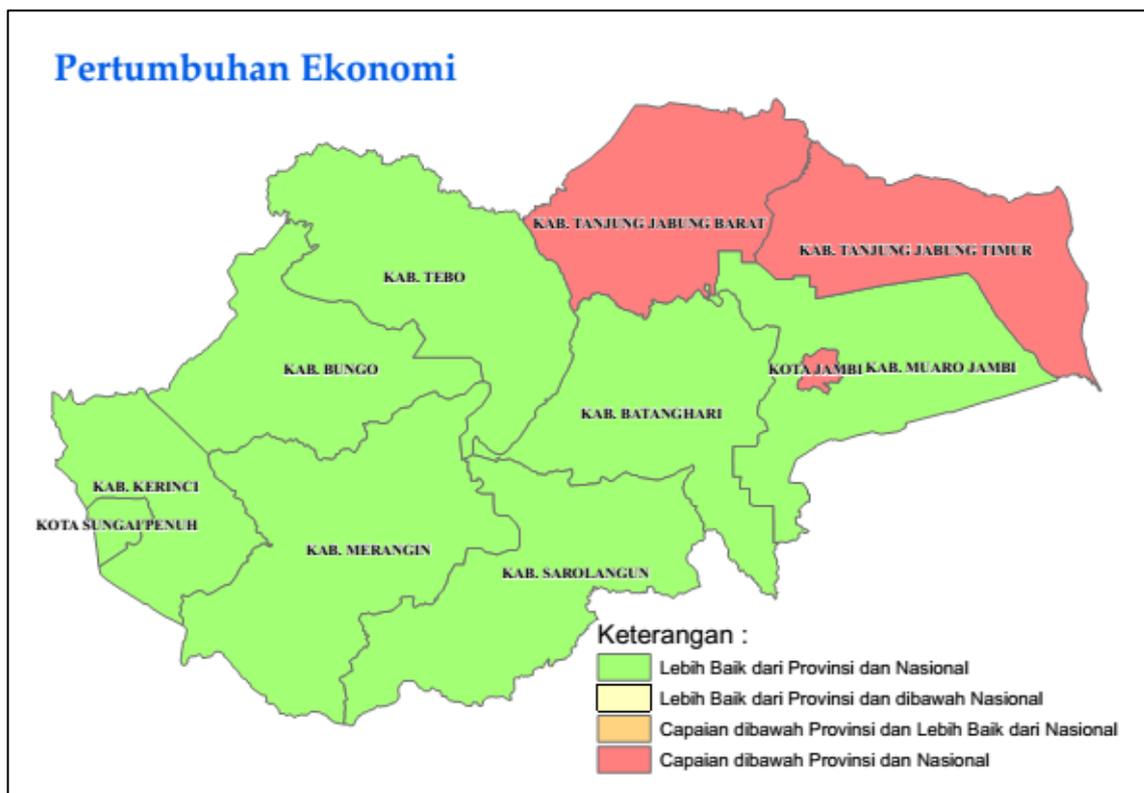
Tabel 6-2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	6,70	6,03	5,10	5,02	3,69
Merangin	6,21	5,55	5,17	4,82	0,78
Sarolangun	4,26	4,69	4,72	5,08	-0,26
Batanghari	4,56	4,82	4,96	4,99	-0,27
Muaro Jambi	5,43	5,06	5,27	5,06	0,27
Tanjung Jabung Timur	2,70	3,13	3,13	4,25	-3,87
Tanjung Jabung Barat	3,14	4,25	6,89	5,15	-0,64
Tebo	5,38	5,60	5,02	4,78	-0,04
Bungo	5,20	5,67	4,72	4,35	-0,40
Kota Jambi	6,81	4,68	5,48	5,33	-3,28
Kota Sungai Penuh	6,51	6,24	5,54	5,12	-0,14

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Bila dilihat dari data time series pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuatif, dan akibat pandemi Covid-19

pada tahun 2020 hampir keseluruhan kabupaten/ kota mengalami kontraksi. Kabupaten/ Kota yang tidak mengalami kontraksi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan Kabupaten/ kota lainnya mengalami kontraksi dengan kontraksi terdalam terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Sementara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Kerinci. Persebaran perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6-2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Bila dilihat dari kontribusi Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi, yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontribusi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terutama berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari sub kategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, kontributor terbesar kedua adalah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi, Sementara untuk kontributor terkecil adalah Kota Sungai Penuh, meskipun berfluktuatif namun cenderung meningkat.

Tabel 6-3 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA THD PDRB PROVINSI JAMBI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	4,7	4,67	4,49	4,52	5,03
Merangin	7,08	7,11	6,9	6,97	7,55
Sarolangun	7,15	7,07	6,92	6,92	6,98
Batanghari	7,8	7,72	7,48	7,49	7,91
Muaro Jambi	11,18	11,21	10,96	11,08	11,8
Tanjung Jabung Timur	10,93	11,06	11,51	11,24	9,39
Tanjung Jabung Barat	18,36	18,75	19,79	19,61	17,88
Tebo	6,79	6,82	6,61	6,65	7,1
Bungo	8,39	8,42	8,26	8,16	8,36
Kota Jambi	14,25	13,82	13,75	13,96	14,35
Kota Sungai Penuh	3,35	3,35	3,32	3,41	3,64

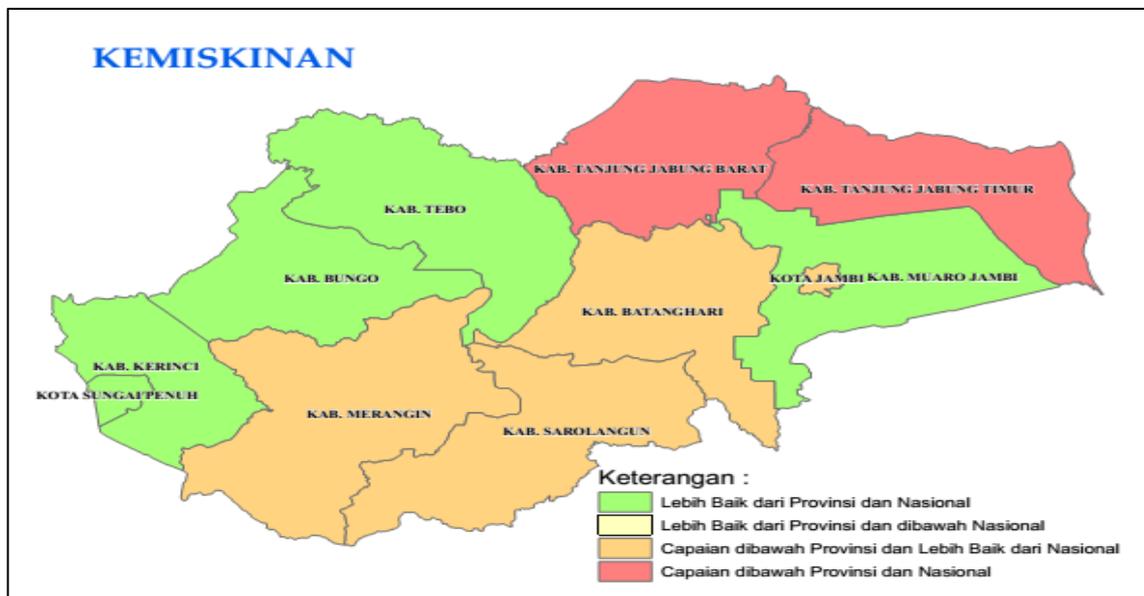
Sumber : Jambi Dalam angka 2021,2021

Tabel 6-4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	7,48	7,45	7,07	7,13	7,30
Merangin	9,95	9,43	8,88	8,48	8,63
Sarolangun	9,33	8,87	8,73	8,45	8,42
Batanghari	10,79	10,33	10,23	9,75	9,65
Muaro Jambi	4,30	4,37	4,05	3,83	3,83
Tanjung Jabung Timur	12,76	12,58	12,38	11,54	10,95
Tanjung Jabung Barat	11,81	11,32	11,10	10,56	10,29
Tebo	6,87	6,79	6,58	6,47	6,26
Bungo	5,99	5,82	5,78	5,6	5,8
Kota Jambi	8,87	8,84	8,49	8,12	8,27
Kota Sungai Penuh	3,13	2,78	2,76	2,81	3,03

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin kabupaten/kota dari tahun 2016 – 2020 pada tabel diatas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten TanjungJabung Barat memiliki persentase penduduk miskin yang paling besar, namun memiliki kecenderungan menurun setiap tahun meskipun pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Untuk persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 3,03 persen di tahun 2020, namun persentase ini meningkat bila dibandingkan tahun 2019.



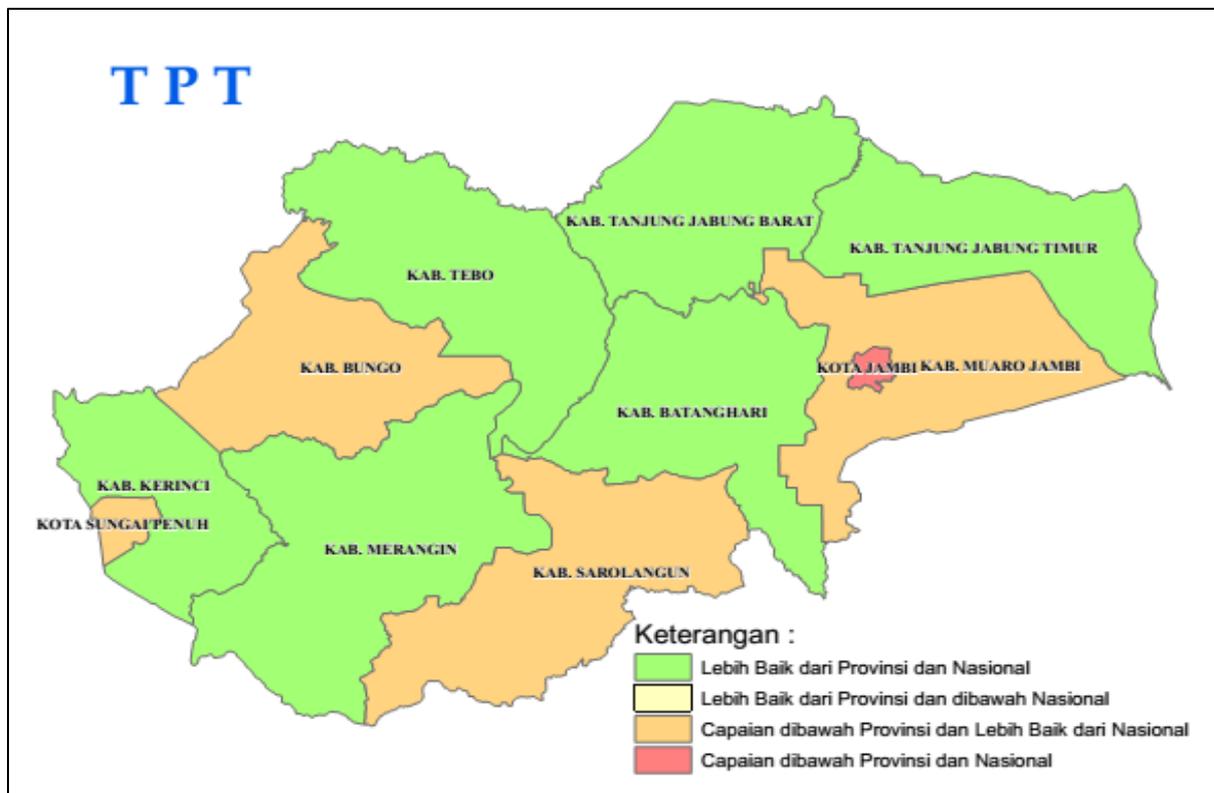
Gambar 6-3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki TPT tertinggi sebesar 10,49 persen, disusul Kabupaten Bungo dengan TPT sebesar 5,94 persen. Kedua kabupaten/kota tersebut didominasi oleh sektor jasa, dimana pembatasan aktivitas pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor ini. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6-5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	tad	3,26	2,74	2,62	2,43
Merangin	tad	4,10	3,47	3,68	4,86
Sarolangun	tad	2,25	4,06	4,09	5,71
Batanghari	tad	3,57	3,87	4,56	4,42
Muaro Jambi	tad	5,39	4,52	5,20	5,43
Tanjung Jabung Timur	tad	2,36	1,80	1,63	1,41
Tanjung Jabung Barat	tad	3,07	2,38	2,57	2,16
Tebo	tad	1,98	2,00	2,90	2,95
Bungo	tad	4,89	3,03	3,82	5,94
Kota Jambi	tad	5,55	6,41	6,53	10,49
Kota Sungai Penuh	tad	4,14	5,13	4,00	5,56

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, 2021



Gambar 6-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Tabel 6-6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

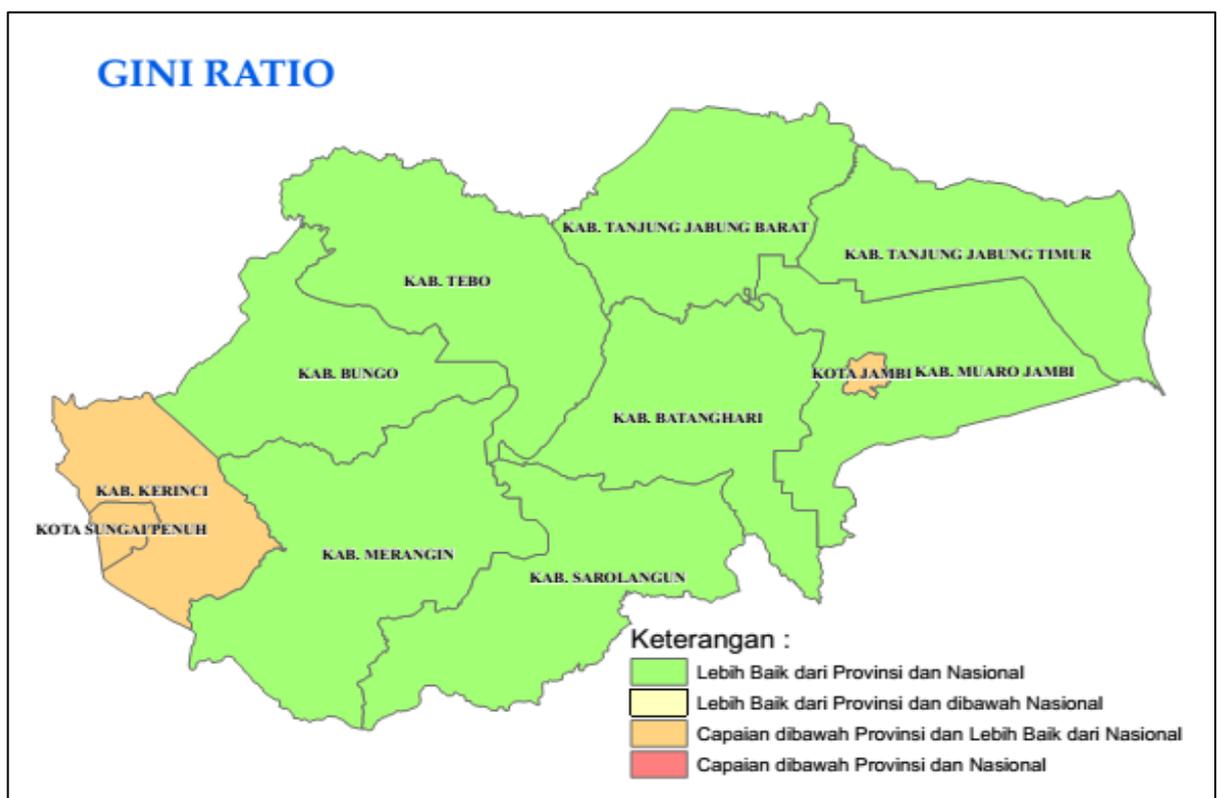
KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kerinci	0,32	0,28	0,28	0,32	0,32
Merangin	0,36	0,33	0,30	0,35	0,29
Sarolangun	0,39	0,34	0,36	0,29	0,29
Batanghari	0,26	0,30	0,25	0,30	0,31
Muaro Jambi	0,34	0,34	0,32	0,31	0,27
Tanjung Jabung Timur	0,29	0,26	0,28	0,29	0,29
Tanjung Jabung Barat	0,36	0,33	0,29	0,36	0,29
Tebo	0,37	0,32	0,27	0,31	0,28
Bungo	0,35	0,34	0,34	0,32	0,26
Kota Jambi	0,39	0,38	0,39	0,33	0,33
Kota Sungai Penuh	0,33	0,33	0,32	0,30	0,34

Sumber : BPS, 2021

Koefisien Gini (Gini Rasio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1

menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo dimana Gini Rasionya merupakan yang paling rendah dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/ kota menunjukkan perbaikan, kecuali Kabupaten Batanghari dan Kota Sei. Penuh yang justru mengalami peningkatan gini ratio atau mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan.



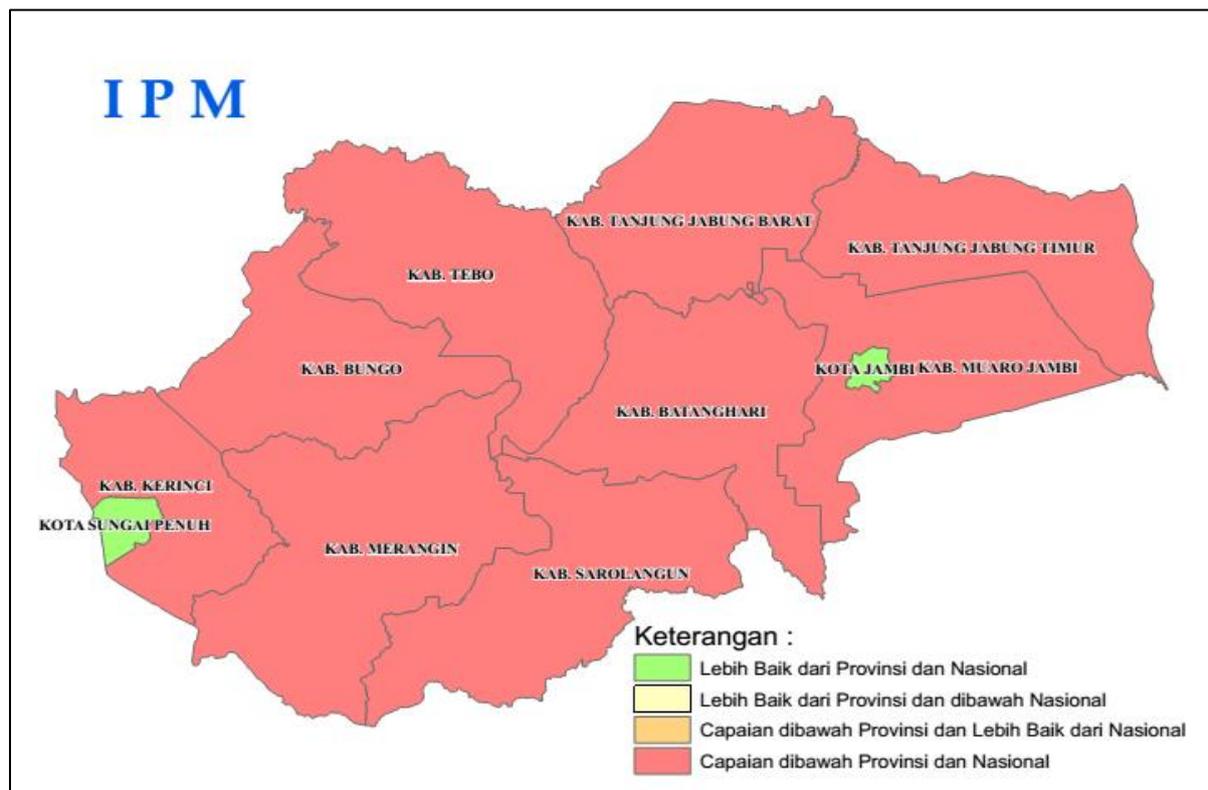
Gambar 6-5 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Tabel 6-7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kerinci	69,68	70,03	70,59	70,95	71,21
Merangin	67,86	68,3	68,81	69,07	69,19
Sarolangun	68,73	69,03	69,41	69,72	69,86
Batanghari	68,7	68,92	69,33	69,67	69,84
Muaro Jambi	67,55	67,86	68,34	69,01	69,18
Tanjung Jabung Timur	61,88	62,61	63,32	63,92	64,43
Tanjung Jabung Barat	65,91	66,15	67,13	67,54	67,54
Tebo	68,05	68,16	68,67	69,02	69,14
Bungo	68,77	69,04	69,42	69,86	69,92
Kota Jambi	76,14	76,74	77,41	78,26	78,37
Kota Sungai Penuh	73,35	73,75	74,67	75,36	75,42

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021,2021

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi terus memperlihatkan perbaikan. Tiga diantara kabupaten/ kota tersebut, yaitu Kota Jambi, Kota Sei. Penuh dan Kabupaten Kerinci termasuk dalam kategori IPM tingkat tinggi, sedangkan kabupaten lainnya termasuk dalam kategori IPM sedang dan IPM terendah berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 6-6 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan beberapa kondisi perwilayahan diatas maka Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005 – 2025** juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021-2026 akan diprioritaskan pada :

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.
2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program “DUMISAKE”; peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa; peningkatan produktivitas komoditas unggulan, perbaikan rantai nilai serta hilirisasi produk.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi baru “SENTUSA” (Sengeti – Tungkal – Sabak)
4. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan

7. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan rumah sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan dibangun adalah Islamic center dan stadion. Adapun pembangunan Islamic center dan Stadion ini akan dilakukan dengan pola tahun jamak atau multiyears
8. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.
9. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan *food estate*.
10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik
11. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun kampung modern Lansia.
12. Peningkatan kesetaraan gender, melalui peningkatan peran dan perlindungan perempuan

Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam **RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2033, penyelenggaraan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jambi lebih diarahkan** pada : 1) Mengalokasikan penggunaan ruang di Provinsi Jambi (pola ruang) dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan; 2) Pengembangan sarana prasaranayang diarahkan pada upaya pemererat keterkaitan spasial antar kawasan (struktur ruang); 3) Mengakselerasi pertumbuhan wilayah yang potensial untuk tumbuh, menjaga pertumbuhan pada kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang; dan 4) Mendorong pengembangan wilayah

untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi berdasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada.

Adapun Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

- 1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
 - a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan. Pengembangan sarana prasarana transportasi yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Provinsi Jambi harus dilakukan dengan mengacu pada studi kelayakan dan kajian dampak lingkungan sehingga pembangunannya tetap mampu menciptakan keseimbangan.
 - b. Peningkatan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW dan PKL.
 - d. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
- 2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
 - a. Peningkatan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.

- b. Peningkatan dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
 - c. Peningkatan dan pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
- 3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
- a. Pengembangan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
 - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
 - d. Pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
 - e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
- 4 Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
- a. Pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai criteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
 - c. Peningkatan dan Penetapan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKW) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
 - d. Penetapan Sanggaran Agung, Siulak Mukai, Muara Tembesi, Pelabuhan Dagang, Nipah Panjang, Wiroto Agung, Rantau Ikil, Pelawan, Teluk Nilau, Sungai Abang, Batang Sangir, Sungai Okan, Limbur Tembesi, Pauh, Teluk Serdang, Rantau Panjang, Pamenang, dan Tempino menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

- e. Peningkatan dan penetapan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat pelayanan.
- 5 Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui:
- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
 - c. Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun.

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

- 1 Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
- 2 Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
- 3 Kabupaten Muara Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar
- 4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
- 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi

- 6 Kota Kerinci mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
- 7 Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026, yaitu:

1. Program Unggulan DUMISAKE, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Jambi Cerdas dan Pintar, berupa akses internet bagi seluruh desa/kelurahan; bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga miskin dan beasiswa S3 bagi PNS, beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa bagi atlet berprestasi. Selain itu juga terdapat pula menu dukungan bagi pendidikan usia dini. Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6-8 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa

Uraian	Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa				
	2022	2023	2024	2025	2026
SMA	1100	1100	1100	1100	1100
SMK	550	550	550	550	550
SLB	500	500	500	500	500
S1	70	70	70	70	70
S3 (PNS, Dosen)	50	50	50	lanjutan	lanjutan
Atlet Berprestasi	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan	menyesuaikan

- b. Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6-9 Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jambi (jiwa)	76.586	77.086	77.586	78.086	78.586

- c. Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; sarana prasarana perdesaan; fasilitas umum perkotaan; bantuan modal kerja bagi Usaha Kecil Mak-Mak (UKMM)/UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan bibit; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* santri/santriwati. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun skema bedah rumah dan bantuan permodalan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 6-10 Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Bedah Rumah	550	550	550	550	550
Bantuan modal kerja bagi UMKM/ Industri Rumah Tangga/start up	1500	1500	1500	-	-

- d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmilyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; fasilitasi kualitas dan mutu pendidikan pesantren; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an .

Tabel 6-11 Target Pemberian Honorarium

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren (desa/kelurahan)	1562	1562	1562	1562	1562
Honorarium da'i kecamatan	144	144	144	144	144

- e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; dan aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.

2. Meningkatkan konektivitas , diantaranya:

- a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
- b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
- c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan

Penangan beberapa ruas jalan akan dilaksanakan dengan pola tahun jamak guna mendapatkan jaminan keberlanjutan penanganan ditengah keterbatasan anggaran. Adapun ruas jalan tersebut antara lain:

- Ruas Jalan Simpang Talang Pudak – Suak Kandis
- Ruas Jalan Simpang Pelawan – Sungai Salak – Pekan gedang/ Batang Asai
- Ruas Jalan Sungai Saren – teluk Nilau – Parit 10/Senyerang
- Ruas Jalan Simpang Betung Bedarah – Sp. Pintas – Bts Kab. Tebo/ Bts Kab. Bungo – Kuaman Kuning – Simp. Kuamang (Merangin)

3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan

- a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN, PKNP, PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
- b. Pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
- c. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
- d. Pengembangan *Food Estate* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah

Bila pembangunan kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan ruang tersebut, diharapkan akan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/ kota, meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan mampu mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jambi.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan target minimal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks gini pada seluruh kabupaten/ kota se Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2021 – 2026 guna mendukung target Provinsi dan nasional. Secara rinci target minimal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 6-12 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	4,61	4,80	4,95	5,00	5,20
Kab. Merangin	4,42	4,57	4,70	4,90	5,10
Kab. Sarolangun	4,46	4,50	4,65	4,80	4,95
Kab. Batang Hari	4,12	4,25	4,35	4,50	4,70
Kab. Muaro Jambi	4,88	4,95	5,10	5,20	5,35
Kab. Tanjab Timur	4,70	4,75	4,80	4,83	4,88
Kab. Tanjab Barat	2,73	2,80	2,93	3,15	3,25
Kab. T e b o	4,59	4,65	4,71	4,80	4,95
Kab. Bungo	4,28	4,32	4,45	4,60	4,75
Kota Jambi	4,88	4,90	4,95	5,00	5,10
Kota Sungai Penuh	4,76	4,80	4,90	4,95	5,10

Tabel 6-13 Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Tingkat Kemiskinan(Persen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	7,25	7,05	6,90	6,70	6,55
Kab. Merangin	8,53	8,35	8,15	8,00	7,85
Kab. Sarolangun	8,40	8,35	8,30	8,25	8,20
Kab. Batang Hari	9,50	9,42	9,37	9,30	9,15
Kab. Muaro Jambi	3,80	3,70	3,60	3,50	3,40
Kab. Tanjab Timur	10,80	10,75	10,65	10,50	10,35
Kab. Tanjab Barat	10,25	10,20	10,10	10,00	9,80
Kab. T e b o	6,15	6,10	5,97	5,94	5,92
Kab. Bungo	5,70	5,65	5,60	5,50	5,35
Kota Jambi	8,15	8,10	8,00	7,95	7,90
Kota Sungai Penuh	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60

Tabel 6-14 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka(Persen)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	2,40	2,35	2,20	2,05	2,00
Kab. Merangin	4,70	4,60	4,50	4,40	4,30
Kab. Sarolangun	5,50	5,40	5,30	5,20	5,10
Kab. Batang Hari	4,30	4,25	4,20	4,10	4,00
Kab. Muaro Jambi	5,35	5,30	5,20	5,10	5,00
Kab. Tanjab Timur	1,40	1,38	1,35	1,27	1,25
Kab. Tanjab Barat	2,05	2,00	1,99	1,98	1,97
Kab. T e b o	2,90	2,85	2,82	2,80	2,77
Kab. Bungo	5,90	5,85	5,81	5,78	5,75
Kota Jambi	10,35	10,32	10,27	10,20	10,10
Kota Sungai Penuh	5,50	5,45	5,30	5,40	5,30

Tabel 6-15 Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	GINI RATIO				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	0,320	0,320	0,315	0,315	0,310
Kab. Merangin	0,310	0,310	0,310	0,300	0,300
Kab. Sarolangun	0,310	0,310	0,310	0,300	0,300
Kab. Batang Hari	0,310	0,310	0,305	0,305	0,300
Kab. Muaro Jambi	0,270	0,270	0,270	0,270	0,265
Kab. Tanjab Timur	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Kab. Tanjab Barat	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Kab. T e b o	0,280	0,280	0,280	0,275	0,275
Kab. Bungo	0,260	0,260	0,260	0,255	0,255
Kota Jambi	0,325	0,322	0,320	0,315	0,310
Kota Sungai Penuh	0,340	0,335	0,330	0,320	0,325

Tabel 6-16 Sasaran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Kab/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Kerinci	71,50	71,80	72,01	72,25	72,40
Kab. Merangin	69,25	69,50	69,75	70,00	70,50
Kab. Sarolangun	69,90	70,00	70,15	70,25	75,40
Kab. Batang Hari	69,90	69,95	70,00	70,25	70,50
Kab. Muaro Jambi	69,22	69,35	69,50	69,75	70,00
Kab. Tanjab Timur	64,50	64,70	64,85	65,00	65,25
Kab. Tanjab Barat	67,55	67,75	67,98	68,20	68,50
Kab. Tebo	69,20	69,35	69,55	69,75	70,40
Kab. Bungo	69,95	70,15	70,30	70,45	70,75
Kota Jambi	78,40	78,50	78,60	78,75	78,95
Kota Sungai Penuh	75,50	75,75	75,90	76,20	76,35

Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan arah kebijakan umum, dirumuskan arah kebijakan implementasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun. Adapun arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026 berdasarkan pada tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6-17 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi
Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi
Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pendapatan Daerah
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia
Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas	Pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas
Pelaksanaan prosedur kerja yang efektif dengan memanfaatkan teknologi	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK
Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan
Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan	Meningkatkan produksi dan produktivitas produk unggulan
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil	optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap sampai sejauh 12 mil
Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM dan IKM	Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan	Mendorong kemandirian UMKM	Mendorong kemandirian UMKM	Mendorong kemandirian UMKM
Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	Mendorong keaktifan koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	Mendorong keaktifan koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	Mendorong keaktifan koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	Mendorong keaktifan koperasi dan penguatan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi
Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	Sinergi usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran
Fasilitasi pengembangan kawasan wisata Gentala Arasy	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata	Penguatan peran kawasan wisata gentala Arasy sebagai salah satu destinasi wisata
Mendorong percepatan perwujudan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi perwujudan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia	Fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi sebagai destinasi wisata dunia

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mendorong percepatan pengembangan kawasan geopark Merangin				
Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja siap kerja melalui inkubator sesuai kebutuhan daerah dan negara tujuan
Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi	Fasilitasi pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	Fasilitasi pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	Fasilitasi pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	Fasilitasi pengembangan objek wisata unggulan kabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi
Mendorong percepatan pembangunan kawasan Ujung Jabung				
PerencanaankawasanSentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Pembangunan fasilitas umum pada kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	Pengembangan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)
Peningkatan penanganan jalan Provinsi	Peningkatan penanganan jalan Provinsi	Peningkatan penanganan jalan Provinsi dan pembangunan jembatan	Peningkatan penanganan jalan Provinsi	Peningkatan penanganan jalan Provinsi
Peningkatan kualitas jalan				
Mendorong pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi Percepatan pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu	Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu
Pemenuhan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan				
Percepatan perwujudan Pelabuhan Ujung Jabung				

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mendorong penyelesaian akses menuju pelabuhan Ujung Jabung	Mendorong penyelesaian akses menuju pelabuhan Ujung Jabung			
Mendorong industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan				
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan
Percepatan pembangunan infrastruktur listrik	Pemenuhan kebutuhan listrik untuk industri			
Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi	Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi
Pemerataan jangkauan internet di wilayah Provinsi Jambi				
Mendorong iklim investasi dan industrialisasi sektor riil				
Mendorong tumbuhnya wira usaha baru				
Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan				
Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi	Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa umum untuk S1 dan S3	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa umum untuk S1 dan S3	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa umum untuk S1 dan S3	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa umum untuk S1 dan S3	Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin dan disabilitas serta beasiswa umum untuk S1 dan S3
Menyusun roadmap revitalisasi SMK	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan SMK dan pengembangan Kelembagaan serta penyediaan dan peningkatan ualitas guru	Penyelarasan kurikulum SMK yang beradaptasi perkembangan dengan konteks lokal serta meningkatkan keterlibatan DUDI	Akreditasi dan perbaikan terus menerus terhadap tatakelola penyelenggaraan pendidikan SMK. Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan SMK	Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusan SMK
Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa	Meningkatkan angka literasi dan numerasi pada kelompok penduduk remaja dan dewasa
meningkatkan kontribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan kontribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan kontribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan kontribusi pariwisata pada PDRB	meningkatkan kontribusi pariwisata pada PDRB
Penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19	penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19	penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19		
penanggulangan dampak sosial akibat Covid-19	penanggulangan dampak sosial akibat Covid-19	penanggulangan dampak sosial akibat Covid-19		
penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19	penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19	penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19		
Pengembangan kawasan wisata	Pengembangan kawasan wisata	Pengembangan kawasan wisata		

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pengembangan UMKM				
Perbaiki rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan daerah Jambi	Perbaiki rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan daerah Jambi	Perbaiki rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan daerah Jambi	Perbaiki rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan daerah Jambi	Perbaiki rantai nilai dan mendorong hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan daerah Jambi
Perencanaan kawasan ekonomi baru	Pengembangan kawasan ekonomi baru	Pengembangan kawasan ekonomi baru	Pengembangan kawasan ekonomi baru	Pengembangan kawasan ekonomi baru
Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau	Mendorong ketaatan komitmen lingkungan dalam bidang investasi dan industri untuk mewujudkan pembangunan industri hijau
Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Pengembangan kawasan pusat pendidikan islam yang terintegrasi dengan wisata religi dan budaya	Pengembangan kawasan pusat pendidikan islam yang terintegrasi dengan wisata religi dan budaya	Pengembangan kawasan pusat pendidikan islam yang terintegrasi dengan wisata religi dan budaya		
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				
Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi	Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya	Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya
Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum				
Peningkatan indeks Pembangunan Manusia				
Percepatan pencapaian target SDGs				
peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	peningkatan Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
Memperluas akses terhadap kesehatan reproduksi				
Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission	Mendorong pelaksanaan net zero energi dan net zero emission

Tabel 6-18 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 1:Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan															
Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,da n akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B		BB		BB		BB		BB		BB		
Sasaran 1.1: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP	B	B		BB		BB		BB		A		A		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	75		77		80		82,00		85,00		85,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	1.877.5 78,05	BB	1.900.500,10	BB	1.920.500, 00	BB	1.925.510, 00	A	1.950.00 0,00	A	9.574.08 8,15	Seluruh Perangkat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	60 %	100%	17.700, 00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,0	100%	88.500,0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk
	Jumlah Desa Mandiri	83 Desa	127	300	134	400	141	500	148	700	155	1000	163	2.900	
	Jumlah Desa Berkembang	875 Desa	849	250	807	350	767	450	731	650	694	900	659	2.600	
	Jumlah Desa Tertinggal	154 Desa	87	350	84	500	80	700	76	700	72	700	68	2.950	
	Jumlah BUMDesa/B UMDesa Berkembang	80	100	150	115	300	120	500	130	700	130	1000	130	2.650	
	Jumlah BUMDesa/B UMDesa Maju	0	0	150	4	300	6	500	10	700	12	1000	12	2.650	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kabupaten/k ota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90 %	90%	3.950,0 0	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	19.750,0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk
PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi	30%	50%	3.797,6 4	60%	1.200,00	70%	1.400,00	80%	1.600,00	90%	1.800,00	90%	9.797,64	Dinas Kominfo
PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP	Predikat Pengawasan Kearsipan	B (Baik)	B (Baik)	831,00	B (Baik)	831,00	B (Baik)	851,00	BB (Sangat Baik)	851,00	BB (Sangat Baik)	870,00	BB (Sangat Baik)	4.234,00	Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA		98 %	1.580,0	98 %	1.715,00	98 %	1.845,00	98 %	1.980,00	98 %	2.075,00	98 %	9.195,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan		95 %	3.300,0	95 %	3.300,00	95 %	3.300,00	96 %	3.300,00	96 %	3.300,00	96 %	16.500,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembanguna n sektor pemerintaha n dan pembanguna n manusia		96 persen	1.265,0	96 persen	1.454,75	96 persen	1.672,96	96 persen	1.923,91	96 persen	2.212,49	96 persen	8.529,11	Badan Perencana- an Pembangu nan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Konsistensi program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	3.000,0	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	15.000,0	Badan Perencana- an Pembangu nan Daerah
	Konsistensi program RKPD dalam APBD	100%	100%	3.992,6 4	100%	4.141,99	100%	4.514,56	100%	4.872,65	100%	6.609,17	100%	24.131,0	Badan Perencana- an Pembangu nan Daerah
PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah	74,38 Persen	79,50 persen	7.488,4 8	84,62 persen	9.056,14	89,74 persen	10.837,33	94,86 persen	12.490,40	100 persen	14.316,4 4	100 persen	54.188,7 9	BPKPD

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP nilai	997.186,78	WTP nilai	1.066.346,89	WTP nilai	1.143.549,71	WTP nilai	1.227.936,09	WTP nilai	1.350.729,70	WTP nilai	5.785.749,18	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5 % (Rp1.535.185.805.549,67)	5,25 persen	18.051,16	5,7 persen	19.205,98	6,1 persen	20.635,46	6,4 persen	22.135,40	6,7 persen	24.348,93	6,7 persen	104.376,93	BPKPD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	70 persen	72%	9.045,35	74%	9.181,03	76%	9.226,93	78%	9.319,20	80%	9.371,50	100 %	46.144,0	Inspektorat Daerah Provinsi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	33 persen	38%	3.396,92	43%	3.512,92	48%	3.530,48	53%	3.565,81	60%	3.601,47	60%	17.607,59	Inspektorat Daerah Provinsi
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	100 persen	1.910,00	100 persen	2.025,00	100 persen	2.150,00	100 persen	2.280,00	100 persen	2.429,00	100 persen	10.794,00	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 persen	1.656,47	100 persen	1.822,11	100 persen	2.004,32	100 persen	2.204,76	100 persen	2.204,76	100 persen	9.892,42	Sekretariat Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	50 %	50 persen	4.081,89	100 persen	4.898,03	100 persen	5.877,63	100 persen	6.759,28	100 persen	7.773,17	100 persen	29.390,0	Sekretariat Daerah
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	100 persen	64.727,86	100 persen	68.030,49	100 persen	71.663,38	100 persen	75.659,55	100 persen	80.055,35	100 persen	360.136,62	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 Persen	1.735,95	100 persen	2.169,93	100 Persen	2.712,42	100 Persen	3.390,53	100 Persen	4.238,16	100 Persen	14.246,99	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target		Rp.juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	92.341,42	100 persen	99.377,38	100 persen	106.899,63	100 persen	107.726,10	100 persen	115.253,95	100 persen	521.598,48	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	60 persen	6.302,3	65 persen	7.548,75	70 persen	7.569,6	75 persen	7.580,07	80 persen	8.590,07	80 persen	37.590,8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sasaran 1.2: Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi	28,1	30,00		32,00		34,00		36,00		38,00		38,00		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,09	83,50		84,00		84,50		85,30		86,00		86,00		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor PMPRB Provinsi Jambi	61,70	63,5	2.134,0	64	2.249,00	64,5	2.480,00	65	2.760,00	65,5	2.720,00	65,5	12.343,0	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Skor 2.849 + sertifikat dengan skor Tinggi	>2,600	2.086,7 7	>2,700	2.295,45	>2,800	2.524,99	>2,850	2.777,49	>2,900	3.055,24	>2,900	12.739,9 3	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil		94%	2.430,0	95%	2.725,00	96%	2.725,00	97%	2.975,00	98%	2.975,00	98%	13.830,0	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk		99 persen	1.960,0	99 persen	3.375,00	99 persen	3.375,00	99 persen	4.105,00	99 persen	4.105,00	99 persen	16.920,0	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan		80%	1.099,9 8	80%	2.524,98	80%	2.524,98	80%	2.750,00	80%	2.750,00	80%	11.649,9 5	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan		100%	160,00	100%	130,00	100%	130,00	100%	160,00	100%	160,00	100%	740,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparatur/pe ngurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	90 %	90%	9.550,0	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	47.750,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan pelaksanaan kerjasama desa	40 %	50%	150,00	60%	150,00	70%	150,00	80%	150,00	80%	150,00	80%	750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	50 %	55%	5.000	60%	5.500	65%	6.000	70%	6.500	80%	7.000	80%	30.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah	75%	80%	9.700	85%	10.000	90%	10.300	95%	10.600	97%	10.900	97%	51.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks kematangan keamanan informasi	0,7 (Level 1)	1,0 (Level 1)	2.600,00	1,7 (level 2)	2.100,00	2,4 (level 2)	1.500,00	3 (level 3)	1.500,00	3,4 (level 3)	1.650,00	3,4 (level 3)	9.350,00	Dinas Kominfo

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	215 indeks	250 Indeks	6.780,95	275 Indeks	7.523,66	300 Indeks	8.286,05	325 Indeks	8.940,38	350 Indeks	9.604,89	350 Indeks	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
	Indeks Profesionalitas ASN	45 indeks	70 Indeks	6.780,95	75 Indeks	7.523,66	80 Indeks	8.286,05	85 Indeks	8.940,38	90 Indeks	9.604,89	90 Indeks	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	72%	17.173,74	75%	17.800,00	78%	18.750,00	0,81	21.700,00	0,84	21.700,0	0,84	97.123,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur	90%	93%	17.173,74	95%	17.800,00	97%	18.750,00	0,99	21.170,00	0,99	21.700,0	0,99	96.593,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat	89 (A)	90 (A)	970,00	90 (A)	1.100,00	91 (A)	1.140,00	91 (A)	1.180,00	92 (A)	1.230,00	92 (A)	5.620,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	100 persen	2.030,66	100 persen	2.207,59	100 persen	2.428,35	100 persen	2.671,18	100 persen	2.938,30	100 persen	12.276,07	Badan Penghubung Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383,55	25 KSP/USP	441,08	27 KSP/USP	507,24	29 KSP/USP	583,33	30 KSP/USP	6.999,90	151,00	8.915,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100%	100%	875,30	100%	900,00	100%	998,20	100%	1.045,04	100%	1.045,04	100%	4.863,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tertib Usaha	NA	60%		60%		60%		62%		62%		62%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Misi 2: Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah															
Tujuan 2 : Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau (%)	NA	4,55		4,75		5,00		5,20		5,30		5,30		
	Tingkat kemiskinan	7,97	7,90		7,84		7,60		7,45		7,2		7,2		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 2.1: Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (persen)	30,85	30,90		30,92		30,93		30,94		30,95		30,95		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	27%	30%	2.455,19	31%	2.577,95	32%	2.706,85	33%	2.842,19	34%	2.984,38	35%	13.566,58	Dinas Perkebunan
	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	16,74%	10%	400,00	10%	450,00	10%	500,00	10%	550,00	10%	600,00	10%	2.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi	5 %	7 %	1.000,0	8 %	1.500,00	9 %	1.700,00	10 %	2.000,00	12 %	2.300,00	12 %	8.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	7 %	11%	10.000,00	13%	12.500,00	15%	14,00	17%	15.000,00	19%	16.000,0	19%	53.514,0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	8%	8,5%	2.452,14	9%	2.574,14	9,5%	2.703,48	10%	2.838,66	10,5%	2.980,59	10,5%	13.549,0	Dinas Perkebunan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	11 %	15 %	23.400,00	17 %	28.850,00	19 %	31.350,00	21 %	34.700,00	23 %	37.600,0	23 %	155.900,	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan Kab/Kota	14%	14,5%	16.766,49	15%	17.604,82	15,5%	18.485,06	16%	19.409,31	16,5%	20.379,77	16,5%	92.645,45	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparaturnya yang diberdayakan/ditingkatkan keterampilannya	0,75 %	1,7 %	950,00	2,2 %	1.060,00	2,7 %	1.120,00	3 %	1.180,00	3,2 %	1.290,00	3,2 %	5.600,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase kelembagaan pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	0,63 %	1 %	1.705,0	1,5 %	2.080,00	2 %	2.560,00	2,5 %	3.040,00	3 %	3.500,00	3 %	12.885,0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian berkualitas di Kab/Kota	4,5%	5%	4.159,86	5,5%	7.103,36	6%	5.291,15	6,5%	4.098,83	7%	4.351,28	7%	25.004,48	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	350,00	100%	262,50	100%	275,63	100%	289,41	100%	303,88	100%	1.481,41	Dinas Perkebunan
	Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	10 %	10 %	250,00	10 %	300,00	10 %	350,00	10 %	400,00	10 %	400,00	10 %	1.700,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	-	2 Izin	2.564,5	2 Izin	3.120,00	2 Izin	3.590,00	2 Izin	5.100,00	2 Izin	5.315,00	10 izin	19.689,5	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjuta n	-	10.687, 49 Ha		16.400, 53 Ha		27.613,8 9 Ha		33.447,0 8 Ha		39..143 ,44 Ha		39..143,4 4 Ha		
PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	53.833, 0 ton	54.480, 9 ton	13.417, 92	54.807, 8 ton	9.321,74	55.136,7 ton	7.836,81	55.467,5 ton	8.393,82	55.800, 3 ton	14.070,0		53.040,2 9	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	52.067, 0 ton	57.168, 0 ton	7.258,0	58.997, 0 ton	7.808,50	60.885,0 ton	8.535,00	62.833,0 ton	9.211,00	64.843, 6 ton	9.843,00		42.655,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang- Undangan	45%	60%	2.437,0 0	65%	1.263,00	70%	1.327,00	75%	1.407,80	77%	1.562,40	77%	7.997,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	NA	50%		50%		50%		50%		50%		50%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	76 (B)	77 (B Indeks)	2.466,9 6	78 (B Indeks)	2.578,12	79 (B Indeks)	3.125,87	80 (B Indeks)	3.371,31	81 (B Indeks)	3.562,32	81 (B Indeks)	15.104,5 8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku	60 %	60 %		62%		66%		67%		70%		70%		
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	29%	40%		41.8%		43.25%		46.6%		51.1%		51.1%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)	340.000.000,00	3%	80,00	8%	100,00	10%	120,00	10%	140,00	10%	160,00	41%	600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	(963667435,9 USD)	6%	1.070,0	6%	1.784,00	6%	1.540,80	6%	1.848,08	6%	1.848,08	30%	8.090,96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 2.2: Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (persen)	10,83	10,90		10,95		11,00		11,50		11,75		11,75		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	0	5%	650,00	10%	725,00	15%	800,00	20%	875,00	25%	875,00	25%	3.925,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20 %	20%	250,00	20%	270,00	20%	280,00	20%	300,00	20%	325,00	20%	1.425,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	NA	1%		1%		1%		1%		1%		1%		
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,35%	0,39%	6.506,18	0,41%	6.816,79	0,43%	7.286,47	0,45%	7.960,12	0,48%	8.613,13	0,48%	37.182,70	
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	7,65%	7,86%		7,97%		8,08%		8,19%		8,30%		8,30%		
	nilai ekspor non migas (US\$ Milyar)	0,934	0,966		0,983		1,0		1,017		1,034		1,034		
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	329.124	250.977	257.866		264.755		271.644		278.533		278.533				

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	NA	0.527 Triliun		0.627 Triliun		0.727 Triliun		0.827 Triliun		0.927 Triliun		0.927 Triliun		
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	80%		81%		82%		83%		84%		84%		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	500,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp. 3,9 Triliun	10%	400,00	10%	420,00	10%	440,00	10%	460,00	10%	480,00	50%	2.200,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1802 pelapor LKPM	3%	300,00	4%	1.220,00	5%	1.388,00	6%	1.465,00	7%	1.542,00	25%	5.915,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	Rp. 6,4 Triliun	10%	206,03	10%	500,00	10%	700,00	10%	900,00	10%	1.100,00	50%	3.406,03	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sasaran 2.3: Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,18	1,20	1,22	1,30	1,40	1,50	1,50							

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	15%	17%	4.740,0	18%	5.335,00	20%	6.725,00	22%	7.385,00	23%	8.490,00	100%	32.675,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	-	16%	847,00	18%	1.300,00	19%	1.600,00	22%	1.902,00	25%	2.330,00	100%	7.979,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	9%	16%	900,00	18%	1.200,00	19%	1.400,00	22%	1.600,00	25%	1.800,00	100 %	6.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	14%	15%	13.900,00	17%	15.010,00	18%	18.045,00	19%	21.400,00	20%	24.500,0	89%	92.855,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1,69% (119 Koperasi Aktif)	2,69%	1.356,00	3,69%	1.559,40	4,69%	1.793,31	5,69%	2.062,31	6,69%	2.309,78	23,45%	9.080,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi berkinerja baik	30% (6 Koperasi)	40%	479,32	45%	575,17	50%	675,61	50%	828,24	50%	927,63	50%	3.485,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat dan cukup sehat	40% (8 KSP/USP)	43%	277,72	45%	319,38	47%	367,29	50%	422,38	50%	473,07	50%	1.859,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	17,6% (72.126 UMKM)	19,6%	41.210,36	21,6%	41.391,91	23,6%	41.600,70	25,6%	41.840,80	27,6%	46.861,70	1,18	212.905,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	4%	5%	2.500,00	5%	2.875,00	5%	3.306,25	5%	3.802,19	5%	4.258,45	25%	16.741,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM	Persentase pertumbuha n Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	6.82%	7%	575,00	7,5%	661,25	8%	780,44	8,5%	897,50	9%	1.005,20	9%	3.919,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 2.4: memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas (%)	53,5	53,9		54,0		54,1		54,2		54,4		54,4		
	Akses terhadap air minum layak (%)	78,06	79,08		83,92		85,00		87,00		90,00		90,00		
	Rasio elektrifika si (%)	99,90	100,0		100,0		100,00		100,00		100,0		100,00		
	Persentase luas sawah beririgasi	76,89	78,00		79,50		81,00		82,50		84,00		84,00		
	Persentase Desa/Kelu rahan yang Memiliki Akses Internet	81,76	99,36		100,0		100,00		100,00		100,0		100,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06	79,08	2.350,69	83,92	2.850,60	85,00	3.120,50	87,00	3.850,69	90,00	5.000,00	90,00	17.172,48	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	76,90	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	90,16	86.436,25	94,90	91.104,32	98,22	105.000,00	98,22	429.453,89	Dinas PUPR
	persentase luas baku daerah irigasi yg terairi	76,90	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	90,16	86.436,25	94,90	91.104,32	98,22	105.000,00	98,22	429.453,89	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,81	79,60	799.085	83,231	803.043,2	85,325	830.146,24	87,832	824.844,864	90,025	812.107,75	90,025	4.250.524,054	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Pelayaran	NA	15%	12.150,00	25%	13.550,00	50%	14.100,00	75%	15.000,00	100%	16.000,0	100%	70.800,0	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Perkeretaapian	NA	60%	3.500,00	70%	4.650,00	80%	4.650,00	90%	4.950,00	100%	4.950,00	100%	22.700,0	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)	NA	0,55	38.150,00	0,55	42.650,00	0,55	45.700,00	0,55	45.000,00	0,55	47.150,0	0,55	218.650,00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	99,92%	99,93%	5.798,5	99,94%	6.060,00	99,95%	6.550,00	99,96%	7.050,00	100%	7.050,00	100%	25.458,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	26,00%	27,00%	2.510,094	28,00%	2.560,094	29,00%	2.590,094	30,00%	2.610,094	31%	2.630,094	31%	10.270,38	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	2.500	100%	3.000	100%	3.500	100%	4.000	100%	4.500	100%	17.700	Dinas PUPR
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100%	100%	1.750	100%	1.275	100%	1.315	100%	1.425	100%	1.400	100%	7.365	Dinas PUPR
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	92% (dari 46,7 km = 42 km)	6%	25.000, 00	12%	30.000,00	18%	35.000,00	24%	40.000,00	30%	45.000,0	30%	175.000, 0	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRA- SI	Persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera		24%	73,668	24,89%	450,00	25,8%	600,00	27,61%	1.000,00	45,08%	400	45,08%	2.523,66 8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si
PROGRAM PENGEMBANG AN KAWASAN TRANSMIGRA- SI	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	NA	1 lokasi		24,89%		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si
	Nilai rata- rata Indeks perkembang an kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	32,14	33,82	415,29 9	35,18	750,00	35,64	800,00	36,09	800,00	36,33	850,00	36,33	3.615,29 9	
	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	40,27	40,89		41,47		41,8		42,22		43,11		43,11		
PROGRAM PERENCANA N KAWASAN TRANSMIGRA- SI	Jumlah kawasan pemukiman Transmigrasi yang berkualitas		1 lokasi	139,99 7	1 lokasi	650,00	1 lokasi	750,00	1 lokasi	850,00	1 lokasi	850,00	1 lokasi	3.239,99 7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5%	5%	1.875,0	8%	1.930,02	8%	2.000,00	8%	2.200,00	9%	2.230,00	9%	10.235,02	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31,73%	100,00%	510,00	100%	675,00	100%	805,00	100%	1.025,00	100%	12.000,0	100%	15.015,0	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi	25%	25%	250,00	40%	275,00	40%	280,00	40%	300,00	40%	300,00	40%	1.405,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawana n	50%	50%	600,00	50%	750,00	50%	900,00	50%	975,00	50%	975,00	50%	4.200,00	Dinas Sosial, Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatka n perlindungan dan Jaminan Sosial	2,50%	2,50%	895,00	3%	1.485,00	3%	1.485,00	3%	1.490,00	3%	1.623,00	3%	6.978,00	Dinas Sosial, Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatka n Rehabilitasi Sosial	0,50%	0,50%	8.261,0 7	1%	7.395,17	1%	7.649,17	1%	8.085,17	1%	8.592,29	1%	39.982,8 7	Dinas Sosial, Kependudu kan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	77%	100%	1.509,21	100%	1.849,76	100%	2.120,26	100%	2.503,55	100%	1.736,60	100%	9.719,38	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	60%	70%	29.866,06	75%	12.807,05	80%	9.758,03	85%	10.671,86	90%	11.812,75	90%	74.915,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran 2.5: Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	72,07		72,43		72,80		73,17		73,53		73,53		
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis lahan (Juta TCO2 Eq)	31,683	3,283		3,348		3,412		3,476		3,541		34,641		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	138,64	138,14	7.805,2	137,64	9.530,9	137,14	11.300	136,64	12.100	136,14	12.800	136,14	53.536	BPBD
PROGRAM PENGELOLA AN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi	0 %	100%	500,00	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	500,000	100%	2.500,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	14.648 SBM	178	9.909,7 85	634	13.789,386	1.289	14.572,948	1.564	15.978,073	2.012	17.283,1 98	5.852	75.733,3 91	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>input</i> / <i>act</i> / <i>outcome</i>)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiat an terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	53% (37 usaha/ kegiata n)	70%	940,00	76%	1.095,00	77%	1.190,00	79%	1.365,00	86%	1.490,00	86%	6.080,00	Dinas Lingkunga n Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	100% (8 kasus)	100%	860,00	100%	1.000,00	100%	1.150,00	100%	1.350,00	100%	1.550,00	100%	5.910,00	Dinas Lingkunga n Hidup

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	64,28% (27 MHA)	71%	250,00	79%	400,00	86%	400,00	93%	400,00	100%	400,00	100%	1.850,00	Dinas Lingkunga n Hidup
PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kenakeraga man Hayati Provinsi Jambi	0%	0%	350,00	0%	400,00	20%	450,00	40%	500,00	60%	500,00	60%	2.200,00	Dinas Lingkunga n Hidup
PROGRAM PENGELOLAA N PERSAMPAHA N	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	17%	26%	300,00	27%	600,00	28%	200,00	30%	600,00	30%	200,00	30%	1.900,00	Dinas Lingkunga n Hidup
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	NA	26%	300,00	27%	600,00	28%	200,00	30%	600,00	30%	200,00	30%	1.900,00	Dinas Lingkunga n Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan limbah B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	100%	165,00	100%	165,00	100%	165,00	100%	165,00	100%	165,00	100%	825,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	56,75	61,19	4.740,24	61,29	4.213,24	61,39	4.738,24	61,49	4.575,24	61,59	4.575,24	61,59	22.842,18	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	85,65	84,42		84,52		84,62		84,72		84,82				
	Indeks Kualitas Air Laut	55,93	77,19		77,84		78,49		79,05		79,70				
	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	69,14	73,89		74,39		74,39		75,39		75,89				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	550,00	100%	650,00	100%	750,00	100%	850,00	100%	850,00	100%	3.650,00	Dinas Lingkunga n Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas/ Masyarakat Lingkungan Hidup yang dibina	NA	50%	450,00	60%	500,00	70%	550,00	80%	600,00	80%	600,00	80%	2.700,00	Dinas Lingkunga n Hidup
PROGRAM PERENCANAA N LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang difasilitasi mempertimb angkan Tujuan Pembanguna n Berkelanjuta n	100%	100%	2.450,0 0	100%	2.550,00	100%	3.400,00	100%	2.000,00	100%	3.050,00	100%	13.450,0 0	Dinas Lingkunga n Hidup

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kond. Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	80% (81.449 Ha)	0,2%	1.426,5 34	0,2%	3.185,000	0,2%	3.508,500	0,12%	3.455,850	0,12%	3.807,43	81%	17.336,7	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	8% (15.783 ,55 Ha dari total luas izin 204.29 6,97 Ha)	15% (penam bahan 14.287 Ha menjadi 30.070, 55)	4.619,0 92	20%	4.880,956	26%	4.043,336	38%	4.267,063	44%	4.384,94	44%	7.805,67	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	4,5% (dari 133 kelemb agaan)	8,2%	206,26 8	12%	226,894	15,78%	249,584	19,54%	249,584	23,30%	274,542	23,30%	1.206,87	Dinas Kehutanan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	0,20%		0,20%		0,20%		0,20%		0,20%		0,20%		
	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,3% (dari total 181.888 Ha)	1,46%	28.489,293	1,58%	30.982,152	1,71%	26.369,413	1,85%	26.369,413	1,99%	24.048,962	1,99%	138.490,139	
	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	4,37%	0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	29,3%	20%	800,00	30%	850,00	40%	1.800,00	50%	1.250,00	50%	1.250,00	50%	5.950,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan	0%	20%	900,00	20%	600,00	20%	600,00	20%	600,00	20%	600,00	20%	3.300,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	25 (jumlah total bangun an dan gedung milik pempro v dalam proses penghit ungan)	4%	6.000,0	4%	6.000,00	4%	6.000,00	4%	6.000,00	4%	6.000,00	20%	30.000,0	Dinas PUPR
	persentase pembangun an bangunan dan gedung strategis provinsi	-	25%	67.924	37,50%	85.000,00	37,50%	80.000,00	-	-	-	-	37,50%	232.924	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH	persentase pengelolaan dan pengembang an sistem air limbah	na	40%	2.113,6 8	50%	2.500,30	60%	2.800,30	70%	3.125,30	80%	5.000,00	80%	15.539,5 8	Dinas PUPR
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak	75,89%	78,45%	2.500,0	81,44%	2.500,00	85,27%	5.000,00	95,00%	7.500,00	100%	10.000,0	100%	27.500,0	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	29,01%	31,03%	202.000,00	32,46%	143.000,00	34,54%	208.000,00	37,33%	279.000,00	40%	267.000,00	40%	1.099.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh (ha)	196,32	185,00	22.640,00	172,00	26.000,00	160,00	24.000,00	148,00	24.000,00	136,00	24.000,00	136,00	120.640,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)	-	-	2.000,00	-	1.500,00	1,00	150.000,00	-	-	-	-	1,00	153.500,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang	5%	10%	7.159,85	10%	8.703,84	10%	9.716,21	10%	10.565,03	10%	10.565,03	10%	46.709,97	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 2.6: menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,13	5,00		4,61		4,56		4,39		4,2		4,2		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	33%	40%	9.000,0	47%	9.250,00	54%	9.500,00	61%	9.750,00	68%	10.000,0	68%	47.500,0	Dinas PUPR
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Layanan RTKD	100%	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	9,5 %	9,6 %	1.000,0	9,7 %%	1.000,00	9,8 %	1.000,00	9,9 %	1.000,00	10 %	1.000,00	10 %	5.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat kompetensi	4,5 %	5,10%	8.400,0	5,20%	8.400,00	5,30%	8.400,00	5,40%	8.400,00	5,50%	8.400,00	5,50%	42.000,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	24,92%	30,10%	3.850,0	30,20%	3.850,00	30,30%	3.850,00	30,40%	3.850,00	30,50%	3.850,00	30,50%	19.250,0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	70 %	76%	1.500,0	77%	1.500,00	78%	1.500,00	79%	1.500,00	80%	1.500,00	80%	7.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran 2.7: meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,00	71.00		72.00		73.00		74.00		75.00		75.00		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	desa mandiri pangan	21,00	31,00	6.616,08	41,00	7.158,49	51,00	8.782,26	61,00	9.499,60	71,00	10.324,54	71,00	42.380,98	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor pph	92.3	92.5	7.093,05	93.2	8.707,01	95.2	9.413,06	95.2	10.225,02	95.5	11.158,78	95.5	5.625.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	konsumsi beras (kg/kap/thn)	86,00	85.5		85,00		84.5		84,00		83.5				
	konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2.139,4	2.140,0		2.195,0		2.195,50		2.198,00		2.200,0				
	konsumsi protein (gr/kap/hr)	60,00	60,50		61,00		61,50		62,00		62,50				

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan rawan pangan	9,50	44.323,00		44.322,00		44.321,0		44.320,0		44.319,00		44.319,0		Dinas Ketahanan Pangan
	persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	13,57% (42,2 ton)	19,61	5.000,0	19,61	6.000,00	19,61	7.000,00	20,42	8.000,00	20,40	9.000,00	20,40	35.000,0	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96,13	100,00	10.000	100,00	2.000,00	100,00	2.500,00	100,00	3.000,00	100,00	3.500,00	100,00	21.000,0	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	39,40 kg/kapita/tahun	40,60 kg/kapita/tahun	5.759,1	41,00 kg/kapita/tahun	4.649,80	41,50 kg/kapita/tahun	5.061,50	42,00 kg/kapita/tahun	54,78	42,50 kg/kapita/tahun	5.592,05	42,50 kg/kapita/tahun	21.117,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	40 %	45%	649,68	50%	1.271,45	55%	1.398,59	60%	1.546,24	65%	1.694,15	65%	6.560,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	90%		91%		92%		92%		94%		94%		Dinas Perindustri an dan Perdaganga n
	Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	NA	5.9%	1.288,5	5.9%	1.301,10	5.9%	1.325,22	5.9%	1.341,14	5.9%	1.341,14	5.9%	6.597,10	
Misi 3: Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia															
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat , berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembanguna n Manusia	71,29	72,14		72,62		73,07		73,56		74,04		74,04		
Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,16	71,28		71,40		71,52		71,64		71,76		71,76		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	4,00	6,00	850,00	6,00	1.050,00	8,00	1.325,00	8,00	1.325,00	9,00	1.325,00	9,00	5.875,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	76.086,00	76.586,00	134.294,18	77.086,00	36.716,21	77.586,0	35.950,51	78.086,0	36.184,88	78.586,00	36.419,34	78.586,0	279.565,12	Dinas Kesehatan
	Jumlah kematian Bayi	353,00	343,00	850,00	333,00	1.050	323,00	1.325	313,00	1.325	303,00	1.325	303,00	47,00	Dinas Kesehatan
	Jumlah kematian ibu	62,00	59,00		56,00		53,00		50,00		47,00				

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	93,00	96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100,00	100,00	98.076,8	100,00	119.157,7	100,00	124.848,4	100,00	131.803,8	100,00	139.385	100,00	100,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV	21%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	7,00	9,00		9,00		9,00		10,00		11,00		11,00		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	88%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi	63%	73%		82%		91%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
	Prevalensi stunting	21,03	16,00		14,00		12,00		10,00		8,00		8,00		
	Prevalensi wasting	10,20	7,80		7,50		7,30		7,00		6,80		6,80		
	Indeks Kepuasan masyarakat di RSUD Rd. Mattaher	83,47	84,00	66.318,81	84,5	69.430,48	85,0	71.697,73	86,0	76.128,35	87,0	79.730,49	87,0	363.305,86	RSUD Rd Mattaher
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	98%	98%	18.349,34	98%	26.652,59	98%	31.149,89	98%	20.833,40	98%	43.190,6	98%	140.175,81	Rumah Sakit Jiwa

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	38,35%	40%	1.292,0 5	43%	1.456,31	46%	1.644,00	48%	1.757,92	50%	1.858,87	50%	8.009,14	Dinas Kesehatan
	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatka n pelatihan terstandar (BAPELKES)	50%	53,40%	1.675,0	57,95%	1.842,50	64,75%	2.062,75	71,57%	2.229,43	78,39%	2.452,37	78,39%	10.262,0 4	Dinas Kesehatan (Bapelkes)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%	1.265	100%	1.454,7	100%	1.818,4	100%	2.059,4	100%	2.059,4	100%	8.688,8	Dinas Kesehatan
	Persentase pedagang besar cabang farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%		100%		100%								

Misi/Tujuan/ Sasaran/Progr am Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>imp act/ outcome</i>)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembanguna n Keluarga (iBangga)	51,11 %	60,32%	3.725,0	60,35%	3.725,00	60,39%	3.725,00	60,45%	3.725,00	60,50%	3.725,00	60,50%	18.625,0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	60,3 %	65,44%	2.050,0	65,48%	2.050,00	65,50%	2.050,00	65,52%	2.050,00	65,57%	2.050,00	65,57%	10.250,0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk
PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	Laju Pertumbuha n Penduduk	1,72 %	1,72 %	1.150,0	1,7 %	5.250,00	1,68 %	5.250,00	1,65 %	5.250,00	1,62 %	5.250,00	1,62%	22.150,0	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 3.2: Meningkatkan akses Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,55	8,79		8,90		9,02		9,14		9,26		9,26		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,86%	26,86%	72.593,16	27,86%	83.314,41	28,86%	96.236,37	29,86%	111.821,20	30,86%	111.821,2	30,86%	475.786,3	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/SMK	70,33%	74,23%		76,17%		78,12%		80,07%		82,02%		82,02%		
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	26,00%	30,00%	1.061.453	35,00%	1.046.631	40,00%	1.045.293	45,00%	1.044.305	50,00%	1.044.305	55,00%	5.989.241	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	57,2%	59,2%		60,2%		61,2%		62,2%		63,2%		63,2%		
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	26,5%	28,3%		29,2%		30,1%		31%		31,9%		31,9%		
	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	30%	35%		40%		45%		50%		55%		45%		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B	25,01%	27%		29%		31%		33%		35%		35%		
	Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha	NA	1%		2%		3%		4%		5%		6%		
	Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru Bahasa Indonesia	NA	5%	2.125,0	10%	2.175,00	15%	2.250,00	20%	2.375,00	25%	2.425	25%	11.300	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	20%	100%	2.000,0	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	10.000	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	100%	100%	320,00	100%	340,00	100%	355,00	100%	370,00	100%	370	100%	1.775	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	peringkat POPNAS	peringkat 10	Peringkat 9 (2022 tidak ada event)	46.993,07	Peringkat 8	44.190,75	Peringkat 8	49.623,37	Peringkat 7	55.990,32	Peringkat 7	64.388,87	Peringkat 7 (tahun 2026 tidak ada event)	261.186,38	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	peringkat PEPARPENAS	peringkat 13	Peringkat 12 (2022 tidak ada event)		Peringkat 11		Peringkat 11		Peringkat 10		Peringkat 10		Peringkat 10 (tahun 2026 tidak ada event)		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	0.024% (56 kelompok dari total 231.323 kelompok)	0.033 % (76 kelompok)	7.688,61	0.041 % (96 kelompok)	8.252,07	0.052 % (121 kelompok)	9.434,78	0.063% (146 kelompok)	10.380,00	0.074 % (171 kelompok)	11.937,00	0.074 % (171 kelompok)	47.692,45	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/imp act/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target		Rp.juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0.087 % (811 orang /925.295 orang pemuda)	0.13% (1181 orang)		0.15 % (1368 orang)		0.17 % (1570 orang)		0.19 % (1772 orang)		0.21 % (1974 orang)		0.21 % (1974 orang)	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	100%	3.797,64	100%	4.302,29	100%	4.879,38	100%	5.539,63	100%	6.370,57	100%	24.889,51	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,78	63,30	2.000,0	67,30	2.200,00	71,30	2.400,00	75,30	2.600,00	79,30	2.800,00	79,30	12.000,0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	20,89	21,50		22,50		23,50		24,50		25,50				
Sasaran 3.3: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	1,02%	17,00 %		18,00 %		19,00 %		20,00 %		21,00 %		21,00 %		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya teregistrasi	53 buah	100 buah	1.400,00	110 buah	1.600,00	115 buah	1.800,00	120 buah	2.000,00	125 buah	2.100,00	125 buah	8.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	7%	13%	400,00	15%	500,00	18%	550,00	21%	600,00	23%	600,00	90%	2.650,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	14%	16%	3.920,0	18%	3.945,00	20%	3.975,00	22%	3.995,00	24%	4.010,00	100%	19.845,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan	20 karya	27 karya	7.930,0	30 karya	8.646,00	32 karya	9.465,00	34 karya	10.250,00	34 karya	11.025,00	34,00	47.316,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah apresiasi di Taman Budaya Jambi	50.000 apresiasi	51.000 apresiasi		52.000 apresiasi		53.000 apresiasi		54.000 apresiasi		55.000 apresiasi		265.000,00	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan	0 kali	2 kali	1.820,0	3 kali	1.945,00	4 kali	2.010,00	5 kali	2.150,00	6 kali	2.235,00	20,00	10.160,0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah peningkatan pelaku seni	300 orang	310 orang		315 orang		320 orang		325 orang		330 orang		1.600,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 3.4: Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi	93,47	93,60		93,80		94,05		94,30		94,50		94,50		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	1.273,5	90%	1.421,00	90%	2.065,00	90%	2.395,00	95%	2.450,00	95%	9.604,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	75%	85%	650,00	90%	840,00	92%	1.130,00	93%	1.185,00	95%	1.300,00	95%	5.105,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	76%	1.055,0	79%	1.200,00	80%	1.445,00	81%	1.620,00	83%	1.725,00	83%	7.045,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	78%	1.840,0	80%	1.977,50	83%	2.422,50	85%	2.680,00	86%	3.275,00	86%	12.195,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77 %	77%	2.970,0	79%	3.200,00	81%	4.450,00	83%	4.500,00	85%	4.540,00	85%	19.660,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satlinmas (orang)	13.109	17.150	670,00	18.200	695,00	19.600	810,00	22.000	930,00	23.430	980,00	23.430	4.085,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	93,02%	100%	5.395,17	100%	5.818,22	100%	6.342,40	100%	6.451,51	100%	7.200,70	100%	31.208,0	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	59,10%	100%	900,27	100%	1.030,54	100%	1.115,54	100%	1.325,54	100%	1.375,54	100%	5.747,43	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 3.5: Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaa n Gender	65,86	67,78		69,02		70,00		71,50		73,00		73,00		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak	54,54%	54,54%	3.000,0	72,72%	3.150,00	81,81%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	15.600,0	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pengendalia n Penduduk
PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Indeks Pembanguna n Gender (IPG)	88,44	91.50	6.000,0	91.50	6.000,00	91.50	6.000,00	91.50	6.000,00	91.50	6.000,00	91.50	15.600.0 00,00	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pengendalia n Penduduk
PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	600,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	600,00	100%	1.800,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>input</i> / <i>output</i>)	Kond.K inerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	target	Rp.juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,809	0,810	2.625,0	0,820	1.325,00	0,830	1.325,00	0,840	1.525,00	0,850	2.625,00	0,850	9.425,00	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pengendalia n Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,26	67,00	1.950,0	67,62	1.950,00	69,87	1.950,00	70,00	1.950,00	70,00	1.950,00	70,00	9.750,00	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pengendalia n Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatka n layanan komprehensi f	100%	100%	1.125,0	100%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100%	1.125,00	100,00%	5.625,00	Dinas Pemberday aan Perempuan , Perlindung an Anak dan Pengendali an Penduduk

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil Provinsi, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang diperkirakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dari semua rencana penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2026, walaupun distribusinya belum dominan. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Namun demikian, kedepan Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga merencanakan untuk menambah investasi sebesar Rp.214 Milyar selama tiga tahun, sehingga PAD akan semakin meningkat.

Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi pemungut serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, sehingga akan tercapai optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Provinsi Jambi adalah melalui perluasan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 7-1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2026 Provinsi Jambi

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	4.534.247.038.522	4.729.037.069.416	4.892.067.722.056	4.937.620.137.382	5.134.481.990.665	2,52
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.770.428.802.468	1.924.617.410.013	2.044.740.488.842	2.174.661.436.446	2.324.160.145.457	5,59
1.1.1.	Pajak daerah	1.507.600.967.749	1.582.981.016.136	1.662.130.066.943	1.745.236.570.290	1.823.772.215.954	3,88
1.1.2.	Retribusi daerah	23.026.961.400	24.569.314.118	26.215.458.164	27.971.893.861	29.846.010.750	5,32
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	28.028.487.058,56	43.988.240.000	56.008.240.000	56.008.240.000	56.008.240.000	14,85
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	211.772.386.260,67	273.078.839.759	300.386.723.734	345.444.732.295	414.533.678.753	14,38
1.2.	Pendapatan Transfer	2.729.487.634.674	2.778.117.882.463	2.829.293.937.834	2.751.613.885.436	2.807.821.845.209	0,57
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.729.487.634.674	2.778.117.882.463	2.829.293.937.834	2.751.613.885.436	2.807.821.845.209	0,57
1.2..	Dana Insentif Daerah	2.425.767.000,00	2.425.767.000,00	2.425.767.000,00	2.425.767.000,00	2.425.767.000,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.330.601.380,00	26.301.776.940,00	18.033.295.380,00	11.344.815.500,00	2.500.000.000,00	-40,78
1.3.1	Hibah	34.330.601.380,00	26.301.776.940	18.033.295.380	11.344.815.500	2.500.000.000	-40,78
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	4.975.011.195.547	4.761.578.094.267	4.920.866.506.584	5.179.506.695.762	5.411.314.125.165	1,70
2.1	Belanja Operasi	2.768.648.440.224	2.826.981.488.283	2.906.458.340.964	2.981.335.694.172	3.070.215.244.283	2,09
2.1.1	Belanja Pegawai	1.578.064.833.151,00	1.664.385.895.652	1.688.531.430.259	1.731.504.806.829	1.783.328.219.080	2,48
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	634.094.822.031,00	647.265.046.141	650.501.371.372	673.753.878.229	699.392.751.466	1,98
2.1.3	Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	555.838.785.042,00	514.680.546.490	566.775.539.333	575.427.009.114	586.844.273.737	1,09
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2	Belanja Modal	1.195.481.112.512	919.226.488.697	959.152.070.259	1.099.515.137.986	1.229.815.110.202	0,57
2.3	Belanja Tidak Terduga	49.226.371.770,00	13.844.810.329,00	11.887.185.709,00	11.372.092.924,00	5.000.000.000,00	-36,71
2.4	Belanja Transfer	961.655.271.041	1.001.525.306.958	1.043.368.909.652	1.087.283.770.680	1.106.283.770.680	2,84
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	805.455.271.041	845.325.306.958	887.168.909.652	931.083.770.680	950.083.770.680	3,36
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	0,00
	Surplus (defisit)	(440.764.157.025)	(32.541.024.851)	(28.798.784.528)	(241.886.558.380)	(276.832.134.500)	-8,88
3	PEMBIAYAAN	440.764.157.025	32.541.024.851	28.798.784.528	241.886.558.380	276.832.134.500	-8,88
3.1	Penerimaan Pembiayaan	500.764.157.025	250.041.024.851	250.298.784.528	241.886.558.380	276.832.134.500	-11,18
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	250.764.157.025	250.041.024.851	250.298.784.528	241.886.558.380	276.832.134.500	2,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000	217.500.000.000	221.500.000.000	0	0	-100,00
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	142.500.000.000	142.500.000.000			0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	60.000.000.000	75.000.000.000	79.000.000.000	-	-	14,75
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		0	0	0	0	0	0,00

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Pendapatan daerah ditargetkan akan meningkat rata-rata 2,52 persen pertahun dalam kurun waktu 2022-2026, yang didukung dari pertumbuhan rata-rata PAD ditargetkan sebesar 5,59 persen, pertumbuhan rata-rata pajak daerah 3,88 persen dan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah 5,32 persen pertahun. Pertumbuhan yang tidak terlalu besar ini dengan mempertimbangkan perekonomian Provinsi Jambi yang masih memerlukan pemulihan sebagai akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer diproyeksikan sebesar 0,57 persen pertahun.

Dengan pertumbuhan rata-rata PAD yang diproyeksikan lebih besar dari pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Jambi. Kontribusi PAD diproyeksikan terus meningkat dari 39,05 persen tahun 2022 menjadi 45,26 persen tahun 2026, sedangkan proporsi pendapatan transfer diproyeksikan turun sedikit demi sedikit dari 60,20 persen tahun 2022 menjadi 54,68 persen pada tahun 2026.

Kontribusi rencana anggaran belanja dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,70 persen. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi belanja operasi sebesar 55,65 persen pada tahun 2022 dan diupayakan proporsinya ditekan agar tidak terlalu meningkat menjadi 56,74 persen atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,09 persen selama kurun waktu 2022-2026.

Belanja modal akan didorong proporsinya lebih besar pada awal tahun rencana atau tahun 2022 dengan memanfaatkan pendanaan dari rencana pinjaman daerah yaitu sebesar 24,03 persen. Melalui proporsi belanja modal yang cukup pada awal tahun rencana, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Jambi pada periode RPJMD ini. Beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan

cukup besar juga direncanakan akan dilakukan secara tahun jamak (multiyears) yaitu tahun 2022-2024 untuk memberikan jaminan anggaran tersedia sampai pekerjaan selesai. Sementara belanja bantuan keuangan berkisar antara 2,89 – 3,14 persen selama kurun waktu 2022-2026. Bantuan keuangan ini direncanakan untuk pelaksanaan program DUMISAKE sebesar Rp156,2 milyar setiap tahunnya untuk diberikan kepada 1562 desa/ kelurahan masing-masing Rp100 juta/tahun/desa/kelurahan dan akan dialokasikan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Bantuan keuangan ini menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan di desa/kelurahan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA dan Pinjaman Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun dengan besaran indikatif sebagaimana terlihat pada tabel 7-1 di atas.

7.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan

dikemukakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari penghitungan kerangka pendanaan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah.

Tabel di bawah memperlihatkan total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.443.520.104.192,- dan tumbuh rata-rata 2,27 persen, hingga menjadi Rp2.733.411.989.760,- pada tahun 2026. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama tersebut, maka didapatkan kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.591.491.091.355,- dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,66 persen hingga menjadi Rp2.677.902.135.405,- pada tahun 2026. Kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut direncanakan untuk mendanai pembangunan di Provinsi Jambi dengan proporsi belanja prioritas I rata – rata 56,40 persen, antara lain untuk membiayai Program Dumisake dan program prioritas dan unggulan lainnya dalam rangka mencapai Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tabel 7-2 Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	1.578.064.833.151	1.664.385.895.652	1.688.531.430.259	1.731.504.806.829	1.783.328.219.080
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3	Belanja bagi hasil	805.455.271.041	845.325.306.958	887.168.909.652	931.083.770.680	950.083.770.680
4	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000	217.500.000.000	221.500.000.000	-	-
a	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	142.500.000.000	142.500.000.000	-	-
c	Penyertaan Modal	60.000.000.000	75.000.000.000	79.000.000.000	-	-
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	2.443.520.104.192	2.727.211.202.610	2.797.200.339.911	2.662.588.577.509	2.733.411.989.760

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 7-3

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	4.534.247.038.522	4.729.037.069.416	4.892.067.722.056	4.937.620.137.382	5.134.481.990.665
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	250.764.157.025	250.041.024.851	250.298.784.528	241.886.558.380	276.832.134.500
4.	Pinjaman Daerah	250.000.000.000				
	Total penerimaan	5.035.011.195.547	4.979.078.094.267	5.142.366.506.584	5.179.506.695.762	5.411.314.125.165
	Dikurangi:	2.443.520.104.192	2.727.211.202.610	2.797.200.339.911	2.662.588.577.509	2.733.411.989.760
5.	Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	2.443.520.104.192	2.727.211.202.610	2.797.200.339.911	2.662.588.577.509	2.733.411.989.760
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.591.491.091.355	2.251.866.891.657	2.345.166.166.673	2.516.918.118.253	2.677.902.135.405

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel 7-4 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.591.491.091.355	2.251.866.891.657	2.345.166.166.673	2.516.918.118.253	2.677.902.135.405
	Prioritas I	1.575.999.420.273	1.273.046.092.351	1.320.108.659.375	1.382.521.535.881	1.432.162.087.210
	Prioritas II	1.015.491.671.082	978.820.799.306	1.025.057.507.298	1.134.396.582.372	1.245.740.048.195

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan kerangka pendanaan yang akan membiayai pembangunan yang dilakukan. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi dalam Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah dengan kebutuhan pendanaannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7-5 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Provinsi Jambi

Kapabilitas Riil / Belanja	Proyeksi (Rp.)				
	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kapabilitas riil keuangan	2.591.491.091.355	2.251.866.891.657	2.345.166.166.673	2.516.918.118.253	2.677.902.135.405
Belanja Barang dan Jasa	634.094.822.031,00	647.265.046.141,00	650.501.371.372,00	673.753.878.229,00	699.392.751.466,00
Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
Belanja Hibah	555.838.785.042,00	514.680.546.490,00	566.775.539.333,00	575.427.009.114,00	586.844.273.737,00
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Modal	1.195.481.112.512,00	919.226.488.697,00	959.152.070.259,00	1.099.515.137.986,00	1.229.815.110.202,00
Belanja Tidak Terduga	49.226.371.770,00	13.844.810.329,00	11.887.185.709,00	11.372.092.924,00	5.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00	156.200.000.000,00

Sumber: hasil analisis, 2021

Tabel 7-6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NON URUSAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	1.877.578,05	BB	1.900.500,10	BB	1.920.500,00	BB	1.925.510,00	A	1.950.000,00	A	9.574.088,15	Seluruh Perangkat Daerah
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB															
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR															
PENDIDIKAN															
PROGRAM PENDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,86%	26,86%	72.593,16	27,86%	83.314,41	28,86%	96.236,37	29,86%	111.821,20	30,86%	111,82	30,86%	364.076,96	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/SMK	70,33%	74,23%	1.061.453	76,17%	1.046.631	78,12%	1.045.293	80,07%	1.044.305	82,02%	1.044.305	82,02%	5.241.989	Dinas Pendidikan
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	26,00%	30,00%		35,00%		40,00%		45,00%		50,00%		55,00%		
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	57,2%	59,2%		60,2%		61,2%		62,2%		63,2%		63,2%		
	Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	26,5%	28,3%		29,2%		30,1%		31%		31,9%		31,9%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	30%	35%		40%		45%		50%		55%		45%		
	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B	25,01%	27%		29%		31%		33%		35%		35%		
	Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha	NA	1%		2%		3%		4%		5%		6%		
	Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru Bahasa Indonesia	NA	5%	2.125,00	10%	2.175,00	15%	2.250,00	20%	2.375,00	25%	2.425	25%	11.300	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	20%	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	10.000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	100%	100%	320,00	100%	340,00	100%	355,00	100%	370,00	100%	370	100%	1.775	Dinas Pendidikan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KESEHATAN															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	4	6	850,00	6	1.050,00	8	1.325,00	8	1.325,00	9	1.325,00	9	5.875,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	76.086	76.586	134.294,18	77.086	36.716,21	77.586	35.950,51	78.086	36.184,88	78.586	36.419,34	78.586	279.565,12	Dinas Kesehatan
	Jumlah kematian Bayi	353	343	850,00	333	1.050	323	1.325	313	1.325	303	1.325	303		
	Jumlah kematian ibu	62	59		56		53		50		47		47		
	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	93%	96%	98.076,8	96%	119.157,7	96%	124.848,4	96%	131.803,8	96%	139.385	96%		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV	21%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		
	Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	7	9		9		9		10		11		11		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	88%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi	63%	73%		81,8%		90,9%		100%		100%		100%		
	Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
	Prevalensi stunting	21,03	16		14		12		10		8		8		
	Prevalensi wasting	10,2	7,8		7,5		7,3		7		6,8		6,8		
	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Rd. MattaHer	83,47	84,00	66.318,81	84,5	69.430,48	85	71.697,73	86	76.128,35	87	79.730,49	87	363.305,86	RSUD Rd MattaHer

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi	98%	98%	18.349,34	98%	26.652,59	98%	31.149,89	98%	20.833,40	98%	43.190,60	98%	140.175,81	Rumah Sakit Jiwa
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	38,35%	40%	1.292,05	43%	1.456,31	46%	1.644,00	48%	1.757,92	50%	1.858,87	50%	8.009,14	Dinas Kesehatan
	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar (BAPELKES)	50%	53,40%	1.675,00	57,95%	1.842,50	64,75%	2.062,75	71,57%	2.229,43	78,39%	2.452,37	78,39%	10.262,04	Dinas Kesehatan (Bapelkes)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%	1.265	100%	1.454,7	100%	1.818,4	100%	2.059,4	100%	2.091,2	100%	8.688,8	Dinas Kesehatan
	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
SOSIAL															
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5%	5%	1.875,00	7,50%	1.930,02	8,00%	2.000,00	8,00%	2.200,00	8,50%	2.230,00	8,50%	10.235,02	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	31,73%	100,00%	510,00	100,00%	675,00	100,00%	805,00	100,00%	1.025,00	100,00%	12.000,00	100,00%	15.015,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi	25%	25%	250,00	40%	275,00	40%	280,00	40%	300,00	40%	300,00	40%	1.405,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan	50%	50%	600,00	50%	750,00	50%	900,00	50%	975,00	50%	975,00	50%	4.200,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	2,5%	2,50%	895,00	2,75%	1.485,00	2,75%	1.485,00	2,75%	1.490,00	2,75%	1.623,00	2,75%	6.978,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,5%	0,50%	8.261,07	0,70%	7.395,17	0,70%	7.649,17	0,70%	8.085,17	0,70%	8.592,29	0,70%	39.982,87	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TRANTIBUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	138,64	138,14	7.805,2	137,64	9.530,9	137,14	11.300	136,64	12.100	136,14	12.800	136,14	53.536	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	76,97%	100%	1.509,21	100%	1.849,76	100%	2.120,26	100%	2.503,55	100%	1.736,60	100%	9.719,38	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satlinmas (orang)	13.109	17.150	670,00	18.200	695,00	19.600	810,00	22.000	930,00	23.430	980,00	23.430	4.085,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	93,02%	100%	5.395,17	100%	5.818,22	100%	6.342,40	100%	6.451,51	100%	7.200,70	100%	31.208,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	59,10%	100%	900,27	100%	1.030,54	100%	1.115,54	100%	1.325,54	100%	1.375,54	100%	5.747,43	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
PU DAN PENATAAN RUANG																
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada tahun berkenaan	25 (jumlah total bangunan dan gedung milik pemprov dalam proses penghitungan)	4	6.000,00	4	6.000,00	4	6.000,00	4	6.000,00	4	6.000,00	20	30.000,00	Dinas PUPR	
	persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi	0	25	67.924,00	37,5	85.000,00	37,5	80.000,00	0	-	0	-	37,5	232.924,00	Dinas PUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	na	40	2.113,68	50	2.500,30	60	2.800,30	70	3.125,30	80	5.000,00	80	15.539,58	Dinas PUPR	
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak	75,89	78,45	2.500,00	81,44	2.500,00	85,27	5.000,00	95	7.500,00	100	10.000,00	100	27.500,00	Dinas PUPR	
	persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman	29,01	31,03	202.000,00	32,46	143.000,00	34,54	208.000,00	37,33	279.000,00	40	267.000,00	40	1.099.000,00	Dinas PUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	78,06	79,08	2.350,69	83,92	2.850,60	85	3.120,50	87	3.850,69	90	5.000,00	90	17.172,48	Dinas PUPR	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	76,90	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	90,16	86.436,25	94,90	91.104,32	98,22	105.000,00	98,22	429.453,89	Dinas PUPR	
	persentase luas baku daerah irigasi yg terairi	76,90	81,04	70.456,25	86,01	76.457,07	90,16	86.436,25	94,90	91.104,32	98,22	105.000,00	98,22	429.453,89	Dinas PUPR	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	33	40	9.000,00	47	9.250,00	54	9.500,00	61	9.750,00	68	10.000,00	68	47.500,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh (ha)	196,32	185	22.640,00	172	26.000,00	160	24.000,00	148	24.000,00	136	24.000,00	136	120.640,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)	0	-	2.000,00	-	1.500,00	1	150.000,00	0	-	0	-	1	153.500,00	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,81	79,60	799.085	83,231	803.043,2	85,325	830.146,24	87,832	824.844,864	90,025	812.107,75	90,025	4.250.524,054	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase penyelenggara n penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang	5	10	7.159,85	10	8.703,84	10	9.716,21	10	10.565,03	10	10.565,03	10	46.709,97	Dinas PUPR
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	2.500	100%	3.000	100%	3.500	100%	4.000	100%	4.500	100%	17.700	Dinas PUPR
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100%	100%	1.750	100%	1.275	100%	1.315	100%	1.425	100%	1.400	100%	7.365	Dinas PUPR

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat	92% (dari 46,7 km = 42 km)	6	25.000,00	12	30.000,00	18	35.000,00	24	40.000,00	30	45.000,00	30	175.000,00	Dinas PUPR
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR															
TENAGA KERJA															
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Layanan RTKD	100%	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	9,5 %	9,6 %	1.000,00	9,7 %	1.000,00	9,8 %	1.000,00	9,9 %	1.000,00	10 %	1.000,00	10 %	5.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat kompetensi	4,5 %	5,10%	8.400,00	5,20%	8.400,00	5,30%	8.400,00	5,40%	8.400,00	5,50%	8.400,00	5,50%	42.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	24,92 %	30,10%	3.850,00	30,20 %	3.850,00	30,30%	3.850,00	30,40%	3.850,00	30,50%	3.850,00	30,50%	19.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAN	Persentase penurunan Pelanggaran Norma-Norma Tenaga Kerja	70 %	76%	1.500,00	77%	1.500,00	78%	1.500,00	79%	1.500,00	80%	1.500,00	80%	7.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	54,54%	54,54%	3.000,00	72,72%	3.150,00	81,81%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	3.150,00	100%	15.600,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	6.000,00	91,50%	30.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	100%	600,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	600,00	100%	1.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender	0,809	0,810	2.625,00	0,820	1.325,00	0,830	1.325,00	0,840	1.525,00	0,850	2.625,00	0,850	9.425,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,26	67	1.950,00	67,62	1.950,00	69,87	1.950,00	70	1.950,00	70	1.950,00	70	9.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00%	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	1.125,00	100,00%	5.625,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
KETAHANAN PANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	desa mandiri pangan	21	31	6.616,08	41	7.158,49	51	8.782,26	61	9.499,60	71	10.324,54	71	42.380,98	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor pph	92.3	92.5	7.093,05	93.2	8.707,01	95.2	9.413,06	95.2	10.225,02	95.5	11.158,78	95.5	562.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
	konsumsi beras (kg/kap/thn)	86	85.5		85		84.5		84		83.5				
	konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2139,4	2140		2195		2195,5		2198		2200				
	konsumsi protein (gr/kap/hr)	60	60,5		61		61,5		62		62,5				
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan rawan pangan	9,5	7.5	5.000,00	6.5	6.000,00	5.5	7.000,00	4.5	8.000,00	3.5	9.000,00	3.5	35.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	13,57% (42,2 ton)	19,61		19,61		19,61		20,42		20,4				

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	96,13	100	10.000,00	100	2.000,00	100	2.500,00	100	3.000,00	100	3.500,00	100	21.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	53% (37 usaha/kegiatan)	70%	940,00	76%	1.095,00	77%	1.190,00	79%	1.365,00	86%	1.490,00	86%	6.080,00	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif	100% (8 kasus)	100%	860,00	100%	1.000,00	100%	1.150,00	100%	1.350,00	100%	1.550,00	100%	5.910,00	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Pengakuan MHA dan kearifan lokal di provinsi Jambi	64,28% (27 MHA)	71,42%	250,00	79%	400,00	86%	400,00	93%	400,00	100%	400,00	100%	1.850,00	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Provinsi Jambi	0	0%	350,00	0%	400,00	20%	450,00	40%	500,00	60%	500,00	60%	2.200,00	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	17,20%	26%	300,00	27%	600,00	28%	200,00	30%	600,00	30%	200,00	30%	1.900,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi	NA	26%	300,00	27%	600,00	28%	200,00	30%	600,00	30%	200,00	30%	1.900,00	Dinas Lingkungan Hidup	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	100%	100%	165,00	100%	165,00	100%	165,00	100%	165,00	100%	165,00	100%	825,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	56,75	61,19	4.740,24	61,29	4.213,24	61,39	4.738,24	61,49	4.575,24	61,59	4.575,24	61,59	22.842,18	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	85,65	84,42		84,52		84,62		84,72		84,82				
	Indeks Kualitas Air Laut	55,93	77,19		77,84		78,49		79,05		79,70				
	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	69,14	73,89		74,39		74,39		75,39		75,89				
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	550,00	100%	650,00	100%	750,00	100%	850,00	100%	850,00	100%	3.650,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Komunitas/Masyarakat Lingkungan Hidup yang dibina	NA	50%	450,00	60%	500,00	70%	550,00	80%	600,00	80%	600,00	80%	2.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	100%	100%	2.450,00	100%	2.550,00	100%	3.400,00	100%	2.000,00	100%	3.050,00	100%	13.450,00	Dinas Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL															
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil		94%	2.430,00	95%	2.725,00	96%	2.725,00	97%	2.975,00	98%	2.975,00	98%	13.830,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk		99 persen	1.960,00	99 persen	3.375,00	99 persen	3.375,00	99 persen	4.105,00	99 persen	4.105,00	99 persen	16.920,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan		80%	1.099,98	80%	2.524,98	80%	2.524,98	80%	2.750,00	80%	2.750,00	80%	11.649,95	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengeluaran Profil kependudukan		100%	160,00	100%	130,00	100%	130,00	100%	160,00	100%	160,00	100%	740,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	60 %	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	17.700,00	100%	88.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Jumlah Desa Mandiri	83 Desa	127	300	134	400	141	500	148	700	155	1000	163	2.900	
	Jumlah Desa Berkembang	875 Desa	849	250	807	350	767	450	731	650	694	900	659	2.600	
	Jumlah Desa Tertinggal	154 Desa	87	350	84	500	80	700	76	700	72	700	68	2.950	
	Jumlah BUMDesa/BU MDesa Berkembang	80	100	150	115	300	120	500	130	700	130	1000	130	2.650	
Jumlah BUMDesa/BU MDesa Maju	0	0	150	4	300	6	500	10	700	12	1000	12	2.650		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	90%	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	9.550,00	90%	47.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	90 %	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	3.950,00	90%	19.750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan pelaksanaanke rjasama desa	40 %	50%	150,00	60%	150,00	70%	150,00	80%	150,00	80%	150,00	80%	750,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51,11 %	60,32%	3.725,00	60,35%	3.725,00	60,39%	3.725,00	60,45%	3.725,00	60,50%	3.725,00	60,50%	18.625,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	60,3 %	65,44%	2.050,00	65,48%	2.050,00	65,50%	2.050,00	65,52%	2.050,00	65,57%	2.050,00	65,57%	10.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,72 %	1,72 %	1.150,00	1,7 %	5.250,00	1,68 %	5.250,00	1,65 %	5.250,00	1,62 %	5.250,00	1,62%	22.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
PERHUBUNGAN																
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Pelayaran	NA	15%	12.150,00	25%	13.550,00	50%	14.100,00	75%	15.000,00	100%	16.000,0	100%	70.800,0	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Perkeretaapian	NA	60%	3.500,00	70%	4.650,00	80%	4.650,00	90%	4.950,00	100%	4.950,00	100%	22.700,0	Dinas Perhubungan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)	NA	0,55	38.150,00	0,55	42.650,00	0,55	45.700,00	0,55	45.000,00	0,55	47.150,0	0,55	218.650,00	Dinas Perhubungan	
KOMUNIKASI DAN INFORMASI																
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah	60%	70%	29.866,06	75%	12.807,05	80%	9.758,03	85%	10.671,86	90%	11.812,75	90%	74.915,75	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik	50%	55%	5.000,00	60%	5.500,00	65%	6.000,00	70%	6.500,00	80%	7.000,00	80%	30.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah	75%	80%	9.700,00	85%	10.000,00	90%	10.300,00	95%	10.600,00	97%	10.900,00	97%	51.500,00	
KOPERASI DAN UKM															
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383,55	25 KSP/USP	441,08	27 KSP/USP	507,24	29 KSP/USP	583,33	30 KSP/USP	6.999,90	151	8.915,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1,69% (119 Koperasi Aktif)	2,69%	1.356,00	3,69%	1.559,40	4,69%	1.793,31	5,69%	2.062,31	6,69%	2.309,78	23,45%	9.080,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	17,6% (72.126 UMKM)	19,6%	41.210,36	21,6%	41.391,91	23,6%	41.600,70	25,6%	41.840,80	27,6%	46.861,70	118,00%	212.905,47	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	4%	5%	2.500,00	5%	2.875,00	5%	3.306,25	5%	3.802,19	5%	4.258,45	25,00%	16.741,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi berkinerja baik	30% (6 Koperasi)	40%	479,32	45%	575,17	50%	675,61	50%	828,24	50%	927,63	50%	3.485,98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	6.82%	7%	575,00	7,5%	661,25	8%	780,44	8,5%	897,50	9%	1.005,20	9%	3.919,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat dan cukup sehat	40% (8 KSP/USP)	43%	277,72	45%	319,38	47%	367,29	50%	422,38	50%	473,07	50%	1.859,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	nilai indeks kepuasan masyarakat	89 (A)	90 (A)	970,00	90 (A)	1.100,00	91 (A)	1.140,00	91 (A)	1.180,00	92 (A)	1.230,00	92 (A)	5.620,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	500,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp. 3,9 Triliun	10%	400,00	10%	420,00	10%	440,00	10%	460,00	10%	480,00	50%	2.200,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1802 pelapor LKPM	3%	300,00	4%	1.220,00	5%	1.388,00	6%	1.465,00	7%	1.542,00	25%	5.915,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	Rp. 6,4 Triliun	10%	206,03	10%	500,00	10%	700,00	10%	900,00	10%	1.100,00	50%	3.406,03	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	peringkat POPNAS	peringkat 10	Peringkat t 9 (2022 tidak ada event)	Rp46.993	Peringkat t 8	Rp44.191	Peringkat t 8	Rp49.623	Peringkat t 7	Rp55.990	Peringkat 7	Rp64.389	Peringkat 7 (tahun 2026 tidak ada event)	Rp261.186	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	peringkat PEPARPENAS	peringkat 13	Peringkat t 12 (2022 tidak ada event)		Peringkat t 11		Peringkat t 11		Peringkat t 10		Peringkat 10		Peringkat 10 (tahun 2026 tidak ada event)		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pertumbuhan kewirausahaan pemuda	0.024% (56 kelompok dari total 231.323 kelompok)	0.033 % (76 kelompok)	Rp7.689	0.041 % (96 kelompok)	Rp8.252	0.052 % (121 kelompok)	Rp9.435	0.063% (146 kelompok)	Rp10.380	0.074 % (171 kelompok)	Rp11.937	0.074 % (171 kelompok)	Rp47.692	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	persentase peningkatan peran serta kepemudaan	0.087 % (811 orang /925.295 orang pemuda)	0.13% (1181 orang)		0.15 % (1368 orang)		0.17 % (1570 orang)		0.19 % (1772 orang)		0.21 % (1974 orang)		0.21 % (1974 orang)		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	100%	100%	3.797,64	100%	4.302,29	100%	4.879,38	100%	5.539,63	100%	6.370,57	100%	Rp24.890	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
STATISTIK															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi	30%	50%	1.000.	60%	1.200	70%	1.400	80%	1.600	90%	1.800	90%	7.000	Dinas Kominfo
PERSANDIAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks kematangan keamanan informasi	0,7 (Level 1)	1,0 (Level 1)	2.600,00	1,7 (level 2)	2.100,00	2,4 (level 2)	1.500,00	3 (level 3)	1.500,00	3,4 (level 3)	1.650,00	3,4 (level 3)	9.350,00	Dinas Kominfo
KEBUDAYAAN															
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya teregistrasi	53 buah	100 buah	1.400,00	110 buah	1.600,00	115 buah	1.800,00	120 buah	2.000,00	125 buah	2.100,00	125 buah	8.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	7%	13%	400,00	15%	500,00	18%	550,00	21%	600,00	23%	600,00	90%	2.650,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	14%	16%	3.920,00	18%	3.945,00	20%	3.975,00	22%	3.995,00	24%	4.010,00	100%	19.845,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan	20 karya	27 karya	7.930,00	30 karya	8.646,00	32 karya	9.465,00	34 karya	10.250,00	34 karya	11.025,00	34	47.316,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah apresiasi di Taman Budaya Jambi	50.000 apresiasi	51.000 apresiasi		52.000 apresiasi		53.000 apresiasi		54.000 apresiasi		55.000 apresiasi		265.000		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan	0 kali	2 kali	1.820,00	3 kali	1.945,00	4 kali	2.010,00	5 kali	2.150,00	6 kali	2.235,00	20	10.160,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah peningkatan pelaku seni	300 orang	310 orang		315 orang		320 orang		325 orang		330 orang		1600		
PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	52,78	63,3	2.000,00	67,3	2.200,00	71,3	2.400,00	75,3	2.600,00	79,3	2.800,00	79,3	12.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	20,89	21,5		22,5		23,5		24,5		25,5				
KEARSIPAN															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Predikat Pengawasan Kearsipan	B (Baik)	B (Baik)	831,00	B (Baik)	831,00	B (Baik)	851,00	BB (Sangat Baik)	851,00	BB (Sangat Baik)	870,00	BB (Sangat Baik)	4.234.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN															
KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	-	2 Izin	2.564,50	2 Izin	3.120,00	2 Izin	3.590,00	2 Izin	5.100,00	2 Izin	5.315,00	10 izin	19.689,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan	-	10.687,4 9 Ha		16.400,5 3 Ha		27.613,8 9 Ha		33.447,0 8 Ha		39.143,4 4 Ha		39.143,4 4 Ha		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	53.833,0 ton	54.480,9 ton	13.417,92	54.807,8 ton	9.321,74	55.136,7 ton	7.836,81	55.467,5 ton	8.393,82	55.800,3 ton	14.070,00		53.040,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	52.067,0 ton	57.168,0 ton	7.258,00	58.997,0 ton	7.808,50	60.885,0 ton	8.535,00	62.833,0 ton	9.211,00	64.843,6 ton	9.843,00		42.655,50	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	45%	60%	2.437,00	65%	1.263,00	70%	1.327,00	75%	1.407,80	77%	1.562,40	77%	7.997,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	NA	50%		50%		50%		50%						

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	39,40 kg/kapita /tahun	40,60 kg/kapita /tahun	5.759,10	41,00 kg/kapita /tahun	4.649,80	41,50 kg/kapita /tahun	5.061,50	42,00 kg/kapita /tahun	5.477,8	42,50 kg/kapita /tahun	5.592,05	42,50 kg/kapita /tahun	21.117,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
PERTANIAN															
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	27%	30%	2.455,19	31%	2.577,95	32%	2.706,85	33%	2.842,19	34%	2.984,38		13.566,58	Dinas Perkebunan
	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota	16,74 %	10 %	400,00	10 %	450,00	10 %	500,00	10 %	550,00	10 %	600,00	10 %	2.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi	5 %	7 %	1.000,00	8 %	1.500,00	9 %	1.700,00	10 %	2.000,00	12 %	2.300,00	12 %	8.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota	7 %	11%	10.000,00	13%	12.500,00	15%	14,00	17%	15.000,00	19%	16.000,00	19%	53.514,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	8%	8,5%	2.452,14	9%	2.574,14	9,5%	2.703,48	10%	2.838,66	10,5%	2.980,59	10,5%	13.549,00	Dinas Perkebunan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota	11 %	15 %	23.400,00	17 %	28.850,00	19 %	31.350,00	21 %	34.700,00	23 %	37.600,00	23 %	155.900,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Yang Sesuai Peruntukkan Kab/Kota	14%	14,5%	16.766,49	15%	17.604,82	15,5%	18.485,06	16%	19.409,31	16,5%	20.379,77	16,5%	92.645,45	Dinas Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparaturnya pertanian yang diberdayakan /ditingkatkan keterampilan nya	0,75 %	1,7 %	950,00	2,2 %	1.060,00	2,7 %	1.120,00	3 %	1.180,00	3,2 %	1.290,00	3,2 %	5.600,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase kelembagaan pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	0,63 %	1 %	1.705,00	1,5 %	2.080,00	2 %	2.560,00	2,5 %	3.040,00	3 %	3.500,00	3 %	12.885,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian berkualitas di Kab/Kota	4,5%	5%	4.159,86	5,5%	7.103,36	6%	5.291,15	6,5%	4.098,83	7%	4.351,28	7%	25.004,48	Dinas Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan yang diselesaikan	100%	100%	350,00	100%	262,50	100%	275,63	100%	289,41	100%	303,88	100%	1.481,41	Dinas Perkebunan
	Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota	10 %	10 %	250,00	10 %	300,00	10 %	350,00	10 %	400,00	10 %	400,00	10 %	1.700,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PARIWISATA															
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	15%	17%	4.740,00	18%	5.335,00	20%	6.725,00	22%	7.385,00	23%	8.490,00	100%	32.675,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	0	16%	847,00	18%	1.300,00	19%	1.600,00	22%	1.902,00	25%	2.330,00	100%	7.979,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	9%	16%	900,00	18%	1.200,00	19%	1.400,00	22%	1.600,00	25%	1.800,00	100%	6.900,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	14%	15%	13.900,00	17%	15.010,00	18%	18.045,00	19%	21.400,00	20%	24.500,00	89%	92.855,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KEHUTANAN															
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnyaE	80% (81.449 Ha)	0,2%	1.426,534	0,2%	3.185,000	0,2%	3.508,500	0,12%	3.455,850	0,12%	3.807,435	81%	17.336,785	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	8% (15.783,55 Ha dari total luas izin 204.296,97 Ha)	15% (penambahan 14.287 Ha menjadi 30.070,55)	4.619,092	20%	4.880,956	26%	4.043,336	38%	4.267,063	44%	4.384,941	44%	7.805,671	Dinas Kehutanan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	4,5% (dari 133 kelembagaan)	8,2%	206,268	12%	226,894	15,78%	249,584	19,54%	249,584	23,30%	274,542	23,30%	1.206,875	Dinas Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	0,20%	28.489,293	0,20%	30.982,152	0,20%	26.369,413	0,20%	26.369,413	0,20%	24.048,962	0,20%	138.490,139	Dinas Kehutanan
	Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,3% (dari total 181.888 Ha)	1,46%		1,58%		1,71%		1,85%		1,99%				
	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	4,37%	0,83%		0,83%		0,83%		0,83%		0,83%				
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL															
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi	29,30%	20%	800,00	30%	850,00	40%	1.800,00	50%	1.250,00	50%	1.250,00	50%	5.950,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase keterjagaan Kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	0,00%	20%	900,00	20%	600,00	20%	600,00	20%	600,00	20%	600,00	20%	3.300,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi	0 Persen	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	2.500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan	14.648 SBM	178	9.909,785	634	13.789,386	1.289	14.572,948	1.564	15.978,073	2.012	17.283,198	5.852	75.733,391	
PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	99,92%	99,93%	5.798,5	99,94%	6.060,00	99,95%	6.550,00	99,96%	7.050,00	100%	7.050,00	100%	25.458,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan teknis	26,00%	27,00%	2.510,094	28,00%	2.560,094	29,00%	2.590,094	30,00%	2.610,094	31%	2.630,094	31%	10.270,38	
PERDAGANGAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	(96366743 5,9 USD)	6%	1.070,00	6%	1.784,00	6%	1.540,80	6%	1.848,08	6%	1.848,08	30%	8.090,96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	40 %	45%	649,68	50%	1.271,45	55%	1.398,59	60%	1.546,24	65%	1.694,15	65%	6.560,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)	340.000.000	3%	80,00	8%	100,00	10%	120,00	10%	140,00	10,00%	160,00	41,00%	600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100%	100%	875,30	100%	900,00	100%	998,20	100%	1.045,04	100%	1.045,04	100%	4.863,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Tertib Usaha	NA	60%		60%		60%		62%		62%		62%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	90%	1.288,50	91%	1.301,10	92%	1.325,22	92%	1.341,14	94%	1.341,14	94%	6.597,10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	NA	5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		5.9%		
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	76 (B)	77 (B Indeks)	2.466,96	78 (B Indeks)	2.578,12	79 (B Indeks)	3.125,87	80 (B Indeks)	3.371,31	81 (B Indeks)	3.562,32	81 (B Indeks)	15.104,58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku	60 %	60%		62%		66%		67%		70%		70%		
	Persentase Penganganan Pengaduan Konsumen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	28,66%	40%		41.8%		43.25%		46.6%		51.1%		51.1%		
PERINDUSTRIAN															
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	0	5%	650,00	10%	725,00	15%	800,00	20%	875,00	25%	875,00	25%	3.925,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan	20 %	20%	250,00	20%	270,00	20%	280,00	20%	300,00	20%	325,00	20%	1.425,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	NA	1%		1%		1%		1%		1%		1%		
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,35%	0,39%		0,41%		0,43%		0,45%		0,48%		0,48%		
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	7,65%	7,86%		7,97%		8,08%		8,19%		8,30%		8,30%		
	nilai ekspor non migas (US\$ Milyar)	0,934	0,966		0,983		1,0		1,017		1,034		1,034		
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	329.124	250.977	6.506,18	257.866	6.816,79	264.755	7.286,47	271.644	7.960,12	278.533	8.613,13	278.533	37.182,70	
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	NA	0,527 Triliun		0,627 Triliun		0,727 Triliun		0,827 Triliun		0,927 Triliun		0,927 Triliun		
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	80%		81%		82%		83%		84%		84%		

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TRANSMIGRASI															
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	NA	24%	73,668	24,89%	450,00	25,8%	600,00	27,61%	1.000,00	45,08%	400	45,08%	2.523,668	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi yang clear dan clean	NA	1 lokasi		24,89%		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	32,14	33,82	415,299	35,18	750,00	35,64	800,00	36,09	800,00	36,33	850,00	36,33	3.615,299	
	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	40,27	40,89		41,47		41,8		42,22		43,11		43,11		
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan pemukiman Transmigrasi yang berkualitas		1 lokasi	139,997	1 lokasi	650,00	1 lokasi	750,00	1 lokasi	850,00	1 lokasi	850,00	1 lokasi	3.239,997	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA		98 persen	1.580,00	98 persen	1.715,00	98 persen	1.845,00	98 persen	1.980,00	98 persen	2.075,00	98 persen	9.195,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan		95 persen	3.300,00	95 persen	3.300,00	95 persen	3.300,00	96 persen	3.300,00	96 persen	3.300,00	96 persen	16.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia		96 persen	1.265,00	96 persen	1.454,75	96 persen	1.672,96	96 persen	1.923,91	96 persen	2.212,49	96 persen	8.529,11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	15.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Konsistensi program RKPd dalam APBD	100%	100%	3.992,64	100%	4.141,99	100%	4.514,56	100%	4.872,65	100%	6.609,17	100%	24.131,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah	74,38 Persen	79,50 persen	7.488,48	84,62 persen	9.056,14	89,74 persen	10.837,33	94,86 persen	12.490,40	100 persen	14.316,44	100 persen	54.188,79	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	WTP	WTP nilai	997.186,78	WTP nilai	1.066.346,89	WTP nilai	1.143.549,71	WTP nilai	1.227.936,09	WTP nilai	1.350.729,70	WTP nilai	5.785.749,18	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5 % (Rp1.535.185.805.549,67)	5,25 persen	18.051,16	5,7 persen	19.205,98	6,1 persen	20.635,46	6,4 persen	22.135,40	6,7 persen	24.348,93	6,7 persen	104.376,93	BPKPD
INSPEKTORAT DAERAH															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	70 persen	72%	9.045,35	74%	9.181,03	76%	9.226,93	78%	9.319,20	80%	9.371,50	100 persen	46.144,00	Inspektorat Daerah Provinsi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	33 persen	38%	3.396,92	43%	3.512,92	48%	3.530,48	53%	3.565,81	60%	3.601,47	60%	17.607,59	Inspektorat Daerah Provinsi
KEPEGAWAIAN															
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	215 indeks	250 Indeks	6.780,95	275 Indeks	7.523,66	300 Indeks	8.286,05	325 Indeks	8.940,38	350 Indeks	9.604,89	350 Indeks	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah
	Indeks Profesionalitas ASN	45 indeks	70 Indeks	6.780,95	75 Indeks	7.523,66	80 Indeks	8.286,05	85 Indeks	8.940,38	90 Indeks	9.604,89	90 Indeks	41.135,93	Badan Kepegawaian Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta setifikasi/ uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi	72%	72%	17.173,74	75%	17.800,00	78%	18.750,00	81%	21.700,00	84%	21.700,00	84%	97.123,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur	90%	93%	17.173,74	95%	17.800,00	97%	18.750,00	99%	21.170,00	99%	21.700,00	99%	96.593,74	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	1.273,50	90%	1.421,00	90%	2.065,00	90%	2.395,00	95%	2.450,00	95%	9.604,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	75%	85%	650,00	90%	840,00	92%	1.130,00	93%	1.185,00	95%	1.300,00	95%	5.105,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	76%	76%	1.055,00	79%	1.200,00	80%	1.445,00	81%	1.620,00	83%	1.725,00	83%	7.045,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	78%	78%	1.840,00	80%	1.977,50	83%	2.422,50	85%	2.680,00	86%	3.275,00	86%	12.195,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan											PD Penanggung jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77 %	77%	2.970,00	79%	3.200,00	81%	4.450,00	83%	4.500,00	85%	4.540,00	85%	19.660,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	50 persen	60 persen	6.302,3	65 persen	7.548,75	70 persen	7.569,6	75 persen	7.580,07	80 persen	8.590,07	80 persen	37.590,80	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
SEKRETARIAT DAERAH															
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyelesaian produk hukum daerah	100 persen	100 persen	1.910,00	100 persen	2.025,00	100 persen	2.150,00	100 persen	2.280,00	100 persen	2.429,00	100 persen	10.794,00	Sekretariat Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 persen	1.656,47	100 persen	1.822,11	100 persen	2.004,32	100 persen	2.204,76	100 persen	2.204,76	100 persen	9.892,42	Sekretariat Daerah
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	50 %	50 persen	4.081,89	100 persen	4.898,03	100 persen	5.877,63	100 persen	6.759,28	100 persen	7.773,17	100 persen	29.390,00	Sekretariat Daerah
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	100 persen	64.727,86	100 persen	68.030,49	100 persen	71.663,38	100 persen	75.659,55	100 persen	80.055,35	100 persen	360.136,62	Sekretariat Daerah

Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												PD Penanggung jawab
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) >2,900	Skor 2.849 + sertifikat dengan skor Tinggi	>2,600 nilai	2.086,77	>2,700 nilai	2.295,45	>2,800 nilai	2.524,99	>2,850 nilai	2.777,49	>2,900 nilai	3.055,24	>2,900 nilai	12.739,93	Sekretariat Daerah
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor PMPRB Provinsi Jambi	61,7	63,5 skor	2.134,00	64 skor	2.249,00	64,5 skor	2.480,00	65 skor	2.760,00	65,5 skor	2.720,00	65,5 skor	12.343,00	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	NA	100 Persen	1.735,95	100 persen	2.169,93	100 Persen	2.712,42	100 Persen	3.390,53	100 Persen	4.238,16	100 Persen	14.246,99	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD															
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	92.341,42	100 persen	99.377,38	100 persen	106.899,63	100 persen	107.726,10	100 persen	115.253,95	100 persen	521.598,48	Sekretariat DPRD
PENGLOLAAN PENGHUBUNG															
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase pelayanan penghubung yang optimal	100 persen	100 persen	2.030,66	100 persen	2.207,59	100 persen	2.428,35	100 persen	2.671,18	100 persen	2.938,30	100 persen	12.276,07	Badan Penghubung Daerah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/ kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Guna mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 8-1 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi

No	Indikator Makro Pembangunan	Kondisi Awal (2020)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	72,14	72,62	73,07	73,56	74,04
2	Tingkat kemiskinan Kemiskinan (Sept) (%)	7,97	7,90	7,84	7,60	7,45	7,2
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%)	5,13	5,00	4,61	4,56	4,39	4,2
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,46	4,70	4,90	5,15	5,30	5,40
5	Pendapatan Perkapita ADHK 2010 (Rp.juta)	41,84	42,30	43,24	44,29	45,47	46,77
6	Indeks Gini (Sept)	0,316	0,315	0,314	0,314	0,313	0,312

Tabel 8-2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB
2	Pertumbuhan PDRB Hijau (%)	NA	4,55	4,75	5,00	5,20	5,30
3	Rasio Konektivitas	53,5	53,9	54,0	54,1	54,2	54,4
4	Akses terhadap air minum layak (%)	78,06	79,08	83,92	85,00	87,00	90,00
5	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	78,06	99,36	100,00	100,00	100,00	100,0
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	72,07	72,43	72,80	73,17	73,53
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan (Juta Ton CO2 eq)	31,683	3,283	3,348	3,412	3,476	3,541
8	Tingkat Kemiskinan (Sept) (%)	7,97	7,90	7,84	7,60	7,45	7,2
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%)	5,13	5,00	4,61	4,56	4,39	4,2
10	Indeks Ketahanan Pangan	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
11	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	72,14	72,62	73,07	73,56	74,04
12	Indeks Pemberdayaan Gender	65,86	67,78	69,02	70,05	71,50	73,00

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Tabel 8.2 berikut adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi.

Tabel 8-3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	-0,46	4,70	4,90	5,15	5,30	5,40	5,40
1.2	Laju Inflasi	%	3,01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3	PDRB Perkapita ADHK 2010	Rp. juta	41,84	42,30	43,24	44,29	45,47	46,77	46,77
1.4	Indeks Gini	-	0,316	0,315	0,314	0,314	0,313	0,312	0,312
1.5	Indeks Ketimpangan Williamson	-	0,38	0,37	0,37	0,365	0,365	0,36	0,36
1.6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	92,03	92,10	92,16	92,40	92,55	92,80	92,80
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	71,29	72,14	72,62	73,07	73,56	74,04	74,04
1.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,09	83,50	84,00	84,50	85,30	86,00	86,00
1.9	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	32,59	35,56	36,3	37,16	38,2	39,37	39,37
1.10	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,16	71,28	71,4	71,52	71,64	71,76	71,76
1.12	Angka kematian ibu (AKI)	Jumlah kematian	62	59	56	53	50	47	47
1.13	Angka kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian	353	343	333	323	313	303	303
1.14	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,03	16	14	12	10	8	8
1.15	Prevalensi wasting pada balita	%	10,2	7,8	7,5	7,3	7	6,8	6,8

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	371	366	362	358	354	350	350
1.17	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	%	9,1	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5
1.18	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	63,5	76%	82%	88%	92%	96%	96%
1.19	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	7	9	9	9	10	11	11
1.20	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.21	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabag yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100
1.22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,00	4,61	4,56	4,39	4,2	4,2
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
2.1	Nilai Tukar Petani	-	107,604*	108	109	110	111	112	112
2,2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	25,36*	25,4	25,45	25,5	25,55	25,60	25,60
2.3	Rasio ketergantungan		43,23	43,00	42,85	42,76	42,50	42,25	42,25
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Pelayanan Urusan Wajib									
1	Kesehatan								
1.1	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	38,35	40	43	46	48	50	50
1.5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0.11	0,25	0,32	0,40	0,50	0,60	0,60
1.6	Persentase cakupan universal health coverage Provinsi Jambi	%	74,79	80	83	86	89	92	92
2	Pendidikan								
2.1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	59,2	60,2	61,2	62,2	63,2	63,2
2.2	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	28,3	29,2	30,1	31	31,9	31,9
2.3	Persentase sekolah menengah negeri yang terakreditasi	%	98,87	99,63	100	100	100	100	100
2.4	Persentase satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	61,38	100	100	100	100	100	100
2.6	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-20 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	NA	100	100	100	100	100	100
2.7	Jumlah SMK Negeri yang terevitalisasi	sekolah	31	25	28	33	35	38	38
2.9	Jumlah SLB Negeri yang terevitalisasi	sekolah	0	3	3	3	2	2	2
3	Sosial								
3.1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	63,63	72,72	81,81	81,81	90,9	100	100
3.2	Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	orang	10	40	40	40	50	50	260
3.3	peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	orang	10	40	40	40	50	50	260
3.4	layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	45,45	72,72	81,81	90,9	100	100	100
3.5	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	badan	23	28	33	40	45	50	50
3.6	bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	KPM	0	110	220	220	220	250	1030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	102.103	102.103	102.103	102.103	102.103	102.103	102.103
3.8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	orang	44	44	44	44	44	44	264
3.9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	lembaga	3	5	5	5	5	5	5
3.10	Jumlah Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	jiwa	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	19.992
3.11	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	jiwa	650	550	550	600	600	650	3.600
3.12	jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	kelompok	15	10	10	11	11	13	70
3.13	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	20	20	20	20	20	20	20
3.14	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,74	1,8	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
3.15	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,22	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37
3.17	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0	15,6	15,6	15,6	20,38	20,38	20,38
4	Trantibum dan Perlindungan Masyarakat								
4.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,02	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	59,1	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase penanganan pra bencana	%	79	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
4.5	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
5	PU dan Penataan Ruang								
5.1	Persentase luas sawah beririgasi	%	76,89	78	79,5	81	82,5	84	84
5.2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	76,81	77,36	77,89	78,58	80,25	80,85	80,85
5.3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	78,06	79,08	83,92	85	87	90	90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak	%	77,82	78,45	81,44	85,27	95,0	100	100
6	<i>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</i>								
6.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,13	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	100	100	100	100	100	100
7	<i>Tenaga Kerja</i>								
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,79	69,18	69,49	69,85	70	71	71
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,13	5,11	4,61	4,56	4,39	4,2	4,2
7.3	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker	%	13,45	58,45	12,2	12,4	12,6	12,8	12,8
7.4	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	5	24,5	9,7	9,8	9,9	10	10
7.5	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	605	985	1200	1300	1400	1600	1600
7.6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	1872	5000	5000	5000	5000	5000	5000
7.7	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	%	48,6	62	65	67	71	75	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	87,72	87,88	88	88,5	88,7	90	90
8	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>								
8.1	Persentase ARG pada belanja APBD	%	70	75	75	75	75	75	75
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,86	67,78	69,02	70,05	71,50	73,00	73,00
8.3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
8.4	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	66,26	67	67,62	69,87	70	70	70
9	<i>Pangan</i>								
9.1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:								
	Skor PPH	-	92,3	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	95,5
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	64,21	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	76,71
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	%	85	85	85	85	85	85	85
9.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:								
	Persentase penduduk beresiko rawan pangan	%	9,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa Mandiri Pangan	Desa	21	31	41	51	61	71	71
	Persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	%	13,57	19,61	19,61	19,61	20,42	20,4	20,4
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	9,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	3,5
9.3	Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:								
	Pengembangan Distribusi Pangan	Kab/kota	11	11	11	11	11	11	11
9.4	Stabilitas Harga Pangan:								
	Pangan Pokok	CV %	CV<6%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%
	Pangan Strategis	CV %	CV<58%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%
10	Lingkungan Hidup								
10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	70,87	72,07	72,43	72,80	73,17	73,53	73,53
10.2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK)	Juta Ton CO2 eq	31,683	3,283	3,348	3,412	3,476	3,541	34,641
10.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan PUU LH yang diterbitkan	%	53	70	76	77	79	86	86
11	Administrasi Kependudukan dan Capil								
11.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	94	97	98	99	100	100	100
11.3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
11.4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
11.5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
11.6	Pemanfaatan data kependudukan	%	19	34,48	46,51	58,13	69,76	76,74	76,74
12	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>								
12.1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	90	90	90	90	90	90	90
12.2	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90	90	90	90	90	90	90
12.3	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	90	90	90	90	90	90	90
12.4	Jumlah desa mandiri	Desa	83	127	134	141	148	155	155

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.5	Jumlah desa berkembang	Desa	875	849	807	767	731	694	694
12.6	Jumlah desa tertinggal	Desa	154	87	84	80	76	72	72
12.7	Status Perkembangan KPPN	Indeks	10	30	40	50	50	50	50
12.8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) berkembang	Desa	80	100	115	120	130	130	130
12.9	Jumlah BUMDesa/BUMDesa Maju	Desa	0	0	4	6	10	12	12
13	<i>Pengendalian Penduduk dan KB</i>								
13.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	55,11	60,32	60,35	60,39	60,45	60,5	60,5
13.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun	47,8	35	30	25	25	21	21
13.3	Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)	Rata-rata anak per wanita	2,49	2,31	2,28	2,26	2,24	2,21	2,21
13.4	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	60,3	65,44	65,48	65,5	65,52	65,57	65,57
13.5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi (unmet need)	%	14	10	10	10	10	10	10
14	<i>Perhubungan</i>								
14.1	On time Performance Layanan transportasi	%	80,2	85	85,2	88,06	89,2	90,1	90,3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	nilai	57,14	75	77,62	79,1	80,2	81,6	83,2
14.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan *	Rasio	15,4	15,31	15,22	15,09	15,01	14,95	14,8
15	<i>Komunikasi dan Informasi</i>								
15.1	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah daerah	%	50	63	75	85	92	100	100
15.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC,ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	%	NA	53	70	81	86	93	93
15.3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	%	68	75	80	85	90	95	95
15.4	Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	70	75	80	85	90	95	95
15.5	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	%	35	65	70	75	80	90	90

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.6	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	10	40	50	55	60	70	70
15.7	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	%	35	55	60	65	70	75	75
15.8	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi	%	40	60	65	70	75	80	80
15.9	Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah	%	5	5	5	5	5	5	5
15.10	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	%	NA	60	72	76	85	94	94
15.11	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	%	70	72	76	80	84	92	92

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	<i>Koperasi dan UKM</i>								
16.1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	2	5,4	5,6	6	6,7	6,7	6,7
16.2	Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha	%	3,29	3,38					
17	<i>Penanaman Modal</i>								
17.1	Realisasi PMDN	Rp. Trilyun	3,5	4,24	4,7	5,1	5,64	6,2	6,2
17.2	Realisasi PMA	US \$. juta	400	480	528	580	638	702	702
18	<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>								
18.1	Prestasi olahraga	Medali emas	13	14	15	16	17	18	18
18.2	Peringkat POPNAS	Peringkat	10	9	8	8	7	7	7
18.3	Peringkat PEPARPENAS	Peringkat	13	12	11	11	10	10	10
18.4	Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
18.5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,024	0,033	0,041	0,052	0,063	0,074	0,074
18.6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,016	0,049	0,065	0,084	0,103	0,124	0,124
19	<i>Statistik</i>								
19.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	40	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	40	100	100	100	100	100	100
20	Persandian								
20.1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	1	3	5	7	9	11	11
20.2	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	-	2	4	4	4	4	4
21	Kebudayaan								
21.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	NA	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,34
21.2	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	7,8	17	18	19	20	21	21
21.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun keatas)	%	0,018	0,36	0,024	0,027	0,03	0,033	0,033

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.4	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,037	1,65	0,04	0,046	0,049	0,052	0,052
21.5	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	1,02	17	18	19	20	21	21
21.6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	0	2	3	4	5	6	6
21.7	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	unit	2	7	8	9	10	11	11
21.8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	unit	NA	15	16	17	18	19	19
21.9	Jumlah museum yang dikelola	unit	3	3	3	3	3	3	3
21.10	Jumlah cagarbudaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	NA	2	3	4	5	6	6
22	Perpustakaan								
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	52,78	63,3	67,3	71,3	75,3	79,3	79,3
22.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	20,89	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	25,5
23	Kearsipan								
23.1	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	orang	267	350	350	350	350	350	350

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	15	250	275	300	325	350	350
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan									
1 Kelautan dan Perikanan									
1.1	kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	Ha	0	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.477,08	39.143,44	39.143,44
1.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	52.067,00	57.168,00	58.997,00	60.885,00	62.833,00	64.843,60	64.843,60
1.3	Produksi perikanan tangkap	Ton	53.833,00	54.480,90	54.807,80	55.136,70	55.467,50	55.800,30	55.800,30
1.4	Konsumsi ikan	kg/kap/ thn	39,15	40,60	41,00	41,50	42,00	42,50	42,50
1.5	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	%	50	50	50	50	50	50	50
2 Pariwisata									
2.1	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. juta	284	350	450	550	650	750	2750
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,07	1,19	1,21	1,25	1,29	1,3	1,3
2.3	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	895.528	950.000	1.500.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	8.755.000
3 Pertanian									
3.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	(54 ku/ha)	1,8	2	3	4	4,2	(63,5 ku/ha)
3.2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	(88,15 ku/ha)	2	2,23	2,45	2,68	2,9	(90,32 ku/ha)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	4,22	9,22	4,82	5,04	5,28	5,49	5,49
3.4	Populai ternak:								
	- Populasi Sapi	Ekor	158.825	162.002	165.242	168.546	171.917	175.536	175.536
	- Populasi Kambing	Ekor	404.385	412.473	420.722	429.137	437.719	446.474	446.474
3.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	16,74	25,74	29,24	32,34	35,34	37,34	37,34
3.6	Produksi Padi	Ton GKG	386.413	416.223	435.708	463.472	497.937	533.504	533.504
3.7	Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	66.627	67.826	69.178	71.249	74.099	77.205	77.205
3.8	Produksi Daging:								
	- sapi	Ribu ton	5,54	5,76	5,88	5,99	6,11	6,24	6,24
	- kambing	Ribu ton	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,08
	- Ayam Buras	Ribu ton	5,59	6,61	7,21	7,86	8,56	9,34	9,34
	- Ayam Ras Petelur	Ribu ton	1,37	1,39	1,41	1,45	1,49	1,54	1,54
	- Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	44,61	61,65	72,64	85,71	101,14	119,35	119,35
	- Itik	Ribu ton	0,51	0,53	0,54	0,56	0,58	0,60	0,60
4	<i>Kehutanan</i>								
4.1	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	2.376,10	260	225	250	260	270	3.641,10
4.2	Pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	15.783,55	30.070,55	39.951,55	53.588,55	77.174,55	89.642,55	89.642,55
5	<i>ESDM</i>								
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,06	12,32	16,65	20,21	24	24,85	24,85
5.3	Persentase desa teraliri listrik (rasio desa berlistrik)	%	99	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
6	Perdagangan								
6.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-21,96	6	6	6	6	6	30
6.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	82,5	90	93	95	97	97	97
6.3	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	12,09	40	41,8	43,25	46,6	51,1	51,1
6.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	60	60	62	66	67	70	70
6.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	90	91	92	92	94	94
6.6	Tertib usaha	%	NA	60	60	60	62	62	62
7	Perindustrian								
7.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas	%	0,35	0,39	0,41	0,43	0,45	0,48	2,16
7.2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	7,65	7,86	7,97	8,08	8,19	8,30	8,30
7.3	Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas	USD Miliar	0,934	0,966	0,983	1,00	1,017	1,034	1,034
7.4	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan	orang	329.124	250.977	257.866	264.755	271.644	278.533	278.533

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Transmigrasi								
8.1	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	32,14	33,82	35,18	35,64	36,09	36,33	36,33
8.2	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	40,27	40,89	41,47	41,8	42,22	43,11	43,11
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan								
1.1	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Konsistensi program RKPD dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan								
2.2	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3	Persentase SilPA terhadap LRA	%	7,8	6	5,5	5	6,7	6,7	6,7
2.4	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	7,52	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
2.5	Persentase belanja pendidikan	%	25,78	20	20	20	20	20	20
2.6	Persentase belanja kesehatan	%	9,29	10	10	10	10	10	10
3	Kepegawaian dan Diklat								
3.1	Persentase tingkat pendidikan aparatur Pemprov yang berpendidikan S1-S2-S3	%	77,13	78	79	80	81	82	82
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	60	65	70	75	80	80
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	%	50	80	80	85	85	85	85
5	<i>Pengawasan</i>								
5.1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	%	35	60	65	70	75	80	80
5.2	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK	%	65	67	69	71	73	75	75

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun, dalam hal ini tahun 2021-2026. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun menuju Provinsi Jambi yang **Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.**

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 7 Juli 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1 Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- 2 Setiap Perangkat Daerah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Bagi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- 3 Untuk menjalankan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a) Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
 - b) Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang kabupaten serta penjaringan

aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.

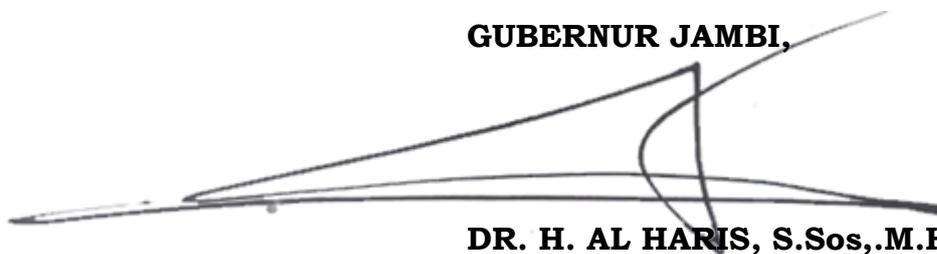
- c) Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari forum Perangkat Daerah.
- 4 Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jambi. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Daerah.
- 5 Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
- 6 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Jambi, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

9.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2027 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2022. Mengacu pada Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD bagi provinsi yang belum memiliki RPJMD adalah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. RKPD yang disusun tersebut selanjutnya menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the text 'GUBERNUR JAMBI,' and 'DR. H. AL HARIS, S.Sos.,M.H.'

DR. H. AL HARIS, S.Sos.,M.H.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
2021-2026

PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

Penyelarasan Target Indikator Makro

No	Indikator Pembangunan	RPJMN 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi				
		Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70	Pertumbuhan Ekonomi (%)			4,70	4,90	5,15
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,29	6,85	6,35	5,75	5,35	Angka Kemiskinan (%)			7,9	7,84	7,6
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,70	3,50	3,40	2,90	2,60	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			5	4,61	4,56
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			72,14	72,62	73,07
5	Rasio Gini						Indeks Gini			0,315	0,314	0,314
6	Penurunan Emisi GRK (%)						Penurunan Emisi GRK berbasis lahan (%)					

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi								
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS					ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi			100	100	100
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3		Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan			178	634	1.289
								PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada			81,04	86,01	90,16
			persentase luas baku daerah irigasi yg terairi			81,04	86,01		90,16					

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PANGAN														
PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor pph			92.5	93.2	95.2
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a))	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0		konsumsi beras (kg/kap/thn)			85.5	85	84.5
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0		konsumsi energi (kcal/kap/hr)			2140	2195	2195,5
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0		konsumsi protein (gr/kap/hr)			60,5	61	61,5
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rentan pangan			7.5	6.5	5.5
									persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah			19,61	19,61	19,61
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan			2 Izin	2 Izin	2 Izin
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80		Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan			10.687,49 Ha	16.400,53 Ha	27.613,89 Ha
								PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-			60%	65%	70%

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan			50%	50%	50%	
KOPERASI DAN UKM														
PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan			7%	7,50%	8%
		Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan			19,60%	21,60%	23,60%
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam			20 KSP/USP	25 KSP/USP	27 KSP/USP
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi			2,69%	3,69%	4,69%					
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun			5%	5%	5%					
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi berkinerja baik			40%	45%	50%					
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	persentase koperasi sehat dan cukup sehat			43%	45%	47%	

Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi							
			2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
										2020	2021	2022	2023	2024	
PERTANIAN															
PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			30%	31%	32%	
										Persentase Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota			10%	10%	10%
										PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi			7%	8%

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan yang diselesaikan			100%	100%	100%
									Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota			10%	10%	10%
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
		Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			54.480,9 ton	54.807,8 ton	55.136,7 ton
PERINDUSTRIAN														
		Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini			5%	10%	15%
								PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai Kewenangan yang dikendalikan			20%	20%	20%
								PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penambahan jumlah industri besar di Provinsi			1%	1%	1%
									Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan			0,39%	0,41%	0,43%
									Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas			7,86%	7,97%	8,08%
									nilai ekspor non migas (US\$ Milyar)			0,966	0,983	1
									Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)			250.977	257.866	264.755

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PERDAGANGAN														
PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas			6%	6%	6%
		Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri			45%	50%	55%
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)			3%	8%	10%
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya			100%	100%	100%					
			Persentase Tertib Usaha			60%	60%	60%						

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk			90%	91%	92%
									Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan			5.9%	5.9%	5.9%
								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu			77 (B Indeks)	78 (B Indeks)	79 (B Indeks)
									Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan			60%	62%	66%
									Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen			100%	100%	100%
									Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-			40%	41.8%	43.25%
PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4							
		Biaya logistik	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0							
		Peringkat Travel and	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.							
PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING						SOSIAL							
PP	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan			5%	7,50%	8,00%

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial			2,50%	2,75%	2,75%
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial			0,50%	0,70%	0,70%
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB														
		Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			60,32%	60,35%	60,39%
								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)			65,44%	65,48%	65,50%
								PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,72%	1,70%	1,68%
SOSIAL														
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan			5%	7,50%	8,00%

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PP	PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial			2,50%	2,75%	2,75%
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan	65,2				80	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial			0,50%	0,70%	0,70%
KESEHATAN														
PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah			76.586	77.086	77.586
		Angka kematian bayi	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0		Jumlah kematian Bayi			343	333	323
		Angka kematian	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0		Jumlah kematian ibu			59	56	53
		Angka prevalensi kontrasepsi	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4		Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC			96%	96%	96%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			100%	100%	100%

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)			100%	100%	100%
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0		Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV			45%	50%	55%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0		Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria			9	9	9
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi			100%	100%	100%
		Insidensi tuberkulosis (per 100.000)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0		Persentase rumah sakit yang terakreditasi			100%	100%	100%
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0		Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se			73%	81,80%	90,90%
		Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09		Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)			95%	95%	95%
		Persentase	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7		Prevalensi stunting			16	14	12
		Prevalensi	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8		Prevalensi wasting			7,8	7,5	7,3
		Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1		Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Rd.			84	84,5	85

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terpenuhi			98%	98%	98%
		Persentase	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	PENDIDIKAN						
PP	PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan			26,86%	27,86%	28,86%
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA/SMK			74,23%	76,17%	78,12%
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16		Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan			30,00%	35,00%	40,00%
		Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16		Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum			59,20%	60,20%	61,20%
									Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum			28,30%	29,20%	30,10%

Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi						
			2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
										2020	2021	2022	2023	2024
								Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha			35%	40%	45%	
								Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B			27%	29%	31%	
								Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha			1%	2%	3%	
								Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan			100%	100%	100%	
								PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru Bahasa Indonesia			5%	10%	15%	
								PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal			100%	100%	100%	
								PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional			100%	100%	100%	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024						RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
							KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda			0.033 % (76 kelompok)	0.041 % (96 kelompok)	0.052 % (121 kelompok)
									persentase peningkatan peran serta kepemudaan			0.13% (1181 orang)	0.15 % (1368 orang)	0.17 % (1570 orang)
								PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi			100%	100%	100%
							SOSIAL							
PP	PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal lahan)	27,9				40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penvelenggaraan			5%	7,50%	8,00%
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial			2,50%	2,75%	2,75%
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial			0,50%	0,70%	0,70%
		Luas kawasan	630000	1600000	1850000	1350000	1100000							
		Bidang tanah	750.000				7.750.000							
		Bidang tanah	6.286.087				56.286.087							

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
KETENAGAKERJAAN															
PP	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat kompetensi			5,10%	5,20%	5,30%	
		Jumlah PT yang													
		a. Top 200	0	0	0	0	1								
		b. Top 300	1	1	1	1	2								
		c. Top 500	2	2	2	2	3								
		Proporsi	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0								
PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
PP	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			76%	79%	80%	
KEBUDAYAAN															
PP	MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya teregistrasi			100 buah	110 buah	115 buah	
								PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi			13%	15%	18%	
								PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum			16%	18%	20%	
								PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan			27 karya	30 karya	32 karya	

Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN 2020 - 2024					RPJMD Provinsi						
			2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
										2020	2021	2022	2023	2024
								Jumlah apresian di Taman Budaya Jambi			51.000 apresian	52.000 apresian	53.000 apresian	
							PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan			2 kali	3 kali	4 kali	
						Jumlah peningkatan pelaku seni				310 orang	315 orang	320 orang		
							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
PP	MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			76%	79%	80%
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
PP	PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan perangkat daerah			60%	65%	70%
							PERPUSTAKAAN							
								PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			63,3	67,3	71,3
								Indeks pembangunan literasi masyarakat			21,5	22,5	23,5	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN							PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
PP	INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni			100%	100%	100%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai)	82,35	83,5	84,8	86	87		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni			100%	100%	100%
		Persentase	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PU DAN TATA RUANG						
		Persentase rumah tangga yang masih menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah			40	50	60
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan	5,95	4,46	2,98	1,49	0		persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak			78,45	81,44	85,27
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah	72.92% penangan	73.70% penangan	75.28% penangan	77.64% penangan	80% penangan		persentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang aman			31,03	32,46	34,54

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
										2020	2021	2022	2023	2024	
			3.70% pengurangan	5.51% pengurangan	9.13% pengurangan	14.57% pengurangan	20% pengurangan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh (ha)			185	172	160	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8%	93.8%	95.9%	97.9%	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sarana dan prasarana persampahan regional yg terbangun (unit)			-	-	1	
			(JP: 23.6%,	(JP: 25.4%	(JP: 27.1%	(JP: 28.9%,	(JP: 30.4%,								
			BJP: 68.2%)	BJP: 68.4%)	BJP: 68.7%)	BJP: 69.0%)	BJP: 69.5%)								
		Persentase	7,3	8,4	10	12,2	15								
		Volume	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205								
		Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada			81,04	86,01	90,16	
		Luas lahan pertanian padi dan non- padi	45229,16667	115942,7083	116142,7083	116342,7083	116342,7083		persentase luas baku daerah irigasi yg terairi			81,04	86,01	90,16	
TRANTIBUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
		Provinsi dengan penurunan risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Indeks Resiko Bencana			138,14	137,64	137,14	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
PU DAN TATA RUANG														
		Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada			81,04	86,01	90,16
									persentase luas baku daerah irigasi yg terairi			81,04	86,01	90,16
PERHUBUNGAN														
		Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas (V/C Ratio)			0,55	0,55	0,55
PP	INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Pelayaran			15%	25%	50%
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi Kinerja tepat						PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	persentase pelaksanaan pengelolaan Perkeretaapian			60%	70%	80%
		Panjang												
PP	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan												
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
PP	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga			99,94%	99,95%	100%
		Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408		Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang tertib administrasi dan			28,00%	29,00%	31%
		Penurunan	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07							
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PP	TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan			70%	75%	80%
		Persentase	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3							

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi							
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target					
										2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase	97,5	98	98,5	99	100								
		Proporsi	70	72	73	74	75,7								
PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN							LINGKUNGAN HIDUP							
	PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air			61,19	61,29	61,39	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50		Indeks Kualitas Udara			84,42	84,52	84,62	
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50		Indeks Kualitas Air Laut			77,19	77,84	78,49	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut			73,89	74,39	74,39	
								TRANTIBUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana			138,14	137,64	137,14	
		Persentase	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15								
		Kecepatan	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0								
								LINGKUNGAN HIDUP							
	PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			70%	76%	77%	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (nersen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kenakeragaman Hayati Provinsi Jambi			0%	0%	20%	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi			26%	27%	28%	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9		Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi			26%	27%	28%	

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)			100%	100%	100%
PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK							KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			77%	79%	81%
	PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67							
	PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73							
								NON URUSAN						
	PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP Perangkat Daerah			B	BB	BB
								INSPEKTORAT DAERAH						
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT			72%	74%	76%

Kode (PN/PP)	RPJMN 2020 - 2024							RPJMD Provinsi						
	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator						Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"			38%	43%	48%
								KEPEGAWAIAN						
								PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN			250 Indeks	275 Indeks	300 Indeks
									Indeks Profesionalitas ASN			70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks
								PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi			72%	75%	78%
									Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur			93%	95%	97%
								SEKRETARIAT DAERAH						
								PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase penyelesaian produk hukum daerah			100%	100%	100%
								PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Skor PMPRB Provinsi Jambi			63,5 skor	64 skor	64,5 skor
								TRANTIBUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas satlinmas (orang)			17.150	18.200	19.600
		Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			100%	100%	100%
		Proporsi orang yang merasa aman berjalan	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			100%	100%	100%
		Indeks	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4							

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
2021-2026

CASCADING KINERJA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

MISI I: MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TUJUAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DENGAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
Indikator Kinerja (IK) : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

- IK 1: Predikat AKIP
- IK 2: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

- IK 1: Predikat AKIP Perangkat Daerah
- IK 2: Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi
- IK 3: Predikat Pengawasan Kearsipan
- IK 4: Konsistensi program RPJMD dalam RKPD
- IK 5: Konsistensi program RKPD dalam APBD
- IK 6: Maturitas SPIP
- IK 7: Kapabilitas APIP
- IK 8: Persentase penyelesaian produk hukum daerah
- IK 9: Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan
- IK 10: Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan
- IK 11: Presentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan
- IK 12: Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah:

- IK 1: Persentase pengamanan barang milik daerah
- IK 2: Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- IK 3: Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP

SASARAN 2: Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima

- IK 1: Skor Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi
- IK 2: Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Level kematangan Perangkat Daerah

- IK 1: Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- IK 2: Persentase peningkatan pelaksanaankerjasama desa
- IK 3: Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes
- IK 4: Indeks kematangan keamanan informasi
- IK 5: Indeks Penerapan Sistem Merit ASN
- IK 6: Indeks Profesionalitas ASN
- IK 7: Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi ASN
- IK 8: Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

- IK 1: Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil
- IK 2: Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk
- IK 3: Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- IK 4: Persentase Pengeluaran Profil kependudukan
- IK 5: Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik
- IK 6: Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah
- IK 7: jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam
- IK 8: Persentase pelayanan penghubung yang optimal
- IK 9: Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya
- IK 10: Persentase Tertib Usaha

MISI II: MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH

TUJUAN: Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja (IK) 1 : Pertumbuhan PDRB Hijau
Indikator Kinerja (IK) 2 : Angka Kemiskinan

SASARAN 1: Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan

IK : Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Meningkatnya kapasitas SDM petani dan nelayan

IK 1 : Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparatur pertanian yang diberdayakan/ditingkatkan keterampilannya
IK 2 : Persentase kelembagaan pertanian yang meningkatkan kapasitasnya
IK 3 : Persentase Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian berkualitas di Kab/Kota

Meningkatnya Produktivitas komoditas unggulan non pertambangan

IK 1 : Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
IK 2 : Produksi Perikanan Tangkap
IK 3 : Produksi Perikanan Budidaya
IK 4 : Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota

Meningkatnya implementasi pengelolaan komoditas secara lestari

IK 1 : Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
IK 2 : Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K
IK 3 : Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan
IK 4 : Persentase Izin Pertanian yang diselesaikan

Meningkatnya pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman/ hewan

IK 1 : persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
IK 2 : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota
IK 3 : Persentase peningkatan kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi

Terpenuhinya sarana prasarana produksi

IK 1: Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota
IK 2: Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota

Meningkatnya sistem logistik dan akses pemasaran komoditas unggulan non pertambangan

IK 1 : Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
IK 2 : Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku
IK 3 : Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
IK 4 : Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
IK 5 : Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
IK 6 : Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)
IK 7 : Pertumbuhan nilai ekspor non migas persentase
IK 8 : *On time Performance* layanan transportasi barang

Sasaran 2 : Meningkatkan industri pengolahan

IK: Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Meningkatnya jumlah dan produksi industri pengolahan

IK 1 : Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi
IK 2 : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas
IK 3 : Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas
IK 4 : Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan
IK 5 : Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan
IK 6 : Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas
IK 7 : Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

Kemudahan Investasi:

IK 1 : IKM Perizinan
IK 2 : Presentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik
IK 3 : Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM
IK 4 : Persentase Peningkatan Rencana Investasi

Sasaran 3: Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata

IK : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

IK : Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya kapasitas SDM Sektor Pariwisata dan SDM pendukung lainnya

IK 1 : Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata

Meningkatnya daya tarik dan minat wisata

IK 1: Persentase peningkatan pemasaran pariwisata
IK 2 : Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan

Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif

IK : Nilai tambah ekonomi kreatif

Meningkatnya volume usaha pendukung ekonomi kreatif

IK 1 : Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
IK 2 : Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga ekonomi kreatif

IK 1 : Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun
IK 2 : persentase koperasi berkinerja baik
IK 3 : Persentase koperasi sehat dan cukup sehat
IK 4 : Persentase Peningkatan UMKM Binaan

Sasaran 4 - 6

MISI II: MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH

TUJUAN: Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indikator Kinerja (IK) 1 : Pertumbuhan PDRB Hijau
Indikator Kinerja (IK) 2 : Angka Kemiskinan

Sasaran 1 - 3

Sasaran 4 : Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar

IK 1: Rasio Konektivitas
IK 2: Akses terhadap air minum layak
IK 3: Rasio elektrifikasi
IK 4: Persentase luas sawah beririgasi
IK 5: Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet

SASARAN 5: Meningkatkan kualitas lingkungan

IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 6 : Menurunnya tingkat pengangguran

IK : Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran 7 : meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan

IK : Indeks Ketahanan Pangan

Meningkatnya layanan transportasi
IK 1 : Kinerja lalu lintas (V/C ratio)

Meningkatnya kualitas jalan
IK 1 : Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap
IK 2 : Persentase drainase jalan provinsi dalam kondisi baik

Meningkatnya Akses terhadap air minum layak
IK 1 : Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak
IK 2 : Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Meningkatnya rasio elektrifikasi
IK 1 : persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan
IK 2 : Persentase Desa berlistrik

Meningkatnya kualitas layanan irigasi
IK 1 : Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan
IK 2 : Persentase luas baku daerah irigasi yg terairi

Meningkatnya akses terhadap internet
IK 1 : Persentase peningkatan jaringan internet
IK 2 : Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah

Terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial
IK 1 : persentase tersedianya hunian layak huni bagi masyarakat
IK 2 : Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah pada Tahun Berkenaan
IK 3 : Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat
IK 4 : Persentase Pemukiman dan Kawasan Serta Masyarakat Transmigrasi Yang Sejahtera
IK 5 : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM
IK 6 : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial
IK 7 : Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan resiko bencana
IK 1 : Indeks Resiko Bencana
IK 2 : Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
IK 3 : Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif
IK 4 : Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)
IK 5 : Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal
IK 6 : Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk
IK 7 : Luas kawasan permukiman kumuh
IK 8 : persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang
IK 9 : persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi

Meningkatnya kualitas tanah, air, udara dan tutupan lahan
IK 1 : Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan/ Fosil (SBM)
IK 2 : persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
IK 3 : ersentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak dan aman
IK 4 : Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi
IK 5 : Persentase Ruang Terbuka Hijau
IK 6 : Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi
IK 7 : Persentase Peningkatan Luasan Pemulihan Dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya
IK 8 : Indeks Kualitas Air
IK 9 : Indeks Kualitas udara
IK 10 : Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi

Meningkatnya kualitas Angkatan Kerja
IK 1 : persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi
IK 2 : Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat

Meluasnya kesempatan kerja
IK 1 : Persentase jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan
IK 2 : Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan

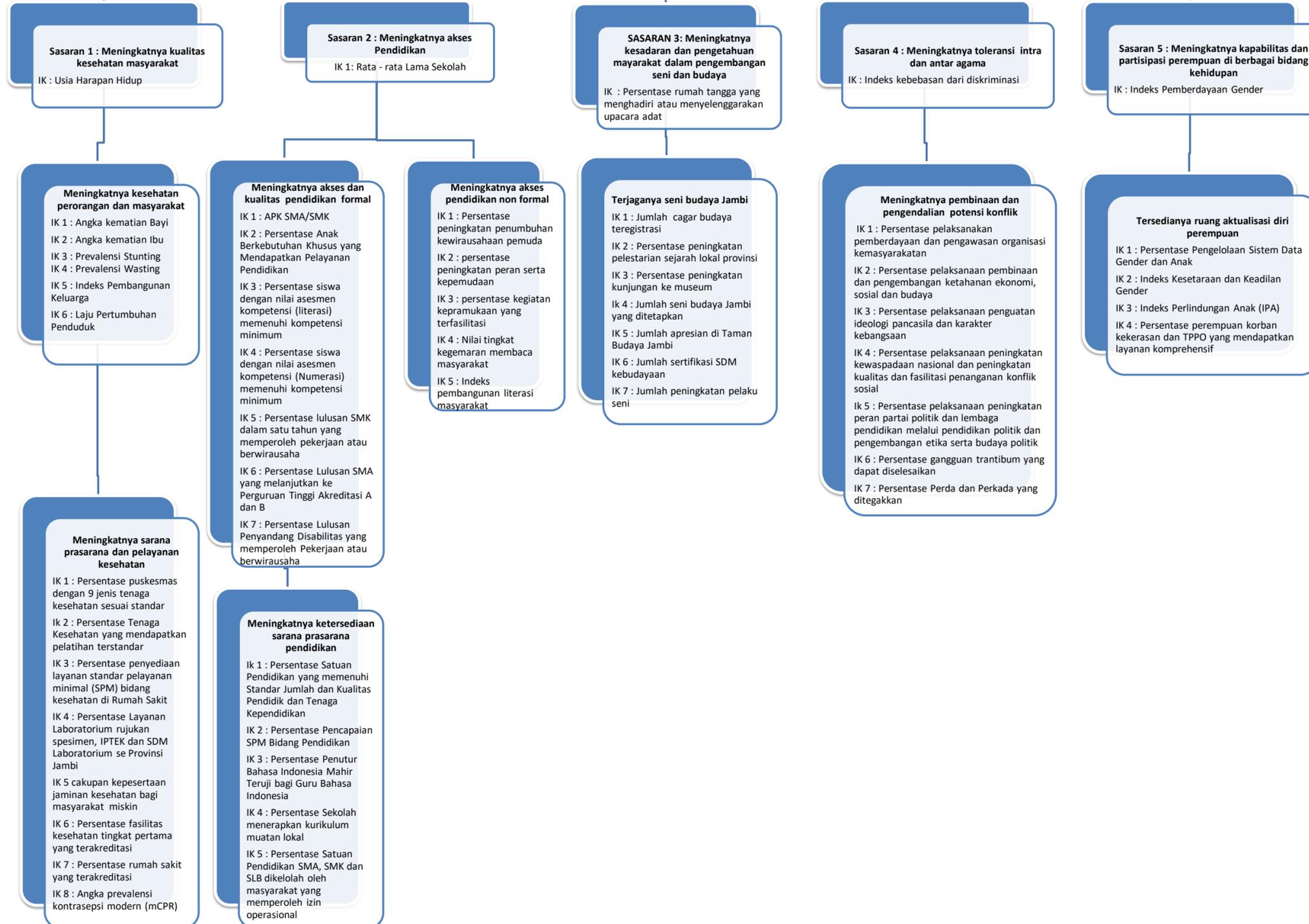
Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan
IK 1 : Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan
IK 2 : Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura
IK 3 : Produksi daging
IK 4 : Peningkatan desa mandiri pangan
IK 5 : persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah
IK 6 : persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Meningkatnya akses terhadap pangan
IK 1 : Skor PPH
IK 2 : persentase daerah rentan rawan pangan
IK 3 : Angka Konsumsi Ikan

MISI III: MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja (IK) 1 : Indeks Pembangunan Manusia



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
2021-2026

POHON KINERJA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

**TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH,
TRANSPARAN,DAN AKUNTABEL DENGAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS**

Indikator Kinerja (IK) : Indeks Reformasi Birokrasi

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

IK 1: Predikat AKIP

IK 2: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima

IK 1 : Skor Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi

IK 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

IK 1: Predikat AKIP Perangkat Daerah

IK 2: Persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Jambi

IK 3: Predikat Pengawasan Kearsipan

IK 4: Konsistensi program RPJMD dalam RKPd

IK 5 : Konsistensi program RKPd dalam APBD

IK 6 : Maturitas SPIP

IK 7 : Kapabilitas APIP

IK 8 : Persentase penyelesaian produk hukum daerah

IK 9 : Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan

IK 10 : Persentase rumusan kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan

IK 11 : Presentase Laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan

IK 12 : Persentase penyelesaian tugas dan fungsi DPRD

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah:

IK 1: Persentase pengamanan barang milik daerah

IK 2 : Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah

IK 3 : Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP

Meningkatnya Level kematangan Perangkat Daerah

IK 1 : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

IK 2 : Persentase peningkatan pelaksanaankerjasama desa

IK 3 : Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes

IK 4 : Indeks kematangan keamanan informasi

IK 5 : Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

IK 6: Indeks Profesionalitas ASN

IK 7 : Persentase kelulusan peserta setifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi ASN

IK 8 : Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM aparatur

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

IK 1 : Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil

IK 2 : Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk

IK 3 : Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan

IK 4 : Persentase Pengeluaran Profil kependudukan

IK 5 : Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumberdaya dan kemitraan komunikasi publik

IK 6 : Persentase akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah

IK 7 : jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam

IK 8 : Persentase pelayanan penghubung yang optimal

IK 9 : Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya

IK 10 : Persentase Tertib Usaha

Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja (IK) 1 : Pertumbuhan PDRB Hijau
Indikator Kinerja (IK) 2 : Angka Kemiskinan

Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan
IK : Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Meningkatnya industri pengolahan
IK: Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata
IK : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

dilanjutkan pada halaman berikutnya

Meningkatnya kapasitas SDM petani dan nelayan
IK 1 : Persentase penyuluh, pelaku utama dan aparaturnya pertanian yang diberdayakan/ditingkatkan keterampilannya
IK 2 : Persentase kelembagaan pertanian yang meningkatkan kapasitasnya
IK 3 : Persentase Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian berkualitas di Kab/Kota

Meningkatnya Produktivitas komoditas unggulan non pertambangan
IK 1 : Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
IK 2 : Produksi Perikanan Tangkap
IK 3 : Produksi Perikanan Budidaya
IK 4 : Persentase Kegiatan Usaha Tani yang Berdaya saing di Kab/Kota

Meningkatnya sistem logistik dan akses pemasaran komoditas unggulan non pertambangan
IK 1 : Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
IK 2 : Persentase komoditi potensial yang diuji sesuai dengan ketentuan berlaku
IK 3 : Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
IK 4 : Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
IK 5 : Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
IK 6 : Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi (rupiah)
IK 7 : Pertumbuhan nilai ekspor non migas persentase
IK 8 : *On time Performance* layanan transportasi barang

Meningkatnya jumlah dan produksi industri pengolahan
IK 1 : Persentase pertumbuhan jumlah industri besar di Provinsi
IK 2 : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas
IK 3 : Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas
IK 4 : Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan
IK 5 : Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan
IK 6 : Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas
IK 7 : Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
IK : Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya daya tarik dan minat wisata
IK 1 : Persentase peningkatan pemasaran pariwisata
IK 2 : Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan

Meningkatnya volume usaha pendukung ekonomi kreatif
IK 1 : Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
IK 2 : Persentase pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan

Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif
IK : Nilai tambah ekonomi kreatif

Meningkatnya implementasi pengelolaan komoditas secara lestari
IK 1 : Persentase Unit Usaha Perikanan Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
IK 2 : Pengelolaan Ruang Laut Oleh Masyarakat Pesisir Maupun Pengusaha Sesuai PERDA RZWP3K
IK 3 : Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan
IK 4 : Persentase Izin Pertanian yang diselesaikan

Meningkatnya pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman/ hewan
IK 1 : persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
IK 2 : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan dan hortikultura di Kab/Kota
IK 3 : Persentase peningkatan kesehatan hewan komoditas strategis dan Terjaminnya keamanan pangan komoditas peternakan strategis di Provinsi Jambi

Terpenuhinya sarana prasarana produksi
IK 1: Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/ Kota
IK 2: Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan di Kab/Kota

Kemudahan Investasi:
IK 1 : IKM Perizinan
IK 2 : Presentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik
IK 3 : Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM
IK 4 : Persentase Peningkatan Rencana Investasi

Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Indikator Kinerja (IK) 1 : Pertumbuhan PDRB Hijau
 Indikator Kinerja (IK) 2 : Angka Kemiskinan

Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
 IK 1: Rasio Konektivitas
 IK 2: Akses terhadap air minum layak
 IK 3: Rasio elektrifikasi
 IK 4: Persentase luas sawah beririgasi
 IK 5: Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet

Meningkatnya kualitas lingkungan
 IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya tingkat pengangguran
 IK : Tingkat Pengangguran Terbuka

Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
 IK : Indeks Ketahanan Pangan

Meningkatnya layanan transportasi
 IK 1 : Kinerja lalu lintas (V/C ratio)

Meningkatnya Akses terhadap air minum layak
 IK 1 : Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak
 IK 2 : Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Meningkatnya rasio elektrifikasi
 IK 1 : persentase rumah tangga berlistrik yang berkeselamatan
 IK 2 : Persentase Desa berlistrik

Meningkatnya kualitas layanan irigasi
 IK 1 : Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan
 IK 2 : Persentase luas baku daerah irigasi yg terairi

Meningkatnya akses terhadap internet
 IK 1 : Persentase peningkatan jaringan internet
 IK 2 : Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet pemerintah

Meningkatnya kualitas jalan
 IK 1 : Persentase jalan Provinsi dalam kondisi mantap
 IK 2 : Persentase drainase jalan provinsi dalam kondisi baik

Terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial
 IK 1 : persentase tersedianya hunian layak huni bagi masyarakat
 IK 2 : Persentase Penyediaan Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah pada Tahun Berkenaan
 IK 3 : Persentase Tersedianya Lingkungan Layak Huni Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Bagi Masyarakat
 IK 4 : Persentase Pemukiman dan Kawasan Serta Masyarakat Transmigrasi Yang Sejahtera
 IK 5 : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM
 IK 6 : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial
 IK 7 : Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan resiko bencana
 IK 1 : Indeks Resiko Bencana
 IK 2 : Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 IK 3 : Persentase Pengelolaan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan penerapan Sanksi Administratif
 IK 4 : Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)
 IK 5 : Persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal
 IK 6 : Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk
 IK 7 : Luas kawasan permukiman kumuh
 IK 8 : persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang
 IK 9 : persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis provinsi

Meningkatnya kualitas tanah, air, udara dan tutupan lahan
 IK 1 : Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan/ Fosil (SBM)
 IK 2 : persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 IK 3 : ersentase rumah tangga yg sudah memiliki akses th sanitasi yang layak dan aman
 IK 4 : Persentase keterjagaan kualitas dan kuantitas air tanah dari Pengusahaan air tanah baik dan benar, serta berkelanjutan dari aspek konservasi
 IK 5 : Persentase Ruang Terbuka Hijau
 IK 6 : Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi
 IK 7 : Persentase Peningkatan Luasan Pemulihan Dan Perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya
 IK 8 : Indeks Kualitas Air
 IK 9 : Indeks Kualitas udara
 IK 10 : Persentase Pengurangan Timbulan Sampah di Provinsi Jambi

Meningkatnya kualitas Angkatan Kerja
 IK 1 : persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi
 IK 2 : Persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat

Meluasnya kesempatan kerja
 IK 1 : Persentase jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan
 IK 2 : Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan

Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan
 IK 1: Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan
 IK 2 : Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura
 IK 3 : Produksi daging
 IK 4 : Peningkatan desa mandiri pangan
 IK 5 : persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah
 IK 6 : persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Meningkatnya akses terhadap pangan
 IK 1 : Skor PPH
 IK 2 : persentase daerah rentan rawan pangan
 IK 3 : Angka Konsumsi Ikan

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
Indikator Kinerja (IK) 1 : Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
IK : Usia Harapan Hidup

Meningkatnya akses Pendidikan
IK 1: Rata - rata Lama Sekolah

Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
IK : Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat

Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
IK : Indeks kebebasan dari diskriminasi

Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
IK : Indeks Pemberdayaan Gender

Meningkatnya kesehatan perorangan dan masyarakat
IK 1 : Angka kematian Bayi
IK 2 : Angka kematian Ibu
IK 3 : Prevalensi Stunting
IK 4 : Prevalensi Wasting
IK 5 : Indeks Pembangunan Keluarga
IK 6 : Laju Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan formal
IK 1 : APK SMA/SMK
IK 2 : Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan
IK 3 : Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum
IK 4 : Persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
IK 5 : Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
IK 6 : Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Akreditasi A dan B
IK 7 : Persentase Lulusan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pekerjaan atau berwirausaha

Meningkatnya akses pendidikan non formal
IK 1 : Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda
IK 2 : persentase peningkatan peran serta kepemudaan
IK 3 : persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi
IK 4 : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
IK 5 : Indeks pembangunan literasi masyarakat

Terjaganya seni budaya Jambi
IK 1 : Jumlah cagar budaya teregistrasi
IK 2 : Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi
IK 3 : Persentase peningkatan kunjungan ke museum
IK 4 : Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan
IK 5 : Jumlah apresiasi di Taman Budaya Jambi
IK 6 : Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan
IK 7 : Jumlah peningkatan pelaku seni

Meningkatnya pembinaan dan pengendalian potensi konflik
IK 1 : Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
IK 2 : Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
IK 3 : Persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
IK 4 : Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
IK 5 : Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
IK 6 : Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
IK 7 : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Tersedianya ruang aktualisasi diri perempuan
IK 1 : Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
IK 2 : Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender
IK 3 : Indeks Perlindungan Anak (IPA)
IK 4 : Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

Meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan kesehatan
IK 1 : Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
IK 2 : Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar
IK 3 : Persentase penyediaan layanan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di Rumah Sakit
IK 4 : Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi
IK 5 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
IK 6 : Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi
IK 7 : Persentase rumah sakit yang terakreditasi
IK 8 : Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan
IK 1 : Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
IK 2 : Persentase Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
IK 3 : Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru Bahasa Indonesia
IK 4 : Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal
IK 5 : Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
2021-2026

KERANGKA LOGIS PENCAPAIAN VISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

VISI:
TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT

MISI KE-1
MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA :
INDEKS REFORMASI BIROKRASI

PRIORITAS PEMBANGUNAN:
PP 10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik

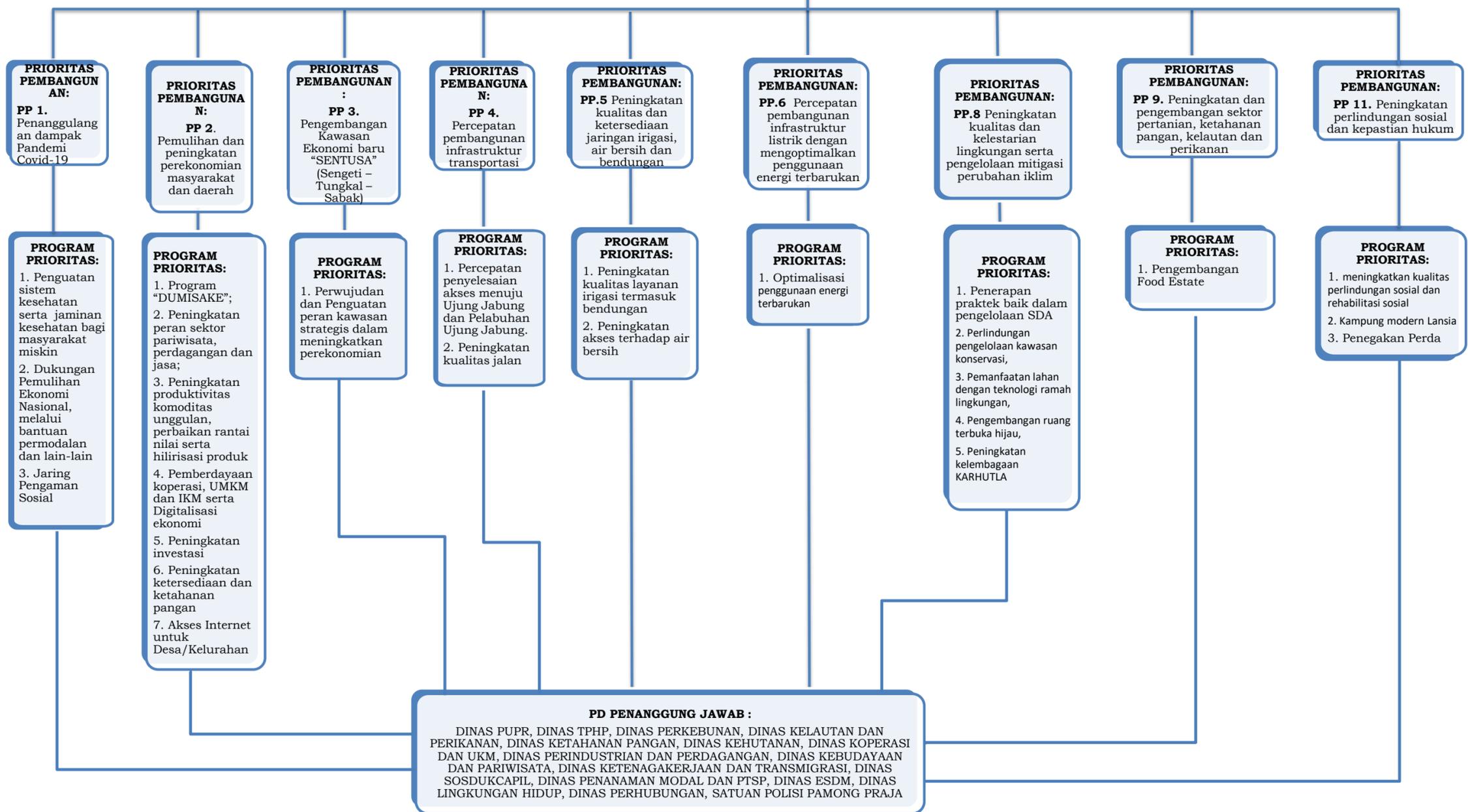
- PROGRAM PRIORITAS:**
1. Peningkatan Akuntabilitas serta pengelolaan keuangan daerah serta Penataan Hukum
 2. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Penataan Birokrasi
 3. Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
 4. Penguatan Pengawasan
 5. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PD PENANGGUNG JAWAB :
SELURUH PERANGKAT DAERAH

VISI:
TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN,
TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH
RIDHO ALLAH SWT

MISI KE-2
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN
DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA :
Pertumbuhan PDRB Hijau (%), Rasio Konektivitas, Akses terhadap air minum layak (%), Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan (Juta Ton CO2 eq), Tingkat Kemiskinan (Sept) (%), Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) (%), Indeks Ketahanan Pangan



VISI:
**TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN,
TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO
ALLAH SWT**

MISI KE-3
MEMANTAPKAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA :
Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender

PRIORITAS PEMBANGUNAN:
PP 7. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya

PROGRAM PRIORITAS:
1. Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan dan Pendidikan
2. Peningkatan Kapasitas SDM
3. Penyediaan sarana prasarana keagamaan dan sosial budaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN:
PP 12. Peningkatan kesetaraan gender

PROGRAM PRIORITAS:
1. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan
2. Peningkatan Perlindungan Anak

PD PENANGGUNG JAWAB :
DINAS PUPR; DINAS PENDIDIKAN; DINAS KESEHATAN; RSUD RD. MATTAHER; RS
JIWA; SEKRETARIAT DAERAH (BIRO KESRA); BADAN KESBANGPOL; DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK